



MEMPERTAHANKAN KUALITAS DAN PERTUMBUHAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Laporan Tahunan **2019**



DAFTAR ISI

04 KESINAMBUNGAN TEMA

05 PENJELASAN TEMA

06 IKHTISAR
UTAMA



14 LAPORAN
MANAJEMEN



40 PROFIL
PERUSAHAAN



08 IKHTISAR KINERJA
POSISI KEUANGAN

09 IKHTISAR KINERJA
LABA RUGI KOMPREHENSIF

10 IKHTISAR KINERJA RASIO
KEUANGAN

12 IKHTISAR OPERASIONAL (NON
KEUANGAN)

13 IKHTISAR SAHAM

13 IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK,
ATAU OBLIGASI KONVERSI

16 LAPORAN DEWAN KOMISARIS

24 LAPORAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH

28 LAPORAN DIREKSI

38 LEMBAR TANDA TANGAN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

42 INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

43 LOGO PERUSAHAAN

44 RIWAYAT SINGKAT
BCAS

44 KETERANGAN PERUBAHAN NAMA
PERUSAHAAN

45 BIDANG USAHA

46 PRODUK, JASA, DAN LAYANAN

49 PERISTIWA PENTING

54 JEJAK LANGKAH

56 PETA WILAYAH USAHA DAN
ALAMAT JARINGAN

62 STRUKTUR ORGANISASI

64 VISI, MISI DAN TATA NILAI
PERUSAHAAN

66 PROFIL DEWAN KOMISARIS

69 PROFIL DEWAN PENGAWAS
SYARIAH

71 PROFIL DIREKSI

75 DAFTAR PEJABAT EKSEKUTIF

80 PROFIL DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KARYAWAN

83 PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS

PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT
INTERNAL

83 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
BCAS

84 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI BCA

84 STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

85 ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

85 KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

85 KRONOLOGI PENCATATAN EFEK
LAINNYA

86 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
2019

92 LEMBAGA DAN PROFESI
PENUNJANG PERUSAHAAN

92 INFORMASI PADA SITUS
PERUSAHAAN

94 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



172 TATA KELOLA PERUSAHAAN



280 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



96 TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL
 97 TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL
 97 TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL
 98 TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH
 98 TINJAUAN OPERASI PER-SEGMENT USAHA
 99 TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
 117 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019 SERTA PROYEKSI TAHUN 2020
 119 STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
 120 IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
 120 INVESTASI BARANG MODAL
 120 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
 121 KEBIJAKAN DIVIDEN
 122 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN
 122 PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
 122 INFORMASI MATERIAL
 122 INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
 124 PERUBAHAN PERATURAN DAN/ATAU PERUNDANG-UNDANGAN
 125 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
 126 PENDUKUNG BISNIS
 129 PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO
 168 ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
 170 PROSPEK USAHA TAHUN 2020
 171 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

174 PENDAHULUAN
 184 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 192 DEWAN KOMISARIS
 203 DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIREKSI
 222 HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI
 223 PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI
 224 KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DPS
 225 KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 242 KOMITE DI BAWAH DIREKSI
 249 ORGAN DI BAWAH DIREKSI
 261 MANAJEMEN RISIKO
 268 FUNGSI KEPATUHAN
 273 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
 274 WHISTLEBLOWING SYSTEM
 275 TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
 275 PERKARA PENTING
 276 SAHAM OPSI
 276 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
 277 KODE ETIK PERUSAHAAN
 278 TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA
 278 PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA
 278 PENDAPATAN NONHALAL DAN PENGGUNAANNYA
 279 DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BUS
 279 BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BUS

283 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
 285 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA
 286 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL
 288 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
 289 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 292 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
 296 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN
 298 INDEKS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 308 LAPORAN KEUANGAN

KESINAMBUNGAN TEMA



2015

KUALITAS KEMITRAAN DAN LAYANAN
SEBAGAI KUNCI UNTUK MEMPERTAHAKAN
PERTUMBUHAN YANG BERKESINAMBUNGAN



2016

KONSISTEN DALAM MEMPERTAHAKAN
KUALITAS KEMITRAAN DAN LAYANAN



2017

SENANTIASA MENJADI
MITRA TERPERCAYA



2018

MEMBANGUN SINERGI DAN KEMITRAAN
YANG SOLID UNTUK MEMPERTAHAKAN
PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS

PENJELASAN TEMA



2019

MEMPERTAHANKAN KUALITAS DAN PERTUMBUHAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Tahun 2019, memberikan tantangan dan sekaligus peluang bagi industri perbankan Indonesia dan BCAS khususnya. Bank dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya agar dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* tapi di saat yang sama Bank juga harus tetap berhati-hati demi menjaga keberlangsungan usaha.

BCAS senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis secara hati-hati yang diarahkan pada upaya mempertahankan portofolio pembiayaan dan dana yang berkualitas, menjaga permodalan yang kuat dan mengelola posisi likuiditas yang sehat. Semua upaya yang dilakukan BCAS bertujuan menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas dan pengembangan bisnis Bank dalam jangka panjang.



01

IKHTISAR UTAMA

IKHTISAR KINERJA POSISI KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan berbeda)

Keterangan	2019	2018	2017	2016	2015	Pertumbuhan 2018:2019 (%)
Total aset	8.634,4	7.064,0	5.961,2	4.995,6	4.349,6	22,2%
Total aset produktif	8.010,0	6.586,6	5.656,5	4.744,8	4.151,6	21,6%
Penempatan pada Bank Indonesia	1.537,8	1.081,9	945,4	811,5	956,5	42,1%
Surat-surat berharga	966,9	842,4	613,6	335,1	58,0	14,8%
Pembiayaan	5.645,4	4.899,7	4.191,1	3.462,8	2.975,5	15,2%
Total liabilitas	6.306,1	5.802,7	4.825,1	3.896,5	3.297,0	8,7%
Dana Pihak Ketiga	6.204,9	5.506,1	4.736,4	3.842,3	3.255,2	12,7%
Giro	1.094,3	492,2	504,6	221,4	167,9	122,3%
Tabungan	657,3	483,2	317,9	255,6	228,5	36,0%
Deposito	4.453,4	4.530,7	3.913,9	3.365,3	2.858,7	-1,7%
Total ekuitas	2.328,3	1.261,3	1.136,1	1.099,1	1.052,6	84,6%
Total investasi pada entitas asosiasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

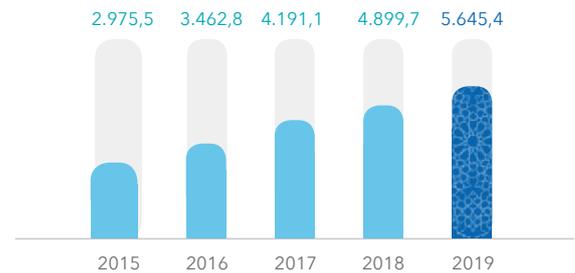
TOTAL ASET
dalam miliar Rupiah

CAGR 2015-2019
▲ 18,7%



PEMBIAYAAN
dalam miliar Rupiah

CAGR 2015-2019
▲ 17,4%



TOTAL LIABILITAS
dalam miliar Rupiah

CAGR 2015-2019
▲ 17,6%



DANA PIHAK KETIGA
dalam miliar Rupiah

CAGR 2015-2019
▲ 17,5%



TOTAL EKUITAS
dalam miliar Rupiah

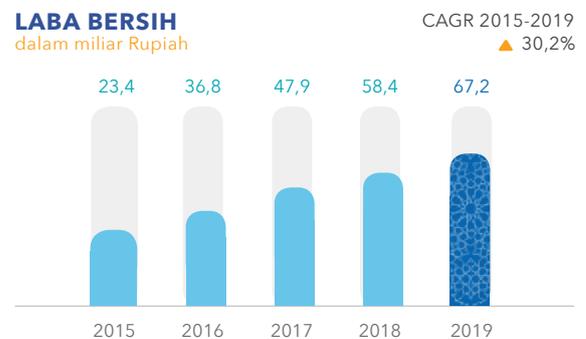
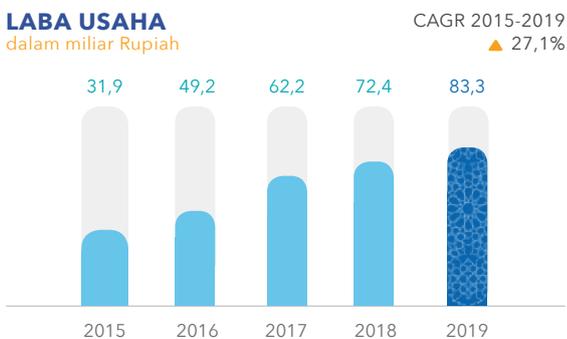
CAGR 2015-2019
▲ 22,0%



IKHTISAR KINERJA LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan berbeda)

Keterangan	2019	2018	2017	2016	2015	Pertumbuhan 2018:2019 (%)
Pendapatan operasional	319,2	247,8	226,6	204,2	163,1	28,8%
Pendapatan penyaluran dana bersih	85,4	81,2	61,9	48,5	31,8	5,3%
Pendapatan operasional lainnya	53,2	19,6	15,3	13,5	9,4	171,3%
Beban operasional	209,3	155,9	146,6	126,4	107,8	34,3%
PPA/CKPN	66,6	20,5	32,6	42,8	32,9	224,9%
Laba usaha	83,3	72,4	62,2	49,2	31,9	15,1%
Laba bersih	67,2	58,4	47,9	36,8	23,4	15,1%
Penghasilan komprehensif	(0,2)	66,9	(10,8)	9,7	3,1	-100,4%
Laba komprehensif	67,0	125,2	37,1	46,5	26,5	-46,5%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	67,2	58,3	47,9	36,8	23,4	15,3%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Laba operasional sebelum beban CKPN	152,0	101,7	92,2	91,2	64,7	49,5%
Laba komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas induk	67,0	125,2	35,5	46,4	26,5	-46,5%
Laba komprehensif diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Laba (rugi) per saham (dalam rupiah penuh)	33.659,0	58.583,8	48.038,0	46.688,0	23.523,9	-42,5%



IKHTISAR KINERJA RASIO KEUANGAN

Keterangan	2019	2018	2017	2016	2015	Pertumbuhan 2018:2019 (%)
PERMODALAN						
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	38,3%	24,3%	29,4%	36,7%	34,3%	14,0%
Aktiva tetap terhadap modal	7,4%	12,7%	8,2%	5,1%	4,0%	-5,3%
KUALITAS ASET						
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,8%	0,4%	0,6%	0,8%	0,7%	0,4%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,4%	0,3%	0,6%	0,8%	0,7%	0,1%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0,4%	1,3%	1,6%	1,5%	1,2%	-0,9%
NPF <i>gross</i>	0,58%	0,35%	0,32%	0,50%	0,70%	0,23%
NPF <i>net</i>	0,26%	0,28%	0,04%	0,21%	0,52%	-0,02%
PROFITABILITAS						
<i>Return On Asset</i> (ROA)	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	0,0%
<i>Return On Equity</i> (ROE)	4,0%	5,0%	4,3%	3,5%	3,1%	-1,0%
Net Imbalan (NI)	4,3%	4,4%	4,3%	4,8%	4,9%	-0,2%
<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,0%	0,0%
Rasio Efisiensi Biaya (BOPO)	87,6%	87,4%	87,2%	92,2%	92,5%	0,1%
LIKUIDITAS						
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	62,0%	54,6%	49,2%	47,6%	45,3%	7,4%
Rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR)	91,0%	89,0%	88,5%	90,1%	91,4%	2,0%
KEPATUHAN						
Persentase pelanggaran BMPD						
• Pihak terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
• Pihak tidak terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Persentase pelampauan BMPD						
• Pihak terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
• Pihak tidak terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GWM						
• GWM Rupiah	4,7%	5,2%	5,1%	5,5%	5,3%	-0,5%
• GWM valuta asing	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CAR
%



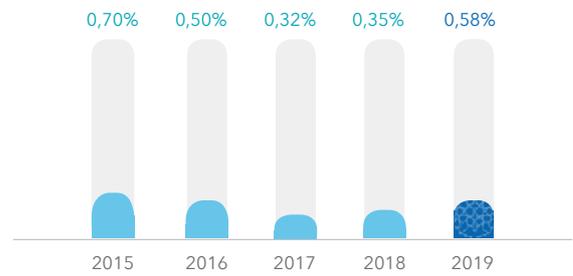
ROA
%



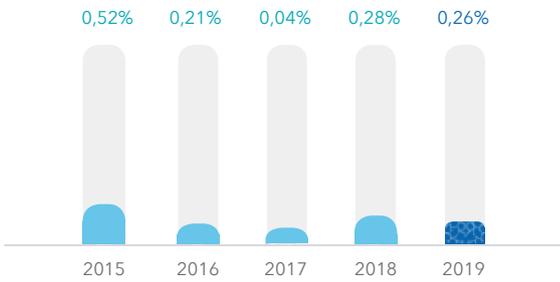
ROE
%



NPF GROSS
%



NPF NET
%



IKHTISAR OPERASIONAL (NON KEUANGAN)

Keterangan	2019	2018	2017	2016	2015	Pertumbuhan 2018:2019 (%)
Jaringan kantor	67	64	57	49	47	4,7%
Pegawai (di luar Pengurus)	723	685	658	644	606	5,5%
Pegawai tetap	446	444	422	447	415	0,5%
Pegawai kontrak	108	81	99	75	98	33,3%
Pegawai alih daya	169	160	137	122	93	5,6%
Jaringan ATM BCA	17,928	17,778	17,658	17,207	17,081	0,8%
Jumlah nasabah pendanaan	87,843	64,958	45,151	31,915	25,386	35,2%
Jumlah nasabah pembiayaan	14,095	14,746	14,197	15,880	12,546	-4,4%

JARINGAN KANTOR



PEGAWAI



JARINGAN ATM BCA



JUMLAH NASABAH PENDANAAN



JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN



IKHTISAR SAHAM

Mengingat status BCAS sebagai Bank *Non-Listed*, sampai dengan 31 Desember 2019 BCAS belum pernah mendaftarkan sahamnya maupun melakukan aktivitas perdagangan saham apa pun sejak pendirian Bank. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang bisa diungkapkan mengenai: (1) Jumlah saham tercatat;

(2) Kapitalisasi pasar; (3) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan (4) Volume perdagangan.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2019, BCAS tidak memiliki obligasi, sukuk, atau obligasi konversi apa pun yang diterbitkan di pasar modal sehingga tidak ada informasi mengenai: (1) Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar

(*outstanding*); (2) Tingkat bunga/imbalan; (3) Tanggal jatuh tempo; dan (4) Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2019.



02

LAPORAN MANAJEMEN





LAPORAN DEWAN KOMISARIS



Tantri Indrawati
Presiden Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa secara keseluruhan BCAS telah menunjukkan kinerja yang baik. BCAS dapat meraih peluang bisnis, mencapai kinerja sesuai dengan arah strategis dan target yang telah ditetapkan serta menghadapi berbagai tantangan perekonomian nasional dan industri perbankan yang terjadi di tahun 2019.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama perkenankan kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga BCAS dapat melalui tahun 2019 dengan kinerja yang membanggakan dan menunjukkan pertumbuhan berkualitas. BCAS secara umum berhasil melampaui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019. Perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris BCAS menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilakukan Direksi selama tahun 2019.

TINJAUAN EKONOMI PERBANKAN INDONESIA TAHUN 2019

Kondisi ekonomi global di tahun 2019 masih mengalami tren perlambatan seperti yang terjadi di beberapa tahun terakhir. Perlambatan ini diantaranya disebabkan oleh penurunan aktivitas konsumsi dan investasi seiring melemahnya sentimen konsumen dan bisnis akibat masih berlanjutnya ketidakpastian global. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 hanya mencapai 2,9% dan diproyeksikan akan naik tipis di tahun berikutnya karena masih adanya pemulihan dari kondisi perdagangan dan investasi.

Industri perbankan nasional juga mengalami tantangan. Bank Indonesia memasang proyeksi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di akhir tahun 2019 pada kisaran 7-9%* dan pertumbuhan kredit pada kisaran 10-12%*. Realisasinya di tahun 2019, pertumbuhan DPK dan kredit masing-masing sebesar 6,5% dan 6,1%, keduanya di bawah proyeksi.

Kendati kondisi perekonomian global dan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, *alhamdulillah* BCAS mampu meraih hasil yang membanggakan. BCAS berkomitmen untuk senantiasa menjaga fondasi perusahaan yaitu likuiditas yang memadai dan basis permodalan yang kokoh untuk dapat tumbuh berkualitas dan menghasilkan kinerja optimal.

*) Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia per Oktober 2019

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIAN

Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi pada tahun 2019 adalah berdasarkan RBB yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa secara keseluruhan Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan bisnis BCAS di tahun 2019, baik dalam hal implementasi strategi bisnis, kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi telah mengarahkan BCAS dalam meraih peluang bisnis, mencapai kinerja sesuai dengan arah strategis dan target yang telah ditetapkan. BCAS juga mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian nasional dan industri perbankan yang terjadi di tahun 2019.

Pencapaian kinerja keuangan BCAS tahun 2019 secara umum berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RBB 2019. Hasil positif yang diraih BCAS dapat dilihat dari pertumbuhan aset BCAS yang terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Desember 2019, aset Bank mencapai Rp8.634,4 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 22,2% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat Rp7.064,0 miliar. Pembiayaan BCAS mencapai Rp5.645,4 miliar tumbuh 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada Rp4.899,7 miliar. Peningkatan pembiayaan Bank senantiasa diimbangi dengan berbagai upaya menjaga kualitasnya, tercermin dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang berada pada angka 0,58% secara *gross* dan 0,26% secara *net*. Hal ini menunjukkan Bank dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dan secara konsisten menerapkan *prudential banking practice*.

DPK mencapai Rp6.204,9 miliar atau tumbuh 12,7% dari tahun 2018 sebesar Rp5.506,1 miliar. Sementara laba bersih tercatat Rp67,2 miliar atau tumbuh 15,1% dari tahun sebelumnya yaitu Rp58,4 miliar.

BCAS mampu mempertahankan likuiditas yang memadai dan basis permodalan yang kokoh. Likuiditas BCAS di tahun 2019 berada pada tingkat yang baik dan memadai, tercermin dari rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR) sebesar 91%. Sementara dilihat dari sisi permodalan, tingkat CAR BCAS berada pada angka 38,3%, sangat memadai untuk menopang pertumbuhan bisnis Bank di tahun-tahun mendatang.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI BANK

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten memantau implementasi strategi bisnis Bank. Pengawasan Dewan Komisaris diwujudkan melalui rapat yang diselenggarakan secara rutin, diskusi serta pemberian nasihat kepada Direksi dalam berbagai kesempatan.

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Komisaris, pengelolaan Bank telah dijalankan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja, visi dan misi serta arah strategis Bank. Sesuai dengan misi Bank yaitu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah, Bank secara kontinyu melakukan perluasan jaringan baik dalam bentuk jaringan kantor maupun jaringan perbankan elektronik. Perluasan jaringan kantor dimaksudkan agar BCAS dapat melayani kebutuhan nasabah secara lebih luas dan memberikan alternatif layanan keuangan syariah yang lebih beragam bagi nasabah. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Bank untuk menjamin kenyamanan, keandalan dan keamanan transaksi nasabah. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan pada perbankan elektronik baik pengembangan *channel* perbankan elektronik baru maupun *enhancement* dan penambahan fitur pada *channel* yang telah ada.

Kualitas layanan juga menjadi perhatian BCAS. Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Direksi dalam menjaga kualitas layanan prima di seluruh jaringan kantor dan lini organisasi sehingga BCAS mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Dewan Komisaris sependapat dengan Direksi bahwa penyaluran pembiayaan yang *prudent* menjadi salah satu kunci pertumbuhan berkualitas yang ditunjukkan oleh BCAS. Langkah Direksi dalam menerapkan prinsip *prudential banking practice* telah dilaksanakan secara konsisten. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara terencana dan terukur di berbagai sektor yang potensial kepada nasabah yang memiliki rekam jejak yang baik sehingga portofolio pembiayaan BCAS terus menunjukkan pertumbuhan yang berkualitas. BCAS juga senantiasa menjaga kualitas kemitraan dengan para nasabah, sehingga pembiayaan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif namun kualitas pembiayaan Bank juga terjaga pada level yang rendah dan sehat.

Guna menyediakan kebutuhan atas layanan perbankan syariah, BCAS melakukan sinergi dengan Grup BCA serta mitra strategis lainnya. Sepanjang tahun 2019, BCAS telah melakukan berbagai inisiatif dengan BCA sebagai perusahaan induk, perusahaan *fintech* atau *e-commerce*, untuk memberikan layanan yang lebih efisien, komprehensif serta pemasaran dengan jangkauan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini di mana teknologi digital telah menjadi bagian yang lekat dengan kehidupan masyarakat.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance, GCG*) merupakan salah satu fondasi yang kokoh untuk mendukung kinerja bisnis Bank dan meningkatkan kepercayaan serta nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Bank memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan GCG, manajemen risiko, kepatuhan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah dan audit internal maupun eksternal.

Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa penerapan GCG yang konsisten bukan hanya demi mempertahankan perusahaan agar tetap sehat, namun juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan bagi kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang. Dewan Komisaris mendorong dan mendukung sepenuhnya langkah Direksi untuk senantiasa melakukan evaluasi dan penguatan terhadap praktik-praktik GCG dalam menjalankan kegiatan usaha BCAS. Melalui penerapan praktik tata kelola secara konsisten dan menyeluruh, Dewan Komisaris meyakini bahwa reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BCAS akan tetap terjaga dengan baik.

Guna menjaga kualitas penerapan GCG, BCAS secara berkala melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG. Hasil *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG pada semester 1 dan 2 tahun 2019, menghasilkan peringkat komposit dengan predikat 'Sangat Baik'. Hal ini menunjukkan penerapan tata kelola telah berlangsung secara tertib, efektif dan menyeluruh di setiap lini organisasi.

Atas komitmen BCAS dalam menerapkan GCG, BCAS memperoleh penghargaan dalam ajang Top GRC 2019 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerja sama dengan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), dan ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia) dan Asia Business Research Center.

PANDANGAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dewan Komisaris memandang *whistleblowing system* sebagai bagian yang penting dari pelaksanaan tata kelola perusahaan, pemeliharaan budaya dan kepedulian atas *anti fraud* di jajaran organisasi Bank. Guna terwujudnya efektivitas penerapan *whistleblowing system* dalam mendeteksi *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan, BCAS telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai. BCAS juga telah memiliki unit kerja yang bertanggung jawab menangani efektivitas *whistleblowing system*, yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan bisnis Bank yang dijalankan oleh Direksi. Pada tahun 2019 Dewan Komisaris secara konsisten membangun komunikasi dan memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi terkait kebijakan dan penentuan strategi BCAS. Arahan dan nasihat diberikan kepada Direksi melalui mekanisme rapat dan diskusi pada berbagai kesempatan. Pada tahun 2019 Dewan Komisaris menyelenggarakan 13 kali Rapat Dewan Komisaris dan 12 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris Direksi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas dukungan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Di sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris

menilai Komite telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris dalam memantau terselenggaranya pengendalian internal dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya diantaranya dilakukan melalui mekanisme rapat, diskusi dengan unit kerja terkait dan melakukan kajian/*review* terhadap laporan-laporan hasil audit internal maupun eksternal. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah mengadakan rapat triwulanan sebanyak 4 kali, melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal secara triwulanan sebanyak 4 kali, menghadiri *exit meeting* audit internal pada kantor cabang dan unit kerja Kantor Pusat.

Komite Pemantau Risiko telah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCAS. Pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme rapat, diskusi dengan unit kerja terkait dan melakukan kajian/*review* maupun pemberian rekomendasi atas kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan risiko Bank. Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat secara triwulanan sebanyak 4 kali dan telah mengkaji laporan-laporan di antaranya Laporan Profil Risiko Bank per triwulan, laporan keuangan perseroan baik per bulan maupun per triwulan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal kebijakan remunerasi di BCAS secara keseluruhan, melalui mekanisme rapat dan diskusi. Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 4 kali rapat.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019, terdapat perubahan komposisi

Dewan Komisaris BCAS sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan tanggal 6 Maret 2019. Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-175/D.03/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Tantri Indrawati selaku calon Komisaris Utama/Presiden Komisaris PT Bank BCA Syariah, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris BCAS sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Tantri Indrawati
 Komisaris Independen : Joni Handrijanto
 Komisaris Independen : Suyanto Sutjiadi

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN DAN DASAR PERTIMBANGAN

Perekonomian Indonesia dan perbankan nasional dalam jangka panjang diperkirakan masih prospektif kendati masih menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global. World Bank dan International Monetary Fund (IMF), memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 akan membaik dibandingkan tahun 2019 sehingga diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil pada tahun 2020 yaitu pada kisaran 5-5,4%. Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi memberikan sentimen positif diantaranya sinergi kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai inisiatif transformasi ekonomi untuk mendorong konsumsi dan investasi di dalam negeri.

Berdasarkan rencana bisnis yang telah disusun Direksi, Dewan Komisaris memandang bahwa target pertumbuhan yang ditetapkan telah relevan dengan perkembangan ekonomi nasional yang moderat. Strategi perluasan jaringan dinilai tepat untuk terus mendekatkan BCAS dengan nasabah. Dalam melakukan ekspansi bisnis, strategi penyaluran pembiayaan secara *prudent* telah sesuai dengan arahan dan nasihat dari Dewan Komisaris dalam berbagai kesempatan rapat dan diskusi. Ke depan, strategi ini agar terus dilanjutkan untuk melakukan pengembangan bisnis yang cermat dan terukur.

Rencana bisnis BCAS juga telah mempertimbangkan peluang pertumbuhan melalui sinergi dengan Grup Usaha sebagaimana telah distimulasi oleh OJK melalui POJK nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Mempertimbangkan berbagai target yang berhasil diraih di sepanjang tahun 2019 dan optimisme ketahanan perekonomian nasional, Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi mampu memanfaatkan peluang usaha di masa mendatang melalui penerapan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai kinerja yang solid dan berkesinambungan.

APRESIASI KEPADA SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya kepada BCAS.

Selain itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah atas dukungan dan arahan yang diberikan sehingga BCAS senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip syariah, jajaran Direksi, manajemen, dan segenap karyawan atas dedikasi,

kontribusi, dan kerja samanya sehingga BCAS dapat terus tumbuh berkualitas dan berkesinambungan. *Insyah Allah*, BCAS dapat maju dan berkembang untuk mewujudkan visi sebagai Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. *Aamiin ya rabbal alamiin*.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Maret 2020
Atas Nama Dewan Komisaris



Tantri Indrawati
Presiden Komisaris



Joni Handrijanto
Komisaris Independen



Tantri Indrawati
Presiden Komisaris



Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

DPS berpendapat bahwa seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS telah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah melakukan upaya-upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip syariah di dalam organisasi Bank.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tuntunan dan hidayah-Nya agar BCAS terus tumbuh dan berkembang sebagai Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat yang amanah.

Perkenankan saya, mewakili Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap kegiatan usaha BCAS selama tahun 2019.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2019

DPS wajib melakukan pengawasan kegiatan Bank agar sesuai prinsip syariah sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepercayaan seluruh Pemangku Kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DPS senantiasa mengikuti perkembangan bisnis Bank, memastikan dan mengawasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun layanan perbankan. Dapat kami sampaikan bahwa DPS melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan:

1. Mengadakan pertemuan rutin gabungan antara DPS dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Kerja terkait secara intensif atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk atau aktivitas baru Bank.
3. Menilai kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah secara langsung melalui kegiatan kunjungan lapangan dan tidak langsung melalui mekanisme uji petik.

4. Mengkaji laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. Penetapan jumlah uji petik telah dilakukan melalui mekanisme rapat internal DPS dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada Direksi.
6. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku.
7. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
8. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud. DPS telah melakukan *review* aspek syariah terhadap prosedur dan ketentuan internal Bank meliputi semua aktivitas utama Bank yaitu penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan layanan perbankan.
9. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan serta pelayanan jasa Bank. Sepanjang tahun 2019, DPS telah memberikan pendapat syariah melalui mekanisme rapat dan diskusi dengan unit kerja terkait serta dalam bentuk Opini DPS. DPS juga secara konsisten melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut opini DPS yang telah dikeluarkan.
10. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik sesuai dengan ketentuan Regulator.

Selain melakukan kegiatan dalam rangka pengawasan di atas, DPS juga mendukung upaya manajemen Bank untuk meningkatkan pemahaman atas aspek syariah kepada lini organisasi di BCAS. Hal ini di antaranya dilakukan melalui kegiatan berikut:

- Menghadiri undangan eksternal, seperti *Workshop Pra Ijtima' Tsanawi (Annual Meeting)* DPS Tahun 2019.
- Melakukan sosialisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kesempatan rapat maupun diskusi.

- Memberikan penyegaran dan pendalaman materi terkait aspek syariah kepada karyawan melalui *training* atau sosialisasi.
- Menjadi *counterparty* dan memberikan konsultasi kepada unit kerja terkait terkait aspek syariah dalam berbagai kesempatan pertemuan atau diskusi baik secara formal maupun nonformal.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, DPS berpendapat bahwa seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS secara keseluruhan telah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah melakukan upaya-upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip syariah di dalam organisasi Bank.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tidak ada perubahan yang terjadi pada komposisi DPS selama tahun 2019, sehingga susunannya tetap sama sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 6 Maret 2019, yang terdiri dari:

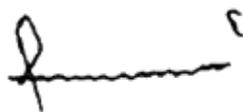
Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
 Anggota : Sutedjo Prihatono

PENUTUP

Demikian Laporan DPS untuk tahun 2019. DPS mengapresiasi komitmen segenap manajemen BCAS dalam menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami berharap komitmen tersebut terus dipertahankan. DPS mendorong dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya manajemen untuk melakukan penguatan terhadap praktik-praktik GCG sebagai fondasi yang kokoh bagi kemajuan BCAS di masa mendatang dan meningkatkan kepercayaan nasabah serta *stakeholder* lainnya kepada BCAS. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dan memberikan rahmat-Nya agar BCAS senantiasa menjadi perusahaan perbankan syariah yang andal dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Maret 2020
 Atas Nama Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
 Ketua Dewan Pengawas Syariah



Sutedjo Prihatono
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN DIREKSI



John Kosasih
Presiden Direktur

BCAS senantiasa memperhatikan perkembangan kondisi eksternal maupun internal dalam menetapkan kebijakan strategis, tetap adaptif dengan perubahan, mencermati peluang pertumbuhan dan di saat yang sama mengelola risiko yang ada.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang kami hormati, Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan BCAS.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2019 meskipun kondisi ekonomi masih penuh dengan ketidakpastian, BCAS dapat terus berkembang secara optimal dan berkesinambungan dengan kualitas yang tetap terjaga dengan baik. Komitmen BCAS untuk memberikan solusi produk dan layanan perbankan syariah bagi masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan senantiasa menjadi motivasi kami dalam memberikan upaya yang optimal. Mewakili jajaran Direksi dan manajemen BCAS, kami sampaikan pelaksanaan usaha serta berbagai pencapaian yang diraih BCAS di tahun 2019.

TINJAUAN EKONOMI DAN PERBANKAN INDONESIA TAHUN 2019

Tren perekonomian global masih mengalami perlambatan. Dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) - Tiongkok memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian, tidak saja kepada negara-negara yang terlibat perang dagang, tetapi juga kepada sebagian negara di dunia. Namun demikian, telah muncul optimisme pasca kesepakatan *phase 1 trade deal* AS-Tiongkok. Adanya prospek pemulihan global memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing, meskipun risiko geopolitik perlu terus diwaspadai.

Pada tahun 2019, kinerja ekonomi Indonesia cukup baik di tengah ekonomi global yang melambat. Stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga dan momentum pertumbuhan dapat dipertahankan. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh yang disebabkan oleh tingkat inflasi yang terjaga dengan baik. Demikian pula pertumbuhan investasi secara nasional masih mengalami pertumbuhan sebagai dampak dari pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang terus berlanjut.

Sementara itu, pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2019 ditutup di angka 5,02% (yoy) seiring terjaganya konsumsi masyarakat serta adanya pemilihan umum yang mendorong konsumsi dari sektor lembaga non-profit rumah tangga. Dari sisi nilai tukar Rupiah, pergerakannya terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) rata-rata berada di level Rp14.197 per USD dan di akhir tahun berhasil ditutup menguat di level Rp13.901.

Sementara itu, industri perbankan nasional masih menghadapi ketidakpastian yang berdampak pada pertumbuhan kredit dan DPK secara keseluruhan. Realisasi kredit tercatat 6,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Indonesia sebelumnya yang berada di kisaran 10-12% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit terjadi baik pada segmen korporasi maupun perorangan. Sementara dari sisi DPK, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan DPK berkisar 7-9% (yoy) namun realisasinya tercatat sebesar 6,5% (yoy). Kondisi likuiditas perbankan cenderung masih ketat, ditandai dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio/LDR*) sebesar 93,6% pada 2019.

Perbankan syariah pada tahun 2019 menempati pangsa pasar 6,17% dari perbankan nasional, menggambarkan peluang pertumbuhan yang masih sangat terbuka. Didukung dengan perkembangan terkini di pasar Indonesia, industri halal sedang mengalami pertumbuhan cukup pesat. *Halal lifestyle* sedang menjadi perhatian khususnya pada kaum muda. Ditambah dengan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pasar syariah di Indonesia diantaranya dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung diketuai oleh Presiden serta kebijakan-kebijakan Regulator yang memberikan stimulus bagi perbankan syariah. Semua ini memberikan optimisme pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan dua digit, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan secara keseluruhan. Total aset perbankan syariah khususnya BUS tumbuh 10,6% secara yoy. Sementara pembiayaan BUS dan DPK BUS masing-masing tumbuh 11,3% dan 12,2%.

ANALISIS ATAS KINERJA BANK

Tahun 2019 merupakan tahun yang menantang bagi industri perbankan syariah nasional termasuk BCAS. Hal ini disebabkan kondisi perlambatan ekonomi global yang tentunya berdampak juga pada iklim usaha di dalam negeri. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab risiko yang dihadapi oleh pelaku perbankan semakin meningkat, tanpa terkecuali BCAS. Menjaga dan mengelola portofolio baik pembiayaan maupun DPK menjadi hal yang krusial. Dari sisi eksternal, BCAS secara konsisten berupaya untuk terus mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan peluang pertumbuhan bisnis yang ada. Sementara dari sisi internal, BCAS tak henti berupaya membangun fondasi melalui pengembangan SDM dan infrastruktur yang andal serta pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank.

Berkat berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan, BCAS mampu menunjukkan kinerja yang menggembirakan sebagai berikut:

- Total aset tercatat sebesar Rp8.634,4 miliar atau tumbuh 22,2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.064,0 miliar;
- Pembiayaan mencapai Rp5.645,4 miliar atau tumbuh 15,2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.899,7 miliar. Pertumbuhan pembiayaan diimbangi dengan upaya untuk menjaga kualitasnya. Tingkat NPF berada pada angka 0,58% secara *gross* dan 0,26% secara *nett* yang mencerminkan kondisi portofolio BCAS yang sehat;
- DPK mencapai Rp6.204,9 miliar atau tumbuh 12,7% (yoy) dari tahun sebelumnya Rp5.506,1 miliar. Baik pembiayaan maupun DPK, keduanya menunjukkan pertumbuhan bersih (*net incremental*) berkisar Rp700,0 miliar. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan DPK serta fungsi intermediasi Bank yang berjalan dengan optimal;
- Laba sebelum pajak Bank mengalami peningkatan sebesar Rp83,3 miliar atau tumbuh 15,1% (yoy) dari tahun sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya laba sebelum pajak maka laba bersih tercatat meningkat menjadi sebesar Rp67,2 miliar atau tumbuh 15,1% (yoy) dari tahun sebelumnya Rp58,4 miliar.
- Rasio BOPO relatif stabil di tahun 2019, yaitu berada di angka 87,5% bergerak dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 87,4%. Kendati menghadapi likuiditas perbankan nasional yang cukup ketat dan cenderung

mendorong *cost of fund* untuk naik, BCAS tetap mampu menjaga rasio BOPO pada tingkat yang stabil. Hal ini mencerminkan Bank tetap dapat menjaga efisiensi kegiatan usahanya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS

Perkembangan ekonomi nasional dan sektor perbankan kian dinamis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bank. Bank harus tetap adaptif dengan perubahan, mencermati peluang pertumbuhan dan di saat yang sama mengelola risiko yang ada. Direksi telah menetapkan strategi utama Bank untuk mengimplementasikan rencana pengembangan bisnis demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Perluasan Jaringan dan Ragam Layanan

Fokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric*) menjadi salah satu fokus utama Bank dalam mengimplementasi kebijakan strategis. Perluasan jaringan yang *multi-channel* terus dilakukan untuk menuju kepada *omni-channel* dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasabah saat ini dan di masa yang akan datang. Pada tahun 2019, BCAS telah memperluas wilayah operasional ke kota Banda Aceh. Menyusul adanya *qanun* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, masyarakat kota setempat khususnya nasabah BCA tentunya membutuhkan alternatif solusi perbankan syariah. Untuk itu, BCAS hadir dengan strategi kolaborasi dengan BCA sebagai entitas induk untuk memberikan edukasi perbankan syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah atas produk dan transaksi perbankan syariah.

Channel perbankan elektronik juga tidak luput dari perhatian BCAS. Pengembangan difokuskan pada penambahan solusi untuk kebutuhan nasabah seperti diluncurkannya *internet banking* untuk nasabah badan usaha yaitu Klik BCA Syariah Bisnis, menyusul Klik BCA Syariah untuk individu yang telah diluncurkan pada tahun sebelumnya, serta penambahan fitur pada *channel* yang sudah ada. Sejalan dengan terus meningkatnya frekuensi transaksi nasabah melalui *channel* perbankan elektronik, penguatan infrastruktur untuk menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah juga menjadi fokus pengembangan. Per akhir tahun 2019, transaksi pada BCA Syariah *mobile* dan Klik BCA Syariah tumbuh pesat, masing-masing tumbuh 81,9% dan 133,0%.

Kebutuhan nasabah baik nasabah badan usaha maupun perorangan terus berkembang. Kompleksitasnya pun makin meningkat. Hal ini disebabkan, nasabah membutuhkan solusi atas kebutuhan yang makin spesifik. Didukung dengan organisasi yang *agile* dan adaptif terhadap perubahan, BCAS selalu berupaya menyediakan ragam layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan per nasabah (*tailor made*).

Pertumbuhan Portofolio Pembiayaan yang Sehat

Pembiayaan BCAS di tahun 2019 mencapai Rp5.645,4 miliar dengan kontribusi utama dari pembiayaan produktif. Melakukan ekspansi bisnis khususnya penyaluran pembiayaan menjadi tantangan tersendiri bagi Bank mengingat iklim usaha di dalam negeri cukup terdampak dengan adanya kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global. Dengan didukung kebijakan terkait pembiayaan yang memadai, kuantitas dan kualitas SDM yang mumpuni, serta infrastruktur operasional pembiayaan maka target penyaluran pembiayaan dapat tercapai.

Pengelolaan risiko dan prinsip kehati-hatian selalu menjadi perhatian utama untuk mencapai pertumbuhan pembiayaan dan menjaga kualitasnya tetap sehat. Antisipasi dan konsistensi menjadi kata kunci. Mencermati perkembangan perekonomian baik di tingkat global maupun nasional harus dilakukan secara konsisten, baik pada saat kondisi ekonomi sedang melambat maupun bertumbuh. Melakukan langkah-langkah antisipatif penanganan pembiayaan juga terus dilakukan terhadap seluruh nasabah baik nasabah dengan kualitas pembayaran yang baik maupun berisiko. Upaya-upaya ini terbukti memberikan hasil yang positif di mana *Loan at Risk* (LaR) BCAS terjaga pada level 5,81% lebih rendah dari LaR BUS yang berada pada level 18,12%.

Kolaborasi dengan Mitra

BCAS memahami bahwa demi memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin luas dan kompleks tidak dapat dilakukan sendiri. Kolaborasi dengan Grup BCA serta para mitra lainnya menjadi solusinya. Apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, kebutuhan nasabah semakin mengarah pada produk, layanan dan transaksi digital. Untuk itu, pada tahun 2019 BCAS menggandeng mitra-mitra terpercaya untuk melakukan pemasaran dan akuisisi nasabah melalui berbagai kanal digital.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN PENCAPAIAN

Kinerja BCAS pada tahun 2019 secara keseluruhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan Bank. Pada akhir tahun 2019, aset tumbuh 22,2% mencapai Rp8.634,4 miliar, melebihi kisaran target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu 10,0-12,0%. Pembiayaan ditargetkan tumbuh 10,0-15,0%, dan realisasinya BCAS tumbuh di atas kisaran target yaitu sebesar 15,2% atau mencapai Rp5.645,4 miliar. Sementara DPK tumbuh dalam kisaran target yang ditetapkan yaitu 10,0-15,0% dengan mencapai pertumbuhan 12,7% atau menjadi sebesar Rp6.204,9 miliar. Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan dan DPK, laba bersih setelah pajak juga menunjukkan kinerja yang optimal dengan membukukan pertumbuhan 15,1% menjadi Rp67,2 miliar, sedikit melampaui target yaitu pada kisaran 10,0%-15,0%.

Perbandingan Target dengan Pencapaian Tahun 2019

	Target	Pencapaian
Pertumbuhan Aset	10,0% - 12,0%	22,2%
Pertumbuhan Pembiayaan	10,0% - 15,0%	15,2%
Pertumbuhan DPK	10,0% - 15,0%	12,7%
Pertumbuhan Laba Bersih Setelah Pajak	10,0% - 15,0%	15,1%

Pencapaian yang berhasil ditunjukkan BCAS merupakan hasil dari implementasi kebijakan strategis yang telah diuraikan sebelumnya. Perluasan jaringan *multi-channel* menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya target penghimpunan dana. Sementara kebijakan dalam penyaluran pembiayaan yang ekspansif namun tetap berhati-hati pada sektor-sektor usaha yang memiliki prospek yang baik menjadi alasan tercapainya target pertumbuhan pembiayaan dan sekaligus komponen utama tercapainya pertumbuhan laba.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Industri perbankan nasional di tahun 2019 mengalami kondisi likuiditas yang cukup ketat ditandai dengan LDR perbankan yang berada pada angka 93,6%. Ketatnya likuiditas ini menyebabkan persaingan yang cukup tinggi di antara pelaku industri perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang

dampaknya cenderung mendorong biaya dana (*cost of fund*) meningkat. Namun demikian, BCAS di tengah kondisi ini mampu menjaga *cost of fund* Bank pada angka yang stabil dan di saat yang sama berupaya melakukan berbagai efisiensi terutama melalui pemanfaatan teknologi dan otomasi di setiap lini operasi sehingga Bank tetap dapat beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari rasio BOPO relatif stabil di tahun 2019, yaitu berada di angka 87,5% hanya sedikit meningkat dari 87,4% di tahun sebelumnya.

Kondisi ekonomi global yang melambat tentunya membawa dampak pada dunia usaha di dalam negeri. Hal ini menimbulkan tantangan dan kendala yang dihadapi BCAS semakin besar terutama adanya risiko penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat. Kondisi ini menuntut manajemen BCAS untuk dapat menjalankan strategi dan perencanaan di tengah kondisi ketidakpastian (*plan the unplanned situation*). Strategi BCAS dalam menyalurkan pembiayaan adalah dengan menjadi mitra usaha yang tepat bagi nasabah. Selain memberikan solusi pembiayaan, BCAS juga memiliki peran sebagai *advisor* bagi nasabah dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian BCAS dapat senantiasa mengetahui perkembangan usaha nasabah dan dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terkait dengan kualitas pembiayaan nasabah.

Menghadapi setiap tantangan, BCAS harus memiliki fondasi yang kuat untuk menopang pertumbuhan bisnis yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM disesuaikan dengan arah perkembangan bisnis perusahaan;
2. Mengembangkan jaringan distribusi *multi-channel* baik secara fisik melalui jaringan kantor maupun non-fisik melalui jaringan perbankan elektronik;
3. Mengembangkan dan mengelola *product and pricing* melalui penambahan produk dan layanan perbankan syariah serta strategi *pricing* yang tepat;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan efisiensi proses;
5. Menjaga *brand reputation*; dan
6. Meningkatkan penerapan *risk management and compliance* secara berkelanjutan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

Guna mempertahankan kelangsungan usaha Bank, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG merupakan fondasi yang kuat untuk memperkuat infrastruktur perusahaan. Menyadari hal tersebut, BCAS senantiasa mempertahankan manajemen usaha yang sehat dengan menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Mengacu pada lima prinsip tersebut, BCAS senantiasa menyempurnakan kualitas penerapan tata kelola perusahaan untuk memaksimalkan berbagai upaya yang tidak hanya bertujuan untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan, namun juga untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. BCAS secara konsisten menjaga tingkat kesehatan Bank berdasarkan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada tingkat yang sehat, meliputi profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan.

Sesuai dengan ketentuan Regulator, BCAS secara periodik melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Penilaian GCG yang komprehensif dan terstruktur mencakup penilaian *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Pada semester 1 dan 2 tahun 2019, hasil *self-assessment* GCG BCAS menghasilkan peringkat komposit 1 dengan predikat 'Sangat Baik'. Pada penilaian *governance structure*, struktur tata kelola BCAS sudah lengkap dan sangat memadai, tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan infrastruktur tata kelola sudah memadai. BCAS telah memiliki kebijakan, prosedur dan sistem informasi yang lengkap dan memadai sesuai kompleksitas usaha Bank. Untuk penilaian *governance process*, penerapan prinsip-prinsip GCG telah berjalan dengan efektif di semua lini organisasi. Sedangkan untuk penilaian *governance outcome*, hasil dari proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah memadai secara kualitas dan kuantitas di antaranya ditunjukkan dengan indikator tidak adanya pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, rasio

permodalan yang berada jauh di atas rasio Kewajiban Penyaluran Modal Minimum dan rendahnya tingkat NPF. Ke depan, BCAS berkomitmen akan senantiasa mengoptimalkan penerapan GCG di setiap aktivitas usaha dan lini organisasi BCAS.

TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) mendorong beralihnya preferensi transaksi nasabah ke teknologi digital. Untuk itu, teknologi informasi menjadi berperan penting dalam meningkatkan keunggulan perbankan transaksi Bank demi memenuhi kebutuhan nasabah. Memahami hal ini, BCAS berfokus pada penambahan ragam *channel* transaksi di antaranya dengan meluncurkan Klik BCA Syariah Bisnis untuk melengkapi Klik BCA Syariah untuk segmen individu yang telah ada sebelumnya.

BCAS melihat peralihan preferensi nasabah terus berlanjut, terlihat dari frekuensi dan nominal transaksi nasabah melalui *channel* perbankan elektronik terus meningkat secara signifikan. Guna mendukung transaksi perbankan nasabah yang terus bertumbuh, BCAS berfokus pada penguatan infrastruktur TI seperti menjamin kecukupan kapasitas, keandalan dan keamanan jaringan. Keamanan transaksi menjadi salah satu faktor penting untuk mendapatkan kepercayaan para nasabah dalam menggunakan layanan perbankan BCAS. Untuk itu, BCAS terus menyempurnakan sistem keamanan TI untuk mengantisipasi ancaman *cyber-crime* dan potensi *fraud*.

Salah satu strategi BCAS dalam memenuhi kebutuhan nasabah atas perbankan transaksi adalah kolaborasi, baik dengan BCA sebagai entitas induk maupun mitra strategis lainnya seperti perusahaan-perusahaan *fintech*. Untuk itu BCAS terus melakukan kolaborasi untuk memperkaya layanan perbankan transaksi bagi nasabah namun dengan tetap memperhatikan risiko yang timbul terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan data dan privasi nasabah.

Teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan otomatisasi dan efisiensi di berbagai aspek layanan dan operasional kantor cabang maupun kantor pusat. Bank melengkapi lini operasional dengan sistem aplikasi yang memungkinkan proses kerja lebih efisien dan proteksi lebih optimal terhadap risiko *fraud*.

Pesatnya perkembangan teknologi juga membawa tantangan tersendiri. Oleh karena itu, BCAS terus melakukan identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko, dalam setiap pengembangan produk dan aktivitas baru terkait dengan teknologi informasi.

SUMBER DAYA MANUSIA

SDM merupakan salah satu pilar utama dan berperan penting bagi keberlangsungan usaha BCAS. Untuk itu BCAS harus memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas para karyawan agar dapat mendukung ekspansi bisnis Bank. BCAS memahami bahwa sukses adalah suatu perjalanan. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa nilai-nilai perusahaan yaitu *Teamwork* (Kerja Sama), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Integrity* (Integritas), dan *Professional* (Profesional), atau yang biasa disingkat *TRIP to Success*, merupakan fondasi yang utama untuk mencapai kesuksesan tersebut.

Melalui berbagai program pengembangan karyawan, BCAS mencetak SDM yang berkualitas yang dapat beradaptasi dan memiliki kapabilitas yang memadai. Karyawan BCAS telah terseleksi, dimana setiap individu karyawan BCAS merupakan sumber daya manusia yang berkompentensi tinggi, memiliki potensi yang baik, serta mampu menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan.

Program pengembangan karyawan merupakan sebuah rangkaian proses yang tidak terputus dimulai dari sejak perekrutan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, program-program pelatihan baik *soft skill* maupun *hard skill* hingga penilaian kinerja dan *talent management* yang transparan. Rangkaian proses ini dimaksudkan agar mendorong para karyawan untuk memberikan kinerjanya yang terbaik demi mendukung pertumbuhan bisnis Bank.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Selain fokus pada upaya untuk menjalankan usaha yang berkesinambungan, BCAS juga terlibat aktif melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara berkelanjutan. Secara kontinu, BCAS melakukan kegiatan sosial melalui program yang

diberi nama BCA Syariah Peduli yang bertujuan mendukung pencapaian sasaran bisnis perusahaan, membangun reputasi positif perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan sosial yang dilakukan BCAS diarahkan pada bidang peningkatan pendidikan, keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan (pilar Peduli Prestasi), peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan, dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat (pilar Peduli Sosial) serta pemberdayaan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM (pilar Peduli Sejahtera).

Sepanjang tahun 2019, BCAS telah melaksanakan beragam kegiatan sosial meliputi tiga pilar tersebut di antaranya adalah bantuan pendidikan, pelaksanaan edukasi dan *workshop* terkait pemahaman perbankan syariah, perencanaan keuangan, dan pengembangan usaha, revitalisasi tempat ibadah hingga pemberian santunan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya BCAS bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Grup BCA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Amil Zakat yang terpercaya maupun berkolaborasi bersama pelaku perbankan syariah lainnya. Dengan kegiatan sosial yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara BCAS dengan *stakeholder*-nya, khususnya masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional BCAS.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Bank secara optimal dan sehat, Direksi didukung oleh komite-komite, yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian. Secara umum, jumlah komite-komite di bawah Direksi di BCAS sudah memenuhi aturan yang berlaku untuk pelaku bisnis di industri perbankan, khususnya perbankan syariah serta telah sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis Bank.

Sepanjang tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan opini yang bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan

rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha Bank, perekonomian maupun regulasi. Direksi memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para Komite atas kinerja dan dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam pengelolaan Bank.

ANALISIS PROSPEK USAHA DAN STRATEGI TAHUN 2020

Pada awal tahun 2020, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 berada pada kisaran 5-5,4% dengan tingkat inflasi 3,1%. Sedangkan di sektor perbankan, pertumbuhan kredit diproyeksikan berkisar antara 10-12% dan DPK diproyeksikan mengalami pertumbuhan pada kisaran 8-10%. Meski melambatnya perekonomian dunia mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional, namun prospek ekonomi Indonesia ke depan cukup baik, diharapkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertahankan dan stabilitasnya tetap terjaga.

Sejalan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional, BCAS juga berharap dapat kembali mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan juga berkesinambungan. BCAS merumuskan dan menetapkan strategi kebijakan strategis untuk dijalankan di tahun 2020 dalam rangka mencapai pertumbuhan bisnis yang diharapkan. Perluasan jaringan *multi-channel* serta pengembangan ragam produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric*) masih menjadi strategi yang dipilih Bank dalam mengimplementasi kebijakan strategis. Hal ini mengingat perkembangan pasar dewasa ini digerakkan oleh kebutuhan konsumen (*demand-driven*), bukan lagi *supply driven* seperti di era-era sebelumnya.

Dunia perbankan ke depan akan semakin kompetitif. Pesaing bukan hanya datang dari pelaku perbankan saja, namun juga industri yang lain. Maka untuk dapat senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah, prinsip kolaborasi akan terus dijalankan Bank, baik dengan BCA sebagai entitas induk, Grup Usaha maupun mitra lainnya. Menghadapi berbagai tantangan ke depan, prinsip kehati-hatian secara konsisten harus dijalankan. BCAS akan tetap waspada dan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan nasional. Ekspansi bisnis melalui pertumbuhan pembiayaan yang *prudent* menjadi strategi BCAS untuk tumbuh dan di saat yang sama menjaga kualitasnya.

Pada akhir tahun 2019, BCAS telah merumuskan target pertumbuhan untuk tahun mendatang secara realistis dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian baik domestik maupun dunia secara keseluruhan. Beberapa indikator pertumbuhan yang ditetapkan Bank di tahun 2020 di antaranya:

- Pertumbuhan aset sebesar 8% - 10%
- Pertumbuhan pembiayaan sebesar 10% - 15%
- Pertumbuhan DPK sebesar 10% - 15%
- Pertumbuhan laba bersih sebesar 10% - 15%

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2019, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi BCAS sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan tanggal 6 Maret 2019. Perubahan komposisi Direksi BCAS ini berlaku efektif sejak 24 September 2019 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK nomor KEP-174/D.03/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Houda Muljanti selaku Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank BCA Syariah dan nomor KEP-176/D.03/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Pranata selaku Calon Anggota Direksi PT Bank BCA Syariah.

Susunan Direksi BCAS per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : John Kosasih
 Direktur : Rickyadi Widjaja
 Direktur : Pranata
 Direktur : Houda Muljanti
 (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)

APRESIASI KEPADA SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN

Alhamdulillah, tahun 2019 dapat kami lalui dengan mencapai *respectable growth* di mana BCAS

berhasil meraih pertumbuhan yang optimal, berkualitas, dan berkesinambungan. Segala upaya yang dilakukan selama tahun buku 2019 tentu merupakan hasil kerja sama yang baik di internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal perusahaan.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada nasabah, para Pemegang Saham, seluruh Pemangku Kepentingan termasuk Regulator, atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada BCAS. Kami mengapresiasi langkah-langkah aktif OJK dan BI dalam menjalankan pengawasan perbankan secara keseluruhan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Direksi memberikan penghargaan yang mendalam atas peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian arahan dan nasihat sehingga manajemen dapat mengelola dan membawa BCAS untuk mencatatkan performa terbaiknya pada tahun 2019 dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta aspek syariah.

Pencapaian yang telah diraih di sepanjang tahun 2019 merupakan motivasi bagi BCAS untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja dalam mewujudkan *good quality and sustainable growth* di tahun-tahun mendatang dengan tetap berlandaskan pada Visi, Misi, dan Tata Nilai Bank. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT untuk menjadikan BCAS sebagai bank syariah yang terdepan dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2020
 Atas Nama Direksi



John Kosasih
 Presiden Direktur



Houda Muljanti
Direktur



John Kosasih
Presiden Direktur



Rickyadi Widjaja
Direktur

Pranata
Direktur

LEMBAR TANDA TANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BCA Syariah Tahun Buku 2019 ini telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan Tahunan BCA Syariah ini juga memuat Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, Maret 2020

DEWAN KOMISARIS



Tantri Indrawati
Presiden Komisaris



Joni Handrijanto
Komisaris Independen



Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen

DIREKSI



John Kosasih
Presiden Direktur



Houda Muljanti
Direktur



Rickyadi Widjaja
Direktur



Pranata
Direktur

Halaman ini sengaja dikosongkan



03

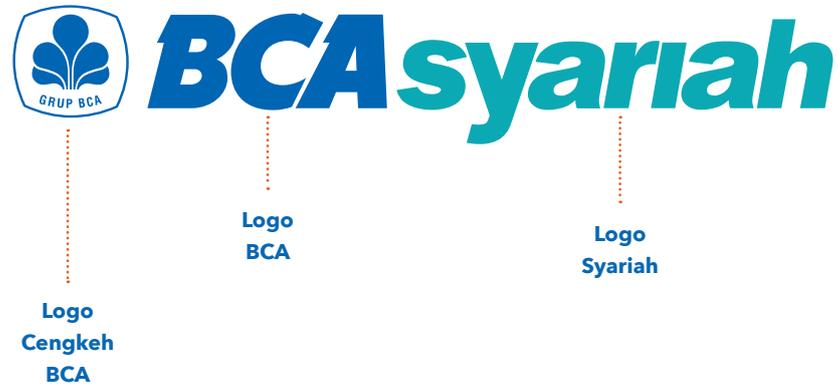
PROFIL PERUSAHAAN



INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Nama	PT Bank BCA Syariah
Nama Inisial	BCAS
Bidang Usaha	Bank Umum Syariah
Kepemilikan Saham	<ul style="list-style-type: none"> · PT Bank Central Asia Tbk 99,9999% · PT BCA Finance 0,0001%
Tanggal Pendirian	2 Maret 2010
Tanggal Beroperasi	5 April 2010
Dasar Hukum Pendirian	<p>Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama dari PT Bank UIB Menjadi PT Bank BCA Syariah</p> <p>Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NO. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010</p>
Modal Dasar	Rp5.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp1.996.300.000.000
Bursa Efek	Saham BCA Syariah belum tercatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia
Kode Bank	536
Swift Code	SYCAIDJ1
Jumlah Karyawan	554 orang; 446 permanen, 108 kontrak
Alamat Kantor Pusat	<p>PT Bank BCA Syariah Jl. Jatinegara Timur no.72 Jakarta Timur 13310 Tel. (62 21) 8190072, 8505030, 8505035</p>
Jumlah Jaringan	67 jaringan cabang, 17.928 ATM BCA dan ratusan ribu EDC BCA (Informasi lokasi cabang dapat dilihat pada bagian Peta Wilayah Usaha dan Alamat Jaringan)
Call Center	Halo BCA 1500888
Website	www.bcasyariah.co.id
Sekretaris Perusahaan	<p>Hubungan Masyarakat BCA Syariah Kantor Pusat Jl. Jatinegara Timur no.72 Jakarta Timur 13310 Tel. (62 21) 8190072, 8505030, 8505035 Email: bcas_humas@bcasyariah.co.id</p>

LOGO PERUSAHAAN



Logo BCAS terdiri dari tiga elemen yaitu Logo Cengkeh BCA, Logo BCA dan Logo Syariah. Tujuan dari penggunaan elemen Logo Cengkeh BCA dan Logo BCA adalah untuk menggambarkan bahwa BCAS merupakan bagian dari Grup BCA dan untuk mengangkat citra positif yang telah terbentuk terhadap Grup BCA.

Logo BCA Syariah memiliki 2 warna dasar yaitu Biru BCA dan warna hijau toska. Warna biru BCA dipilih untuk memberi gambaran bahwa BCAS adalah bagian dari Grup BCA

sementara warna hijau toska dipilih untuk menggambarkan BCAS sebagai sebuah unit usaha perbankan syariah yang modern, tidak kaku serta membuka pintu seluas-luasnya bagi nasabah non-muslim untuk turut menikmati faedahnya.

Jenis huruf yang dipilih ingin memberi kesan elegan, bersahabat namun tetap tegas dan bersahaja.

RIWAYAT SINGKAT BCAS

Seiring perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat serta meningkatnya minat masyarakat terhadap perekonomian syariah, PT Bank BCA Syariah ("BCAS" atau "Bank") hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah.

BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Akuisisi tersebut disahkan melalui Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar (Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB) No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha, nama PT Bank UIB berubah menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal yang sama juga dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham BCAS sebesar 99,996% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan 0,004% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 2

Maret 2010. Dengan diperolehnya izin tersebut maka pada tanggal 5 April 2010 BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. BCAS hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, khususnya para nasabah BCA yang mendambakan layanan perbankan syariah melengkapi berbagai produk unggulan BCA yang telah ada. Salah satu bentuk nyata dukungan BCA kepada BCAS adalah penyediaan layanan bebas biaya dan terintegrasi guna mendukung kemudahan akses nasabah BCAS. Layanan tersebut meliputi:

- Penyetoran uang tunai ke rekening BCAS melalui teller di seluruh cabang BCA yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia;
- Cek saldo, pengiriman uang antara BCA-BCAS dan tarik tunai di seluruh jaringan ATM BCA; dan
- Berbelanja di berbagai merchant yang menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BCA dengan menggunakan kartu debit BCAS;
- Layanan *Call Center* melalui Halo BCA 1500888

Hingga akhir tahun 2019, BCAS telah melayani 87.843 nasabah pendanaan dan 14.095 nasabah pembiayaan melalui 67 jaringan cabang yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (KC), 14 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan dan Banda Aceh.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Pada 1992, perusahaan menggunakan nama PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB), kemudian berubah

menjadi PT Bank BCA Syariah (BCAS) pada 16 Desember 2009.

BIDANG USAHA



KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009, maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Ruang lingkup kegiatan usaha BCAS sesuai anggaran dasar antara lain:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- i. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah

- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*
- p. Memberikan fasilitas Bank Garansi berdasarkan prinsip syariah
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- s. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik
- t. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/ DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, BCAS mulai beroperasi sejak tanggal 5 April 2010 dengan kegiatan usaha:

1. Menghimpun dana berdasarkan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) berupa tabungan, giro, dan deposito;
2. Menyalurkan pembiayaan (langsung dan tidak langsung) dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah/musyarakah* (bagi hasil) dan *ijarah muntahiya bittamlik - IMBT* (sewa beli);
3. Menyediakan jasa dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

PRODUK, JASA, DAN LAYANAN

SIMPANAN

- Tahapan iB
- Tahapan Rencana iB
- Tahapan Mabruur iB
- Simpanan Pelajar (SimPel) iB
- Giro iB
- Deposito iB
- Rekening Dana Nasabah (RDN)

PEMBIAYAAN

- KPR iB
- KKB iB
- EMAS iB
- Pembiayaan Umrah iB
- Pembiayaan UMKM
- Pembiayaan Modal Kerja iB
- Pembiayaan Investasi iB
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB
- Pembiayaan Anjak Piutang iB
- Bank Garansi

PERBANKAN ELEKTRONIK

- BCA Syariah *Mobile*
- Klik BCA Syariah
- Kartu Debit BCA Syariah dan Jaringan ATM
- Jaringan ATM Prima dan ALTO
- Flazz BCA Syariah

JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

- Layanan Penerimaan Setoran BPIH
- Kiriman Uang (Retail dan RTGS)
- Kliring (Lokal dan *Intercity Clearing*)
- *Virtual Account*
- *Safe Deposit Box* (SDB)
- Layanan *Payroll* (Pembayaran Gaji)
- Referensi Bank
- Inkaso

PRODUK SIMPANAN:

- **Tahapan iB**
Adalah rekening tabungan yang menyediakan berbagai manfaat yang memudahkan nasabah melakukan transaksi berdasarkan prinsip *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil).
- **Tahapan Rencana iB**
Adalah tabungan investasi berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang berguna untuk membantu nasabah melakukan perencanaan keuangan.
- **Tahapan Mabru iB**
Adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh* (bagi hasil) yang bertujuan untuk membantu nasabah mewujudkan rencana ibadah Umrah dan Haji.
- **Simpanan Pelajar (SimPel) iB**
Adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- **Giro iB**
Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah* (titipan).
- **Deposito iB**
Adalah produk investasi dengan pilihan jangka waktu yang sesuai dengan keinginan nasabah serta dijalankan sesuai prinsip *mudharabah* (bagi hasil).
- **Rekening Dana Nasabah (RDN)**
Adalah produk simpanan baik dalam bentuk Tahapan iB maupun Giro iB yang dimiliki oleh nasabah/investor untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

PRODUK PEMBIAYAAN:

- **KPR iB**
Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* (jual beli) di mana BCAS membiayai pembelian rumah/apartemen yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.
- **KKB iB**
Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* (jual beli) di mana BCAS membiayai pembelian kendaraan bermotor yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.

- **EMAS iB**

Adalah produk pembiayaan kepada nasabah untuk kepemilikan Logam Mulia (Emas) dengan akad *murabahah* (jual beli)

- **Pembiayaan Umrah iB**

Adalah salah satu fasilitas pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* (sewa-menyewa) untuk membantu nasabah mewujudkan niat melaksanakan ibadah umrah.

- **Pembiayaan UMKM**

Adalah pembiayaan investasi dan/atau modal kerja berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabahah* (jual beli) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha.

- **Pembiayaan Modal Kerja iB**

Adalah penyediaan dana jangka pendek/ menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku dan kebutuhan modal kerja lainnya.

- **Pembiayaan Investasi iB**

Adalah pembiayaan yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah, serta tanah dan bangunan (termasuk pembelian properti) dan kendaraan untuk usaha.

- **Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB**

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

- **Pembiayaan Anjak Piutang iB**

Adalah layanan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek disertai dengan pemberian fasilitas pembiayaan sesuai Prinsip Syariah.

- **Bank Garansi**

Adalah garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh Bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).

PERBANKAN ELEKTRONIK:

- **BCA Syariah Mobile**

Adalah fasilitas perbankan elektronik dari BCA Syariah untuk kemudahan nasabah perorangan dan Badan Usaha (non individu) dalam melakukan transaksi perbankan melalui *smartphone* dengan menggunakan jaringan internet meliputi transaksi finansial dan transaksi nonfinansial.

- **Klik BCA Syariah**
Adalah layanan perbankan elektronik dari BCA Syariah guna kemudahan nasabah individu maupun badan usaha dalam melakukan transaksi perbankan finansial maupun nonfinansial melalui jaringan internet.
- **Kartu Debit BCA Syariah dan Jaringan ATM**
Adalah sarana untuk melakukan berbagai macam transaksi di jaringan ATM BCA, Prima dan ALTO, serta untuk berbelanja di *merchant* bertanda Debit BCA.
- **Jaringan ATM Prima dan ALTO**
Pemegang kartu debit BCAS dapat melakukan transaksi tarik tunai, cek saldo dan transfer antarbank melalui jaringan ATM Prima dan ALTO. Nasabah juga dapat melakukan transfer ke Bank Lain yang tergabung dalam Jaringan ATM Bersama dan ALTO.
- **Flazz BCA Syariah**
Adalah kartu dengan teknologi chip dan RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dapat memudahkan transaksi pembayaran transaksi nasabah sehingga lebih cepat dan praktis.

JASA DAN LAYANAN PERBANKAN:

- **Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**
Adalah layanan yang memberikan kemudahan pembayaran setoran awal dan setoran pelunasan biaya ibadah haji.

- **Kiriman Uang (Ritel dan RTGS)**
Adalah jasa yang diberikan BCAS untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana ke rekening tujuan dengan didukung oleh Sistem Kliring Nasional (SKN) dan BI-RTGS.
- **Kliring (Lokal dan Intercity Clearing)**
Adalah jasa yang diberikan BCAS untuk mewakili nasabah dalam pertukaran warkat elektronik antarbank.
- **Virtual Account**
Adalah rekening khusus yang diberikan kepada pelanggan perusahaan mitra sebagai sarana pembayaran tagihan atau pengiriman dana sehingga memudahkan perusahaan mitra dalam mengidentifikasi kiriman dana yang diterimanya.
- **Safe Deposit Box (SDB)**
Adalah jasa menyewakan tempat penyimpanan barang dengan ukuran tertentu kepada nasabah dengan sistem keamanan terjamin.
- **Layanan Payroll (Pembayaran Gaji)**
Adalah jasa untuk mewakili nasabah dalam pembayaran gaji kepada karyawan-karyawannya
- **Referensi Bank**
Adalah jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah atas surat referensi.
- **Inkaso**
Adalah jasa yang diberikan BCAS untuk mewakili nasabah dalam menagihkan warkat kepada bank tertarik.

PERISTIWA PENTING

28 Januari 2019



Untuk melayani nasabah dengan lebih baik, BCAS meluncurkan seragam baru yang lebih modern dan dinamis.

22 Februari 2019



BCAS meraih predikat *Gold* Kategori Bank Syariah pada *Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award* yang diselenggarakan oleh Economic Review.

22-24 Februari 2019



BCAS berpartisipasi dalam rangkaian BCA Expoversary yang diselenggarakan BCA dalam rangka HUT ke-62 secara serentak di Jakarta, Palembang dan Surabaya. BCAS menawarkan program dan promo menarik untuk melengkapi produk-produk Grup BCA sekaligus meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

28 Februari 2019



BCAS menyelenggarakan *Performance Update* tahun 2018 di Kantor Pusat BCAS

7 Maret 2019



BCAS mendapat predikat Platinum Kategori Bank Syariah pada *Indonesia CSR Award* yang diselenggarakan oleh Economic Review

8 April 2019



Kegiatan Donor Darah diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT BCAS ke-9

9 April 2019



BCAS meraih *Exceptional Service Performance* Kategori *Sharia Banking* pada *Contact Center Service Excellence Award* 2019 yang diselenggarakan oleh Carre Service Quality Monitoring

12 April 2019



BCAS menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik

15 April 2019



ULS Bintaro resmi beroperasi

22 April 2019



BCAS hadir di Kota Bandar Lampung untuk memperkuat layanan BCAS di Pulau Sumatera

23 April 2019



Sebagai komitmen BCAS dalam mendukung proyek infrastruktur strategis pemerintah, BCAS turut berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi kepada PLN

15 Mei 2019



BCAS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran KKB iB dengan Garasi.id

16 Mei 2019



BCAS meraih:

- Peringkat I Kategori Tabungan Bank Umum Syariah untuk produk Tahapan iB
- Peringkat II *Corporate Brand* Bank Umum Syariah pada Infobank *Digital Brand Award* yang diselenggarakan oleh Infobank

26 Mei 2019



BCA Syariah melaksanakan penyaluran dana zakat nasabah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang selanjutnya disalurkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat

12 Juni 2019



BCAS KC Banda Aceh resmi beroperasi sebagai cabang BCAS pertama di Kota Banda Aceh

18 Juni 2019



BCAS meresmikan KCP Kediri sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan di Jawa Timur

20 Juni 2019



BCAS meraih:

- *The Best in Finance* Kategori *Sharia Banking Companies*
- Predikat *Very Excellent* pada *Indonesia Finance Award* yang diselenggarakan oleh *Economic Review*

27 Juni 2019



BCAS meraih:

- Peringkat II *Best Overall Performance*
- Peringkat II Performa Terbaik *Overall Minus E-Banking*
- Peringkat II Performa Terbaik *Customer Service*
- Peringkat II Performa Terbaik *Teller*
- Peringkat III Performa Terbaik *Telepon* pada *Banking Service Excellence Award* yang diselenggarakan oleh Infobank

9 Juli 2019



BCAS meraih predikat *Diamond Award Category Sharia Banking* pada *Service Quality Award* yang diselenggarakan oleh Carre Service Quality Monitoring

12 Juli 2019



BCAS melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). BCAS telah menjadi Bank Administrator RDN sejak tahun 2015.

26 Juli 2019



BCAS menyampaikan kinerja semester I-2019 pada acara *Media Update* yang diselenggarakan di Kantor Pusat BCAS Jakarta

29 Juli 2019



BCAS mengundang *Emascom* untuk memasarkan produk-produk pembiayaan konsumtif untuk memperluas jangkauan pemasaran melalui *platform digital*

22 Agustus 2019



BCAS meraih:

- Peringkat 4 Stars
- *The Most Committed GRC Leader* dalam Top GRC 2019 yang diselenggarakan oleh Top Business

23 Agustus 2019



BCAS meraih peringkat 1 *The Best Indonesia GCG Implementation Category Sharia Bank* pada *Indonesia Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh Economic Review

23-25 Agustus 2019



Sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, BCAS bersama OJK dan perbankan syariah lainnya menggelar *iB Vaganza* di Kota Palembang

28 Agustus 2019



BCAS meraih:

- Top Bank Syariah
- Top CEO

pada Top Bank 2019 yang diselenggarakan oleh Top Business

29 Agustus 2019



BCAS meraih:

- Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan
- *The Best Bank in Risk Profile & GCG* pada Infobank Awards yang diselenggarakan oleh Infobank

16 September 2019



BCAS menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Waqara untuk memasarkan Pembiayaan Multijasa Umrah

20-22 September 2019



iB Vaganza diselenggarakan di Kota Medan untuk mendekatkan produk dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat Kota Medan

9 Oktober 2019



ULS Setiabudi hadir untuk memperkuat layanan BCAS di Kota Medan

10 Oktober 2019



BCAS mendapat predikat *2nd Best E-Channel Transaction* kategori *Islamic Bank* pada *Prima Awards* yang diselenggarakan oleh PT Rintis Sejahtera

22 Oktober 2019



BCAS meraih predikat *The Best Performance in Complaint Handling* dari PT Rintis Sejahtera

25 Oktober 2019



BCAS meraih:

- *Golden Award "Excellent in Financial Performance Throughout 2014 - 2018"*
- *Excellent in Financial Performance Throughout 2018*
- *The Best Asset Quality Sharia Bank 2019* pada *Infobank Sharia Awards* yang diselenggarakan oleh Infobank

15 November 2019



BCAS meraih predikat "Sehat" Kategori Bank Syariah BUKU 2 dan 3 pada *Indonesia Best Bank Award* yang diselenggarakan oleh *Warta Ekonomi*

19 November 2019



BCAS mendapat predikat *Bank Syariah Kualitas Pembiayaan Terbaik* pada *Anugerah Syariah Republika* yang diselenggarakan oleh *Republika*

22-24 November 2019



Bersama OJK dan perbankan syariah lainnya, BCAS menggelar *iB Vaganza Solo* sebagai wujud nyata upaya peningkatan literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah

27 November 2019



BCAS meraih *The Best Bank in Retail Banking Services* (Kategori Bank Syariah) pada *Tempo Financial Business Award* yang diselenggarakan oleh Tempo

28 November 2019



BCAS meraih Bank Berpredikat "Sangat PRIMA" Kategori Bank BUKU 2 pada *Best Bank Performance of MSMEs Loans Award* yang diselenggarakan oleh Majalah Peluang

6 Desember 2019



BCAS meraih:

- *2nd Best Sharia Bank*
- *1st The Best Operational Excellent*
- *2nd Best Information Technology*

pada Anugerah Perbankan Indonesia yang diselenggarakan oleh Economic Review

12 Desember 2019



BCAS meraih *The Best Financial Performance Sharia Bank* pada *Moeslimchoice Award* yang diselenggarakan oleh Moeslimchoice

JEJAK LANGKAH

2010 April

BCAS memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum Syariah, menyusul keberhasilan akuisisi dan konversi PT Bank Utama Internasional Bank (UIB) menjadi Bank Umum Syariah oleh perusahaan induk Bank, PT Bank Central Asia Tbk.

2014 Oktober

BCAS meluncurkan fasilitas *mobile banking* yang diberi nama *BCA Syariah mobile*.

2016 Januari

BCAS ditetapkan menjadi Bank BUKU II oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2010 - 2012

2014 - 2015

2016

2012 Januari

BCAS membuka layanan untuk menunjang segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2015 Maret

BCAS mengembangkan Sistem Inti Perbankan (*Core Banking System*) terkini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

2015 Juli

BCAS ditunjuk sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2017 April

BCAS memperkenalkan Tahapan Mabruur iB yang merupakan pengembangan fitur produk tabungan untuk mempermudah nasabah dalam mewujudkan rencana ibadah Umrah dan Haji.

2017 September

- BCAS meluncurkan Kartu FLAZZ BCA Syariah sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai.
- BCAS meresmikan KC Palembang sebagai kantor cabang pertama yang ada di provinsi Sumatera Selatan.

2018 Februari

BCAS terpilih sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 s/d Maret 2021.

2019 April

BCAS hadir di Bandar Lampung untuk memperkuat layanan BCAS di Pulau Sumatera.

2019 Juni

BCAS KC Banda Aceh resmi beroperasi sebagai cabang BCAS pertama di Kota Banda Aceh.

2017

2018

2019

2017 Januari

BCAS meresmikan KC Medan sebagai jaringan kantor pertama di Pulau Sumatera.

2017 Maret

BCAS meluncurkan Produk Pembiayaan Multijasa Umrah untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan Umrah nasabah.

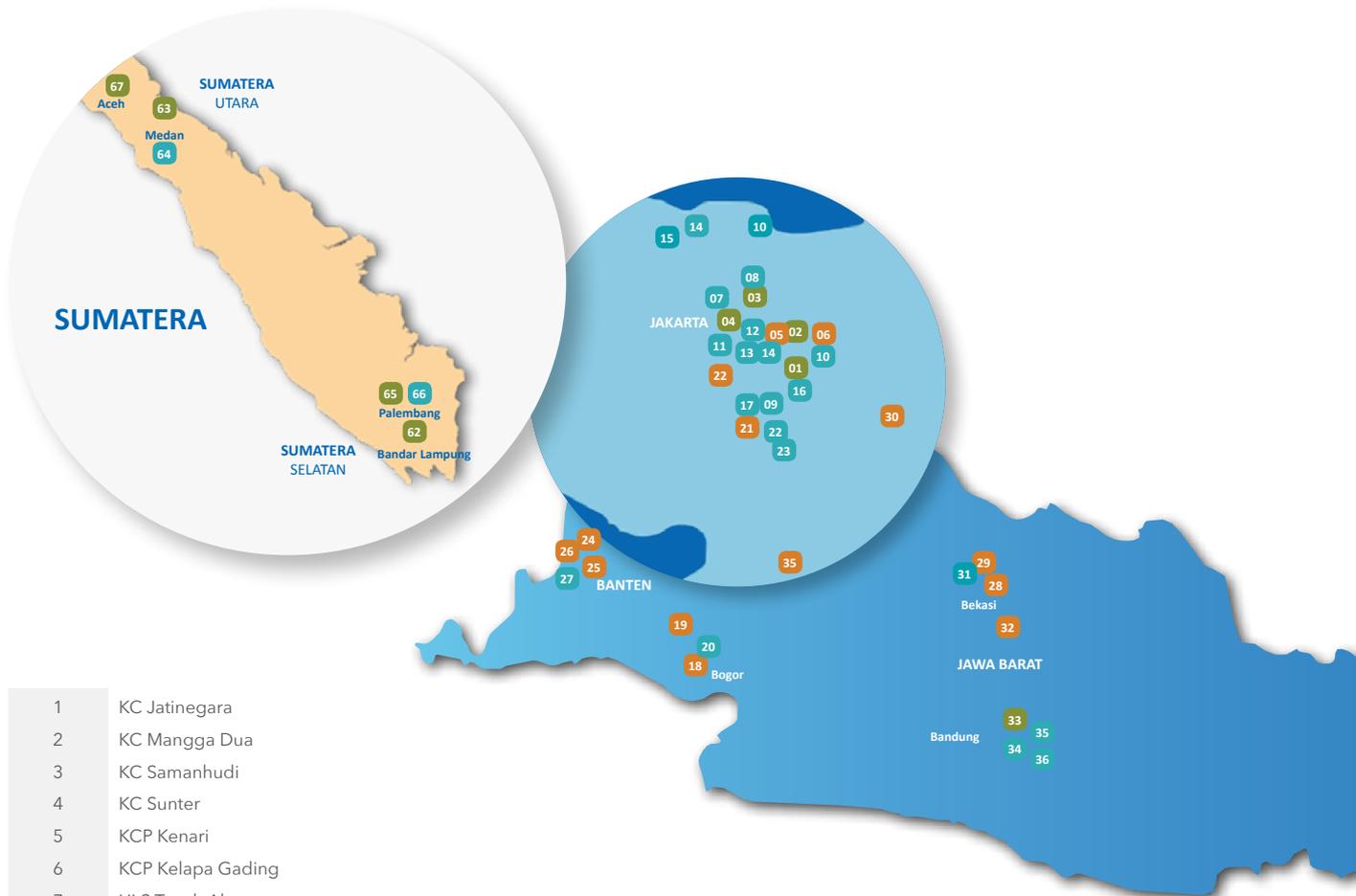
2017 Oktober

BCAS meluncurkan fasilitas *internet banking* yang diberi nama Klik BCA Syariah untuk keamanan dan kenyamanan nasabah bertransaksi.

2017 November

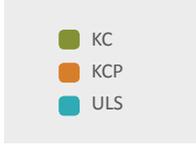
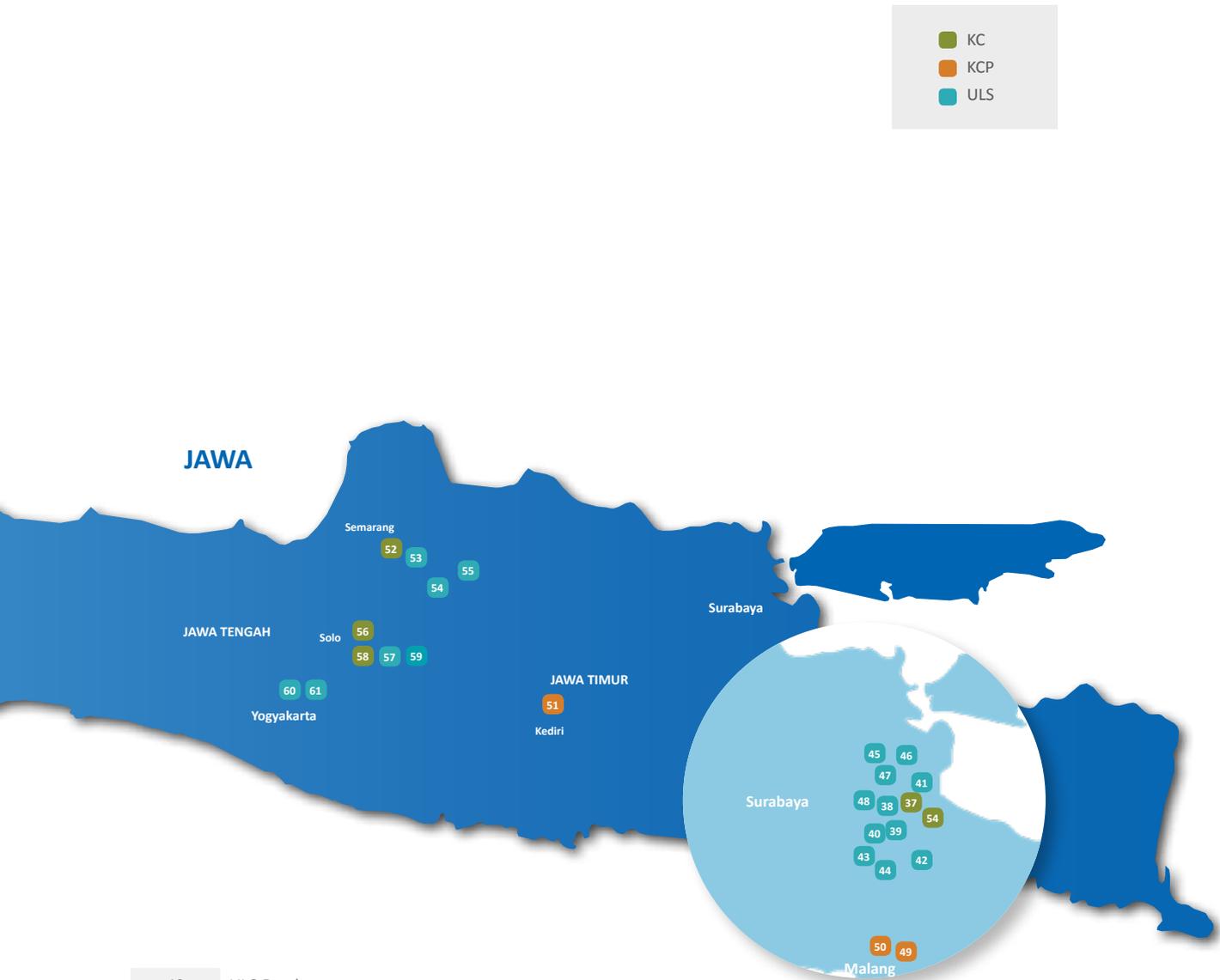
BCAS memperluas jaringan dengan membuka KCP Malang.

PETA WILAYAH USAHA DAN ALAMAT JARINGAN



- 1 KC Jatinegara
- 2 KC Mangga Dua
- 3 KC Samanhudi
- 4 KC Sunter
- 5 KCP Kenari
- 6 KCP Kelapa Gading
- 7 ULS Tanah Abang
- 8 ULS Metro Pondok Indah
- 9 ULS Pasar Minggu
- 10 ULS Tanjung Priok
- 11 ULS Melawai
- 12 ULS Gudang Peluru
- 13 ULS Kemang Mansion
- 14 ULS Puri Indah
- 15 ULS Pluit Kencana
- 16 ULS Bintaro Utama
- 17 ULS Bintaro
- 18 KCP Pasar Anyar
- 19 KCP Cileungsi
- 20 ULS Bogor
- 21 KCP Depok
- 22 ULS Depok
- 23 ULS Cimanggis
- 24 KCP Ciledug
- 25 KCP Pasar Anyar Tangerang
- 26 KCP Ciputat
- 27 ULS Tangerang
- 28 KCP Bekasi
- 29 KCP Pasar Kranji

- 30 KCP Pondok Gede
- 31 ULS Juanda Bekasi
- 32 KCP Cikarang Selatan
- 33 KC Bandung
- 34 ULS Dago
- 35 ULS Kota Baru Parahyangan
- 36 ULS Buah Batu Bandung
- 37 KC Surabaya
- 38 ULS Darmo
- 39 ULS Veteran
- 40 ULS Sidoarjo
- 41 ULS Kapas Krampung
- 42 ULS Pondok Chandra
- 43 ULS Sepanjang
- 44 ULS Perak Barat
- 45 ULS Mojokerto
- 46 ULS Gedangan
- 47 ULS Gresik



- 48 ULS Pandaan
- 49 KCP Malang
- 50 ULS Kepanjen
- 51 KCP Kediri
- 52 KC Semarang
- 53 ULS Majapahit
- 54 ULS Pemuda Semarang
- 55 ULS Kudus
- 56 KC Yogyakarta
- 57 ULS Sudirman Yogyakarta
- 58 KC Solo
- 59 ULS Solo Slamet Riyadi
- 60 ULS Singosaren Solo
- 61 ULS Sragen Solo

- 62 KC Bandar Lampung
- 63 KC Medan
- 64 ULS Setiabudi Medan
- 65 KC Palembang
- 66 ULS A. Rivai
- 67 KC Banda Aceh

Per 31 Desember 2019, BCAS memiliki 1 Kantor Pusat dan 67 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Unit Layanan Syariah (ULS).

NO	LOKASI	NAMA CABANG	ALAMAT CABANG	NOMOR TELEPON
	Jakarta	KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL	Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur 13310	(021) 8190072, 8505030, 8505035
1	Jakarta	KC Jatinegara	Jl. Jatinegara Timur No.72, Jakarta Timur 13310	(021) 8190072, 8505030, 8505035
2	Jakarta	KC Mangga Dua	Ruko Agung Sedayu (Harco Mangga Dua), Blok E No.26 Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta Pusat 10730	(021) 6123758-9, 6123761-2
3	Jakarta	KC Samanhudi	Komp.Perkantoran Mitra Krekot, Jl.K.H Samanhudi No.21 Jakarta Pusat 10710	(021) 3506706,3866457-9 3807770-71
4	Jakarta	KC Sunter	Ruku Komplek Mitra Sunter No. B.11-12 Sunter Jakarta Utara	(021) 65837724, 65837725, 65837726
5	Jakarta	KCP Kenari	Komp. Pasar Kenari Baru Ex. Pegadaian, Kios A 18-19, Jl Salemba Raya No. 02 J Jakarta Pusat 10430	(021) 3914404-5
6	Jakarta	KCP Kelapa Gading	BCA KCP Kelapa Gading Raya, Jl. Boulevard Raya Blok L No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara	(021) 45879429-30
7	Jakarta	ULS Tanah Abang	BCA KCP Pasar Tanah Abang Blok B, Gedung Pasar Tanah Abang Blok B lantai 5, kios NO.3,5,6 Jl Fachrudin NO. 78, 80, 82, Jakarta Pusat 10250	(021) 23573598
8	Jakarta	ULS Metro Pondok Indah	BCA KCP Metro Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah UA 60 & 61 Jakarta Selatan 12310	(021) 7693823
9	Jakarta	ULS Pasar Minggu	BCA KCP Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu 6 Jakarta Selatan 12740	(021) 79188703
10	Jakarta	ULS Tanjung Priok	BCA KCU Tanjung Priok, Jl. Enggano 22-23 Jakarta Utara 14310	(021) 43937937
11	Jakarta	ULS Melawai	BCA KCP Melawai, Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3, Jakarta Selatan 12160	(021) 72780409
12	Jakarta	ULS Gudang Peluru	BCA KCP Gudang Peluru, Komp. Gudang Peluru Blok A No. 23 - Jl. Kampung Melayu Besar - Jakarta Timur 12830	(021) 83706303
13	Jakarta	ULS Kemang Mansion	BCA KCP Kemang Mansion, Shopping Arcade The Mansion at Kemang, Jl. Kemang Raya No. 3-5 Jakarta Selatan 12730	(021) 29055560
14	Jakarta	ULS Puri Indah	BCA KCP Pasar Puri Indah, Jl Raya Puri Indah Blok A/20-22, Kembangan Jakarta Barat 11610	(021) 58354757
15	Jakarta	ULS Pluit Kencana	BCA KCP Pluit Kencana, Jl. Taman Pluit Kencana Selatan No. 1-3 Jakarta Utara 14440	(021) 66678530
16	Jakarta	ULS Bintaro Utama	BCA KCP Bintaro Utama, Bintaro Jaya Blok E Kav. 3-5 Jl Bintaro Utama Rukan	(021) 22734410
17	Jakarta	ULS Bintaro	BCA KC Bintaro, Jl. Bintaro Jaya Blok A-5 No.12 & 15 Sektor 7, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren	(021) 2762 2484

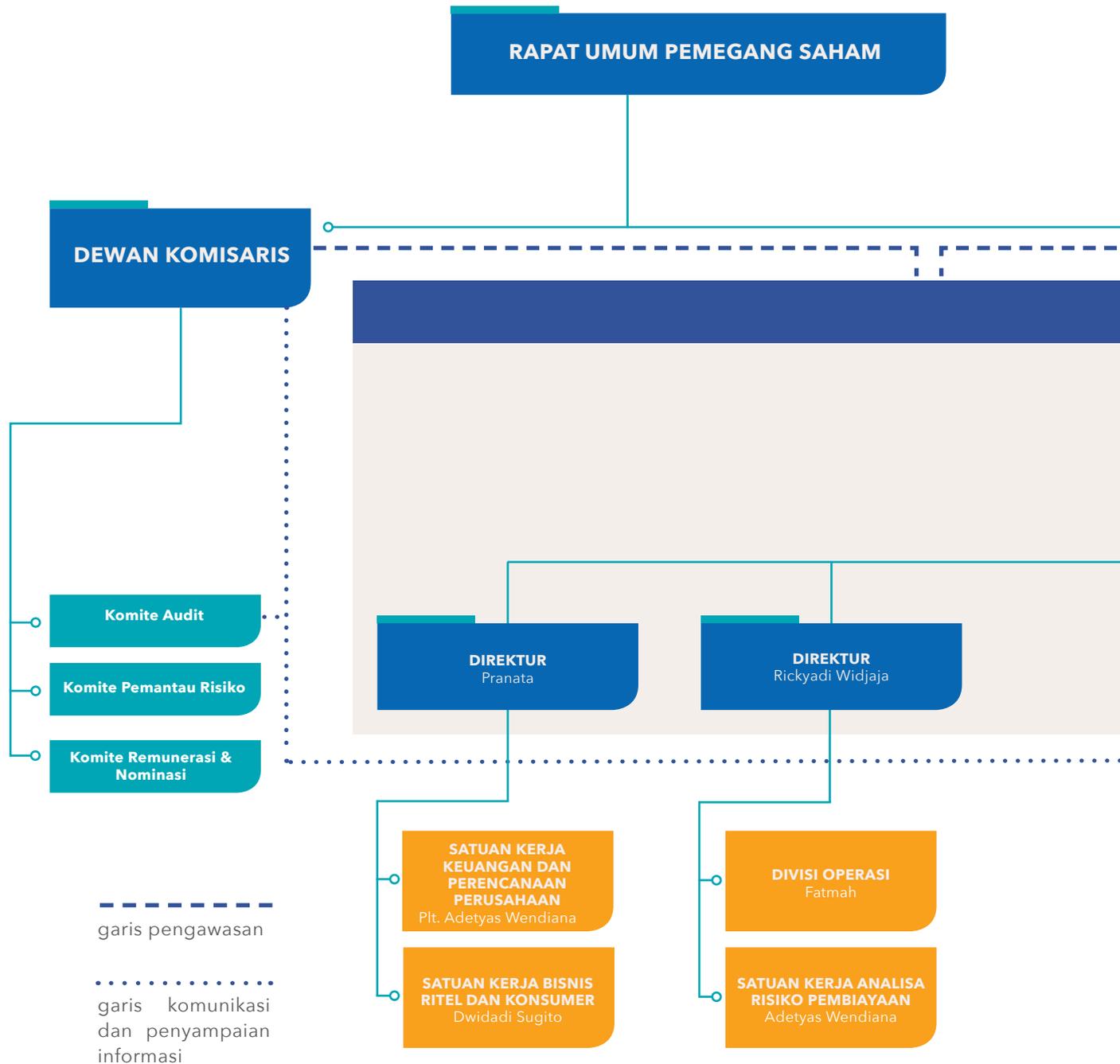
NO	LOKASI	NAMA CABANG	ALAMAT CABANG	NOMOR TELEPON
18	Bogor	KCP Pasar Anyar	Ruko Taman Topi Square Jl. Kapten Muslihat Blok B7, RT 03/Rw 01 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	(0251) 8392942, 8338377
17	Bogor	KCP Cileungsi	Komp. Ruko Griya Kenari Mas A1 No.13 RT.16 RW.10 Cileungsi Kidul, Bogor	(021) 8249 6628
18	Bogor	ULS Bogor	BCA KCU Bogor Jl. Ir Juanda 28, Bogor 16122	(0251) 8327255
19	Depok	KCP Depok	Komp. Ruko Kartini, Jl. Raya Citayem No. B20 RT.01 RW.02 Kelurahan Depok, Kec. Pancoran Mas Depok 16431	(021) 77200815, 77200827
20	Depok	ULS Depok	BCA KCU Margonda, Jl. Margonda Raya No.182, Depok 16423	(021) 77218192
21	Depok	ULS Cimanggis	BCA KCP Cimanggis, Jl. Raya Bogor Km. 29, Cimanggis - Cibinong 16951	(021) 87714758
22	Tangerang	KCP Ciledug	Ruko Dian Plaza, Jl. Raden Patah No. 8A Ruko No. 12A, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang	(021) 73451916, 73451976
23	Tangerang	KCP Pasar Anyar Tangerang	Jl. KH Sholeh Ali No.3 Sukasari, Kota Tangerang	(021) 55732121, 55732123
24	Tangerang	KCP Ciputat	Komp. Perkantoran Ciputat Lot. Jl. Dewi Sartika No.22 Ciputat, Tangerang Selatan	(021) 7425598, 7425631
25	Tangerang	ULS Tangerang	BCA KCU Tangerang, Jl. Kisamaun No. 57, Tangerang - Banten 15118	(021) 55770024
26	Bekasi	KCP Bekasi	Komp. Pertokoan Pratama Plaza, Blok A 4/12, Jl Ir. H. Juanda No. 151, Bekasi 17111	(021) 8803011 - 2, 8811973
29	Bekasi	KCP Pasar Kranji	Jl. Raya Pemuda No. 7 RT 005/RW 004, Kecamatan Bekasi Barat	(021) 8866932, 88952463, 88953003
30	Bekasi	KCP Pondok Gede	Ruko Pusat Onderdil, Jl. Raya Pd. Gede Blok I No. 4, Pondok Gede	(021) 84903617, 84903610
31	Bekasi	ULS Juanda Bekasi	BCA KCP Juanda Bekasi, Jl. Ir H. Juanda No. 54 Bekasi 17113	(021) 88343599
32	Cikarang	KCP Cikarang Selatan	Pertokoan Metro Boulevard Blok A. No.14 Jl. Niaga Raya Jababeka Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi	(021) 8971661, 8971684
33	Bandung	KC Bandung	BCA KCU Bandung Jl. Asia Afrika 122 - 124 Bandung 40261	(022) 4267425-27
34	Bandung	ULS Dago	BCA KCU Dago, Jl. Ir. H. Juanda 118 Bandung 40132	(022) 2532013
35	Bandung	ULS Kota Baru Parahyangan	BCA KCP Kota Baru Parahyangan, Jl. Panyawangan Kav.6 No.6 Kota Baru Parahyangan Bandung	(022) 87794368
36	Bandung	ULS Buah Batu Bandung	BCA KCP Buah Batu, Jl. Buah Batu 192 Bandung	(022) 73517344
37	Surabaya	KC Surabaya	Jl. Mayjend Sungkono, Kompl Pertokoan Darmo Park I Blok 2-A/1, Surabaya 60256	(031) 031-5680373, 031-5680374
38	Surabaya	ULS Darmo	BCA KCU Darmo, Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya 60265	(031) 5678137

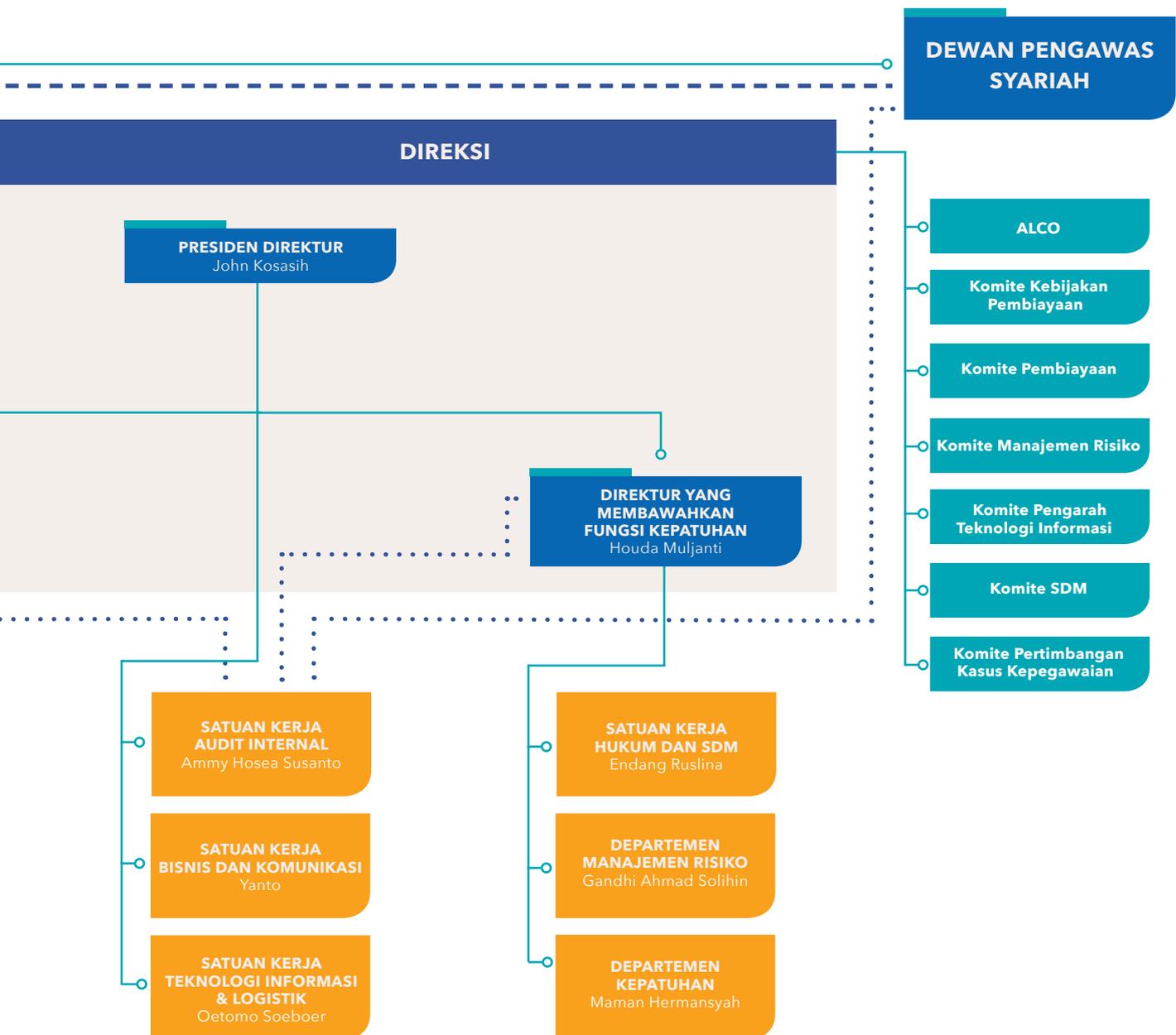
NO	LOKASI	NAMA CABANG	ALAMAT CABANG	NOMOR TELEPON
39	Surabaya	ULS Veteran	BCA KCU Veteran, Jl. Veteran 18-24, Surabaya 60175	(031) 3572956
40	Surabaya	ULS Sidoarjo	BCA KCU Sidoarjo, Jl. Ahmad Yani 39 A, Sidoarjo 61212	(031) 8968805, 8962611
41	Surabaya	ULS Kapas Krampung	BCA KCP Kapas Krampung, Jl. Kapas Krampung 126-126A-B, Surabaya 60136	(031) 5047946
42	Surabaya	ULS Pondok Chandra	BCA KCP Pondok Chandra, Komp. Pertokoan Pondok Chandra, Jl. Palem TC 09, Surabaya 61151	(031) 8675613
43	Surabaya	ULS Sepanjang	BCA KCP Sepanjang, Jl. Raya Wonocolo 59, Taman Sepanjang - Sidoarjo 61257	(031) 7887183
44	Surabaya	ULS Perak Barat	BCA KCP Pucang Anom, Jl. Pucang Anom Timur 18 Surabaya	(031) 99022180
45	Surabaya	ULS Mojokerto	BCA KCU Mojokerto, Jl H.O.S Cokroaminoto 5 Mojokerto	(0321) 0321-5285631
46	Surabaya	ULS Gedangan	BCA KCP Gedangan, Jl Raya 18 Gedangan Sidoarjo 61254	(031) 855 6993
47	Surabaya	ULS Gresik	BCA KCU Gresik, Jl. R.A. Kartini 98B - 100 Gresik 61122	(031) 3976869
48	Surabaya	ULS Pandaan	BCA KCP Pandaan, Jl. RA. Kartini 2, Jogosari - Pandaan	(0343) 6743611
49	Malang	KCP Malang	BCA KCP Kudus, Jl. KH. Zainul Arifin 78 Malang	(0341) 352671, 357146, 355980, 357312
50	Malang	ULS Kepanjen	BCA KCP Kepanjen, Jl. Jend. Yani 99 (Jl. Pahlawan), Kepanjen	(0341) 3906144
51	Kediri	KCP Kediri	BCA KCU Kediri, Lt 2 Jl. Brawijaya No. 8 Kediri	(0354) 2891150
52	Semarang	KC Semarang	Jl. Kapten Pierre Tendean 13, Semarang	(024) 3557444, 3580530
53	Semarang	ULS Majapahit	BCA KCP Majapahit, Jl. Majapahit 112 Semarang 50161	(024) 76584661
54	Semarang	ULS Pemuda Semarang	BCA KCU Semarang, Jl Pemuda No. 90-92 Semarang	(024) 3559779
55	Kudus	ULS Kudus	BCA KCU Kudus, Jl. A Yani 91 Kudus	(0291) 2913130
56	Yogyakarta	KC Yogyakarta	BCA KCP P. Mangkubumi, Jl. P. Mangkubumi 5-7 Yogyakarta 55271	(0274) 2920549, 2920550, 2920552
57	Yogyakarta	ULS Sudirman Yogyakarta	BCA KCU Yogyakarta, Jl Jendral Sudirman No. 49-51 Yogyakarta	(0274) 5015302
58	Solo	KC Solo	Jl. Slamet Riyadi 488 Solo 57142	(0271) 724951, 726992, 735636,
59	Solo	ULS Solo Slamet Riyadi	BCA KCU Solo Slamet Riyadi, Jl. Brigjen Slamet Riyadi 3 Solo	(0271) 633775
60	Solo	ULS Singosaren Solo	BCA KCP Singosaren, Jl. Dr. Rajiman 197 Solo	(0271) 2935588
61	Solo	ULS Sragen Solo	BCA KCP Sragen, Jl. Sukowati 185 Sragen	(0271) 8851245

NO	LOKASI	NAMA CABANG	ALAMAT CABANG	NOMOR TELEPON
62	Bandar Lampung	KC Bandar Lampung	BCA KCP Teluk Betung, Jl. Ikan Gurame No. 24-26 Bandar Lampung 35225	(0721) 5609956
63	Medan	KC Medan	Jl. Asia No. 184 D Medan 20214	(061) 7365457, 7365401, 7365011
64	Medan	ULS Setiabudi Medan	BCA KCP Setiabudi Medan Jl. Setiabudi No 150 A-B Medan	061-42405911
65	Palembang	KC Palembang	BCA KCU Palembang, Jl Demang Lebar Daun No. 10 Palembang	(0711) 5560811, 5560966, 5560858
66	Palembang	ULS A. Rivai	BCA KCP A Rivai, Jl. Kapten Rivai 22 Palembang	(0711) 5735008
67	Banda Aceh	KC Banda Aceh	BCA KCU Banda Aceh, Jl. Tgk. Daud Beureuh No. 44 Gampong Kuta Alam, Banda Aceh	(0651) 22484

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/SK/KOM/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Memorandum No. 175/MO/HSD/2019, maka struktur organisasi BCAS per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:





VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

VISI

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat

Visi ini mengandung makna:

- Seluruh insan BCAS berkeinginan menjadikan BCAS sebagai bank andalan masyarakat dengan menciptakan produk, layanan, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya.
- Dengan menjadi bank andalan, maka BCAS akan menjadi pilihan utama masyarakat sehingga dapat mewujudkan cita-cita BCAS untuk berperan dalam perekonomian Indonesia.

MISI

- Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

Visi, Misi, dan Tata Nilai BCAS telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/DIR/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi BCAS, Bank senantiasa melakukan *review* terhadap Visi dan Misi perusahaan dan dinyatakan sesuai dengan perkembangan dan tantangan perusahaan ke depan. Visi dan Misi secara konsisten disosialisasikan kembali kepada seluruh jenjang organisasi di antaranya pada pelaksanaan Rapat Kerja Nasional. Pada tanggal 10-11 Oktober 2019, telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif serta Kepala Departemen.



TATA NILAI PERUSAHAAN

Tata nilai BCAS adalah konsep nilai yang disusun dengan tujuan memberikan landasan moral dan perilaku bagi setiap insan BCAS yang berkarya dalam organisasi BCAS. BCAS meyakini bahwa setiap insan dalam organisasi adalah modal yang paling utama. Oleh sebab itu, tata nilai BCAS dikembangkan dari keyakinan BCAS bahwa untuk dapat meraih visi dan misinya dibutuhkan insan-insan yang menganut serangkaian nilai tertentu. Tata nilai BCAS mengandung empat nilai inti yang disingkat TRIP yaitu: *Teamwork*, *Responsibility*, *Integrity*, *Professional*. Penetapan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCAS telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/DIR/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah.

Teamwork (Kerja Sama)

Adalah interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nilai *Teamwork* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. *Understand* (Memahami)
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menyelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
- b. *Interact* (Berinteraksi)
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus-menerus.
- c. *Synergy* (Sinergi)
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

Responsibility (Tanggung Jawab)

Mengandung pengertian melaksanakan peran dan tugas dengan penuh perhatian dan kepedulian untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang spesifik. Nilai *Responsibility* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. *Act* (Bertindak)
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas, dan menyeluruh.
- b. *Aware* (Peduli)
Memiliki kepekaan, pengertian, dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah.

- c. *Serve Sincerely* (Melayani dengan Tulus)
Melayani dengan cara menggali, memahami, dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

Integrity (Integritas)

Mengandung pengertian sikap teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, dan keterbukaan, yang dilakukan secara konsisten untuk membangun kepercayaan perusahaan bagi nasabah. Nilai *Integrity* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. *Honest* (Jujur)
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan nasabah.
- b. *Commit* (Berkomitmen)
Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik, dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.
- c. *Transparent* (Terbuka)
Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan nasabah.

Professional (Profesional)

Mengandung pengertian secara positif menampilkan citra, sikap, dan kompetensi yang secara konsisten ditingkatkan untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan peran dan tugas guna meningkatkan citra perusahaan. Nilai *Professional* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. *Appearance* (Citra Positif)
Berpenampilan, bersikap, dan berkomunikasi secara profesional.
- b. *Competence* (Kompetensi)
Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- c. *Continuous Improvement* (Perbaikan yang Berkelanjutan)
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus-menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Tantri Indrawati Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun dan berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan RUPST tanggal 6 Maret 2019, Tantri Indrawati diangkat menjadi Presiden Komisaris BCAS untuk periode jabatan selama 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022 dan mendapat persetujuan OJK melalui Surat Keputusan OJK perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan nomor KEP/175/D.3/2019 tanggal 24 September 2019.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris BCAS, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan BCAS sejak tahun 2010 sampai dengan 2019. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau pernah berkarier di Bank Bukopin dengan menempati berbagai posisi manajerial (1986 - 2008), di antaranya sebagai Kepala Urusan Sumber Daya Manusia dan Diklat; *Group Head Line of Business Pendidikan, Asuransi, Pegadaian, Modal Ventura*; dan *Group Head Liabilities Commercial*. Pada periode 2008-2010, beliau memangku jabatan manajerial puncak Bank Syariah Bukopin sebagai Direktur Kepatuhan dan terakhir sebagai Direktur Pelayanan dan Pendanaan.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

Tantri Indrawati meraih gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga (1986) dan gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi/PSDM dari FISIP Universitas Indonesia (2004). Beliau juga telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan Sertifikasi Kepatuhan Level *Executive*. Selain pendidikan formal, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia - Monash University, Melbourne; *International Certification Programme in Wealth Management* - Erasmus University; *Corporate Governance of Islamic Financial Institutions* - Cibafi World Bank, Kuala Lumpur serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, *Risk Management*, Perbankan Syariah, dan APU-PPT.



Joni Handrijanto

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun dan berdomisili di Malang, Jawa Timur.

Joni Handrijanto diangkat sebagai Komisaris Independen BCAS pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 5 Maret 2014. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau telah berkarir di BCA yaitu dari tahun 1982-2010 dan memangku berbagai jabatan mulai dari karyawan operasional/kiriman uang dan inkaso BCA Cabang Malang (1982-1984), Kepala Seksi Analisis Kredit Cabang Malang (1985-1986), Kepala Marketing dan Kredit Cabang Kediri (1986-1988), Pimpinan KCP Tulungagung (1988-1990), Pimpinan di beberapa Cabang BCA (Banyuwangi, Balikpapan, Kediri dan Palembang) sejak tahun 1990-2001, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan (2001-2003), Kepala Kantor Wilayah Malang (2003-2005), dan Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2005-2010).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Joni Handrijanto menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Brawijaya Malang dan meraih gelar Doktorandus pada tahun 1981 dan gelar Magister Sains pada tahun 2001. Selain pendidikan formal, beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Manajemen Perbankan, Akuntansi dan Kredit, Kepemimpinan serta *Risk Management* yang diselenggarakan oleh Learning Center BCA, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT PEAK Pratama Indonesia, LSPP, dan LPPI.



Suyanto Sutjiadi Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, berdomisili di Jakarta.

Suyanto Sutjiadi diangkat sebagai Komisaris Independen BCAS pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2013. Pengangkatan terakhir sejak RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau telah berkarir di BCA sejak tahun 1978 dan memangku berbagai jabatan mulai dari Kepala Seksi Bagian Transfer (1981-1982), *Counterpart* di Bank Indonesia Palembang (1983-1984), Kepala Seksi Bagian Tabanas dan Taska (1985-1986), Kepala Seksi Marketing (1986-1987), Kepala Cabang di beberapa KCU dan KCP (1987-2004) dan sebagai Kepala Kantor Wilayah V Medan (2004-2010).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Suyanto Sutjiadi memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983 dan telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Perkreditan, Manajemen Perbankan, Kepemimpinan, dan *Risk Management* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), PT PEAK Pratama Indonesia, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT BCA, Tbk, Institut Bankir Indonesia, serta program SESPI Bank Angkatan 57.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

Ketua DPS

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun dan berdomisili di Tangerang.

Fathurrahman Djamil menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank UIB tanggal 29 Juli 2009 dan mendapatkan persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/GBI/DPbs. Pengangkatan terakhir sejak RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022.

Beliau berpengalaman di bidang ilmu Syariah sebagai praktisi maupun akademisi. Menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk periode tahun 2015-2020, dosen di beberapa universitas negeri maupun swasta, serta menjadi Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga/institusi keuangan.

Selain menjadi ketua DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai ketua DPS di Adira Finance (perusahaan pembiayaan), ketua DPS pada AIA Insurance (asuransi) dan anggota DPS pada Bank CIMB Niaga Syariah (perbankan).

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.

Beliau meraih gelar Sarjana (1981) dan Master (1987) bidang Ilmu Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Melanjutkan Program Doktor (Ph.D) dalam bidang *Islamic Studies* di McGill University, Kanada (1992). Meraih gelar *Philosophy Doctor* di bidang Teori Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1994).



Sutedjo Prihatono

Anggota DPS

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun dan berdomisili di Tangerang.

Sutedjo Prihatono diangkat sebagai anggota DPS BCAS pada RUPST tanggal 4 Maret 2015 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 18 Mei 2015. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjadi anggota DPS, beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2010. Pernah berkarier di Karim Consulting Indonesia sebagai *Non Consulting Director* sejak tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia sebagai *Human Resources Head* (1996-2001) dan *Senior Corporate Banking* (2001-2004). Berpengalaman sebagai Pengajar dan penanggung jawab berbagai program pelatihan di bidang perbankan syariah.

Selain menjadi anggota DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan).

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Sutedjo Prihatono meraih gelar S1 dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen (1993) dan gelar Magister Manajemen dari Binus Business School pada Fakultas Manajemen (2014). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan, antara lain di bidang *Selling Skill*, *Service Excellence*, *Accounting Programme*, *Financing Analysis*, dan *General Islamic Banking Programme*.

PROFIL DIREKSI



John Kosasih
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun dan berdomisili di Jakarta.

John Kosasih diangkat sebagai Presiden Direktur BCAS pada RUPST tanggal 15 Maret 2016 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 4 Oktober 2016. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur (2013-2016) dan sebagai Direktur (2010-2013). Sebelum bergabung di BCAS, beliau menempati berbagai posisi strategis di PT BCA Tbk sebagai *Senior Adviser* Ketua Tim *Personal Banking*, *Senior Adviser* Kepala Pengembangan Penjualan Perbankan Individu dan Konsultan Strategi Pemasaran (2005-2008), menempati berbagai jabatan manajerial puncak di PT Bank Danamon Tbk (2000-2005) dengan posisi terakhir sebagai *Senior Vice President Consumer Mass Market* (DSP). Memulai karier di dunia perbankan di PT Bank Risjad Salim Internasional (1997-1999) dengan tugas menangani keuangan dan administrasi kredit. Di perusahaan yang sama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Pusat dan anggota tim pengelola (2000) pada saat bank tersebut diambil alih oleh BPPN. Di tahun 2000, beliau dipercaya menjabat sebagai Komisaris (wakil BPPN) di PT Hana Risjad Finance.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

John Kosasih memperoleh penghargaan sebagai Top CEO 2018 dan Top CEO 2019 pada ajang Top Bank 2018 dan 2019 yang diselenggarakan oleh Top Business. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Economics* di Murdoch University, Perth, West Australia pada tahun 1992. Beliau juga telah mengikuti berbagai *Senior Management Training* di dalam dan luar negeri di berbagai bidang, termasuk *Strategy Implementation Course*-Sydney, Australia; *Consumer Risk Management*-Jakarta; *Sales Management for Bankers*-Jakarta; *Retail and Individual Banking, Consumer Lending and Branch Banking*-Thailand; *Retail Banking Process*-Australia; *Pacific RIM Bankers Programme*-University of Washington, Foster Education Seattle, USA dan program pelatihan ASEAN *Global Leadership Programme*, UC Berkeley California, USA.



Houda Muljanti

Direktur dan merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Houda Muljanti diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 15 Maret 2016 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 28 September 2016. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di BCA dan memangku jabatan manajerial sebagai Kepala Subdiv *Human Capital Strategy and Solution* (2012-2016), Kepala Subdiv Manajemen SDM (2006-2012), dan Kabiro Pengembangan Kebijakan SDM (2001-2006). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Sentul Damai Resort (2012-2016), berkarier di PT SQ Centre Indonesia (1993-2001) dan Japan International Cooperation Agency (1991-1993).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

Houda Muljanti memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990) dan Magister Manajemen dari Institut Manajemen Prasetya Mulya (2005). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya GALLUP *Accelerated Strengths Coaching Course*, *Financial Inclusion Summit Asia 2017* dan pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, *Risk Management*, serta Perbankan Syariah yang di antaranya diselenggarakan oleh PT BCA, Tbk, Karim Consulting Indonesia, dan Gapura Prima Sejati.



Rickyadi Widjaja

Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPSLB tanggal 29 Agustus 2017 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 14 Februari 2018. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di BCA (1989-Februari 2018) dengan menempati berbagai posisi manajerial yaitu Kepala Grup Analisa Risiko Kredit, Kepala Sub Divisi Kredit Komersial dan Ritel dan Wakil Kepala Divisi Kredit Komersial.

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

Rickyadi Widjaja meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari Deakin University Melbourne Australia (1989) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri, antara lain pelatihan di bidang Kepemimpinan, Perbankan Umum, Perbankan Syariah, *Risk Management* dan *Corporate Finance*.



Pranata Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun dan berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

Pranata diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST tahun 2020 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 24 September 2019.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan dari tahun 2010 - 2019. Beliau juga pernah berkarier di Bank Danamon (2002-2010) dengan menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai SAVP *Financial and Control Team Leader*, Unit Usaha Syariah Bank Danamon (2009-2010), *Business Planning Head*, SEMM DSP Bank Danamon (2006-2009) dan *Portfolio Management Head*, CMM DSP Bank Danamon (2004-2006).

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

Pranata menyelesaikan pendidikannya di bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Persada Indonesia Jakarta. Beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan antara lain di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, *Risk Management*, *Corporate Finance* serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan.

DAFTAR PEJABAT EKSEKUTIF

NO	NAMA PEJABAT EKSEKUTIF	JABATAN
1	Endang Ruslina	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM
2	Adetyas Wendiana	Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan Merangkap sebagai Pjt. Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan
3	Ammy Hosea Susanto	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
4	Fatmah	Kepala Divisi Operasi
5	Dwidadi Sugito	Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer
6	Oetomo Soeboer	Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik
7	Yanto	Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi
8	Gandhi Ahmad Solihin	Kepala Departemen Manajemen Risiko
9	Maman Hermansyah	Kepala Departemen Kepatuhan
10	Ferianto	Kepala KC Sunter
11	Whira Rahman	Kepala KC Mangga Dua
12	The Ardian Prabowo	Kepala KC Samanhudi
13	Lily Yulianti	Kepala KC Bandung
14	Mardjukie Kangsotrisno	Kepala KC Yogyakarta
15	Setyawan Kuntjoro	Kepala KC Surabaya
16	Lenny Herawati Tanty	Kepala KC Solo
17	Emmiliana Setiawati	Kepala KC Semarang
18	Merling Thiosanto	Kepala KC Jatinegara
19	Salim Lestari	Kepala KC Palembang
20	Wiwick Putra Wijaya	Kepala KC Medan
21	Sukhaili	Kepala KC Banda Aceh



Dari Kiri ke Kanan

Ferianto

Kepala KC Sunter

Oetomo Soeboer

Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik

Lenny Herawati Tanty

Kepala KC Solo

Houda Muljanti

Direktur

Yanto

Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi

Merling Thiosanto

Kepala KC Jatinegara

Tantri Indrawati

Presiden Komisaris



John Kosasih Presiden Direktur
Maman Hermansyah Kepala Departemen Kepatuhan
Wiwick Putra Wijaya Kepala KC Medan
H. Fathurrahman Djamil Ketua Dewan Pengawas Syariah

Adetyas Wendiana Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan Merangkap sebagai Plt. Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan
Ammy Hosea Susanto Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Lili Yulianti Kepala KC Bandung
Setyawan Kuntjoro Kepala KC Surabaya



Dari Kiri ke Kanan

Gandhi Ahmad Solihin

Kepala Departemen
Manajemen Risiko

Sukhaili

Kepala KC Banda Aceh

Salim Lestari

Kepala KC Palembang

The Ardian Prabowo

Kepala KC Samanhudi

Fatmah

Kepala Divisi Operasi

Mardjukie Kangsostrisno

Kepala KC Yogyakarta

Pranata

Direktur

Suyanto Sutjiadi

Komisaris Independen



Joni Handrijanto
Komisaris Independen

Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja Hukum
dan SDM

Emmiliana Setiawati
Kepala KC Semarang

Rickyadi Widjaja
Direktur

Whira Rahman
Kepala KC Mangga Dua

Sutedjo Prihatono
Anggota
Dewan Pengawas Syariah

Dwidadi Sugito
Kepala Satuan Kerja Bisnis
Ritel dan Konsumer

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

JUMLAH TOTAL KARYAWAN

Sampai akhir tahun 2019, jumlah karyawan BCAS (tetap dan kontrak) adalah sebanyak 554 orang atau meningkat 5,5% dibandingkan tahun 2018. Jumlah karyawan berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, masa kerja, kelompok usia dan kelompok gender adalah sebagai berikut.

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Profil karyawan berdasarkan level organisasi di dalam BCAS untuk tahun 2019 terdiri dari 20 orang pejabat eksekutif 3,6% dari total karyawan, 14 orang manajer 2,5% dari total karyawan), 107 orang staf 19,3% dari total karyawan dan 413 orang karyawan lain-lain 74,5% dari total karyawan.

Jabatan	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pejabat Eksekutif	20	3,6%	20	3,8%	20	3,8%
Manajer	14	2,5%	16	3,0%	15	2,9%
Staf	107	19,3%	149	28,4%	140	26,9%
Lain-lain	413	74,5%	340	64,8%	346	66,4%
Jumlah	554	100,0%	525	100,0%	521	100,0%

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Berdasarkan tingkat pendidikan, tercatat hingga akhir tahun 2019, profil karyawan BCAS (karyawan tetap dan kontrak) didominasi oleh karyawan dengan tingkat

pendidikan sarjana yaitu berjumlah 363 orang atau 65,5% dari total karyawan. Selanjutnya, sebanyak 98 orang atau sebesar 17,7% merupakan karyawan dengan tingkat pendidikan non akademi, sebanyak 79 orang atau 14,3% adalah karyawan dengan tingkat pendidikan diploma dan sebanyak 14 orang atau 2,5% adalah karyawan dengan tingkat pendidikan pasca sarjana.

Pendidikan	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	14	2,5%	14	2,7%	13	2,5%
Sarjana	363	65,5%	336	64,0%	331	63,5%
Diploma	79	14,3%	83	15,8%	84	16,1%
Non Akademi	98	17,7%	92	17,5%	93	17,9%
Jumlah	554	100,0%	525	100,0%	521	100,0%

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Hingga akhir tahun 2019, sebanyak 446 orang 80,5%

karyawan BCAS merupakan karyawan tetap dan 108 orang 19,5% adalah karyawan kontrak.

Status Kepegawaian	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	446	80,5%	444	84,6%	422	81,0%
Kontrak	108	19,5%	81	15,4%	99	19,0%
Jumlah	554	100,0%	525	100,0%	521	100,0%

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Berdasarkan masa kerja, 155 orang atau 28,0% karyawan memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun, 163 orang atau 29,4% karyawan memiliki masa kerja 2 sampai kurang

dari 5 tahun, 123 orang atau 22,2% karyawan memiliki masa kerja 5 sampai kurang dari 8 tahun dan 113 orang atau 20,4% karyawan memiliki masa kerja 8 tahun atau lebih.

Masa Kerja	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<2th	155	28,0%	132	25,1%	89	17,1%
2-<5th	163	29,4%	178	33,9%	202	38,8%
5-<8th	123	22,2%	124	23,6%	135	25,9%
≥8th	113	20,4%	91	17,3%	95	18,2%
Jumlah	554	100,0%	525	100,0%	521	100,0%

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA

Berdasarkan kelompok usia, sebanyak 40 orang atau 7,2% karyawan berusia kurang dari 25 tahun, 306

orang atau 55,2% karyawan berusia 25 sampai kurang dari 35 tahun, 124 orang atau 22,4% karyawan berusia 35 sampai kurang dari 45 tahun, 61 orang atau 11,0% karyawan berusia 45 sampai kurang dari 55 tahun dan 23 orang atau 4,2% karyawan berusia 55 tahun atau lebih.

Kelompok Usia	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<25 th	40	7,2%	35	6,7%	17	3,3%
25 - <35 th	306	55,2%	293	55,8%	325	62,4%
35 - < 45 th	124	22,4%	116	22,1%	108	20,7%
45 - < 55 th	61	11,0%	59	11,2%	54	10,4%
≥55 th	23	4,2%	22	4,2%	17	3,3%
Jumlah	554	100,0%	525	100,0%	521	100,0%

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK GENDER

Berdasarkan kelompok gender, sebanyak 280 orang

atau 50,5% karyawan adalah laki-laki dan 274 orang atau 49,5% karyawan adalah perempuan.

Kelompok Gender	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-Laki	280	50,5%	273	52,0%	282	54,1%
Perempuan	274	49,5%	252	48,0%	239	45,9%
Jumlah	554	100,0%	525	100,0%	521	100,0%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

BCAS menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting bagi perusahaan. Oleh sebab itu, BCAS senantiasa mengoptimalkan kemampuan setiap karyawannya dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna pengembangan kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan kapasitas karyawan. Pelatihan dan pengembangan SDM dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan

bagi seluruh SDM dengan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan BCAS. Kerangka pelatihan dan pengembangan karyawan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan strategi perusahaan.

Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Selama tahun 2019, BCAS menyelenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi untuk 3.820 orang karyawan atau naik 46,3% dibandingkan tahun 2018. Berikut adalah jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi berdasarkan golongan.

Peserta Training berdasar Level Organisasi	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi dan Pejabat Eksekutif	360	9,4%	343	13,1%	189	10,1%
Manajer	1.410	36,9%	819	31,4%	595	31,7%
Staf	1.976	51,7%	1.370	52,5%	983	52,4%
Lain-Lain	74	1,9%	79	3,0%	108	5,8%
Jumlah	3.820	100,0%	2.611	100,0%	1.875	100,0%

BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Total biaya yang telah dikeluarkan BCAS untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan pada

tahun 2019 mencapai Rp3,7 miliar atau naik 27,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	2019	2018	2017
Jumlah	Rp3,7 M	Rp2,9 M	Rp2,2 M

REALISASI PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Realisasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan

kompetensi karyawan BCAS pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Periode Pelaksanaan	Aktivitas Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Jumlah Peserta*
Januari - Desember 2019	E-Learning dengan berbagai tema pelatihan <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i>	BCA Syariah	1375
	Pelatihan <i>in-house</i> yang diinisiasi oleh unit kerja terkait. Tema pelatihan mulai dari <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> .	BCA Syariah	1118
	Pelatihan internal dengan berbagai tema pelatihan <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i>	BCA Syariah	1126
	Pelatihan eksternal dengan berbagai tema pelatihan <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i>	Infobank Institute, HRD Spot, Value Consult, BCA Learner Service, Kemenag, D'Passion Indonesia, Bank Indonesia, IKAI, PT Intipasan Pariwara, Depnaker, OJK, Spectra Center, Advanced Management Center, PPTK, ACFE, ESQ, ISRA, Formasi, IIGMA, PPM Manajemen, FKDKP, Efektif Pro, MMS Law Office, LSPP, IBM Indonesia, dll.	216

*Data jumlah peserta termasuk Pengurus (Dewan Komisaris, DPS, Direksi) dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Informasi mengenai Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris

Perusahaan dan Unit Audit Internal dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini bagian Tata Kelola Perusahaan.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BCAS

Nama Instansi	Lembar Saham	%
PT Bank Central Asia Tbk	1.996.299	99,9999%
PT BCA Finance	1	0,0001%
Jumlah	1.996.300	100%

RINCIAN 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Per 31 Desember 2019, PT Bank Central Asia Tbk merupakan pemegang saham terbesar BCAS.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM > 5%

Per 31 Desember 2019, tidak terdapat pemegang saham dengan kepemilikan saham lebih dari 5%, kecuali PT Bank Central Asia Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali BCAS.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM MASING-MASING < 5%

Per 31 Desember 2019, tidak terdapat pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing <5%.

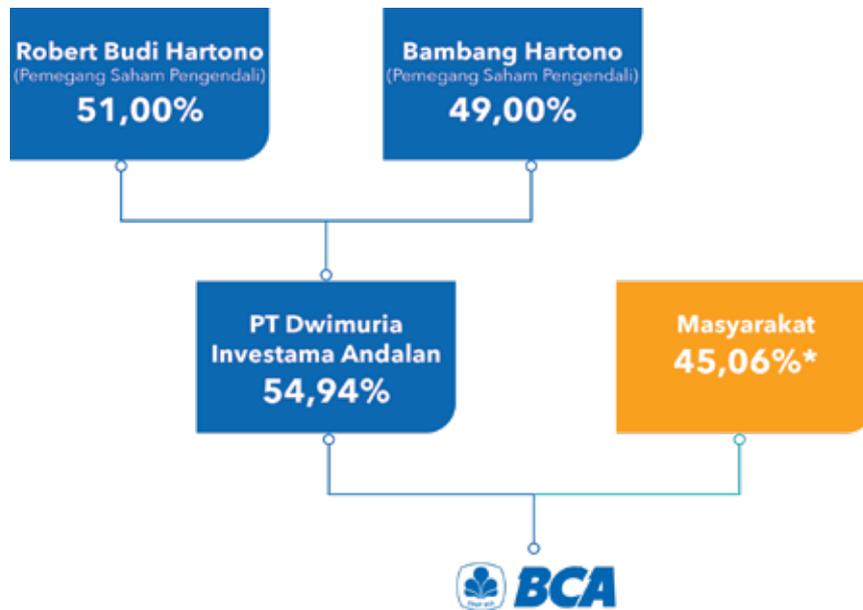
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Per 31 Desember 2019, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi BCAS.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BCA

Per 31 Desember 2019

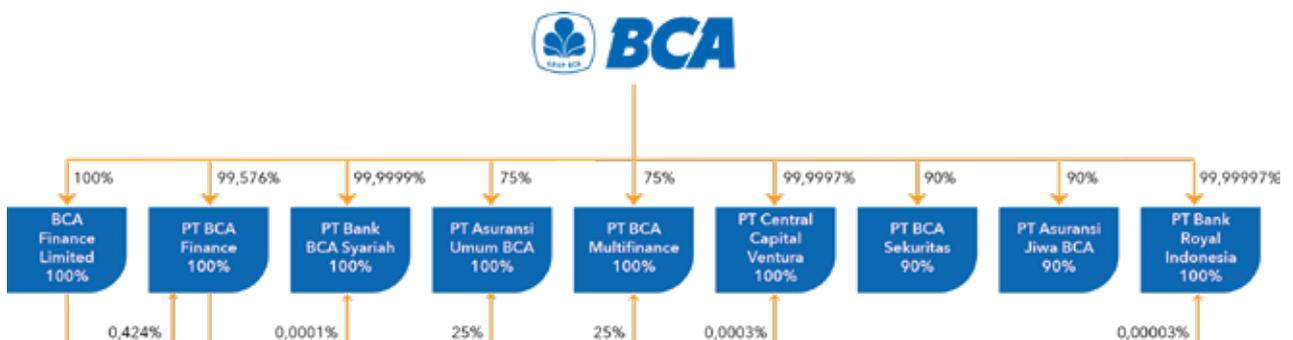


Keterangan :

- Jalur Pengendalian
- Pengendali

* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan *Ultimate Shareholders*, sebesar 0,02% dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan sebesar 0,02% dimiliki oleh Bambang Hartono. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham Perseroan. Komposisi saham yang dimiliki masyarakat juga termasuk kepemilikan Anthoni Salim terhadap saham Perseroan sebesar 1,76%.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

Sampai dengan tahun 2019, BCAS tidak mempunyai entitas anak dan/atau entitas asosiasi sehingga tidak ada informasi mengenai: (1) nama entitas anak dan/atau

asosiasi; (2) persentase kepemilikan saham; (3) bidang usaha entitas anak dan/atau asosiasi; dan (4) status operasi entitas anak dan/atau asosiasi.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

BCAS merupakan Perusahaan Tertutup (*private company*) dan belum pernah melakukan aktivitas perdagangan saham apa pun sejak pendiriannya, sehingga tidak ada

informasi tentang kronologi pencatatan saham dan jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sampai dengan tahun 2019, BCAS belum pernah melakukan pencatatan atau penerbitan efek lainnya

apapun, sehingga tidak ada informasi tentang kronologi pencatatan efek lainnya.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2019

Sepanjang tahun 2019, BCAS telah menerima 34 penghargaan dari berbagai lembaga. Hasil tersebut tidak lepas dari kerja keras dan komitmen tiap elemen

perusahaan untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi perusahaan. Penghargaan dan sertifikasi tersebut adalah:



Gold Award Kategori Bank Syariah Aset <Rp10 T
Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-Iv-2019
Economic Review
22 Februari -2019



Platinum Award Kategori Bank Syariah Aset Rp.2,5 T - Rp5 T
Indonesia CSR Award- III- 2019
Economic Review
7 Maret 2019



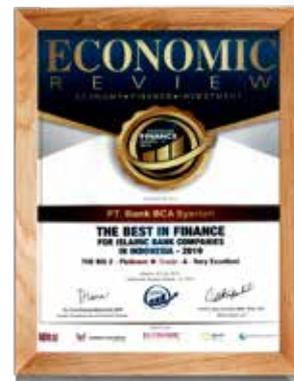
Exceptional Service Performance-Contact Center Service Excellence Award 2019
Contact Center Service Excellence Award 2019
Carre Service Quality Monitoring
9 April 2019



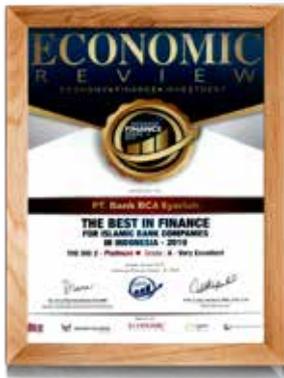
Peringkat I Kategori Tabungan Bank Umum Syariah untuk produk Tahapan iB
The 8th Infobank Digital Brand Award 2019
Infobank
16 Mei 2019



Peringkat II Corporate Brand Bank Umum Syariah dengan aset di bawah Rp10 triliun
The 8th Infobank Digital Brand Award 2019
Infobank
16 Mei 2019



The Best in Finance in the category of Sharia Banking Companies 2019
Indonesia Finance Award II 2019
Economic Review
20 Juni 2019



The Big 2, Platinum, Grade A, Very Excellent
Indonesia Finance Award II 2019
Economic Review
20 Juni 2019



Peringkat II Best Overall Performance
Banking Service Excellence Award 2019
Infobank
27 Juni 2019



Peringkat II Performa Terbaik Overall Minus E-banking
Banking Service Excellence Award 2019
Infobank
27 Juni 2019



Peringkat II Performa Terbaik Customer Service
Banking Service Excellence Award 2019
Infobank
27 Juni 2019



Peringkat II Performa Terbaik Teller
Banking Service Excellence Award 2019
Infobank
27 Juni 2019



Peringat III Performa Terbaik Telepon
Banking Service Excellence Award 2019
Infobank
27 Juni 2019



Predikat Diamond, Konvensional - Sharia Banking
Service Quality Award 2019
Carre Service Quality Monitoring
9 Juli 2019



TOP GRC 2019 #4 Stars
TOP GRC 2019
Top Business
22 Agustus 2019



TOP GRC 2019 #4 Stars
John Kosasih *The Most Committed GRC Leader* 2019
Top Business
22 Agustus 2019



Peringkat 1 "The Best Indonesia GCG Implementation 2019", kategori Sharia Bank - BUKU I - Asset < Rp5T
Indonesia Good Corporate Governance Award 2019
Economic Review
23 Agustus 2019



TOP Bank BCA Syariah 2019
TOP Bank 2019
Top Business
28 Agustus 2019



TOP Bank BCA Syariah 2019
John Kosasih TOP CEO Bank 2019
Top Business
28 Agustus 2019



The Best Bank in Risk Profile GCG 2019
 24 Infobank Awards
 Infobank
 29 Agustus 2019



Bank Berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2018
 24 Infobank Awards
 Infobank
 29 Agustus 2019



Bank Berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2014-2018
 24 Infobank Awards
 Infobank
 29 Agustus 2019



2nd Best E-Channel Transaction category Tier 3-2 Islamic Bank
 PRIMA Awards 2019
 PT Rintis Sejahtera
 10 Oktober 2019



The Best Performance in Complaint Handling
 PRIMA Awards 2019
 PT Rintis Sejahtera
 22 Oktober 2019



Golden Award "Excellent in Financial Performance Throughout 2014 - 2018"
 8th Infobank Sharia Awards 2019
 Infobank
 25 Oktober 2019



Excellent in Financial Performance Throughout 2018
8th Infobank Sharia Awards 2019
Infobank
25 Oktober 2019



The Best Asset Quality Sharia Bank 2019
8th Infobank Sharia Awards 2019
Infobank
25 Oktober 2019



Bank Berpredikat "Sehat" kategori Bank Syariah BUKU 2 dan 3
Indonesia Best Bank Award 2019
Warta Ekonomi
15 November 2019



Bank Syariah Kualitas Pembiayaan Terbaik
Anugerah Syariah Republik Indonesia 2019
Republika
19 November 2019



The Best Bank in Retail Banking Services (Kategori Bank Syariah)
Tempo Financial Business Award 2019
TEMPO
27 November 2019



Bank Berpredikat "Sangat PRIMA" Kategori Bank BUKU 2 Aset Rp 5 T - di bawah Rp 10 T
Best Bank Performance of MSMEs Loans 2019 Award
Majalah Peluang
28 November 2019



2nd Best Sharia Bank 2019
 Anugerah Perbankan Indonesia 2019
 Economic Review
 6 Desember 2019



1st The Best Operational Excellent 2019
 Anugerah Perbankan Indonesia 2019
 Economic Review
 6 Desember 2019



2nd Best Information Technology 2019
 Anugerah Perbankan Indonesia 2019
 Economic Review
 6 Desember 2019



The Best Financial Performance Sharia Bank
 2nd Moeslimchoice Award 2019
 Moeslimchoice
 12 Desember 2019

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

BCAS didukung oleh lembaga dan profesi penunjang perusahaan pada 2019 guna merealisasikan laporan keuangan dan perhitungan aktuarial;

Jenis Lembaga	Nama	Periode	Jasa
Kantor Akuntan Publik	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tahjo dan Rekan	2019	Pemeriksaan Laporan Keuangan
Aktuarial	PT Emerald Delta Consulting	2019	Perhitungan Aktuarial

INFORMASI PADA SITUS PERUSAHAAN

BCAS menyediakan situs perusahaan yang dapat diakses melalui <https://www.bcasyariah.co.id/> sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perusahaan.

Pada situs perusahaan, BCAS menyediakan informasi terkait solusi produk dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan maupun untuk kebutuhan bisnis, informasi tentang BCAS dan informasi-informasi penting lainnya.

Informasi menu pada situs BCAS di antaranya berisi informasi sebagai berikut:

Profil Korporasi

- Sejarah
- Visi dan Misi
- Dewan Komisaris, Direksi dan DPS
- Profil Perusahaan

Produk

- Pendanaan
- Pembiayaan
- Jasa
- *Electronic Channel*

Berita Terkini

- Berita Terkini
- Edukasi
- Informasi
- Lensa Peristiwa
- Karier
- Program Promosi

Lokasi Cabang

- Menyediakan informasi tentang kantor cabang BCAS, lengkap dengan alamat, nomor telepon dan nomor fax.

Laporan Keuangan

- Laporan Keuangan Tahunan
- Laporan Eksposur Risiko
- Laporan Keuangan Triwulan
- Laporan Keuangan Bulanan

Good Corporate Governance

- Informasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab
- Komite-Komite Perusahaan
- RUPS
- Penghargaan
- Laporan Pelaksanaan GCG

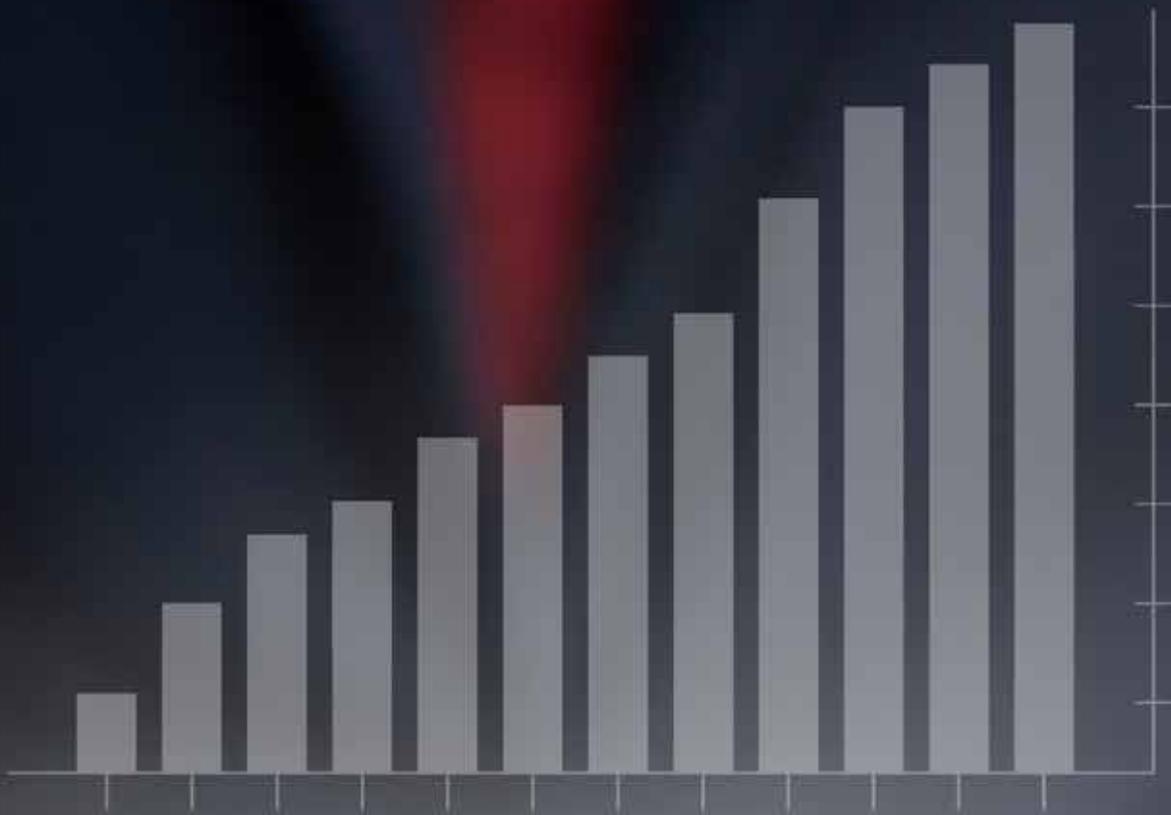
Karier

- Menyediakan informasi lowongan kerja di BCAS.



04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN **MANAJEMEN**



TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL



Sepanjang tahun 2019, perekonomian Indonesia mengalami tantangan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Dari eksternal, sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global tentunya juga berdampak pada perekonomian Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi global melandai pada tahun 2019 setelah sebelumnya mencapai 3,6% pada 2018. IMF yang pada kuartal pertama tahun 2019 memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,3% mengoreksi angka pertumbuhan ini hingga pada angka 3% dan realisasinya pertumbuhan ekonomi global berada pada angka 2,9%.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai di antaranya disebabkan oleh penurunan aktivitas konsumsi dan investasi seiring melemahnya sentimen konsumen dan bisnis akibat masih berlanjutnya ketidakpastian global. Konflik perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok semakin menekan aktivitas perdagangan global sehingga memengaruhi kinerja ekspor dan menurunkan permintaan global. Pelemahan permintaan global tersebut menyebabkan harga komoditas secara umum masih rendah. Selain itu, proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), ketegangan dan konflik politik di sejumlah kawasan, dan krisis ekonomi di sejumlah negara turut menjadi faktor penyebab melemahnya ekonomi global.

TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Di tengah perekonomian dunia yang masih melambat, kinerja ekonomi Indonesia cukup baik di tahun 2019 yang tercatat tumbuh sebesar 5,1%. Stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga dan momentum pertumbuhan dapat dipertahankan. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh tingkat konsumsi dan investasi yang menguat. Konsumsi swasta yang meliputi konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh cukup kuat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi rumah tangga tetap kuat, tercermin dari daya beli masyarakat yang terjaga seiring kenaikan pendapatan masyarakat yang ditopang inflasi yang rendah, serta bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Demikian pula pertumbuhan investasi secara nasional masih mengalami pertumbuhan sebagai dampak dari pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang terus berlanjut. Industri manufaktur merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Oleh sebab itu, penguatan inovasi di sektor industri merupakan sebuah keharusan untuk mendongkrak daya saing Indonesia. Pemanfaatan inovasi menjadi kunci untuk mengambil peluang dari perubahan sistem global di era revolusi industri generasi keempat, seperti penggunaan teknologi digital dan internet pada industri nasional.

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL

Industri perbankan nasional masih menghadapi ketidakpastian yang berdampak pada pertumbuhan kredit dan DPK secara keseluruhan. Realisasi kredit tercatat 6,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Indonesia sebelumnya yang berada di kisaran 10-12% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit terjadi baik pada segmen korporasi maupun

perorangan. Sementara dari sisi DPK, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan DPK berkisar 8-10% (yoy) namun realisasinya tercatat sebesar 6,5% (yoy). Kondisi likuiditas perbankan cenderung masih ketat, ditandai dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) sebesar 93,6% pada 2019.



TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Industri halal di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pemerintah menyadari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah melalui berbagai inisiatif menunjukkan keseriusan dalam menumbuhkan pasar syariah nasional di antaranya dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung diketuai oleh Presiden. Implementasi ekosistem mata rantai nilai halal (*halal value chain*) melalui pengembangan ekonomi pesantren, UMKM syariah sampai dengan industri khususnya makanan, *fashion*, kosmetika, pariwisata dan farmasi, serta kampanye industri halal akan terus diperkuat. Selain itu, berbagai kebijakan juga diluncurkan untuk mendukung penguatan perbankan syariah nasional. Optimalisasi keuangan sosial syariah pada sektor zakat dan wakaf juga akan terus didorong untuk meningkatkan pembiayaan syariah yang inklusif.

Sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah terhadap

perbankan nasional mengalami peningkatan dan berada pada posisi 6,17%. Angka ini menggambarkan peluang pertumbuhan yang masih sangat terbuka. Ditambah dengan kebijakan-kebijakan Regulator yang memberikan stimulus bagi perbankan syariah, hasilnya perbankan syariah mengalami pertumbuhan dua digit, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan secara keseluruhan.

Pertumbuhan aset BUS pada tahun 2019 tercatat sebesar 10,6% secara yoy, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan aset tahun 2018 yang mencapai 10,0% (yoy). Penyaluran pembiayaan BUS tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 11,3% (yoy), meningkat jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,6% (yoy). DPK BUS tahun 2019 tumbuh sebesar 12,2% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,1% (yoy). Sementara itu rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/ NPF*) BUS pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar 3,2% relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,3%.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Sebagai salah satu pelaku dalam industri perbankan syariah di Indonesia, BCAS memegang peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan, BCAS tentunya harus mengidentifikasi, mengukur dan mengelola berbagai risiko yang timbul. Salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam memitigasi risiko pembiayaan adalah dengan melakukan diversifikasi jenis akad pembiayaan karena masing-masing jenis akad memiliki tingkat

risiko tersendiri bagi Bank. Beberapa jenis akad yang digunakan BCAS dalam menyalurkan pembiayaan yaitu *murabahah* (jual beli), *Ijarah Muntahiyah Bittamlik-IMBT* (sewa/beli), dan *mudharabah/musyarakah* (bagi hasil).

Sepanjang tahun 2019, BCAS menyalurkan pembiayaan mencapai Rp5.645,4 miliar atau tumbuh 15,2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.899,7 miliar dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Jumlah Pembiayaan	Miliar Rupiah	% Terhadap Jumlah Pembiayaan	Nominal	%
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Jual Beli)	1.619,7	28,7%	1.706,9	34,8%	(87,2)	(5,1%)
Pembiayaan IMBT (Sewa Beli)	511,3	9,1%	517,4	10,6%	(6,1)	(1,2%)
Perbiayaan <i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil)	490,7	8,7%	242,6	5,0%	248,1	102,3%
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	3.009,8	53,3%	2.432,3	49,6%	577,5	23,7%
Pembiayaan <i>Qardh</i>	13,9	0,2%	0,6	0,0%	13,3	2412,0%
Jumlah Pembiayaan	5.645,4	100,0%	4.899,7	100,0%	745,7	15,2%

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* masih memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp3.009,8 miliar atau 53,3% dari total portofolio pembiayaan BCAS. Angka ini meningkat cukup tinggi yaitu 23,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan, pembiayaan dengan akad *musyarakah* menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCAS.

Sementara, kontribusi terbesar kedua adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu Rp1.619,7

miliar atau 28,7% dari total portofolio pembiayaan Bank. Terjadi penurunan 5,1% pada akad *murabahah* jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BCAS senantiasa berupaya memberikan solusi pembiayaan kepada nasabah dengan beragam jenis akad sehingga komposisi akad pembiayaan di BCAS dapat terdistribusi dengan lebih baik, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter usaha nasabah.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Tantangan demi tantangan terus dihadapi oleh pelaku perbankan nasional, tanpa terkecuali BCAS. Pelemahan pada perekonomian global dan tantangan perekonomian nasional turut mempengaruhi iklim usaha dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko BCAS khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan. Di sisi lain, kondisi likuiditas yang cukup ketat cenderung mendorong peningkatan biaya dana dan akhirnya menimbulkan tekanan pada imbal hasil yang diterima Bank.

Di tengah tantangan yang dihadapi, BCAS berkomitmen untuk terus mengupayakan pertumbuhan bisnis bank yang sehat dan berkelanjutan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva dengan cermat dan optimal dengan tetap menerapkan *prudential banking practice*. Hasilnya BCAS berhasil membukukan kinerja yang baik selama

tahun 2019 dan menunjukkan rata-rata pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan industri.

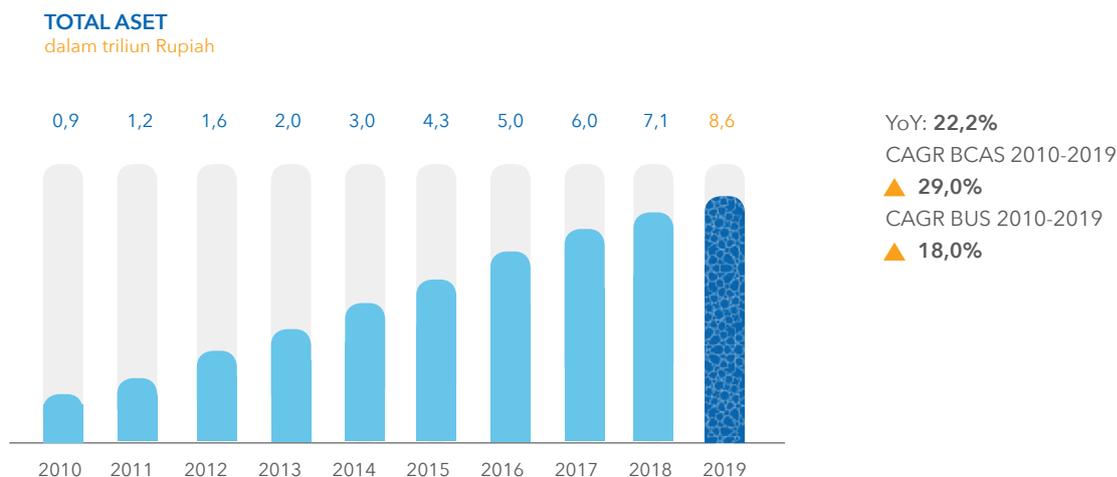
Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada tahun 2019, BCAS dapat mencatatkan posisi keuangan yang solid, didukung oleh portfolio aset yang sehat serta posisi permodalan dan likuiditas yang terjaga.

Aset

Sejak beroperasinya BCAS pada tahun 2010 hingga akhir tahun 2019, aset BCAS terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan aset BCAS 2010-2019 (CAGR) sebesar 29,0% berada di atas rata-rata pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 18,0%.



Posisi aset BCAS pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp8.634,4 miliar atau tumbuh 22,2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.064,0 miliar. Pertumbuhan ini di antaranya disebabkan pertumbuhan aset produktif yang memberikan kontribusi 92,5% dari total aset.

Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Aset	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Aset	Nominal	%
Aset produktif	7.990,3	92,5%	6.569,8	93,0%	1.420,5	21,6%
Penempatan pada bank lain	111,4	1,3%	11,3	0,2%	100,1	883,2%
Penempatan pada Bank Indonesia	1.266,5	14,7%	816,3	11,6%	450,2	55,2%
Reverse repo	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Surat berharga	966,9	11,2%	842,4	11,9%	124,5	14,8%
Pembiayaan	5.645,4	65,4%	4.899,7	69,4%	745,7	15,2%
Aset non produktif	644,1	7,5%	494,2	7,0%	149,9	30,3%
Kas	8,4	0,1%	3,9	0,1%	4,5	113,6%
Giro pada Bank Indonesia	271,3	3,1%	265,6	3,8%	5,6	2,1%
Aset tetap	147,8	1,7%	126,3	1,8%	21,5	17,1%
Aset pajak tangguhan	18,4	0,2%	13,3	0,2%	5,1	37,9%
Aset lain	354,3	4,1%	168,5	2,4%	185,8	110,3%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan	(156,1)	(1,8%)	(83,4)	(1,2%)	(72,6)	87,1%
Total aset	8.634,4	100,00%	7.064,0	100,0%	1.570,4	22,2%

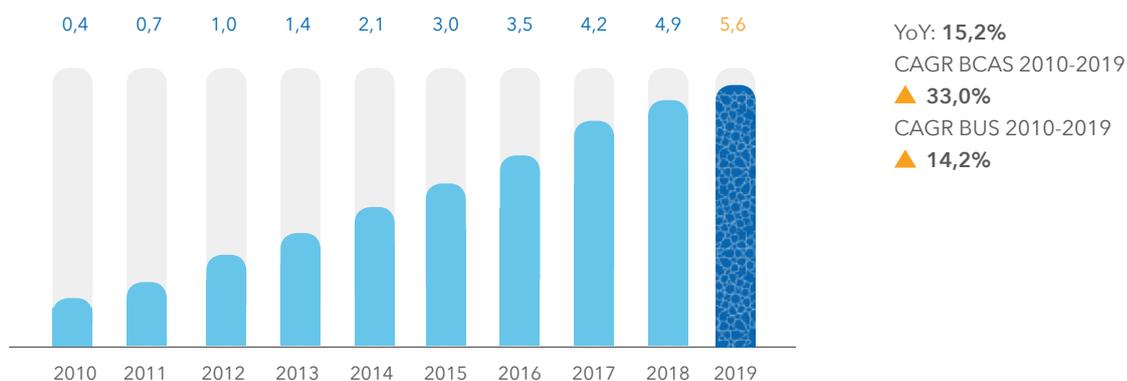
Aset produktif BCAS tercatat sebesar Rp7.990,3 miliar, meningkat sebesar 21,6% dengan pertumbuhan Rp1.420,5 miliar. Pertumbuhan ini sebagian besar dikontribusi dari pertumbuhan pada pembiayaan sebesar Rp745,7 miliar serta penempatan pada Bank Indonesia yang tumbuh sebesar Rp450,2 miliar dari tahun sebelumnya.

miliar tumbuh 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada Rp4.899,7 miliar. Sementara jika ditinjau sejak tahun 2010, pembiayaan BCAS terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan BCAS 2010-2019 (CAGR) sebesar 33,0% berada di atas rata-rata pertumbuhan pembiayaan BUS sebesar 14,2%.

Pembiayaan yang Disalurkan

Portofolio pembiayaan memberikan kontribusi sebesar 65,4% terhadap total aset BCAS di tahun 2019. Di akhir tahun 2019, pembiayaan tercatat mencapai Rp5.645,4

PEMBIAYAAN dalam triliun Rupiah



Portofolio pembiayaan BCAS mayoritas didominasi oleh pembiayaan pada sektor produktif yaitu segmen komersial dan UMKM. Porsi pembiayaan pada segmen komersial tercatat sebesar 76,6%, meningkat 16,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara porsi pembiayaan pada segmen UMKM tercatat sebesar 21,0% atau meningkat 17,2% dibanding tahun sebelumnya.

bisnis dan melakukan proses pengolahan pembiayaan. Hal ini dilakukan di antaranya dengan membentuk unit bisnis yang fokus pada pengembangan segmen UMKM, mengembangkan produk dan skema pembiayaan dengan skema *value chain financing* serta meningkatkan kompetensi dan memperhatikan kecukupan jumlah sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung penyediaan layanan pembiayaan UMKM.

Sebagai wujud komitmen BCAS untuk mengembangkan sektor UMKM, BCAS terus berupaya melakukan penguatan fungsi bisnis UMKM dalam menggali peluang

Segmen Pembiayaan	2019		2018		Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Pembiayaan	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Pembiayaan	Nominal	%
Komersial	4.323,9	76,6%	3.727,6	76,1%	596,3	16,0%
Konsumer	138,1	2,4%	162,3	3,3%	(24,2)	(14,9%)
UMKM:	1.183,4	21,0%	1.009,9	20,6%	173,5	17,2%
Menengah	817,3	14,5%	615,9	12,6%	201,4	32,7%
Kecil	40,3	0,7%	52,1	1,1%	(11,8)	(22,6%)
Mikro	325,7	5,8%	341,8	7,0%	(16,1)	(4,7%)
Total pembiayaan	5.645,4	100,0%	4.899,7	100,0%	745,7	18,3%

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan BCAS dilakukan secara terencana dan terukur di berbagai sektor yang potensial kepada nasabah yang memiliki rekam jejak baik. Dalam melakukan ekspansi pembiayaan, BCAS senantiasa berfokus pada upaya-upaya menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Upaya BCAS di antaranya meliputi:

- Peningkatan kualitas SDM yang terkait dengan proses pembiayaan mulai dari pelaksana fungsi pemasaran, fungsi inisiasi, fungsi pengolahan, fungsi pencairan dan administrasi hingga fungsi penyelesaian pembiayaan;

- Memastikan kecukupan kebijakan pembiayaan serta melakukan evaluasi secara berkala;
- Penyempurnaan dan simplifikasi alur proses dengan memanfaatkan teknologi untuk otomasi pada beberapa proses operasional

Hasilnya, dari total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp5.645,4 miliar, 94,6% berada pada kategori Lancar. Sementara itu, pembiayaan pada kategori Dalam Perhatian Khusus sebesar 4,8% dari total pembiayaan. Pembiayaan kategori NPF berhasil dikelola pada tingkat yang sehat yaitu 0,58% secara *gross* dan 0,26% secara *net*, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Uraian	2019		2018	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Pembiayaan	Miliar Rupiah	% Terhadap Pembiayaan
Performing financing	5.612,7	99,4%	4.882,7	99,7%
Lancar	5.339,8	94,6%	4.490,4	91,6%
Dalam Perhatian Khusus	272,9	4,8%	392,3	8,0%
Non Performing Financing	32,7	0,6%	17,0	0,3%
Kurang Lancar	7,2	0,13%	0,5	0,01%
Diragukan	0,2	0,00%	0,1	0,00%
Macet	25,3	0,45%	16,4	0,34%
Total Pembiayaan	5.645,4	100,0%	4.899,7	100,0%
Rasio NPF - Gross		0,58%		0,35%
Rasio NPF - Net		0,26%		0,28%

Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.266,5 miliar, meningkat 55,2% atau Rp450,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikontribusi oleh penempatan pada instrumen Fasbis yang meningkat sebesar Rp15,9 miliar, instrumen SBIS yang meningkat sebesar Rp140,0 miliar; dan instrumen Sukuk BI yang meningkat sebesar Rp294,3 miliar.

Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada Surat Berharga tahun 2019 mencapai Rp966,9 miliar, meningkat 14,8% atau Rp124,5 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp842,4 miliar. Hal tersebut dikontribusi dari peningkatan investasi syariah pada reksadana dan obligasi korporasi.

Kas

Posisi Kas pada akhir tahun 2019 berada pada posisi Rp8,4 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 113,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,9 miliar. Hal ini dilakukan untuk menjaga posisi kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan transaksi uang tunai nasabah dengan tetap memperhatikan posisi kas yang optimal.

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp271,3 miliar, tumbuh 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp265,6 miliar. Posisi Giro pada Bank Indonesia selalu dijaga agar berada di atas ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Pada akhir tahun 2019 posisi GWM BCAS tercatat sebesar 4,7%.

Liabilitas

Jumlah liabilitas BCAS per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp6.306,1 miliar, naik 8,7% atau Rp503,4

miliar dari jumlah liabilitas di tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp5.802,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan DPK yang memberikan kontribusi 98,4% terhadap total liabilitas Bank.

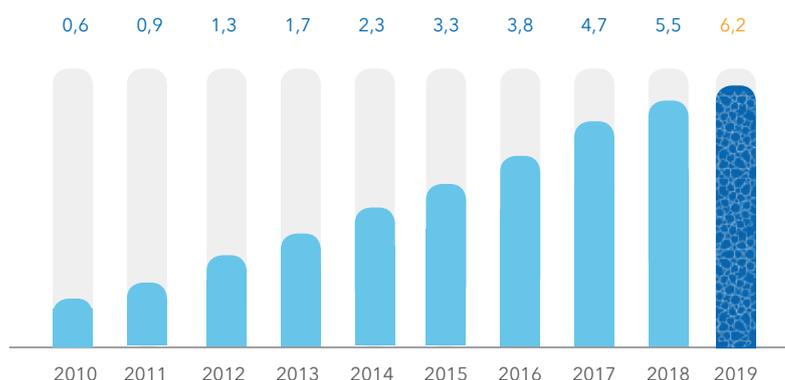
Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Liabilitas	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Liabilitas	Nominal	%
Dana Pihak Ketiga	6.204,9	98,4%	5.506,1	94,9%	698,8	12,7%
Giro	1.094,3	17,4%	492,2	8,5%	602,0	122,3%
Tabungan	657,3	10,4%	483,2	8,3%	174,1	36,0%
Deposito	4.453,4	70,6%	4.530,7	78,1%	(77,3)	(1,7%)
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	5,9	0,1%	192,7	3,3%	(186,9)	(97,0%)
Liabilitas <i>spot dan forward</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga diterbitkan	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan diterima	-	-	-	-	-	-
Setoran jaminan	0,2	0,0%	0,2	0,0%	(0,0)	(1,5%)
Liabilitas antar kantor	-	-	-	-	-	-
Kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	-	-
Kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	95,1	1,5%	103,6	1,8%	(8,6)	(8,3%)
Dana investasi <i>profit sharing</i>	-	-	-	-	-	-
Total liabilitas	6.306,1	100,0%	5.802,7	100,0%	503,4	8,7%

Dana Pihak Ketiga

Bank melakukan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat melalui berbagai produk yaitu giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Ditinjau sejak tahun 2010, DPK

BCAS tumbuh konsisten dengan rata-rata pertumbuhan 2010-2019 (CAGR) sebesar 30,7%, berada di atas rata-rata pertumbuhan DPK BUS sebesar 16,0%.

DANA PIHAK KETIGA dalam triliun Rupiah



YoY: 12,7%
 CAGR BCAS 2010-2019
 ▲ 30,7%
 CAGR BUS 2010-2019
 ▲ 16,0%

Pada tahun 2019, BCAS menghimpun DPK sebesar Rp6.204,9 miliar, tumbuh sebesar Rp698,8 miliar atau 12,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.506,1 miliar. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada produk Giro yang tercatat sebesar Rp1.094,3 miliar, tumbuh Rp602,0 miliar atau 122,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Produk tabungan tercatat sebesar Rp657,3 miliar, tumbuh Rp174,1 miliar atau 36,0%. Sementara produk deposito justru mengalami koreksi. Produk deposito tercatat sebesar Rp4.453,4 miliar, menurun sebesar Rp77,3 miliar atau 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan giro dan tabungan merupakan hasil dari upaya BCAS untuk memperbaiki portofolio CASA melalui berbagai aktivitas di antaranya penambahan *channel* transaksi perbankan elektronik untuk badan usaha yaitu Klik BCA Syariah Bisnis untuk meningkatkan aktivitas transaksi nasabah bisnis melalui BCAS, penyempurnaan fitur pada *channel* yang sudah ada, pemasaran produk tabungan secara kolektif melalui kerja sama dengan perusahaan serta berbagai upaya pemasaran melalui aktivitas *below the line*.

Ekuitas

Ekuitas BCAS posisi 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.328,3 miliar, meningkat Rp1.067,0 miliar atau 155,1% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya setoran modal dari PT. Bank Central Asia, Tbk sebesar Rp1.000,0 miliar serta perolehan laba. Total laba bersih BCAS di tahun 2019 adalah Rp67,2 miliar meningkat 15,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF

Pada tahun 2019, BCAS mampu menunjukkan kinerja pendapatan yang baik meski menghadapi kekhawatiran perekonomian yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan pada penyaluran pembiayaan diimbangi dengan pengelolaan aset produktif yang baik serta efisiensi operasional perusahaan. Hal ini menjadi salah satu faktor BCAS mampu membukukan pertumbuhan pendapatan usaha. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan usaha maka BCAS dapat mencatatkan pertumbuhan laba pada tahun berjalan.

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Nominal	%
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	621,5	522,6	98,9	18,9%
Pendapatan pembiayaan	509,2	450,5	58,6	13,0%
Pendapatan usaha utama lainnya	112,3	72,0	40,3	55,9%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(302,3)	(274,7)	(27,6)	10,0%
Hak bagi hasil milik bank	319,2	247,9	71,3	28,8%
Pendapatan usaha lainnya	53,2	19,6	33,6	171,0%
Beban usaha	(286,9)	(186,3)	(100,6)	54,0%
Laba sebelum pajak	85,4	81,2	4,3	5,3%
Pendapatan (beban) non usaha	(2,1)	(8,8)	6,6	(75,6%)
Laba usaha	83,3	72,4	10,9	15,1%
Zakat & manfaat (beban) pajak penghasilan	(16,1)	(14,0)	(2,1)	14,8%
Laba bersih	67,2	58,4	8,8	15,1%
Penghasilan komprehensif	(0,2)	66,9	(67,1)	(100,4%)
Laba komprehensif	67,0	125,2	(58,3)	(46,5%)
Laba per saham (dalam rupiah penuh)	33.659,0	58.583,8		

Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai *Mudharib*

Sepanjang tahun 2019, BCAS membukukan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* sebesar Rp621,5 miliar meningkat Rp98,9 miliar atau 18,9% dibandingkan periode tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp522,6 miliar. Peningkatan terbesar dikontribusi oleh peningkatan pendapatan pembiayaan.

Pendapatan Pembiayaan

Pada tahun 2019, pendapatan pembiayaan BCAS tercatat sebesar Rp509,2 miliar, meningkat sebesar 58,6 miliar atau 13,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan peningkatan pembiayaan yang tumbuh dengan *incremental* Rp745,7 miliar. Pendapatan

pembiayaan sebagian besar dikontribusi oleh pendapatan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp250,0 miliar yang mencatat porsi 49,1% dari pendapatan pembiayaan. Selanjutnya pendapatan pembiayaan dikontribusi oleh pendapatan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp184,4 miliar yang mencatat porsi 36,2% dari total pendapatan pembiayaan.

Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan pendapatan pembiayaan dengan akad *musyarakah* menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu Rp29,6 miliar atau tumbuh 13,4%. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada tahun 2019 yang meningkat 23,8%.

Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Pendapatan Pembiayaan	Miliar Rupiah	% Terhadap Pendapatan Pembiayaan	Nominal	%
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	184,4	36,2%	187,4	41,6%	(3,0)	(1,6%)
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>	38,2	7,5%	17,8	3,9%	20,4	114,5%
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	36,6	7,2%	25,0	5,5%	11,6	46,6%
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	250,0	49,1%	220,4	48,9%	29,6	13,4%
Total pendapatan pembiayaan	509,2	100,0%	450,5	100,0%	58,6	13,0%

Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Bank mencatatkan pendapatan usaha utama lainnya dari penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada Bank Syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.

Pendapatan usaha utama lainnya di tahun 2019 tercatat sejumlah Rp112,3 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp40,3 miliar atau 55,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank di mana Bank berupaya menempatkan dana pada instrumen yang lebih produktif seperti reksadana dan obligasi agar memberikan imbal hasil yang optimal namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Surat-surat berharga yang dimiliki oleh BCAS pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp966,3 miliar yang terdiri dari sukuk sebesar Rp361,1 miliar, reksadana sebesar Rp505,8 miliar dan SIMA sebesar Rp100,0 miliar.

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer pada 2019 tercatat sebesar Rp302,3 miliar, meningkat Rp27,6 miliar atau 10% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang wajar seiring dengan meningkatnya dana *syirkah* temporer yang diterima oleh Bank yang terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito berjangka *mudharabah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank.

Hak Bagi Hasil Milik Bank

Tahun 2019, BCAS membukukan Hak Bagi Hasil Milik Bank sebesar Rp319,2 miliar, meningkat Rp71,3 miliar atau 28,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan Hak Bagi Hasil Milik Bank tersebut sejalan dengan meningkatnya portofolio pembiayaan yang disalurkan dan portofolio investasi BCAS pada berbagai instrumen keuangan.

Beban Usaha

Beban usaha tercatat sebesar Rp286,9 miliar, meningkat Rp100,6 miliar atau 54,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan beban usaha terjadi karena adanya pencadangan kerugian atas aset produktif sebagai bagian dari strategi Bank dalam mengelola kualitas aset, kenaikan beban bonus atas simpanan dengan akad *wadiah*, serta kenaikan berkala atas kegiatan operasional Bank seiring dengan adanya penambahan jumlah cabang.

Laba Usaha

Ditinjau dari sejak beroperasinya BCAS di tahun 2010, BCAS menunjukkan pertumbuhan laba usaha yang berkesinambungan dengan rata-rata pertumbuhan 2010-2019 (CAGR) tercatat 33,3%, berada di atas rata-rata pertumbuhan laba usaha BUS yang tercatat 20,4%. Pada posisi tahun 2019, BCAS membukukan laba usaha sebesar Rp83,3 miliar, meningkat Rp10,9 miliar atau 15,1% dari tahun sebelumnya.

LABA USAHA

dalam miliar Rupiah



Laba Bersih

Sejalan dengan pertumbuhan laba usaha, laba bersih turut mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019 laba bersih tercatat sebesar Rp67,2 miliar, meningkat Rp8,8 miliar atau 15,1% dari tahun sebelumnya.

Laba Bersih Per Saham

Sebagai bentuk komitmen PT Bank Central Asia, Tbk sebagai entitas induk terhadap pertumbuhan bisnis BCAS maka BCA menempatkan tambahan modal Rp1.000,0 miliar pada semester kedua tahun 2019. Hal ini berdampak pada realisasi laba bersih per saham di tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp33.659,0, sementara

realisasi laba bersih per saham tahun sebelumnya sebesar Rp58.583,8.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas BCAS posisi 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.328,3 miliar, meningkat Rp1.067,0 miliar atau 155,1% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya setoran modal dari PT. Bank Central Asia, Tbk, perolehan laba, serta pendapatan komprehensif lain.

Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Ekuitas	Miliar Rupiah	% Terhadap Total Ekuitas	Nominal	%
Modal disetor	1.996,3	85,7%	996,3	79,0%	1.000,0	100,4%
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-	-
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	53,7	2,3%	53,9	4,3%	(0,2)	(0,4%)
Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	-
Ekuitas lainnya	-	-	-	-	-	-
Cadangan	8,0	0,3%	6,5	0,5%	1,5	23,1%
Laba (rugi)	270,3	11,6%	204,6	16,2%	65,7	32,1%
Laba (rugi) tahun-tahun lalu	203,1	8,7%	146,2	11,6%	56,9	38,9%
Laba (rugi) tahun berjalan	67,2	2,9%	58,4	4,6%	8,8	15,1%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	67,2	2,9%	58,4	4,6%	8,8	15,1%
Keperentingan non pengendali (<i>minority interest</i>)	-	-	-	-	-	-
Total ekuitas	2.328,3	100,0%	1.261,3	100,0%	1.067,0	155,1%

LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain,

penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal perolehan.

Pada tahun 2019 BCAS memiliki posisi Kas dan Setara Kas sebesar Rp360,6 miliar, meningkat Rp79,7 miliar atau 128,4% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp280,9 miliar. Komponen-komponen utama arus kas dijelaskan dalam ringkasan berikut ini:

Uraian	2019	2018
	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah
Arus kas dari aktivitas operasi	(790,7)	(129,3)
Arus kas dari aktivitas investasi	(129,7)	13,1
Arus kas dari aktivitas pendanaan	1.000,0	-
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	79,7	(116,2)
Kas dan setara kas awal tahun	280,9	397,1
Kas dan setara kas akhir tahun	360,6	280,9

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp790,7 miliar, sementara pada tahun 2018 sebesar Rp129,3 miliar. Arus kas masuk untuk aktivitas operasi di antaranya berasal dari penerimaan pendapatan sebagai *mudharib* sebesar Rp649,7 miliar dan dana simpanan nasabah sebesar Rp512,0 miliar. Sementara arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama berasal dari penyaluran pembiayaan

sebesar Rp782,2 miliar, penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp450,0 miliar, serta pembayaran bagi hasil sebesar Rp293,0 miliar. Secara keseluruhan lebih besarnya arus kas keluar untuk aktivitas operasi disebabkan adanya peningkatan pengeluaran kas untuk penyaluran pembiayaan serta upaya penempatan dana BCAS pada pos yang lebih produktif dan memberikan imbal hasil optimal seperti penempatan pada Bank Indonesia.

Uraian	2019 Miliar Rupiah	2018 Miliar Rupiah
Arus kas masuk penerimaan pendapatan sebagai <i>mudharib</i>	649,7	573,9
Arus kas masuk dari dana simpanan nasabah	512,0	959,9
Arus kas keluar untuk penempatan pada Bank Indonesia	450,0	389,7
Arus kas keluar untuk penyaluran pembiayaan	782,2	739,8
Arus kas keluar untuk beban operasional	178,8	140,1
Arus kas keluar untuk pembayaran bagi hasil	293,0	270,2

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi selama tahun 2019 tercatat sebagai arus kas keluar sebesar Rp129,7 miliar, sementara pada tahun 2018 arus kas untuk aktivitas investasi tercatat sebagai arus kas masuk Rp13,1 miliar. Lebih besarnya arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun 2019 terutama berasal dari adanya pengeluaran kas untuk pembelian surat berharga sebesar Rp263,0 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan selama tahun 2019 tercatat sebagai arus kas masuk sebesar Rp1.000,0 miliar, sementara pada tahun 2018 tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari kas masuk setoran modal dari PT Bank Central Asia, Tbk.

LAPORAN RASIO KEUANGAN

Rasio-rasio keuangan utama ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Rasio Keuangan (%)	2019	2018
Permodalan		
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR)	38,3%	24,3%
Aktiva tetap terhadap modal	7,4%	12,7%
Kualitas aset		
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,8%	0,4%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,4%	0,3%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0,4%	1,3%
NPF <i>gross</i>	0,58%	0,35%
NPF <i>net</i>	0,26%	0,28%
Profitabilitas		
<i>Return on Asset</i> (ROA)	1,2%	1,2%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	4,0%	5,0%
Net Imbalan (NI)	4,3%	4,4%
<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	1,2%	1,2%
Rasio efisiensi biaya (BOPO)	87,6%	87,4%
Likuiditas		
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	62,0%	54,6%
Rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR)	91,0%	89,0%

Rasio Keuangan (%)	2019	2018
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran BMPD		
a.1. Pihak Terkait	0,0%	0,0%
a.2. Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%
Persentase pelampauan BMPD		
b.1. Pihak terkait	0,0%	0,0%
b.2. Pihak tidak terkait	0,0%	0,0%
GWM		
GWM Rupiah	4,7%	5,2%
GWM Valuta Asinng	0,0%	0,0%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,0%	0,0%

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

BCAS memiliki posisi keuangan dan kemampuan membayar utang yang baik, tercermin dari tingkat solvabilitas, likuiditas, serta rentabilitas.

Solvabilitas

BCAS mengukur solvabilitas melalui rasio kecukupan modal. BCAS memastikan Bank memiliki kecukupan modal yang memadai dalam memenuhi risiko kredit, pasar dan operasional. Pada tahun 2019, Rasio Kecukupan Modal Bank (CAR) tercatat sebesar 38,3% mengalami peningkatan dibandingkan posisi CAR pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,3%. Hal ini seiring dengan penambahan modal yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia, Tbk. CAR BCAS masih berada di atas persyaratan minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan oleh Regulator yaitu 8% yang mencerminkan posisi permodalan yang solid untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional serta memadai untuk menopang Bank dalam melakukan pengembangan

portofolio pembiayaan serta ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Likuiditas

Dari sisi likuiditas, BCAS melakukan pengukuran menggunakan rasio FDR serta *secondary reserve*. Pengelolaan likuiditas Bank dengan baik merupakan hal yang sangat penting yang mencakup struktur pendanaan, aset likuid, komitmen pemberian pembiayaan kepada debitur dan kewajiban segera. BCAS mengelola posisi likuiditas yang solid, tercermin dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio - FDR*) sebesar 91,0% yang mencerminkan keseimbangan yang optimal antara aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana.

Dalam pengelolaan likuiditas, Bank mempersiapkan *secondary reserve* sebesar Rp1.562,7 miliar pada akhir tahun 2019, meningkat Rp511,1 miliar atau 48,6% dibandingkan tahun sebelumnya. *Secondary reserve* Bank sebagian besar dalam bentuk FASBIS yang menempati porsi 42,4% dari total *secondary reserve* yang dibentuk pada tahun 2019.

Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	% Terhadap Jumlah Secondary Reserve	Miliar Rupiah	% Terhadap Jumlah Secondary Reserve	Nominal	%
FASBIS	662,2	42,4%	646,3	61,5%	15,9	102,5%
Interbank Placement	211,4	13,5%	151,3	14,4%	60,1	139,7%
SBIS	310,0	19,8%	170,0	16,2%	140,0	182,4%
SBSN	84,8	5,4%	83,9	8,0%	0,8	101,0%
Sukuk BI	294,3	18,8%	0,0	0,0%	294,3	100,0%
Jumlah Secondary Reserves	1.562,7	100,0%	1.051,6	100,0%	511,1	48,6%

Rentabilitas

Kinerja rentabilitas BCAS dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio antara lain *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Imbalan* (NI/ekuivalen dengan NIM) dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Return on Assets (ROA) adalah rasio rentabilitas yang mengukur tingkat kemampuan Bank dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Pada 2019, BCAS mencatatkan ROA sebesar 1,2% relatif stabil dari tahun sebelumnya.

Return on Equity (ROE) adalah rasio rentabilitas yang mengukur tingkat kemampuan Bank dalam mengelola modal sendiri yang berasal dari hasil investasi pemegang saham untuk menghasilkan laba. Di tahun 2019, ROE BCAS tercatat sebesar 4,0% atau mengalami koreksi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,0%. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal pada tahun 2019 dari PT Bank Central Asia, Tbk.

Net Imbalan (NI) BCAS mengalami sedikit koreksi dari 4,4% pada 2018 menjadi 4,3% pada 2019. Hal ini seiring dengan tren likuiditas yang semakin ketat di industri perbankan nasional mendorong biaya dana meningkat sehingga berdampak pada imbalan bersih yang diterima oleh Bank.

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BCAS sedikit mengalami peningkatan dari 87,4% pada tahun 2018 menjadi 87,6% di tahun 2019. Peningkatan BOPO terjadi karena tren meningkatnya biaya dana akibat kondisi ketatnya likuiditas yang dialami industri perbankan nasional.

Kolektibilitas Piutang

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* tahun 2019 tetap dapat dipertahankan pada level yang sehat yaitu 0,58%. Sementara NPF *Net* tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,26% pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar 0,28% pada tahun 2018. Baik NPF *Gross* maupun NPF *Net* menunjukkan kualitas portofolio pembiayaan Bank yang rendah dan sehat. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi Bank dalam pengelolaan risiko, penerapan prinsip kehati-

hatian dengan baik sejak awal akuisisi pembiayaan, pemeliharaan pembiayaan yang selalu mengedepankan kualitas kemitraan, hingga penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif.

Kepatuhan

Aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku maupun ketentuan perundang-undangan selalu menjadi perhatian BCAS. BCAS melakukan pengukuran kepatuhan Bank terhadap ketentuan melalui indikator Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Posisi Devisa Netto (PDN).

Sepanjang tahun 2019, BCAS telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini tercermin di antaranya dari tidak terjadinya pelanggaran dan pelampauan **Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**.

Posisi Giro BCAS pada Bank Indonesia selalu dijaga agar berada di atas ketentuan **Giro Wajib Minimum (GWM)** yang berlaku. Pada akhir tahun 2019 posisi GWM BCAS tercatat sebesar 4,7%.

Sementara untuk indikator **Posisi Devisa Netto (PDN)**, BCAS belum melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing sehingga tidak tersedia informasi terkait PDN.



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

dalam jutaan Rupiah

POS - POS		INDIVIDUAL	
		31 Des 2019	31 Des 2018
I	Tagihan Komitmen		
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta asing	-	-
	2. Posisi pembelian <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang masih berjalan	-	-
	3. Lainnya	-	-
II	Kewajiban Komitmen	943.045	952.149
	1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. <i>Committed</i>		
	i. Rupiah	102.912	27.355
	ii. Valuta asing	-	-
	b. <i>Uncommitted</i>		
	i. Rupiah	840.133	924.794
	ii. Valuta asing	-	-
	2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	-	-
	a. <i>Committed</i>		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta asing	-	-
	b. <i>Uncommitted</i>		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta asing	-	-
	3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan		
	a. L/C luar negeri	-	-
	b. L/C dalam negeri	-	-
	4. Posisi penjualan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang masih berjalan	-	-
	5. Lainnya	-	-
III	Tagihan Kontinjensi	32.512	31.153
	1. Garansi yang diterima		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta asing	-	-
	2. Pendapatan dalam penyelesaian		
	a. <i>Murabahah</i>	9.182	7.595
	b. <i>Istishna'</i>	-	-
	c. Sewa	2.781	3.009
	d. Bagi Hasil	-	-
	e. Lainnya	20.347	20.347
	3. Lainnya	202	202
IV	Kewajiban Kontinjensi	31.093	28.169
	1. Garansi yang diberikan		
	a. Rupiah	31.093	28.169
	b. Valuta asing	-	-
	2. Lainnya	-	-

INFORMASI KINERJA KEUANGAN LAIN

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

dalam jutaan Rupiah

KOMPONEN MODAL	31 Des 2019	31 Des 2018
	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
I. Modal Inti (Tier 1)	2.311.469	1.240.447
1. Modal Inti Utama (CET 1)	2.311.469	1.240.447
1.1. Modal disetor (setelah dikurangi saham <i>treasury</i>)	1.996.300	996.300
1.2. Cadangan Tambahan Modal	334.399	259.019
1.2.1 Faktor Penambah	334.399	265.900
1.2.1.1 Penghasilan Komperensif Lain	56.115	54.811
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	8.162	6.858
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	47.953	47.953
1.2.1.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	278.284	211.089
1.2.1.2.1 Agio saham biasa	-	-
1.2.1.2.2 Cadangan Umum	8.000	6.500
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	203.090	146.222
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	67.194	58.367
1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-
1.2.1.2.6 Modal sumbangan	-	-
1.2.1.2.7 Waran yg diterbitkan	-	-
1.2.1.2.8 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	-	-
1.2.2 Faktor Pengurang	-	6.881
1.2.2.1 Penghasilan Komperensif Lain	-	-
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-
1.2.2.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	-	6.881
1.2.2.2.1 Disagio saham biasa	-	-
1.2.2.2.2 Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-
1.2.2.2.4 Selisih Kurang antara Penyisihan penghapusan aset (PPA) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	-	-
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	-	-
1.2.2.2.6 PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk	-	6.881
1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
1.4 Faktor pengurang modal utama	19.230	14.872
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	18.369	13.316
1.4.2 <i>Goodwill</i>	-	-
1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	861	1.556
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-

KOMPONEN MODAL	31 Des 2019	31 Des 2018
	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya	-	-
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
2. Modal Inti Tambahan / <i>Additional Tier</i> (AT-1)	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
2.2. Agio (disagio) (+/-)	-	-
2.3. Faktor pengurang modal inti tambahan	-	-
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
II. Modal Pelengkap (Tier 2)	56.254	45.433
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	-	-
2. Agio (disagio) (+/-)	-	-
3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1.25% ATMR resiko kredit)	56.254	45.433
4. Cadangan tujuan	-	-
5. Faktor pengurang modal pelengkap	-	-
5.1. <i>Sinking Fund</i>	-	-
5.2. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-
Total Modal	2.367.724	1.285.880
Aset Tertimbang Menurut Risiko		
ATMR resiko kredit	5.729.159	4.912.793
ATMR resiko pasar	-	-
ATMR resiko operasional	456.908	385.907
Total ATMR	6.186.067	5.298.700
Rasio KPMM sesuai profil risiko (%)		
Alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko	8	8
Dari CET1 (%)	4,50	4,50
Dari AT1 (%)	-	-
Dari Tier 2 (%)	0,91	0,86
Rasio KPMM		
Rasio CET1 (%)	37,37	23,41
Rasio Tier 1 (%)	37,37	23,41
Rasio Tier 2 (%)	0,91	0,86
Rasio KPMM (%)	38,28	24,27
CET 1 untuk <i>buffer</i> (%)	32,87	18,91
Prosentase <i>buffer</i> yang wajib dipenuhi oleh bank (%)		
<i>Capital conservation buffer</i> (%)	-	-
<i>Countercyclical buffer</i> (%)	-	-
<i>Capital surcharge</i> untuk bank sistemik (%)	-	-

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Kerugian

Sebagai bagian dari upaya Bank dalam pengelolaan risiko, BCAS senantiasa melakukan pembentukan beban CKPN yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi kualitas aset keuangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan atas adanya risiko kredit akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

Tahun 2019 BCAS melakukan pembentukan CKPN sebesar Rp156,1 miliar dengan PPAP Wajib Dibentuk sebesar Rp70,6 miliar. CKPN yang dibentuk BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai untuk mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan yang disalurkan.

dalam jutaan Rupiah

No.	Pos-pos	2019				2018			
		CKPN		PPAP Wajib Dibentuk		CKPN		PPAP Wajib Dibentuk	
		Individual	Kolektif	Khusus	Umum	Individual	Kolektif	Khusus	Umum
1.	Penempatan pada bank lain	-	1.114	-	1.114	-	113	-	113
2.	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga dimiliki	-	8.822	-	8.822	-	7.585	-	7.585
4.	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Piutang <i>Murabahah</i>	4.350	31.162	3.204	15.048	-	27.529	2.161	16.006
6.	Piutang <i>Istishna'</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Piutang <i>Qardh</i>	-	139	-	139	-	5	-	5
8.	Piutang Sewa	17	-	3	-	365	-	-	-
9.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-	4.907	-	4.907	-	6.510	-	2.426
10.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	79.332	26.224	11.147	26.224	18.489	22.834	8.721	19.298
11.	Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-

Transaksi Spot dan Forward

BCAS belum melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing sehingga tidak tersedia informasi terkait transaksi *Spot* dan *Forward*.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

dalam jutaan Rupiah

Indikator	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagikan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
			A	B	C
A. Pembiayaan					
1. Bank					
2. Non Bank	5.460.615	47.965			
B. Penghimpunan Dana					
1. Giro Wadiah					
a. Bank	4.349	51	-	1	0,28%
b. Non Bank	938.823	10.952		379	0,48%
2. Giro Mudharabah					
a. Bank					
b. Non Bank					
3. Tabungan Wadiah					
a. Bank	-	-			
b. Non Bank	221.223	2.581		110	0,60%
4. Tabungan Mudharabah					
a. Bank	-	-			
b. Non Bank	382.787	4.466	7,50	335	1,05%
5. Deposito Mudharabah					
a. Bank					
- 1 Bulan	3.419	40	38	15	5,32%
- 3 Bulan	-	-	-	-	
- 6 Bulan	-	-	-	-	
- 12 Bulan	-	-	-	-	
b. Non Bank					
- 1 Bulan	3.871.007	45.159	38	17.160	5,32%
- 3 Bulan	514.489	6.002	38	2.281	5,32%
- 6 Bulan	168.849	1.970	38	749	5,32%
- 12 Bulan	42.686	498	38	189	5,32%
Total	6.147.632	71.719		21.219	

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

dalam jutaan Rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Saldo awal dana zakat	68	56
2	Dana zakat yang berasal dari		
	a. Internal BUS	-	-
	b. Eksternal BUS	74	68
3	Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat		
	a. Lembaga Amil Zakat	67	56
	b. Badan Amil Zakat	-	-
4	Kenaikan (penurunan) dana zakat	7	12
5	Saldo akhir dana zakat	75	68

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

dalam jutaan Rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Sumber dana kebajikan pada awal periode	1.521	1.749
2	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	5
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif		-
	d. Denda	283	378
	e. Penerimaan non halal	46	27
	f. Lainnya	-	-
	Total penerimaan	329	410
3	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	632	638
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total penggunaan	632	638
4	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(303)	(228)
5	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	1.218	1.521

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Sampai dengan tahun 2019, BCAS tidak memiliki dana investasi terikat sehingga tidak terdapat informasi mengenai laporan perubahan dana investasi terikat.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019 SERTA PROYEKSI TAHUN 2020

BCAS telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berisikan target yang ingin dicapai beserta rencana strategi perusahaan. RBB ini menjadi pedoman bagi Bank untuk mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan, memacu produktivitas dan kinerjanya di tahun berjalan.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DAN REALISASI TARGET 2019

Perkembangan ekonomi nasional dan sektor perbankan kian dinamis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bank. Bank harus tetap adaptif dengan perubahan, mencermati peluang pertumbuhan dan di saat yang sama mengelola risiko yang ada. Strategi utama Bank yang telah dirumuskan diimplementasikan secara konsisten demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan Jaringan dan Ragam Layanan

Fokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric*) menjadi salah satu fokus utama Bank dalam mengimplementasi kebijakan strategis. Perluasan jaringan yang *multi-channel* terus dilakukan untuk menuju kepada *omni-channel* dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasabah saat ini dan di masa yang akan datang. Pada tahun 2019, BCAS telah memperluas wilayah operasional ke kota Banda Aceh. Menyusul adanya *qanun* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, masyarakat kota setempat khususnya nasabah BCA tentunya membutuhkan alternatif solusi perbankan syariah. Untuk itu, BCAS hadir dengan strategi kolaborasi dengan BCA sebagai entitas induk untuk memberikan edukasi perbankan syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah atas produk dan transaksi perbankan syariah.

Channel perbankan elektronik juga tidak luput dari perhatian BCAS. Pengembangan difokuskan pada penambahan solusi untuk kebutuhan nasabah seperti diluncurkannya *internet banking* untuk nasabah badan usaha yaitu Klik BCA Syariah Bisnis, menyusul Klik BCA Syariah untuk individu yang telah diluncurkan pada tahun sebelumnya, serta penambahan fitur pada *channel* yang sudah ada. Sejalan dengan terus meningkatnya frekuensi transaksi nasabah melalui *channel* perbankan elektronik, penguatan infrastruktur untuk menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah juga menjadi fokus pengembangan. Per akhir tahun 2019, transaksi pada BCA Syariah *Mobile* dan Klik BCA Syariah tumbuh pesat, masing-masing tumbuh 81,9% dan 133,0%.

Kebutuhan nasabah baik nasabah badan usaha maupun perorangan terus berkembang. Kompleksitasnya pun makin meningkat. Hal ini disebabkan, nasabah membutuhkan solusi atas kebutuhan yang makin spesifik. Didukung dengan organisasi yang *agile* dan adaptif terhadap perubahan, BCAS selalu berupaya menyediakan ragam layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan per nasabah (*tailor made*).

Pertumbuhan Portofolio Pembiayaan yang Sehat

Pembiayaan BCAS di tahun 2019 mencapai Rp5.645,4 miliar dengan kontribusi utama dari pembiayaan produktif. Melakukan ekspansi bisnis khususnya penyaluran pembiayaan menjadi tantangan tersendiri bagi Bank mengingat iklim usaha di dalam negeri cukup terdampak dengan adanya kondisi ketidakpastian dan pelambatan perekonomian global. Dengan didukung kebijakan terkait pembiayaan yang memadai, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, serta infrastruktur operasional pembiayaan maka target penyaluran pembiayaan dapat tercapai.

Pengelolaan risiko dan prinsip kehati-hatian selalu menjadi perhatian utama untuk mencapai pertumbuhan pembiayaan dan menjaga kualitasnya tetap sehat. Antisipasi dan konsistensi menjadi kata kunci. Mencermati perkembangan perekonomian baik di tingkat global maupun nasional harus dilakukan secara konsisten, baik pada saat kondisi ekonomi sedang melambat maupun bertumbuh. Melakukan langkah-langkah antisipatif penanganan pembiayaan juga terus dilakukan terhadap seluruh nasabah baik nasabah dengan kualitas pembayaran yang baik maupun berisiko. Upaya-upaya ini terbukti memberikan hasil yang positif di mana *Loan at Risk* (LaR) BCAS terjaga pada level 5,81% lebih rendah dari LaR BUS yang berada pada level 18,12%.

Kolaborasi dengan Mitra

BCAS memahami bahwa demi memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin luas dan kompleks tidak dapat dilakukan sendiri. Kolaborasi dengan Grup BCA serta para mitra lainnya menjadi solusinya. Apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, kebutuhan nasabah semakin mengarah pada produk, layanan dan transaksi digital. Untuk itu, pada tahun 2019 BCAS menggandeng mitra-mitra terpercaya untuk melakukan pemasaran dan akuisisi nasabah melalui berbagai kanal digital.

Berkat implementasi strategi bisnis yang konsisten sepanjang tahun 2019, kinerja BCAS secara keseluruhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan Bank. Pada akhir tahun 2019, aset tumbuh 22,2% mencapai Rp8.634,4 miliar, melebihi kisaran target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu 10,0-12,0%. Pembiayaan ditargetkan tumbuh 10,0-15,0%, dan realisasinya BCAS tumbuh di atas kisaran target yaitu sebesar 15,2% atau mencapai Rp5.645,4 miliar. Sementara DPK tumbuh

dalam kisaran target yang ditetapkan yaitu 10,0-15,0% dengan mencapai pertumbuhan 12,7% atau menjadi sebesar Rp6.204,9 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan dan DPK, laba bersih setelah pajak juga menunjukkan kinerja yang optimal dengan membukukan pertumbuhan 15,1% menjadi Rp67,2 miliar, sedikit melampaui target yaitu pada kisaran 10,0%-15,0%.

Uraian	Target	Pencapaian
Pertumbuhan Aset	10,0% - 12,0%	22,2%
Pertumbuhan Pembiayaan	10,0% - 15,0%	15,2%
Pertumbuhan DPK	10,0% - 15,0%	12,7%
Pertumbuhan Laba Bersih Setelah Pajak	10,0% - 15,0%	15,1%

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DAN PENETAPAN TARGET 2020

Kondisi perekonomian global yang masih melambat dan diliputi ketidakpastian turut berdampak pada kondisi dunia usaha di Indonesia. Hal ini mendorong Bank untuk semakin konsisten dalam mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis, menentukan asumsi pertumbuhan dan penetapan target di tahun mendatang.

Selaras dengan Visi dan Misi Bank, dalam proses pengembangan bisnis ke depan, Bank tetap menerapkan prinsip *customer partnership* di mana Bank secara *prudent* akan terus memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif bagi nasabah bisnis maupun perseorangan. Bank senantiasa melakukan perbaikan dari sisi proses maupun infrastruktur yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan pasar, serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna menunjang rencana pertumbuhan bisnis ke depan dengan tetap mengutamakan layanan kepada nasabah individual retail banking untuk segmen *affluent* dan *mass market*, dan nasabah *business banking* untuk segmen UMKM dan Non UMKM.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank pada tahun 2020:

1. Pengembangan *Delivery Channels*

Bank terus melakukan penambahan jaringan kantor untuk memperluas jangkauan layanan baik melalui pembukaan jaringan secara organik, secara in-organik maupun dengan model bisnis Layanan Syariah Bank (LSB) berkolaborasi dengan BCA sebagai entitas induk.

Penambahan *alternative channel* berupa perbankan elektronik serta penyempurnaan fitur-fitur pada *channel* yang sudah ada tidak luput dari perhatian BCAS di tahun mendatang. Hal ini dilakukan dengan harapan memberikan *customer experience* yang baik bagi nasabah serta mengimbangi perkembangan teknologi yang kian pesat.

2. Pengembangan Bisnis Baru dan Layanan

Keragaman produk, layanan dan fasilitas pembayaran adalah salah satu pertimbangan nasabah dalam memilih Bank. Untuk itu Bank senantiasa berupaya untuk melakukan pengembangan bisnis baru melalui penambahan ragam produk maupun layanan.

3. Penambahan Aktivitas Baru
Menjalin kerja sama dengan mitra strategis menjadi salah satu strategi untuk menangkap peluang pertumbuhan. Untuk itu, Bank akan terus menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dengan konsep kerja sama *business to business* untuk menyediakan solusi perbankan syariah bagi nasabah.
 4. Pengembangan Pembiayaan UMKM
Sejalan dengan komitmen BCAS dalam mengembangkan segmen UMKM serta sebagai bentuk pemenuhan BCAS terhadap ketentuan portofolio UMKM dari Regulator, BCAS terus berupaya meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, penguatan infrastruktur maupun SDM.
 5. Sinergi Bisnis dengan BCA (Grup BCA)
Sebagai bagian dari Grup BCA, Bank selalu berupaya untuk melengkapi produk/fasilitas yang telah ada di perusahaan Grup dengan produk dan layanan keuangan berbasis syariah dengan harapan dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi yang signifikan bagi Grup BCA secara keseluruhan.
 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Sumber Daya Manusia, infrastruktur serta sarana penunjang lainnya.
 7. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dan menerapkan manajemen risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Dalam menyusun proyeksi tahun 2020, BCAS menggunakan asumsi di antaranya proyeksi pertumbuhan kredit dan DPK dari Regulator dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian baik domestik maupun dunia secara keseluruhan. Berdasarkan asumsi yang digunakan serta dengan telah dirumuskannya langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank pada tahun 2020, BCAS menyusun target untuk tahun mendatang. Pada akhir tahun 2019, BCAS menetapkan target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020 khususnya pada indikator keuangan utama sebagai berikut:
1. Pertumbuhan aset sebesar 8% - 10%
 2. Pertumbuhan pembiayaan sebesar 10% - 15%
 3. Pertumbuhan DPK sebesar 10% - 15%
 4. Pertumbuhan laba bersih sebesar 10% - 15%

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

BCAS meyakini bahwa permodalan yang kuat menjadi salah satu fondasi bagi keberlangsungan usaha dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan permodalan BCAS dilakukan berdasarkan kebutuhan kecukupan permodalan yang mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, pertumbuhan bisnis saat ini, dan mengantisipasi pertumbuhan bisnis mendatang. Bank juga memastikan bahwa struktur permodalan yang dimiliki telah optimal serta berada pada tingkat yang sehat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Regulator.

Rencana permodalan telah disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga senantiasa memastikan

bahwa penyediaan modal minimum yang dimiliki sesuai dengan profil risiko dan dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur permodalan BCAS pada posisi akhir tahun 2019 tercatat senilai Rp2.328,3 miliar yang terdiri dari modal disetor, laba ditahan serta cadangan-cadangan lainnya. Permodalan BCAS meningkat sebesar Rp1.067,0 miliar atau 155,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio kecukupan modal Bank pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 38,3% berada di atas ketentuan Regulator sebesar 8%.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2019, Bank tidak menjalin ikatan apa pun yang bersifat material untuk investasi barang modal sehingga tidak terdapat informasi mengenai;

- i. Nama pihak yang melakukan ikatan;
- ii. Tujuan dari ikatan;
- iii. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;

- iv. Mata uang yang menjadi denominasi;
- v. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

INVESTASI BARANG MODAL

Belanja modal BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	%
Tanah	22,8	0,0	22,8	-
Bangunan	1,6	33,9	(32,3)	(95,4%)
Inventaris	6,1	16,9	(10,8)	(63,9%)
Kendaraan bermotor	0,4	0,1	0,3	528,0%
Jumlah investasi	30,8	50,8	(20,0)	(39,4%)

BCAS melakukan investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) yang merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap. Pada tahun 2019, investasi barang modal BCAS mencapai Rp30,8

miliar yang bertujuan mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan Bank secara menyeluruh. Peningkatan terbesar terjadi pada investasi atas tanah dan bangunan senilai Rp24,3 miliar.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan yang

mempengaruhi BCAS, selain sebagaimana yang diungkap dalam Laporan Keuangan terlampir.

KEBIJAKAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dalam menentukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, Bank mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya mengatur bahwa:

- Pembagian dividen tunai dapat dilakukan apabila Bank membukukan laba bersih, dengan memperhatikan kondisi dan rencana pengembangan Bank;
- Keputusan mengenai besaran dan pelaksanaan dividen ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Direksi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
- Dalam kebijakannya, Direksi dapat memutuskan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan menyalurkan laba yang diperoleh untuk tahun buku sebagai dana cadangan maupun laba ditahan.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Sebagaimana ditetapkan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 6 Maret 2019, Bank tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 sehingga tidak terdapat informasi mengenai (i) Total dividen yang dibagikan; (ii) Jumlah dividen kas per saham; (iii) *Payout ratio*; (iv) Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Dari laba bersih sebesar Rp58,4 miliar, Rp1,5 miliar disisihkan sebagai dana cadangan, sementara sisa dari laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Bank sampai saat ini tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) dikarenakan status Bank yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan sahamnya tidak diperjualbelikan kepada publik sehingga tidak terdapat informasi mengenai:

- i. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;
- ii. Jangka waktu;
- iii. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; serta
- iv. Harga *exercise*.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga akhir tahun buku 2019, BCAS belum pernah melakukan penawaran umum atas sahamnya, sehingga tidak ada informasi mengenai:

- i. Total perolehan dana;
- ii. Rencana penggunaan dana;
- iii. Rincian penggunaan dana;
- iv. Saldo dana; dan
- v. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

INFORMASI MATERIAL

Tidak terdapat informasi material yang berkenaan dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/

peleburan, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang dilakukan oleh BCAS di 2019.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - iii. personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.

- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
- entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
 - entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Transaksi dilakukan dalam rangka menjalankan bisnis normal sebagai Bank dan memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain adalah giro pada bank lain, simpanan dari bank lain, dan simpanan nasabah. Pada tahun 2019, persentase transaksi Bank kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset adalah 4,7%.

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dan Transaksi
PT Anarawata Puspa Utama	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Asuransi Umum BCA	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Asuransi Jiwa BCA	Dimiliki oleh pemegang saham Akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Bank Central Asia Tbk	Pemegang saham	Pemegang saham, giro pada bank lain, simpanan dari bank lain dan beban usaha
PT BCA Finance	Pemegang saham	Pemegang saham
PT BCA Sekuritas	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Central Santosa Finance	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Central Capital Ventura	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Dana Pensiun Bank Central Asia	Dana pensiun pemegang saham	Simpanan nasabah
Pejabat Eksekutif	Pejabat pembuat keputusan	Simpanan nasabah
Perorangan pengendali bank dan anggota keluarga	Pemegang saham	Simpanan nasabah

PERUBAHAN PERATURAN DAN/ATAU PERUNDANG-UNDANGAN

Pada tahun 2019 terdapat beberapa peraturan dan/atau perundang-undangan yang dikeluarkan dan berlaku mulai tahun 2019, yang berkaitan dengan bidang usaha Bank dan memerlukan perhatian Bank sebagai berikut:

Nomor Peraturan	Perihal	Dampak Bagi Bank															
POJK 1/POJK.03/2019	Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum	<ol style="list-style-type: none"> Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Bank wajib memiliki piagam audit intern. Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. <p>Bank telah melakukan penyesuaian piagam audit intern sesuai POJK ini.</p>															
POJK 12/POJK.03/2019	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Dalam rangka pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan. Bank melakukan pelaporan sesuai dengan jenis pelaporan yang terdapat dalam POJK ini dengan batas waktu yang telah ditentukan. 															
POJK 23 /POJK.01/2019	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	Bank telah melakukan penyesuaian terhadap perubahan ketentuan terkait APU PPT.															
POJK 36/POJK.03/2019	Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi	Bank telah menindaklanjuti dengan mendaftarkan penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/atau petugas pelaporan dari Sistem Pelaporan Otoritas.															
SEOJK 9/SEOJK.03/2019	Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank	Bank menyampaikan Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili Pihak Utama Bank beserta pihak yang dapat dihubungi termasuk perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.															
PBI 21/8/PBI/2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia	Bank melakukan penyesuaian terhadap penyisipan dan perubahan ketentuan Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.															
PBI 21/12/PBI/2019	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan Target RIM Syariah menjadi: <ol style="list-style-type: none"> Batas Bawah Target RIM Syariah 84%. Batas Atas Target RIM Syariah 94% Perubahan Parameter Disinsentif Bawah menjadi: <table border="1" data-bbox="858 1332 1442 1529"> <thead> <tr> <th>NPF</th> <th>KPMM</th> <th>Parameter Disinsentif Bawah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 5%</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KPMM s.d. 14%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>< 5%</td> <td>14% < KPMM ≤ 19%</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KPMM > 19%</td> <td>0,15</td> </tr> </tbody> </table> 	NPF	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah	≥ 5%	-	0,00		KPMM s.d. 14%	0,00	< 5%	14% < KPMM ≤ 19%	0,10		KPMM > 19%	0,15
NPF	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah															
≥ 5%	-	0,00															
	KPMM s.d. 14%	0,00															
< 5%	14% < KPMM ≤ 19%	0,10															
	KPMM > 19%	0,15															
PBI 21/13/PBI/2019	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio <i>Loan To Value</i> Untuk Kredit Properti, Rasio <i>Financing To Value</i> Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Bank telah melakukan penyesuaian batasan maksimum rasio FTV Untuk pembiayaan properti dan batasan minimum uang muka untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor.															
PADG 21/11/PADG/2019	Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> Dan Sistem Kliring Nasional Bank	Bank melakukan penyesuaian terhadap batas nominal transaksi yang dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam PADG ini.															

Nomor Peraturan	Perihal	Dampak Bagi Bank
PADG 21/21/PADG/2019	Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank wajib memiliki prosedur internal terkait Kode Etik Pasar. Prosedur internal disampaikan kepada Bank Indonesia untuk pertama kali paling lambat tanggal 14 April 2020. 2. Bank menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia terkait pemahaman dan penerapan Kode Etik Pasar pada Pelaku Pasar untuk dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia. 3. Bank menyampaikan Laporan Kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai yang belum memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan Sertifikat Tresuri yang paling lambat disampaikan 14 April 2020.
PADG 21/27/PADG/2019	Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	BCAS telah menyesuaikan pemenuhan GWM dalam Rupiah sesuai dengan ketentuan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2019, tidak terdapat penerbitan standar baru, amandemen dan interpretasi yang menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank atas jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan.

Standar baru, amandemen, dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:
- PSAK 73 - "Sewa";

Bank sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Bank.



PENDUKUNG BISNIS

TEKNOLOGI INFORMASI

Fokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric*) menjadi salah satu upaya Bank dalam mengimplementasi kebijakan strategis. BCAS memahami bahwa kebutuhan nasabah semakin beragam dan preferensi nasabah telah bergeser (*shifting*) ke arah *digital transaction*. Untuk itu, BCAS mencermati perkembangan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan teknologi dalam berimprovisasi menciptakan sarana untuk mendukung penyediaan layanan berkualitas, meningkatkan *customer experience*, dan mendorong produktivitas internal BCAS dengan selalu memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan bertransaksi.

Perkembangan TI BCAS senantiasa diselaraskan dengan arah strategi dan kebijakan Bank. BCAS terus berupaya mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam setiap produk dan layanan serta proses operasional Bank. Sepanjang tahun 2019, aktivitas-aktivitas pengembangan sistem TI yang telah dilaksanakan BCAS di antaranya sebagai berikut:

Pengembangan Produk dan Layanan BCAS

Pengembangan aplikasi selalu berfokus pada pemenuhan kebutuhan nasabah baik nasabah individu maupun badan usaha serta diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dan strategi perusahaan. Pada tahun 2019, BCAS mengembangkan Klik BCA Syariah Bisnis sebagai solusi transaksi yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah. Klik BCA Syariah Bisnis didesain dengan memberikan pilihan koneksi ke sistem BCAS melalui jaringan internet maupun *host to host* (H2H). Dengan Klik BCA Syariah Bisnis, nasabah dapat mengelola rekening yang dimiliki melalui jaringan yang telah dilengkapi dengan proteksi optimal.

Prioritas pada kenyamanan, keamanan, dan keandalan menjadi perhatian BCAS. Untuk itu, fasilitas-fasilitas yang telah ada seperti BCA Syariah *Mobile* dan Klik BCA Syariah terus diperkaya fiturnya agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah baik nasabah individu maupun nonindividu dan tetap memprioritaskan kenyamanan, keamanan, dan keandalan.

Pengembangan Jaringan dan Aplikasi Penunjang Operasional

Keandalan dan keamanan sistem perbankan dan fasilitas transaksi merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kepercayaan para nasabah dalam menggunakan layanan perbankan BCAS. Kapabilitas infrastruktur dan jaringan komunikasi harus konsisten dievaluasi dan ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan layanan bagi nasabah dengan tetap memperhatikan kualitas dan keamanannya. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah nasabah dan skala bisnis Bank, jumlah transaksi melalui kantor cabang maupun *e-channel* kian meningkat. Untuk itu, pada tahun 2019 BCAS melakukan berbagai upaya untuk memastikan layanan kepada nasabah tetap berjalan dengan baik dengan kualitas yang optimal di antaranya melalui penambahan kapasitas jaringan, penambahan back up jaringan dan *back up data centre*.

Untuk menunjang fungsi utama Bank baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan layanan perbankan, BCAS terus mengevaluasi dan menyempurnakan *Core Banking System* (CBS) yang dimiliki serta mengembangkan berbagai aplikasi penunjang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan efisiensi proses operasional terus dilakukan seperti pengembangan *Human Resource Information System* (HRIS), otomasi berbagai proses rekonsiliasi, penggunaan arsip elektronik, hingga penggunaan teknologi digital untuk kebutuhan *training* maupun *meeting*. Hal ini juga menjadi salah satu faktor untuk mendorong produktivitas kerja setiap karyawan dan unit kerja.

Penguatan Sistem Keamanan

Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan di mana Bank harus mengelola data seluruh nasabah dengan baik. Kemajuan teknologi yang makin pesat, menuntut Bank untuk terus memperbarui sistem pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan dari luar maupun *internal fraud*. Oleh karena itu, sistem

pengamanan informasi dan transaksi yang andal menjadi sangat penting. Untuk memastikan kecukupan sistem pengamanan yang telah dimiliki dengan perkembangan teknologi terkini, BCAS secara berkala melakukan penetration test pada berbagai sistem aplikasi. Hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan proteksi yang telah diterapkan.

Edukasi terhadap nasabah maupun karyawan internal tentang *security* selalu dilakukan melalui berbagai *channel* yang dimiliki Bank. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *awareness* nasabah dan karyawan di antaranya mengenai tips keamanan bertransaksi, waspada terhadap serangan dari pihak luar, menjaga kerahasiaan data, dan pengelolaan user ID maupun perangkat transaksi perbankan elektronik.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan bisnis BCAS. Menghadapi tantangan di industri perbankan serta iklim usaha yang dinamis, SDM BCAS harus memiliki *agility* dan adaptif terhadap perubahan. Untuk itu BCAS senantiasa berupaya untuk memastikan kecukupan dan keandalan SDM yang dimiliki agar bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan bisnis Bank dengan melakukan pengelolaan SDM yang komprehensif.

Pengelolaan SDM adalah suatu proses yang menyeluruh, terorganisir, berkesinambungan mulai dari seleksi hingga program retensi dengan didukung kebijakan pengelolaan SDM yang memadai.

Seleksi dan Rekrutmen

Tahap-tahap dalam proses seleksi dan rekrutmen meliputi tahap *Capacity Planning* dan *Capacity Fulfillment*. *Capacity Planning* merupakan tahap perencanaan di mana kebutuhan akan karyawan diidentifikasi secara terperinci termasuk kriteria dan kemampuan ideal yang dibutuhkan dari calon karyawan agar dapat memenuhi kebutuhan dari setiap unit kerja maupun cabang. Tahap selanjutnya adalah *Capacity Fulfillment*, di mana Bank

melakukan pemenuhan karyawan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dalam melakukan perekrutan, selain memastikan kesesuaian kompetensi, BCAS juga memastikan kesesuaian nilai-nilai pribadi yang dianut oleh calon karyawan dengan nilai-nilai yang dianut perusahaan. Hal ini menjadi penting, agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai Bank. Proses seleksi dan rekrutmen BCAS, dilakukan melalui kerja sama dengan BCA, *job fair event*, maupun *experienced hire* baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2019, BCAS memulai menyelenggarakan program BCA Syariah *Development Program* iB atau disingkat BDP iB. BDP iB dilatarbelakangi kebutuhan perusahaan atas pemenuhan karyawan yang sesuai dengan pertumbuhan bisnis Bank. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan SDM yang andal yang nantinya akan mengisi posisi strategis di BCAS lengkap dengan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan visi, misi, dan tata nilai BCAS. Selain itu dengan program BDP iB diharapkan BCAS dapat mengetahui secara rinci perkembangan dan karakter pekerja sehingga memudahkan untuk menilai, mengevaluasi, dan menyaring calon pemimpin yang berkualitas.

Pelatihan dan Pengembangan

BCAS menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan sebagai bagian dari strategi Bank untuk mengembangkan kapasitas karyawan baik karyawan baru maupun karyawan *existing*. Fokus pelatihan dan pengembangan bagi karyawan baru adalah pada peningkatan *hard skill* dan *soft skill* untuk mempersiapkan karyawan pada tahap penempatan. Sementara fokus pelatihan dan pengembangan untuk karyawan *existing* adalah pada pengembangan kompetensi karyawan agar selalu relevan dengan dinamika Bank.

Pada tahun 2019, BCAS fokus pada pengembangan internal untuk menyiapkan suksesor yang akan menjadi pemimpin pada beberapa jenjang organisasi melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan baik yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis (*hard*

skill) sesuai dengan area kerja masing-masing maupun kemampuan manajerial dan *leadership (soft skill)* untuk membekali setiap individu agar dapat menjadi *future leader* yang sesuai harapan Bank. Sebagian besar program pelatihan BCAS telah diintegrasikan dengan sistem *e-learning*. Selama tahun 2019 telah dilakukan program pelatihan yang diikuti oleh 3.835 karyawan dengan total biaya yang telah dialokasikan sebesar Rp3,7miliar.

BCAS memahami bahwa perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) merupakan salah satu kunci agar organisasi senantiasa bergerak ke arah yang lebih baik. Untuk menstimulasi ide-ide perbaikan proses bisnis maupun kreativitas di tengah kesibukan sehari-hari, BCAS secara kontinyu melakukan berbagai program kompetisi yaitu Kaizen, *Continuous Improvement Process (CIP)*, serta *New Business Concept (NBC)*. BCAS juga berpartisipasi dalam program reguler BCA sebagai entitas induk yaitu *BCA Innovation Convention Awards (BIC)* dan *Financial Technology Hackaton (Finhack)*. Kegiatan-kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para karyawan untuk menyalurkan ide-ide kreatif terkait inovasi layanan serta solusi perbankan maupun penyempurnaan proses internal dan eksternal.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan tahap yang penting dalam pengelolaan karyawan. Hal ini untuk memastikan setiap karyawan memahami apakah kinerjanya telah berada level yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan, memastikan karyawan menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian kinerja perusahaan.

Sebagai bagian dari program pengukuran kinerja, budaya *coaching* juga menjadi perhatian manajemen Bank. *Coaching* menjadi salah satu mekanisme untuk memonitor dan mendorong kinerja karyawan karena melalui *coaching* diharapkan baik atasan maupun karyawan dapat bersama-sama mengidentifikasi kekuatan, kelemahan masing-masing karyawan dan selanjutnya merumuskan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi dan mengatasi masalah

kinerja yang mungkin dihadapi. *Coaching* telah menjadi program wajib bagi karyawan pada level manajerial untuk dilaksanakan kepada anggota timnya dan senantiasa dimonitor pelaksanaannya.

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja masing-masing karyawan di setiap unit kerja, BCAS telah menyusun kebijakan dan pedoman penilaian kinerja tahunan yang terintegrasi, yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direksi No. 049/SK/DIR/2012 tertanggal 21 Desember 2012, Surat Edaran Satuan Kerja Hukum & SDM No. 001/SE/HSD/2013 tertanggal 29 Januari 2013 dan Surat Edaran Satuan Kerja Hukum & SDM No. 010/SE/HSD/2014 tertanggal 2 September 2014.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, tolak ukur penilaian menjadi penting. Untuk itu pada setiap akhir tahun buku, manajemen Bank menentukan sasaran bisnis/kerja untuk periode tahun yang akan datang sebagai tolak ukur penilaian, yang mencakup kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*). Penilaian atas kinerja karyawan mencakup sasaran bisnis/kerja, kecakapan kerja, dan perilaku budaya dan telah mempertimbangkan klasifikasi golongan karyawan.

Program Mempertahankan Pegawai (*Retention*)

BCAS senantiasa memastikan kepuasan dan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari upaya Bank untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung perkembangan usaha Bank yang berkelanjutan. Untuk itu BCAS telah memiliki program mempertahankan karyawan meliputi pengembangan karier (*career path*) serta membangun iklim kerja yang kondusif melalui kegiatan-kegiatan *employee engagement*.

Program pengembangan karier harus terarah dan terencana. Hal ini penting agar Bank dapat memastikan adanya kesinambungan regenerasi dan suksesi dalam organisasi. Program pembekalan dan akselerasi diterapkan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin baru. Salah satu media untuk mengidentifikasi kandidat yang potensial adalah melalui Panel Manajemen. Panel Manajemen bertujuan melakukan proses identifikasi

karyawan potensial secara objektif agar mendapatkan karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perusahaan; membuat perencanaan pengembangan karier karyawan; dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan karyawan. Panel manajemen ini kemudian dilanjutkan dengan program pendidikan khusus bagi kandidat tertentu. Setelah mengikuti pendidikan khusus, BCAS menyediakan berbagai program pengembangan diri berkelanjutan guna mempersiapkan para karyawan tersebut untuk dipromosikan ke jenjang karier selanjutnya di Bank.

Program *employee engagement* BCAS di antaranya meliputi peningkatan kesejahteraan karyawan; pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi; penyelenggaraan kegiatan di bidang seni, olahraga, dan kerohanian. Peningkatan kesejahteraan karyawan selalu menjadi fokus Bank oleh karena itu BCAS berkomitmen dalam penerapan kebijakan remunerasi yang sesuai kinerja sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para karyawan dan mendukung kesejahteraan karyawan. BCAS telah memiliki kebijakan remunerasi yang memadai. Dalam hal remunerasi, Bank senantiasa mempertimbangkan *fairness* dan *competitiveness*

dengan industri perbankan yang berada dalam satu *peer*.

Peran unit SDM dalam Bank sebagai *business enabler* semakin krusial. Dalam pengelolaan karyawan, setiap Bank tentunya dihadapkan pada hal-hal administratif serta *database* yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan semakin besarnya organisasi serta kebutuhan bisnis yang kian ekspansif, maka tuntutan akan data yang *real time* dan sistem *database* yang terintegrasi menjadi penting. Untuk itu, pada tahun 2019 BCAS telah menggunakan *Human Resource Information System* (HRIS). Dengan HRIS, seluruh *database* telah terintegrasi, setiap karyawan dapat melakukan pengelolaan kepegawaian secara mandiri (*employee self service*) sehingga berbagai proses kepegawaian menjadi lebih efisien.

PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Informasi eksposur risiko disajikan dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



Tabel 1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada pemerintah	1.629.640	-	-	1.629.640
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	463.030	-	-	463.030
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	211.881	-	-	211.881
5	Pembiayaan beragun rumah tinggal	40.287	11.453	1.575	53.315
6	Pembiayaan beragun properti komersial	335.068	105.990	447	441.505
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	375.597	-	-	375.597
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	120.260	48.529	5.221	174.010
9	Tagihan kepada korporasi	3.454.621	1.245.249	242.753	4.942.623
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	23	-	-	23
11	Aset lainnya	445.977	-	-	445.977
Total		7.076.385	1.411.222	249.996	8.737.602

Wilayah I : Jabodetabek

Wilayah II : Non Jabodetabek (P. Jawa)

Wilayah III : Sumatera

Tabel 2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
		< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada pemerintah	1.629.640	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	54.229	68.529	240.272	100.000	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	211.881	-	-	-	-
5	Pembiayaan beragun rumah tinggal	519	2.488	24.952	25.356	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	49.354	777	107.669	283.705	-
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	13.148	82.609	107.542	172.298	-
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	42.868	69.388	46.253	15.501	-
9	Tagihan kepada korporasi	2.945.157	814.702	596.885	585.878	-
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	23	-	-	-	-
11	Aset lainnya	-	-	-	-	445.977
Total		4.946.819	1.083.493	1.123.572	1.182.739	445.977

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018				
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.171.450	-	-	1.171.450
	100.000	-	-	100.000
	-	-	-	-
	11.330	-	-	11.330
	43.311	9.548	948	53.807
	199.614	110.910	-	310.524
	418.428	-	-	418.428
	142.745	33.672	213	176.629
	3.266.282	1.234.605	170.627	4.671.513
	778	354	-	1.133
	251.148	-	-	251.148
	5.605.086	1.389.089	171.788	7.165.962

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018							
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak							
Total	< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.629.640	1.171.450	-	-	-	-	1.171.450	
463.030	-	-	100.000	-	-	100.000	
-	-	-	-	-	-	-	
211.881	11.330	-	-	-	-	11.330	
53.315	106	1.671	20.667	31.364	-	53.807	
441.505	52.143	5.010	95.215	158.156	-	310.524	
375.597	11.229	99.690	121.089	186.419	-	418.428	
174.010	25.863	69.865	59.434	21.467	-	176.629	
4.942.623	2.729.958	686.526	520.743	734.286	-	4.671.513	
23	34	631	181	287	-	1.133	
445.977	-	-	-	-	251.148	251.148	
8.737.602	4.002.113	863.393	917.329	1.131.979	251.148	7.165.962	

Tabel 3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

NO	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2019						
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	21.546	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-	-
5	Listrik, gas dan air	-	200.000	-	-	-
6	Konstruksi	-	52.504	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	20.833	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	168.147	-	211.881	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.629.640	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha	-	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-	53.315
	Total	1.629.640	463.030	-	211.881	53.315

dalam jutaan Rupiah

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	326.306	2.015	262.658	-	-
	-	-	290	92.058	-	-
	-	-	4.450	30.838	-	-
	17.231	-	34.552	1.094.335	-	-
	-	-	260	-	-	-
	47.985	-	301	287.489	-	-
	330	-	58.714	1.233.089	-	-
	131	-	2.919	1.419	-	-
	8.935	-	27.856	485.673	-	-
	-	-	94	1.097.979	-	-
	365.855	-	4.495	266.811	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	56	26.007	-	-
	-	-	155	9.638	-	-
	-	-	6.135	413	23	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.038	49.292	31.719	54.215	-	445.977
	441.505	375.597	174.010	4.942.623	23	445.977

NO	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2018						
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-	-
5	Listrik, gas dan air	-	100.000	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	248
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	-	-	11.330	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.171.450	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha	-	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-	53.559
	Total	1.171.450	100.000	-	11.330	53.807

dalam jutaan Rupiah

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	342.624	1.922	202.213	-	-
	-	-	235	125.597	-	-
	-	-	3.729	4.825	-	-
	294	-	23.300	946.543	-	-
	-	-	534	-	-	-
	48.732	-	395	266.343	-	-
	492	-	61.784	1.090.081	11	-
	-	-	3.619	1.965	-	-
	4.663	-	39.382	525.511	-	-
	-	-	385	1.126.517	-	-
	256.344	-	2.971	376.775	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	269	2.579	-	-
	-	-	297	-	-	-
	-	-	6.867	478	23	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	75.804	30.940	2.085	1.099	251.148
	310.525	418.428	176.629	4.671.512	1.133	251.148

Tabel 4. Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Wilayah		
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan	3.875.433	342.598	40.891
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)			
	a. Belum jatuh tempo	-	10.883	-
	b. Telah jatuh tempo	-	-	-
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - individual	-	4.350	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - kolektif	33.349	7.422	326
5	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-

Tabel 5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

NO	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai
			Belum Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)
31 Desember 2019			
1	Pertanian, perburuan, dan kehutanan	486.395	-
2	Perikanan	290	-
3	Pertambangan dan penggalian	16.160	-
4	Industri pengolahan	214.539	-
5	Listrik, gas, dan air	260	-
6	Konstruksi	114.198	-
7	Perdagangan besar dan eceran	209.639	10.883
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.782	-
9	Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	312.791	-
10	Perantara keuangan	745.654	-
11	Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	390.025	-
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1.628.321	-
13	Jasa pendidikan	23.203	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8.052	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya	5.924	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-
19	Bukan lapangan usaha	-	-
20	Lainnya	99.690	-
	Total	4.258.922	10.883

dalam jutaan Rupiah

	Total	31 Desember 2018			Total
		Wilayah			
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	4.258.922	5.316.076	1.393.560	171.788	6.881.424
		-	-	-	-
	10.883	245.200	15.699	-	260.899
	-	-	1.799	-	1.799
	4.350	14.385	4.470	-	18.854
	41.097	51.337	11.761	1.477	64.575
	-	9.230	-	-	9.230

dalam jutaan Rupiah

	Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan Yang Dihapus Buku
		(6)	(7)	(8)
(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
	-	-	4.065	-
	-	-	3	-
	-	-	428	-
	-	-	7.086	-
	-	-	2	-
	-	-	1.673	-
	-	4.350	2.662	-
	-	-	41	-
	-	-	12.999	-
	-	-	7.451	-
	-	-	3.112	-
	-	-	-	-
	-	-	184	-
	-	-	65	-
	-	-	208	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	1.120	-
	-	4.350	41.097	-

NO	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai
			Belum Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)
31 Desember 2018			
1	Pertanian, perburuan, dan kehutanan	546.759	-
2	Perikanan	130.813	115.583
3	Pertambangan dan penggalian	8.554	-
4	Industri pengolahan	970.137	-
5	Listrik, gas, dan air	100.534	-
6	Konstruksi	315.470	-
7	Perdagangan besar dan eceran	1.115.153	21.889
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5.833	-
9	Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	401.295	-
10	Perantara keuangan	2.470.755	64.314
11	Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	642.042	47.620
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	-	-
13	Jasa pendidikan	2.848	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	297	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya	7.368	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-
19	Bukan lapangan usaha	-	-
20	Lainnya	163.567	11.493
	Total	6.881.425	260.899

dalam jutaan Rupiah

	Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan Yang Dihapus Buku
	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	-	5.413	-
	-	4.981	53	-
	-	-	269	-
	-	-	9.002	2.593
	-	-	1.014	-
	-	-	2.979	-
	1.799	4.632	12.760	1.370
	-	-	188	-
	-	-	15.498	-
	-	3.216	9.238	-
	-	5.953	6.195	4.852
	-	-	-	-
	-	-	21	-
	-	-	8	-
	-	-	273	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	73	1.665	415
	1.799	18.855	64.576	9.230

Tabel 6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

NO	Keterangan	31 Desember 2019	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	0	35.227
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (net)	4.350	5.870
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	4.353	5.870
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(3)	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	-
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo akhir CKPN	4.350	41.097

Tabel 7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

NO	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
(1)	(2)	Fitch Ratings	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
(1)	(2)	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	246.983	52.504	163.543	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	11.392	100.489	100.000	-	-
5	Pembayaan beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan pegawai/ pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada korporasi	186.622	130.177	224.690	100.792	-
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-
11	Aset lainnya	-	-	-	-	-
	Total					

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018	
CKPN Individual	CKPN Kolektif
(5)	(6)
33.647	58.267
12.292	10.955
166.646	233.935
(154.354)	(222.980)
(25.968)	(4.392)
(1.116)	(255)
18.854	64.575

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2019											
Tagihan Bersih											
			Peringkat Jangka Panjang							Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3					
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3					
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3					
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)					
id BB+ s.d idBB-	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
-	-	-	-	-	-	-	-	1.629.640	1.629.640		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	463.030		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.881		
-	-	-	-	-	-	-	-	53.315	53.315		
-	-	-	-	-	-	-	-	441.505	441.505		
-	-	-	-	-	-	-	-	375.597	375.597		
-	-	-	-	-	-	-	-	174.010	174.010		
-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.342	4.942.623		
-	-	-	-	-	-	-	-	23	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	445.977	445.977		
									8.737.602		

NO	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	100.000	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	11.330	-	-	-
5	Pembayaan beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada korporasi	360.613	21.554	182.654	-	-
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-
11	Aset lainnya	-	-	-	-	-
Total						

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018

Tagihan Bersih

Tagihan Bersih			Peringkat Jangka Panjang						Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3				
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3				
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3				
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)				
id BB+ s.d idBB-	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
-	-	-	-	-	-	-	-	1.171.450	1.171.450	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.330	
-	-	-	-	-	-	-	-	53.807	53.807	
-	-	-	-	-	-	-	-	310.524	310.524	
-	-	-	-	-	-	-	-	418.428	418.428	
-	-	-	-	-	-	-	-	176.629	176.629	
-	-	-	-	-	-	-	-	4.106.691	4.671.513	
-	-	-	-	-	-	-	-	1.133	1.133	
-	-	-	-	-	-	-	-	251.148	251.148	
								7.165.962	7.165.962	

Tabel 8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk):

 1. Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

NO	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2019					
		Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Shariah compliant profit rate swap	-	-	-	-	-	-
2	Shariah compliant foreign currency swap	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

2. Transaksi Repo

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

3. Transaksi Reverse Repo

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah

		31 Desember 2018								
	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
			≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun					
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018				
	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018			
Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Tabel 9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2019											
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
A	Eksposur neraca												
1	Tagihan kepada pemerintah	1.629.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	299.487	-	-	-	-	163.543	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	211.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan beragun rumah tinggal	-	32.216	9.608	11.492	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	441.495	-	-	-
7	Pembiayaan pegawai/ pensiunan	-	-	-	-	-	-	375.597	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	13.619	-	-	-	-	-	-	-	160.341	-	-	-
9	Tagihan kepada korporasi	231.771	316.799	-	-	-	-	224.690	-	4.119.333	-	-	-
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
11	Aset lainnya	8.418	-	-	-	-	-	-	-	437.560	-	-	-
	Total eksposur neraca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah

		31 Desember 2018													
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
ATMR	Beban Modal	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal	
(14)	(15)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
-	-	1.171.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.669	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.376	-	-	11.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.266	-	
12.867	-	1.338	26.493	10.579	15.397	-	-	-	-	-	-	-	13.332	-	
441.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.524	-	-	310.524	-	
187.799	-	-	-	-	-	-	-	418.428	-	-	-	-	209.214	-	
120.255	-	13.004	-	-	-	-	-	-	163.626	-	-	-	122.719	-	
4.295.038	-	275.964	371.763	-	-	-	-	182.654	-	3.788.880	-	-	3.954.560	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133	-	-	1.133	-	
437.560	-	3.942	-	-	-	-	-	-	-	247.206	-	-	247.206	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2019											
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
B	Eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi pada transaksi rekening administratif												
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	2.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	11.250	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	16.498	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
9	Tagihan kepada korporasi	817.470	94.934	-	-	-	-	-	-	31.043	-	-	-
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total eksposur TRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah

	ATMR	Beban Modal	31 Desember 2018											ATMR	Beban Modal
			Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
			0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50.030	-	-	-	-	-	-	-	27.355	-	28.169	-	-	41.847	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		31 Desember 2019										
NO	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
C		Eksposur akibat kegagalan pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>)										
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total eksposur <i>counterparty credit risk</i>		2.731.539	955.316	9.608	11.492	-	-	763.851	160.391	5.029.454	-	-

dalam jutaan Rupiah

		31 Desember 2018													
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
	ATMR	Beban Modal	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
	(14)	(15)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.729.159	-	1.465.697	509.586	10.579	15.397	-	-	628.437	163.626	4.375.913	-	-	4.922.802	-

Tabel 10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2019						
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4) + (5) + (6) + (7)]	
A	Eksposur neraca							
1	Tagihan kepada pemerintah	1.629.640	-	-	-	-	1.629.640	
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	463.030	-	-	-	-	463.030	
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada bank	211.881	-	-	-	-	211.881	
5	Pembayaran beragun rumah tinggal	53.315	-	-	-	-	53.315	
6	Pembiayaan beragun properti komersial	441.495	-	-	-	-	441.495	
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	375.597	-	-	-	-	375.597	
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	173.960	13.619	-	-	-	187.580	
9	Tagihan kepada korporasi	4.892.593	231.771	-	-	-	5.124.364	
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	23	-	-	-	-	23	
11	Aset lainnya	445.977	-	-	-	-	445.977	
	Total eksposur neraca	8.687.512	245.390	-	-	-	8.932.902	
B	Eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi pada transaksi rekening administratif							
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	2.874	-	-	-	-	2.874	
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-	-	-	
5	Pembayaran beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Pembiayaan beragun properti komersial	11.270	-	-	-	-	11.270	
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	16.548	-	-	-	-	16.548	
9	Tagihan kepada korporasi	943.446	-	-	-	-	943.446	
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	
	Total eksposur TRA	974.138	-	-	-	-	974.138	

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018						
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4) + (5) + (6) + (7)]
	1.171.450	-	-	-	-	1.171.450
	100.000	-	-	-	-	100.000
	-	-	-	-	-	-
	11.330	-	-	-	-	11.330
	53.807	1.338	-	-	-	52.470
	310.524	-	-	-	-	310.524
	418.428	-	-	-	-	418.428
	176.629	13.004	-	-	-	163.626
	4.619.262	275.964	-	-	-	4.343.298
	1.133	-	-	-	-	1.133
	251.148	-	-	-	-	251.148
	7.113.711	290.306	-	-	-	6.823.406
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	55.525	-	-	-	-	55.525
	-	-	-	-	-	-
	55.525	-	-	-	-	55.525

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2019						
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4) + (5) + (6) + (7)]	
C	Eksposur akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk)							
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada korporasi	-	-	-	-	-	-	-
	Total eksposur counterparty credit risk	-	-	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018						
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4) + (5) + (6) + (7)]
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Tabel 11. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

NO	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2019					
		Nilai Aset Yang disekuritisasi	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi	ATMR	Pengurangan Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit pendukung a. Fasilitas Penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas Penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Fasilitas - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Jasa - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Penyedia Bank Kustodian - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal a. <i>Senior trache</i> - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. <i>Senior trache</i> - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2018						
	Nilai Aset Yang disekuritisasi	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/Rugi dari Akti- tas Sekuritisasi	ATMR	Pengurangan Modal
		Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Tabel 12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Asal

dalam jutaan Rupiah

No.	Underlying Asset	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-
5	Pembayaan beragun rumah tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	-	-	-	-
9	Tagihan kepada korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Tabel 13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

1. Eksposur Aset di Neraca

dalam jutaan Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada pemerintah	1.629.640	-	-	1.171.450	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	463.030	141.669	141.669	100.000	20.000	20.000
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	211.881	42.376	42.376	11.330	2.266	2.266
5	Pembiayaan beragun rumah tinggal	53.315	12.867	12.867	53.807	13.801	13.332
6	Pembiayaan beragun properti komersial	441.495	441.495	441.495	310.524	310.524	310.524
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	375.597	187.799	187.799	418.428	209.214	209.214
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel	173.960	130.470	120.255	176.629	132.472	122.719
9	Tagihan kepada korporasi	4.892.593	4.526.809	4.295.038	4.619.262	4.230.524	3.954.560
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	23	23	23	1.133	1.133	1.133
11	Aset lainnya	445.977	-	437.560	251.148	-	247.206
	Total	8.687.512	5.483.508	5.679.082	7.113.711	4.919.934	4.880.955

Tabel 13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi Pada Transaksi Rekening Administratif

dalam jutaan Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	10	10	10	-	-	-
7	Pembiayaan pegawai/pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel	50	38	38	-	-	-
9	Tagihan kepada korporasi	50.030	50.030	50.030	41.847	41.847	41.847
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	50.090	50.077	50.077	41.847	41.847	41.847

Tabel 13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

 3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

dalam jutaan Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada entitas sektor publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaran beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan beragun properti komersial	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Tabel 13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

 4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

dalam jutaan Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	a. Beban modal 8% (5 - 15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban modal 50% (16 - 30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban modal 75% (31 - 45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	<i>Non - delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Tabel 13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

5. Eksposur Sekuritisasi

dalam jutaan Rupiah

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas pembiayaan pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas pembiayaan pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas pembiayaan yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian efek beragun aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian efek beragun aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Tabel 13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

6. Total Pengukuran Risiko Kredit

dalam jutaan Rupiah

No.		31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Total ATMR risiko kredit	5.729.159	4.922.802
2	Total faktor pengurang modal	-	-

Tabel 14. Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

dalam jutaan Rupiah

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2019				31 Desember 2018			
		Bank		Konsolidasian		Bank		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko <i>benchmark</i> suku bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Risiko spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko nilai tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Risiko ekuitas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Risiko komoditas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 15. Risiko Likuiditas: Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing

a. Profil Maturitas Rupiah

No.	Pos - Pos	Saldo	31 Desember 2019				
			Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Neraca						
	A. Aset	8.628.917	2.867.849	479.759	1.303.518	558.461	3.144.330
	1. Kas	8.418	8.418	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	1.243.451	968.451	-	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	111.392	111.392	-	-	-	-
	4. Surat berharga dimiliki	1.261.267	1.211.267	-	-	-	50.000
	5. Piutang <i>murabahah</i> (gross)	1.619.734	517	3.126	11.222	47.198	1.557.671
	6. Piutang <i>salam</i>	-	-	-	-	-	-
	7. Piutang <i>istishna'</i>	-	-	-	-	-	-
	8. Piutang <i>qardh</i>	13.916	3	13.051	76	255	531
	9. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	490.691	1.000	26.400	1.355	63.940	397.996
	10. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	3.009.765	211.655	437.176	1.288.704	429.095	643.135
	11. <i>Ijarah</i>	511.312	-	6	2.004	17.757	491.545
	12. Aset lainnya	358.971	355.146	-	157	216	3.452

dalam jutaan Rupiah

	Saldo	31 Desember 2018				
		Jatuh Tempo *)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	6.439.838	1.558.102	625.063	983.021	419.417	2.854.235
	6.220	6.220	-	-	-	-
	979.384	889.384	-	20.000	70.000	-
	106.814	106.814	-	-	-	-
	567.801	370.279	-	-	-	197.522
	1.665.094	560	46.410	33.610	36.306	1.548.208
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	403	4	20	74	98	207
	331.878	1.267	14.425	3.729	106.762	205.695
	2.190.547	121.811	564.111	924.659	202.466	377.500
	525.341	-	59	902	3.321	521.059
	66.356	61.763	38	47	464	4.044

No.	Pos - Pos	Saldo	31 Desember 2019				
			Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B. Liabilitas		8.628.917	6.150.137	357.483	84.913	31.126	2.005.258
1.	Dana Pihak Ketiga	6.204.931	5.722.451	357.483	84.913	31.126	8.958
a.	Giro wadiah	1.094.260	1.094.260	-	-	-	-
b.	Deposito mudharabah	4.453.374	3.989.838	355.378	80.518	27.640	-
c.	Tabungan wadiah	231.954	231.954	-	-	-	-
d.	Tabungan mudharabah	425.343	406.399	2.105	4.395	3.486	8.958
e.	Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Liabilitas kepada bank lain	5.868	5.868	-	-	-	-
4.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5.	Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-
6.	Liabilitas lainnya	2.418.118	421.818	-	-	-	1.996.300
C. Rekening administratif		31.093	-	-	20.410	10.683	-
1.	Kewajiban komitmen	31.093	-	-	20.410	10.683	-
2.	Kewajiban kontijensi	-	-	-	-	-	-
D. Selisih (A-B)		-	(3.282.288)	122.276	1.278.605	742.335	1.139.072

Tabel 15. Risiko Likuiditas: Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing

b. Profil Maturitas Valuta Asing

No.	Pos - Pos	Saldo	31 Desember 2019				
			Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset		-	-	-	-	-	-
1.	Kas	-	-	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-
4.	Surat berharga dimiliki	-	-	-	-	-	-
5.	Piutang murabahah (gross)	-	-	-	-	-	-
6.	Piutang salam	-	-	-	-	-	-
7.	Piutang istishna'	-	-	-	-	-	-
8.	Piutang qardh	-	-	-	-	-	-
9.	Pembiayaan mudharabah	-	-	-	-	-	-
10.	Pembiayaan musyarakah	-	-	-	-	-	-
11.	Ijarah	-	-	-	-	-	-
12.	Aset lainnya	-	-	-	-	-	-

No.	Pos - Pos	Saldo	31 Desember 2019				
			Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
B.	Liabilitas	-	-	-	-	-	-
1.	Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
a.	Giro wadiah	-	-	-	-	-	-
b.	Deposito mudharabah	-	-	-	-	-	-
c.	Tabungan wadiah	-	-	-	-	-	-
d.	Tabungan mudharabah	-	-	-	-	-	-
e.	Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Liabilitas kepada bank lain	-	-	-	-	-	-
4.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5.	Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-
6.	Liabilitas lainnya	-	-	-	-	-	-
C.	Rekening administratif	-	-	-	-	-	-
1.	Kewajiban komitmen	-	-	-	-	-	-
2.	Kewajiban kontijensi	-	-	-	-	-	-
D.	Selisih (A-B)	-	-	-	-	-	-

Tabel 16. Risiko Operasional

dalam jutaan Rupiah

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Pendapatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan indikator standar	243.684	36.553	456.908	205.817	30.873	385.907
	Total	243.684	36.553	456.908	205.817	30.873	385.907

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

ASPEK PEMASARAN

BCAS senantiasa memberikan perhatian yang tinggi terhadap kebutuhan nasabah (*customer centric*). Bank memahami bahwa kebutuhan nasabah terus berkembang khususnya dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital dewasa ini. Bank harus bergerak cepat dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang spesifik dan di saat yang sama makin beragam pada setiap segmen nasabah. Untuk itu, BCAS selalu siap mengembangkan dan memodifikasi produk yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masing-masing nasabah (*tailor made solution*).

Strategi pemasaran yang diimplementasikan harus sesuai dengan arah bisnis perusahaan. Sejalan dengan salah satu kebijakan strategis bank yaitu pertumbuhan portfolio pembiayaan yang sehat maka BCAS fokus memasarkan pembiayaan baik pada segmen komersial maupun UMKM. Model bisnis *value chain financing* untuk pembiayaan produktif dalam bentuk *supplier financing* maupun distributor *financing* menjadi salah satu model bisnis yang diterapkan BCAS untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah yang memiliki rekam jejak baik dan telah memiliki hubungan kerja sama dengan nasabah *existing* BCAS. Sementara untuk menjaga kualitas portfolio tetap sehat, konsisten menjaga kualitas kemitraan menjadi salah satu kuncinya.

Mengintegrasikan teknologi pada produk dan layanan baik dalam hal fitur atau pemasarannya merupakan salah satu langkah yang dilakukan BCAS pada tahun 2019. Seiring dengan semakin mudahnya bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk secara online, BCAS melakukan kerja sama dengan *platform-platform e-commerce* seperti Blibli dan garasi.id untuk memasarkan produk-produk BCAS khususnya produk konsumtif seperti KPR, KKB, Pembiayaan Umrah, dan Pembiayaan Emas. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas terutama nasabah potensial yang fasih teknologi.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah nasabah, BCAS melakukan program-program promosi seperti hadiah langsung setiap pembukaan produk BCAS baik produk dana maupun pembiayaan. BCAS juga menyelenggarakan program loyalitas nasabah untuk

meningkatkan penggunaan fasilitas BCAS seperti BCA Syariah *Mobile* dan Klik BCA Syariah. Program promosi yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan mengedepankan produk unggulan Bank.

Ragam produk dan layanan prima yang telah dikembangkan oleh BCAS harus didukung dengan komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat memahami produk dan layanan BCAS baik dalam hal manfaat, biaya, risiko, maupun hak dan kewajiban bagi nasabah. Aktivitas komunikasi pemasaran yang telah dilakukan BCAS di antaranya:

- Berpartisipasi dalam *expo* edukatif untuk menjangkau masyarakat secara langsung di antaranya melalui partisipasi dalam *event* bersama OJK seperti *event* Keuangan Syariah Fair (KSF), *event* iB Vaganza, dan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan OJK lainnya.
- Secara aktif melakukan *open table* dalam berbagai *event* seperti *BCA Expo* bersama grup usaha BCA di kota-kota besar di Indonesia, *open table* di pusat keramaian, sekolah, kampus, dan perkantoran.
- Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada insan media untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai perbankan syariah, khususnya BCAS.
- Melakukan publikasi tentang BCAS dan produk-produknya di media cetak dan online maupun media sosial.
- Bekerja sama dengan Halo BCA sebagai *solution centre* dan *contact centre* untuk memberikan layanan informasi produk dan layanan BCAS.
- Dengan melakukan upaya-upaya di atas diharapkan produk dan layanan BCAS dapat semakin diterima oleh masyarakat dan meningkatkan pangsa pasar BCAS di industri perbankan syariah.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2019 tercatat sebesar 6,17% dari total industri perbankan nasional, menggambarkan peluang pertumbuhan yang masih sangat terbuka. Persentase tersebut menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun seiring semakin maraknya pasar syariah di Indonesia. Industri halal sedang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Halal *lifestyle* sedang menjadi perhatian khususnya pada kaum muda. Ditambah dengan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pasar syariah di Indonesia di antaranya dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung diketuai oleh Presiden serta kebijakan-kebijakan Regulator yang memberikan stimulus bagi perbankan syariah. Semua ini memberikan optimisme pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional secara keseluruhan, pangsa pasar BCAS terhadap perbankan syariah khususnya BUS juga mengalami pertumbuhan.

PANGSA PASAR BERDASARKAN ASET

Total aset BCAS per Desember 2019 mencapai Rp8.634,4 miliar, memiliki *market share* sebesar 2,5% dari total aset BUS, meningkat dari tahun sebelumnya di mana *market share* BCAS tercatat sebesar 2,2%.

Uraian	BUS			BCA SYARIAH			Pangsa Pasar BCA Syariah terhadap perbankan syariah (BUS)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Aset	288.026,7	316.691,3	35.363,5	5.961,2	7.064,0	8.634,4	2,1%	2,2%	2,5%

PANGSA PASAR BERDASARKAN PEMBIAYAAN

Dari segi pembiayaan, BCAS membukukan pembiayaan sebesar Rp5.645,4 miliar pada akhir tahun 2019 dengan pangsa pasar 2,5% dari pembiayaan BUS. Hal ini seiring

dengan semakin ekspansifnya kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan BCAS sehingga pangsa pasar pembiayaan BCAS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,4%.

Uraian	BUS			BCA SYARIAH			Pangsa Pasar BCA Syariah terhadap perbankan syariah (BUS)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pembiayaan	189.788,9	202.298,3	225.145,7	4.191,1	4.899,7	5.645,4	2,2%	2,4%	2,5%

PANGSA PASAR BERDASARKAN DANA PIHAK KETIGA

DPK BCAS pada 2019 mencapai Rp6.204,9 miliar dengan pangsa pasar 2,1% terhadap DPK perbankan

syariah. Di tengah kondisi likuiditas yang cukup ketat di industri perbankan syariah, BCAS tetap dapat menjaga pangsa pasar DPK BCAS dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,1%.

Uraian	BUS			BCA SYARIAH			Pangsa Pasar BCA Syariah terhadap perbankan syariah (BUS)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
DPK	238.3932,9	257.606,3	288.9787,8	4.736,4	5.506,1	6.204,9	2,0%	2,1%	2,1%

POSISI BCA SYARIAH DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH (BUS)

Secara umum, perbandingan antara kinerja BCAS dengan kinerja perbankan syariah nasional khususnya BUS ditunjukkan pada tabel berikut:

Uraian	BCA Syariah	BUS
Pertumbuhan aset	22,2%	10,6%
Pertumbuhan pembiayaan	15,2%	11,3%
Pertumbuhan DPK	12,7%	12,2%
CAR	38,3%	20,6%
ROA	1,2%	1,7%
BOPO	87,6%	84,5%
FDR	91,0%	77,9%
NPF Gross	0,58%	3,23%
NPF Net	0,28%	1,88%

Berdasarkan tabel di atas, BCAS mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan BUS pada mayoritas indikator keuangan utama. Sementara pada

indikator lain yaitu ROA tergolong dalam kategori yang wajar dan cukup sehat.

PROSPEK USAHA TAHUN 2020

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 berada pada kisaran 5-5,4% dengan tingkat inflasi 3,1%. Sedangkan di sektor perbankan, pertumbuhan kredit diproyeksikan berkisar antara 10-12% dan DPK diproyeksikan mengalami pertumbuhan pada kisaran 8-10%. Meski melambatnya perekonomian dunia mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional, namun prospek ekonomi Indonesia ke depan cukup baik, diharapkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertahankan dan stabilitasnya tetap terjaga.

Sejalan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional, BCAS juga berharap dapat kembali mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan juga berkesinambungan. BCAS merumuskan dan menetapkan strategi kebijakan strategis untuk dijalankan

di tahun 2020 dalam rangka mencapai pertumbuhan bisnis yang diharapkan. Perluasan jaringan *multi-channel* serta pengembangan ragam produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric*) masih menjadi strategi yang dipilih Bank dalam mengimplementasi kebijakan strategis. Hal ini mengingat perkembangan pasar dewasa ini digerakkan oleh kebutuhan konsumen (*demand-driven*), bukan lagi *supply driven* seperti di era-era sebelumnya.

Dunia perbankan ke depan akan semakin kompetitif. Pesaing bukan hanya datang dari pelaku perbankan saja, namun juga industri yang lain. Maka untuk dapat senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah, prinsip kolaborasi akan terus dijalankan Bank, baik dengan BCA sebagai entitas induk, Grup Usaha maupun mitra lainnya. BCAS memandang bahwa peluang pertumbuhan

bagi BCAS di tahun mendatang masih terbuka. Namun demikian, Bank akan tetap waspada dan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan nasional. Ekspansi bisnis yang senantiasa diiringi dengan

penerapan *prudential banking* harus konsisten dilakukan demi mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Bisnis Bank erat kaitannya dengan kepercayaan, untuk itu demi kelangsungan usaha Bank, BCAS berupaya mempertahankan kepercayaan para nasabah serta *stakeholder* lainnya dengan terus menyediakan solusi keuangan yang komprehensif. BCAS memastikan keandalan sistem perbankannya, kecukupan kapasitas dan kapabilitas dalam mendukung transaksi nasabah, serta kecukupan dan kompetensi segenap sumber daya manusianya.

Berdasarkan hasil penilaian manajemen atas kemampuan BCAS untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, tidak ada hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha BCAS. Dasar penilaian manajemen di antaranya adalah dari sehatnya kondisi keuangan BCAS saat ini, peningkatan kinerja keuangan dari tahun ke tahun, serta pangsa pasar perbankan syariah yang menunjukkan tren peningkatan sehingga semakin memperkuat optimisme bahwa BCAS akan memiliki keberlangsungan usaha yang baik.

Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang memiliki dampak terhadap proses operasional Bank, BCAS telah memiliki rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*) yang dirancang untuk memastikan layanan inti Bank dapat tetap berjalan. Rencana kelangsungan usaha didukung dengan

kapabilitas infrastruktur yang memadai dan kualitas SDM yang solid. BCAS mengevaluasi kecukupan dan keandalan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), infrastruktur jaringan, serta sistem operasi. BCAS juga senantiasa melakukan evaluasi dan memperbaharui pedoman serta prosedur dalam menghadapi situasi darurat pada seluruh tingkat operasional guna menjamin fungsi-fungsi bisnis tetap berjalan. Secara berkala, BCAS mengadakan pelatihan dan simulasi untuk memastikan kesiapan Bank serta segenap manajemen dan karyawan dalam menghadapi bencana dan kemungkinan munculnya kejadian-kejadian lain yang dapat mengganggu kegiatan usaha.

Asumsi yang mendasari penilaian manajemen atas kelangsungan usaha Bank meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi nasional yang positif
- Kondisi perbankan nasional yang tetap terjaga
- Pertumbuhan pangsa pasar industri perbankan syariah
- Posisi BCAS dalam industri Perbankan Syariah khususnya BUS pada beberapa indikator keuangan utama
- Tingkat Kesehatan BCAS
- Kecukupan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*)

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN





PENDAHULUAN

BCA Syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) dituntut untuk terus menjaga kinerja keuangannya agar selalu sehat, *prudent*, dan solid. Salah satu upaya untuk menjaga tingkat kesehatan bank adalah melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau "GCG").

Salah satu upaya melindungi kepentingan *stakeholder* dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah adalah melalui penerapan GCG. Oleh sebab itu, BCAS berkomitmen untuk senantiasa menerapkan GCG di dalam menjalankan usaha. BCAS meyakini bahwa penerapan GCG menunjang pencapaian sasaran bisnis jangka panjang perusahaan dan memberikan keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu nilai tambah bagi pemegang saham, industri perbankan nasional, perekonomian nasional, dan *stakeholder* lainnya.

Untuk menciptakan GCG yang kokoh, BCAS telah menyusun Manual GCG sebagai panduan bagi seluruh insan BCAS dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Manual GCG ini senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas usaha BCAS.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip GCG secara umum bertujuan untuk memastikan agar kegiatan operasional bank syariah benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan penerapan GCG BCAS secara khusus sebagaimana tercantum dalam Manual GCG adalah:

1. Mendorong pengelolaan BCAS sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professionalism*), dan Kewajaran (*Fairness*).

2. Mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:
 - *Governance Structure*, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
 - *Governance Process*, agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan *output* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
 - *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan BCAS.
3. Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang bekerja efektif, efisien, dan independen.
4. Mendorong pengelolaan BCAS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (*Code of Conduct*) yang tinggi.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang digerakkan oleh *corporate value* yang dihasilkan dari penerapan GCG secara komprehensif dan berkesinambungan.
7. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi di perusahaan induk yaitu PT Bank Central Asia Tbk selaku Entitas Utama, diperlukan pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCAS untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAN PRINSIP DASAR GCG

Dasar Hukum

Untuk memastikan bahwa implementasi GCG yang dilakukan oleh BCAS telah sesuai, terarah dan terencana, maka BCAS melandaskan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Penilaian penerapan GCG sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39.SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
4. Profesional (*Professional*), yaitu kompetensi untuk mengelola Bank secara objektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KERANGKA KERJA GCG

Struktur GCG

Struktur GCG BCAS telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BCAS telah memiliki organ tata kelola yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang sesuai sehingga tercipta *control, check and balance*.

Struktur GCG BCAS terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

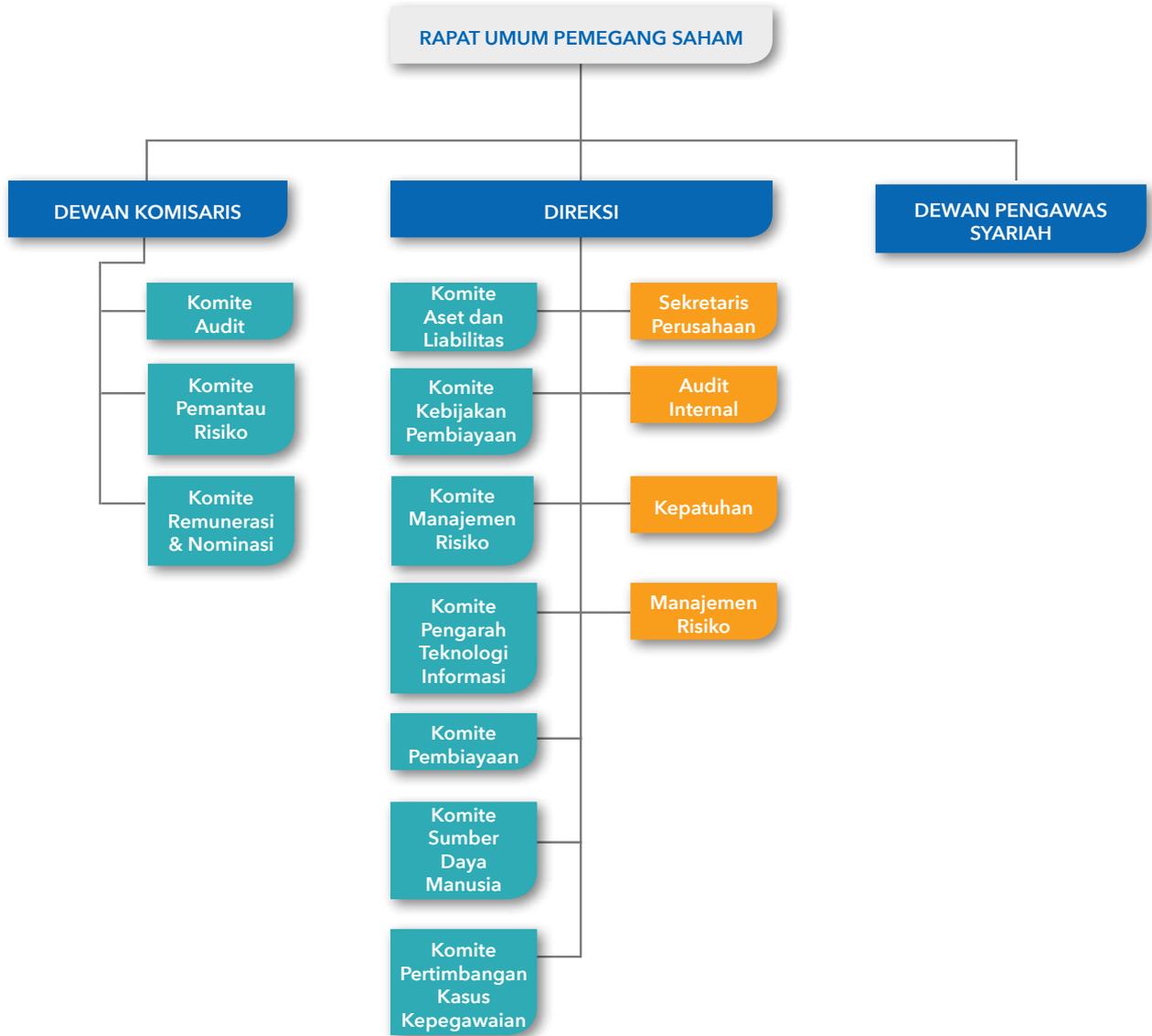
- Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 1. Komite Audit
 2. Komite Pemantau Risiko
 3. Komite Remunerasi dan Nominasi
- Organ Pendukung Direksi
 1. Komite di Bawah Direksi
 - Komite Aset dan Liabilitas (*Asset Liability Committee/ALCO*)
 - Komite Kebijakan Pembiayaan
 - Komite Pembiayaan
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Komite Sumber Daya Manusia
 - Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
 2. Sekretaris Perusahaan
 3. Audit Internal
 4. Kepatuhan
 5. Manajemen Risiko

Prinsip Dasar

Komitmen BCAS dalam menerapkan GCG di antaranya diwujudkan dengan upaya-upaya internalisasi visi, misi, dan tata nilai Bank yang dilakukan secara konsisten. Visi BCAS adalah menjadi bank andalan dan pilihan masyarakat melalui pelaksanaan misi-misinya untuk menciptakan produk, layanan, dan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki perilaku sesuai tata nilai BCAS yaitu *Teamwork, Responsibility, Integrity, dan Professional*.

Dalam rangka mencapai kesinambungan usaha perusahaan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan efektif dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kepatuhan pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik perbankan yang sehat.



IMPLEMENTASI GCG

Wujud komitmen BCAS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara lain melalui kebijakan internal terkait GCG.

Sebagai upaya untuk melembagakan pelaksanaan GCG di dalam perusahaan, BCAS memandang perlu untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur GCG, dan salah satu sarana implementasi penerapan GCG. Beberapa kebijakan terkait GCG yang ada di BCAS antara lain sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar Perusahaan
- b. Kode Etik Perusahaan
- c. Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS *Charter*)
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor 028/SK/DIR/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Pedoman *Anti Fraud* BCA Syariah
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 018/SK/DIR/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Penerapan *Whistleblowing System* BCA Syariah
- f. Tata Nilai BCAS berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/SK/DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS
- g. Pedoman Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 076/SK/DIR/2014 yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 017/SK/DIR/2017 tanggal 28 April 2017
- h. Surat Keputusan Direksi Nomor 057/SK/DIR/2017 tanggal 30 November 2017 Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi
- i. Surat Keputusan Direksi Nomor 047/SK/DIR/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)
- j. Surat Keputusan Direksi Nomor 028/SK/DIR/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi
- k. Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) versi 2019

- l. Surat Edaran Nomor 057/SE/STL/2019 Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik oleh Pihak Ketiga (Vendor) Versi 2019

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2019

Self-Assessment

Sebagai wujud kepatuhan Bank kepada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BCAS telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG.

Kriteria yang Digunakan Dalam Penilaian

Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola Bank yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank
8. Penerapan fungsi audit internal
9. Penerapan fungsi audit eksternal
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan internal

Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses penilaian *Self-Assessment* Tata Kelola BCAS melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Skor Penilaian Masing-Masing Kriteria

BCAS telah menyampaikan hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I dan II 2019, BCAS mendapatkan peringkat 1 atau predikat "Sangat Baik".

Governance Structure

Governance Process

Governance Outcome

1. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan & pelaksanaan tugas komite
4. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana & penyaluran pembiayaan, serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank
8. Penerapan fungsi audit internal
9. Penerapan fungsi audit eksternal
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan internal

Hasil Self-Assessment Semester I 2019

Pada semester I 2019 hasil penilaian *self-assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori "Sangat Baik". Secara umum kesimpulan hasil *self-assessment* semester I 2019 adalah sebagai berikut:

PERINGKAT SEMESTER I 2019	DEFINISI PERINGKAT
Peringkat 1 Sangat Baik	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.

ANALISIS

A. Governance Structure

- Dewan Komisaris
Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domisili dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di tempat lain dan telah lulus *fit and proper test*. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
Komite Penunjang Dewan Komisaris:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- Direksi
Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
Komite Penunjang Direksi:
 - Komite Aset dan Liabilitas
 - Komite Kebijakan Pembiayaan
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Komite Pembiayaan
 - Komite Sumber Daya Manusia
 - Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
- Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang karyawan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
- Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah, SDM di fungsi kepatuhan, SDM di fungsi audit intern dan memiliki fungsi pengembangan produk yang independen dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai
- Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

B. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah :

- Dewan Komisaris
Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.
- Direksi
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Proses pengembangan produk baru dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
- Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja lain melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan nonkeuangan, serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ANALISIS
C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat menjadi rekomendasi/nasehat kepada Direksi.
2. Direksi
Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

dalam miliar Rupiah

Keterangan	Jun 2018	Jun 2019	YoY Growth
Total Aset	6.440	7.036	9,26%
Pembiayaan	4.713	4.918	4,34%
DPK	5.171	5.633	8,94%
Laba sebelum pajak	33,61	34,34	2,17%
Laba setelah pajak	25,21	25,76	2,18%

Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi perhatian utama BCAS, hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum di atas > 95%.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Unit Kerja di BCAS telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.
 - b. Satuan Kerja Audit Internal bertindak objektif dalam melakukan audit dan memiliki Piagam Audit Internal dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern
6. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan beberapa pihak lainnya serta telah disampaikan pada *homepage* Bank secara tepat waktu. Terdapat sanksi dari Regulator sebesar Rp.62.752.221,- hal ini disebabkan kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Tahun 2018 kurang dari ketentuan.

Hasil Self-Assessment Semester II 2019

Pada semester II 2019 hasil penilaian *self-assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori "Sangat Baik". Secara umum kesimpulan hasil *self-assessment* semester II 2019 adalah sebagai berikut:

PERINGKAT SEMESTER II 2019	DEFINISI PERINGKAT
Peringkat 1 Sangat Baik	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.

ANALISIS

A. Governance Structure

1. Dewan Komisaris
Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di tempat lain dan telah lulus *fit and proper test*. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Penunjang Dewan Komisaris:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Direksi
Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Komite Penunjang Direksi:
 - Komite Aset dan Liabilitas
 - Komite Kebijakan Pembiayaan
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Komite Pembiayaan
 - Komite Sumber Daya Manusia
 - Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
3. Komite
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Penggantian anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang karyawan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah
Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu SK DIR No.080/SK/DIR/2010 tanggal 9 Agustus 2010.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Internal Audit, dan SDM Audit Intern yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

ANALISIS

B. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah:

1. Dewan Komisaris
Penggangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.
2. Direksi
Penggangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
3. Komite
Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Penggangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah.
Proses pengembangan produk baru dan Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Selama tahun 2019, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank. Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
SAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan
Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan nonkeuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ANALISIS

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi/nasihat kepada Direksi.
2. Direksi
Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

dalam miliar Rupiah

Keterangan	Des 2018 <i>Audited</i>	Des 2019 <i>Un-Audited</i>	YoY Growth
Total Aset	7.064	8.629	22,15%
Pembiayaan	4.900	5.645	15,22%
DPK	5.506	6.205	12,69%
Laba sebelum pajak	72,39	83,23	14,96%

Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi *concern* utama BCAS hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum diatas > 100%.

3. Komite
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah
Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional Bank bebas dari intervensi Pemegang Saham / pihak lainnya.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Satuan Kerja Audit Internal bertindak obyektif dalam melakukan audit dan memiliki Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan NonKeuangan
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.

Selain hasil *self-assessment* di atas, salah satu indikator kualitas penerapan GCG BCAS juga terlihat dari beberapa penghargaan terkait GCG yang diterima BCAS di sepanjang tahun 2019 yaitu:

Tanggal	Penghargaan	Penyelenggaraan
22 Agustus 2019	- TOP GRC 2019 dengan peringkat 4 Stars - Untuk John Kosasih sebagai <i>The Most Committed GRC Leader 2019</i>	Top Business
23 Agustus 2019	- Peringkat 1 <i>The Best Indonesia GCG Implementation 2019</i> untuk kategori <i>Sharia Bank</i>	Economic Review
29 Agustus 2019	- <i>The Best Bank in Risk Profile GCG 2019</i> - Bank berperingkat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2018	Infobank
15 November 2019	- Bank dengan predikat Sehat untuk kategori Bank Syariah BUKU 2 dan 3	Warta Ekonomi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Pada penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Bank dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

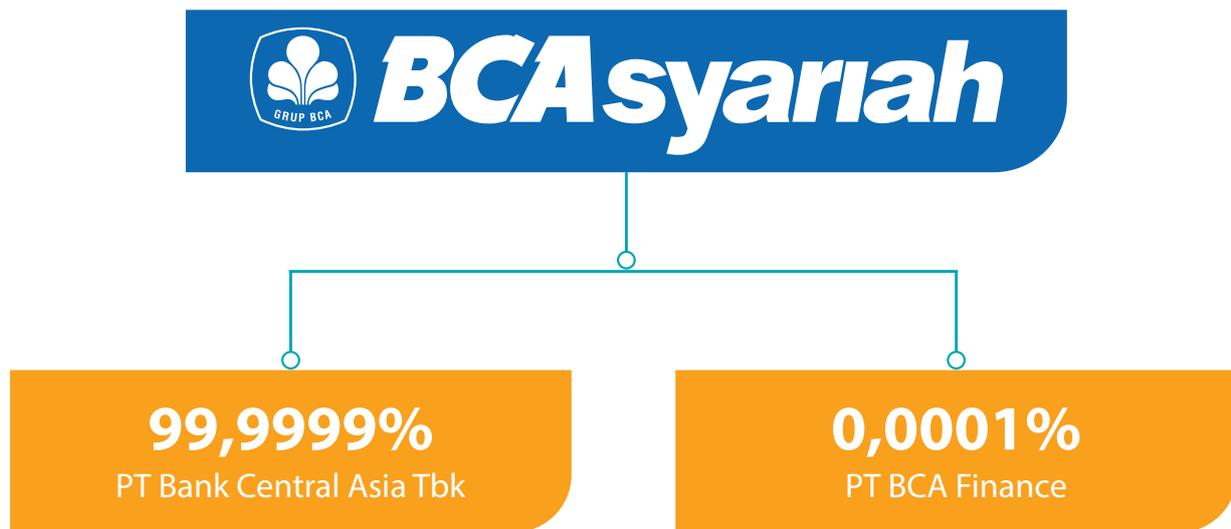
RUPS sebagai organ BCAS memiliki wewenang antara lain:

- Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasan yang telah dijalanannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- Menetapkan penggunaan laba BCAS, dalam hal BCAS mempunyai laba yang positif untuk tahun buku yang telah berakhir berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCAS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi BCAS misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi BCAS.
- Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memutuskan penetapan gaji, tunjangan, serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris BCAS.
- Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- Melakukan penunjukan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar.
- Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

Informasi Pemegang Saham Utama atau Pengendali BCAS

PT Bank Central Asia Tbk atau disingkat BCA adalah pemilik saham mayoritas di BCAS. Dengan demikian, pemegang saham pengendali BCAS adalah BCA. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan GCG, BCA sebagai pemegang saham tidak turut andil dalam kegiatan operasional BCAS.

Berikut adalah diagram yang menggambarkan pemegang saham utama/pengendali BCAS:



Pelaksanaan RUPS di Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan

Dengan memperhatikan peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta Anggaran Dasar BCAS, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan berwenang menyelenggarakan RUPS Lainnya/Luar Biasa yang dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diselenggarakan oleh BCAS secara tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir (RUPS Tahunan) dan sewaktu-waktu/luar biasa (RUPS Luar Biasa) yang diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Bank.

Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank kepada para pemegang saham. RUPS Tahunan juga

merupakan forum untuk membahas strategi, kebijakan, dan hasil-hasil usaha Bank serta hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

RUPS Tahunan 2019

Pada tahun 2019 BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2019. Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 6 Maret 2019 No. 57.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019

RUPS Tahunan 2019 dihadiri antara lain oleh perwakilan dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT BCA Finance selaku pemegang saham BCAS. Pemanggilan rapat kepada PT Bank Central Asia Tbk dilakukan melalui surat No. 033/DIR/2019 dan pemanggilan rapat kepada PT BCA Finance dilakukan melalui surat No. 034/DIR/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Agenda, Keputusan, dan Status

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Status
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dokumen pendukungnya</p>	Terealisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.</p>	<p>Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 58.367.069.139,- (lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan Rupiah) ("Laba Bersih 2018") selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2018 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyisihkan Laba Bersih 2018 sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah); dan sisa dari Laba Bersih 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan 	Terealisasi
<p>3. Penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>	<p>a. Menyatakan bahwa pada saat ini susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>Direksi Presiden Direktur: John Kosasih Direktur: Rickyadi Widjaja Direktur Kepatuhan: Tantri Indrawati Direktur: Houda Muljanti</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris: Yana Rosiana Komisaris Independen: Joni Handrijanto Komisaris Independen: Suyanto Sutjiadi</p> <p>Dewan Pengawas Syariah (DPS) Ketua DPS: Prof. Dr. Fatturahman Djamil, MA Anggota DPS: Sutedjo Prihatono</p> <p>Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019, yaitu rapat ini. Maka dengan ini Pemegang Saham Perseroan menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta dokumen pendukungnya</p>	Terealisasi

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Status
	b. Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:	
	Direksi	
	Presiden Direktur: John Kosasih	
	Direktur: Rickyadi Widjaja	
	Direktur: Houda Muljanti	
	Dewan Komisaris	
	Komisaris Independen: Joni Handrijanto	
	Komisaris Independen: Suyanto Sutjiadi	
	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Ketua DPS: Prof. Dr. Fatturahman Djamil, MA	
	Anggota DPS: Sutedjo Prihatono	
	Dengan ketentuan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022	
	c. Mengangkat Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dengan ketentuan selama persetujuan OJK terkait pengangkatan yang bersangkutan belum diperoleh maka Tantri Indrawati diangkat sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan tanggal keputusan dari OJK mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pengangkatan Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris Perseroan	
	d. Mengangkat Yana Rosiana sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan calon Presiden Komisaris Perseroan mendapat persetujuan dari OJK untuk diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan	
	e. Mengangkat Pranata sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022	
	f. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Yana Rosiana atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan	
	g. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tantri Indrawati atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan	
	h. Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:	
	Direksi	
	Presiden Direktur: John Kosasih	
	Direktur: Rickyadi Widjaja	
	Direktur: Tantri Indrawati	
	Direktur: Houda Muljanti	
	Dewan Komisaris	
	Presiden Komisaris: Yana Rosiana	
	Komisaris Independen: Joni Handrijanto	
	Komisaris Independen: Suyanto Sutjiadi	
	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Ketua DPS: Prof. Dr. Fatturahman Djamil, MA	
	Anggota DPS: Sutedjo Prihatono	
	i. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi	

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Status
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019, serta bonur untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 	Terealisasi
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk menunjuk penggantinya; dan Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Menyatakan pemberian kuasa dalam Rapat ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.	Terealisasi

Tindak Lanjut

- Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 57 tanggal 6 Maret 2019.
- Melaporkan isi keputusan RUPS Tahun 2019 ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019.
- Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 26 Agustus 2019.
- Melaporkan pengangkatan Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris, Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Pranata sebagai Direktur kepada OJK melalui surat No. 199/DIR/2019 tanggal 2 Oktober 2019

RUPS Luar Biasa Tahun 2019

Pada tahun 2019 BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 26 Agustus 2019 No. 93.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2019

RUPS Luar Biasa 2019 dihadiri antara lain oleh perwakilan dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT BCA Finance selaku pemegang saham BCAS. Pemanggilan rapat kepada PT Bank Central Asia Tbk dilakukan melalui surat No. 174/DIR/2019 dan pemanggilan rapat kepada PT BCA Finance dilakukan melalui surat No. 175/DIR/2019 tanggal 13 Agustus 2019.

Agenda, Keputusan, dan Status

Agenda RUPS Luar Biasa 2019	Keputusan	Status
<p>1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)</p>	<p>1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 996.300.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), menjadi Rp 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah)</p>	<p>2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 996.300.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), menjadi Rp 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) yang mana dalam rangka meningkatkan modal ditempatkan dan disetor tersebut, Perseroan akan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sehingga saham seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Bank Centrak Asia Tbk sehingga dengan demikian setelah diadakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan di atas dan penyeteroran atas saham-saham yang diambil bagian oleh Pemegang Saham berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PT Bank Central Asia Tbk sebagai pemegang saham Perseroan atas 1.996.299 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.996.299.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) b. PT BCA Finance sebagai pemegang saham Perseroan atas 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).</p>	<p>Terealisasi</p>

Agenda RUPS Luar Biasa 2019	Keputusan	Status
3. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan	<p>Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4 ayat 1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah)</p> <p>Pasal 4 ayat 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 39,93% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen) atau sejumlah 1.996.300 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah)</p> <p>Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>Menyatakan pemberian kuasa dalam Rapat ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.</p>	Terealisasi

Tindak Lanjut

Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 26 Agustus 2019.

Tindak Lanjut Keputusan RUPS di Tahun 2018

Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan 2018

Pada tahun 2018, BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2018. Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 14 Maret 2018 No. 22.

Agenda, Putusan dan Status RUPS Tahunan 2018

Hasil Keputusan	Agenda RUPS Tahun 2018	Status
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut.	Terealisasi

Hasil Keputusan	Agenda RUPS Tahun 2018	Status
<p>2. Menetapkan bahwa sesuai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.860.237.199,-(empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:</p> <p>a. Menyisihkan Laba Bersih Perseroan tahun 2017 sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan akan meningkat dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah)</p> <p>b. Sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p>	<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta.</p>	Terealisasi
<p>3. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:</p> <p>a. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018</p> <p>b. Menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018.</p>	<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan bonus untuk tahun buku 2017 kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan</p>	Terealisasi
<p>Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yaitu Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</p>	<p>4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	

Tindak Lanjut

Isi seluruh keputusan RUPS Tahun 2018 ini telah dituangkan ke dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 22 tanggal 14 Maret 2018.

Tindak Lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018

Pada tahun 2018, BCAS tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan usaha secara umum dan memberi nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Bank. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS BCAS.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCAS telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal *Manual Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi *Manual Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal berikut:

- Komposisi Dewan Komisaris
- Kriteria dan Persyaratan Dewan Komisaris
- Independensi Dewan Komisaris
- Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan
- Kewajiban, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Kewajiban, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko
- Aspek Transparansi Dewan Komisaris
- Larangan bagi Dewan Komisaris
- Kebijakan Remunerasi
- Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Dengan tidak mengurangi tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCAS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan DPS dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Melaporkan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
6. Berdasarkan rapat, Dewan Komisaris wajib memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi kemudian wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap Komite serta memastikan tata tertib dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas secara optimal, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup.

Dalam rangka memastikan Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kemampuan Bank maka:

1. Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

2. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.
3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.
3. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BCAS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan, kecuali mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA

Jumlah dan Komposisi

Mengacu kepada Manual GCG BCAS, jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi di mana 1 (satu) orang di antaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris. Berdasarkan hal tersebut, per tanggal 31 Desember 2019, BCAS memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan persetujuan RUPS BCAS. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang (66,7%) di antaranya adalah Komisaris Independen.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2022, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria

Kriteria yang ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijabarkan secara lengkap pada Manual GCG BCAS sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.

5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

SUSUNAN, DASAR PENGANGKATAN, MASA JABATAN SERTA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris sebelum diselenggarakan RUPS tahunan 2019.

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
Yana Rosiana	Presiden Komisaris	Bekasi, Jawa Barat	RUPST 2019 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-49/D.03/2016 tanggal 28 September 2016	-	2016-2019
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Malang, Jawa Timur	RUPST 2013 tanggal 17 April 2013	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.03/2014 tanggal 5 Maret 2014	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	2016-2019
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Jakarta	RUPST 2013 tanggal 17 April 2013	Keputusan Gubernur BI No. 15/100/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 30 September 2013	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	2016-2019

Dalam RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2019, RUPS menyetujui mengangkat Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris BCAS yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris sesudah diselenggarakan RUPS tahunan 2019 dan Tantri Indrawati telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjadi Presiden Komisaris BCAS.

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Bekasi, Jawa Barat	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-175/D.03/2019 tanggal 24 September 2019	-	2019-2022
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Malang, Jawa Timur	RUPST 2019 tanggal 17 April 2013	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.03/2014 tanggal 5 Maret 2014	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Jakarta	RUPST 2013 tanggal 17 April 2013	Keputusan Gubernur BI No. 15/100/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 30 September 2013	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris, BCAS senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman. Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas BCAS sehingga diharapkan dalam pengembangan

maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki. Pada tahun 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Yana Rosiana*	Presiden Komisaris	66 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Diploma bidang Manajemen Keuangan Perbankan, STIE Perbanas Surabaya (1975) 	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris BCAS (2016-2019) Presiden Direktur BCAS (2010-2016) Tim kuasa Direksi BCA dalam proses akuisisi dan konversi PT Bank UIB menjadi BCAS (2008-2010) Kepala Kantor Wilayah IX BCA (2000-2008) Pemimpin Kantor Cabang Korporasi Sudirman (1996-2000) Kepala Biro Sistem dan Prosedur (1990-1996)
Tantri Indrawati**	Presiden Komisaris	57 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Magister Sains bidang Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2004) Sarjana bidang Ekonomi Manajemen, Universitas Airlangga (1986) 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan BCAS (2010-2019) Direktur Kepatuhan serta Direktur Pelayanan dan Pendanaan Bank Syariah Bukopin (2008-2010) Berbagai posisi manajerial di Bank Bukopin (1986-2008)
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	64 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Magister Sains, Universitas Brawijaya (2001) Doktorandus, Universitas Brawijaya (1981) 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen BCAS (2013-2019) Kepala BCA Kantor Wilayah Surabaya (2005-2010) Kepala BCA Kantor Wilayah Malang (2003-2005) Kepala BCA Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan (2001-2003) Pemimpin BCA Cab. Banyuwangi, Balikpapan, Kediri dan Palembang (1990-2001) Pemimpin BCA KCP Tulungagung (1988-1990) Kepala Marketing dan Kredit BCA Cab. Kediri (1986-1988) Kepala Seksi Analis Kredit BCA Cab. Malang (1985-1986) Karyawan operasional BCA Cab. Malang (1982-1985)
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	64 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi, Universitas Sriwijaya Palembang (1983) 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen BCAS (2013-2019) Kepala BCA Kantor Wilayah V Medan (2004-2010) Kepala BCA di beberapa KCU dan KCP (1987-2004) Kepala Seksi Marketing (1986-1987) Kepala Seksi Bagian Tabanas dan Taska (1985-1986) Counterpart Bank Indonesia Palembang (1983-1984) Kepala Seksi Bagian Transfer (1981-1982)

*) Masa jabatan Yana Rosiana berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Tantri Indrawati dimulai pada tanggal 24 September 2019

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Untuk meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris, maka dilakukan pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tercermin dalam fungsi Dewan Komisaris di dalam komite sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Yana Rosiana*	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Tantri Indrawati**	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> Ketua merangkap anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di BCA

*) Masa jabatan Yana Rosiana berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Tantri Indrawati dimulai pada tanggal 24 September 2019

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Komisaris mengenai visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan Bank, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota

Dewan Komisaris, serta pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan syariah.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan yaitu:

Dewan Komisaris	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Yana Rosiana*	-	-	-
Tantri Indrawati**	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	09 & 12 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Suyanto Sutjiadi	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	09 & 12 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Joni Handrijanto	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	09 & 12 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019

*) Masa jabatan Yana Rosiana berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Tantri Indrawati dimulai pada tanggal 24 September 2019

INFORMASI KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria/persyaratan antara lain:

- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
- Seluruh anggota Dewan komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BCAS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan kecuali mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan

Pernyataan Komisaris Independen

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib bebas dari pengaruh manajemen Perusahaan, Pemegang Saham, maupun pihak-pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dipilih berdasarkan proses nominasi selayaknya melakukan tugas mereka dengan tidak mengutamakan kepentingan dari pihak-pihak yang menominasikannya.

Setiap anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai persyaratan pengajuan persetujuan OJK dan didokumentasikan oleh

Bank, antara lain menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Independen:

- Bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris (pengawas) atau anggota Direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau utang jatuh tempo yang bermasalah
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan
- Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Regulator
- Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP
- Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan PBI nomor 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka transparansi maka Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan.

Per 31 Desember 2019 informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih
Yana Rosiana*	Presiden Komisaris	Nihil
Tantri Indrawati**	Presiden Komisaris	Nihil
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Nihil
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Nihil

*) Masa jabatan Yana Rosiana berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Tantri Indrawati dimulai pada tanggal 24 September 2019

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 16, anggota Dewan Komisaris wajib

mengungkapkan rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Per 31 Desember 2019 informasi rangkap jabatan Dewan Komisaris pada BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Yana Rosiana*	Presiden Komisaris	Tidak ada
Tantri Indrawati**	Presiden Komisaris	Tidak ada
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Tidak ada
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Tidak ada

*) Masa jabatan Yana Rosiana berakhir pada tanggal 24 September 2019
 **) Masa jabatan Tantri Indrawati dimulai pada tanggal 24 September 2019

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jenis Rapat

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris senantiasa bekerja secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk selalu aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *good corporate governance*, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat-rapat. Rapat-rapat yang diselenggarakan dengan melibatkan Dewan Komisaris adalah:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS
- Rapat Komite

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta			
			YR	TI	JH	SS
1	18/02/2019	1. Presentasi Departemen Manajemen Risiko 2. Sosialisasi POJK perihal SPFAIB 3. Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Tahun 2019 4. Presentasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi	√		√	√
2	18/03/2019	Pelaksanaan APU-PPT Triwulan IV-2018	√		√	√
3	22/04/2019	1. Presentasi Departemen Manajemen Risiko 2. Presentasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 3. <i>Progres Action Plan</i> Penanganan Pembiayaan Kolektibilitas 2-5	x	Belum menjabat sebagai Dewan Komisaris	√	√
4	20/05/2019	Presentasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	√		√	√
5	24/06/2019	1. Laporan Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2018 2. Presentasi Departemen Manajemen Risiko	√		√	√

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta			
			YR	TI	JH	SS
6	29/07/2019	1. Tingkat Kesehatan Bank Semester I-2019 2. Persiapan Menghadapi Pelaksanaan Mutual Evaluation Review - <i>Financial Action Task Force</i> (MER-FATF) 3. Presentasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 4. <i>Progress Action Plan</i> Penanganan Pembiayaan Kolektibilitas 2-5 5. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Unit Kerja	√	Belum menjabat sebagai Dewan Komisaris	√	√
7	31/07/2019	Pertemuan Dewan Komisaris dengan Divisi Audit Internal BCA	√		√	x
8	26/08/2019	1. Pelaksanaan APU-PPT Triwulan II-2019 2. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Unit Kerja	√		√	√
9	23/09/2019	1. Presentasi Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer 2. <i>Progress Action Plan</i> Penanganan Pembiayaan Kolektibilitas 2-5 3. <i>Stress Test</i> Terintegrasi Tahun 2019	√		√	√
10	10/10/2019	Susunan Komite		√	√	√
11	21/10/2019	1. Presentasi Departemen Manajemen Risiko 2. Pelaksanaan APU-PPT Triwulan III-2019 3. <i>Progress Action Plan</i> Penanganan Pembiayaan Kolektibilitas 2-5 4. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)		Tidak menjabat lagi sebagai Dewan Komisaris	√	√
12	25/11/2019	1. <i>Update</i> Persiapan Menghadapi MER-FATF 2. RBB 2020 3. Rencana Kerja Unit Kerja Tahun 2020			√	√
13	16/12/2019	<i>Update</i> Persiapan Menghadapi MER-FATF			√	√

Keterangan:

YR : Yana Rosiana
 TI : Tantri Indrawati
 JH : Joni Handrijanto
 SS : Suyanto Sutjiadi
 √ : Hadir
 x : Tidak Hadir

- Penjelasan mengenai Rapat Dewan Komisaris, DPS dan Direksi akan dibahas pada sub bab DPS
- Penjelasan mengenai Rapat Dewan Komisaris dan Direksi akan dibahas pada sub bab Direksi
- Penjelasan mengenai Rapat Komite akan dibahas pada sub bab Komite

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali yang terdiri dari 13 (tiga belas) kali Rapat Dewan Komisaris, 16 (enam belas) kali Rapat Komite, 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta

12 (dua belas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi atau lebih dari 100% jika dibanding kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Berikut adalah rekapitulasi frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Dewan Komisaris BCAS.

No	Nama Rapat	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris			
		YR*	TI**	SS	JH
Rapat Dewan Komisaris					
1	Jumlah Rapat	9	4	13	13
	Jumlah Kehadiran	8	4	10	13
	%	89%	100%	77%	100%
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi					
2	Jumlah Rapat	9	3	12	12
	Jumlah Kehadiran	7	3	9	12
	%	78%	100%	75%	100%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS					
3	Jumlah Rapat	9	3	12	12
	Jumlah Kehadiran	7	3	9	12
	%	78%	100%	75%	100%
Rapat Komite Audit					
4	Jumlah Rapat	-	-	-	8
	Jumlah Kehadiran	-	-	-	8
	%	-	-	-	100%
Rapat Komite Pemantau Risiko					
5	Jumlah Rapat	-	-	4	-
	Jumlah Kehadiran	-	-	4	-
	%	-	-	100%	-
Rapat Komite Remunerasi & Nominasi					
6	Jumlah Rapat	3	1	4	4
	Jumlah Kehadiran	3	1	4	3
	%	100%	100%	100%	75%

Keterangan:

YR : Yana Rosiana
 TI : Tantri Indrawati
 JH : Joni Handrijanto
 SS : Suyanto Sutjiadi

- Penjelasan mengenai Rapat Dewan Komisaris dan Direksi akan dibahas pada sub bab Direksi
- Penjelasan mengenai Rapat Komite akan dibahas pada sub bab Komite
- *) Masa jabatan Yana Rosiana berakhir pada tanggal 24 September 2019
- **) Masa jabatan Tantri Indrawati dimulai pada tanggal 24 September 2019

PELAKSANAAN TUGAS DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Bank berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsinya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh jenjang organisasi.

Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memberikan masukan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui media diskusi dan rapat seperti rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, rapat gabungan dengan DPS dan Direksi, dan rapat di tingkat Komite.

Berikut beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Rekomendasi
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan UMKM sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Dalam melakukan penyaluran pembiayaan agar senantiasa konsisten dalam menerapkan <i>prudential banking practice</i>, perkembangan kondisi perekonomian nasional dan global, serta pemenuhan prinsip syariah Melakukan pemantauan secara optimal terhadap nasabah pembiayaan untuk meminimalisir menurunnya kualitas pembiayaan Melakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara efektif
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal sesuai komitmen yang disepakati Melakukan persiapan dalam menghadapi MER FATF secara optimal dan berkoordinasi secara aktif dengan Regulator Meningkatkan kualitas penerapan GCG, kualitas SDM, fungsi supervisi dan pengendalian internal di seluruh lini organisasi

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN SELF ASSESSMENT

Kriteria Penilaian

Kriteria *Self-Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 secara mandiri (*Self-Assessment* GCG) yang disampaikan kepada

OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian *Self-Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) tahun 2019 BCAS adalah Peringkat 1 atau Sangat Baik dengan analisis antara lain:

Kriteria	Analisis
<i>Governance Structure</i>	Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di tempat lain dan telah lulus <i>fit and proper test</i> . Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Komite Penunjang Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> · Komite Audit · Komite Pemantau Risiko · Komite Remunerasi dan Nominasi
<i>Governance Process</i>	Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.
<i>Governance Outcome</i>	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi/nasehat kepada Direksi.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN

Berdasarkan Anggaran Dasar BCAS, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir jika yang bersangkutan:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan
- Mengundurkan diri
- Meninggal dunia
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh DSN-MUI dan memegang peranan penting bagi BCAS sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha dan di seluruh jenjang organisasi Bank.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DPS BCAS mempunyai pedoman tata tertib kerja DPS yang tertuang dalam Piagam DPS (*DPS Charter*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012 tentang Piagam DPS (*DPS Charter*).

Secara garis besar, pedoman ini mengatur tata tertib kerja DPS terkait:

- Tugas dan tanggung jawab
- Kegiatan dan aktivitas
- Kedudukan DPS dalam organisasi BCAS
- Fungsi pengawasan
- Rencana kerja
- Kehadiran dan waktu kerja
- Kode etik
- Persyaratan
- Komposisi keanggotaan DPS
- Rapat dan risalah rapat
- Penilaian dan pertanggungjawaban kinerja DPS
- Kaji ulang
- Laporan

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup pengawasan DPS terhadap Bank meliputi:

1. Pengawasan terhadap produk/jasa, akad-akad, pedoman, operasional, dan aktivitas baru Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG bagi Bank Umum Syariah yang ditetapkan oleh Regulator.
3. Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Anggota DPS menjalankan fungsi pengawasannya melalui:

1. Rapat rutin DPS
2. Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang-cabang BCAS

3. Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan, dan prosedur yang ada pada Bank yang dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara
4. Melakukan uji petik secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
5. Menghadiri rapat-rapat Direksi dan/atau Komisaris apabila dipandang perlu
6. Meminta laporan kepada Internal Audit atas hasil pemeriksaan audit terkait temuan mengenai aspek syariah
7. Meminta bantuan kepada staf yang ditunjuk khusus untuk membantu DPS, guna memeriksa kesesuaian aspek syariah di lapangan dan mengkoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait mengenai pengembangan produk, kebijakan, SOP, dan akad untuk dimintakan opini dan rekomendasi.

Anggota DPS memiliki kewenangan yaitu:

1. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, SOP, dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada BCAS.
2. Mereviu dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip syariah dan akad yang dikeluarkan Bank.
3. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
4. Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN KRITERIA ANGGOTA

Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Piagam DPS (*DPS Charter*) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012, maka komposisi DPS adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan/Ketua DPS ditunjuk dari salah satu anggota DPS dan ditetapkan bersamaan dengan pengangkatan anggota DPS pada RUPS Bank.
2. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan maksimum 3 (tiga) orang.
3. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Regulator, namun tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) di wilayah Indonesia.

Kriteria

Anggota DPS harus memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Integritas
Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Piagam DPS, ketentuan perbankan syariah yang umum maupun khusus, peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan lain yang berlaku dengan penuh profesionalisme.
2. Kompetensi
Sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, pengetahuan bidang perbankan, *treasury*, akuntansi, dan manajemen keuangan secara umum.
3. Reputasi
Sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet Bank Indonesia.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Kepadatan dan Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SUSUNAN ANGGOTA, DASAR PENGANGKATAN, MASA JABATAN SERTA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pada tanggal 31 Desember 2019, DPS BCAS terdiri dari 2 (dua) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Terakhir	Periode
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Ketua	Tangerang	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009	Keputusan Gubernur BI No.12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022
Sutedjo Prihatono	Anggota	Tangerang	RUPST 2015 tanggal 4 Maret 2015	Keputusan OJK No SR-5/PB.13/2015 tanggal 18 Mei 2015	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2019, anggota DPS telah mengikuti berbagai pelatihan yaitu:

Dewan Komisaris	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Prof.Dr.H. Fathurrahman Djamil, M.A	Workshop DSN MUI Tahun 2019	DSN MUI	21-22 Februari 2019
	Muzarakah 13 (Sinergi Antara Institusi Kewangan Islam & Obligasi Sosial: Isu dan Hala Tuju)	ISRA (<i>International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance</i>)	23-24 Juli 2019
	Workshop Pra Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Tahun 2019 Bidang Perbankan Syariah	DSN MUI	17 September 2019
	<i>Facing Challenges In Millenials Era</i>	PT. Bank BCA Syariah	9 & 12 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	PT. Bank BCA Syariah	10 Oktober 2019
Sutedjo Prihatono	Workshop Pra Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Tahun 2019 Bidang Perbankan Syariah	DSN MUI	17 September 2019

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan DPS selama tahun 2019.

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Ketua DPS	a. Ketua DPS pada Adira Finance (Perusahaan Pembiayaan) b. Ketua DPS pada AIA Insurance (Asuransi) c. Anggota DPS pada Bank CIMB Niaga Syariah (Perbankan)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (Perbankan)

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jenis Rapat

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah. Secara garis besar, DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dilakukan melalui rapat yang wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat dan merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Dalam pelaksanaannya, rapat DPS dihadiri oleh Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan unit-unit kerja.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat DPS adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda	FD	SP
1	22/01/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Desember 2018 2. Pembahasan Lain-Lain	√	√
2	19/02/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Januari 2019 2. Penyampaian Temuan Hasil Audit Terkait Aspek Syariah 3. Penyampaian Hasil Review Kebijakan/Ketentuan Produk/Operasional	√	√
3	19/03/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Februari 2019 2. Permohonan Opini Produk Pembiayaan	√	√
4	23/04/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Maret 2019 2. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah	√	√
5	21/05/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode April 2019 2. Penggunaan Dana Sosial Tahun 2018 dan 2010	√	√
6	25/06/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Mei 2019 2. Permohonan Opini: Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah	√	√
7	30/07/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Juni 2019 2. Pembahasan Lain-Lain	√	√
8	27/08/2019	1. <i>Financial Highlight</i> Pt. Bank BCA Syariah Periode Juli 2019 2. Permohonan Opini	√	√
9	24/09/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Agustus 2019 2. <i>Brainstorming : Short Term & Intraday Facility</i> 3. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi	√	√
10	22/10/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode September 2019 2. Pengalihan Fasilitas Pembiayaan	√	√
11	26/11/2019	1. Koordinasi DPS Dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode Oktober 2019	√	√
12	17/12/2019	1. <i>Financial Highlight</i> PT. Bank BCA Syariah Periode November 2019 2. Tindak Lanjut Hasil Audit	√	√

Keterangan:

FD: Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A

SP: Sutedjo Prihatono

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2019, jumlah rapat yang telah dilakukan DPS adalah total sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi dan kehadiran rapat adalah sebagai berikut.

Nama	Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS			Rapat Bersama Unit Kerja		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	12	12	100%	12	12	100%
Sutedjo Prihatono	12	12	100%	12	12	100%

PELAKSANAAN TUGAS DAN REKOMENDASI DPS

Hasil pengawasan DPS di Semester 1 (satu) dan 2 (dua) selama tahun 2019 telah tertuang dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Kertas Kerja Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2019.

DPS menyatakan bahwa seluruh produk, kebijakan, dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip syariah dan telah

mengikuti fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil atas analisis terhadap laporan yang disampaikan/diminta, *review* atas ketentuan, kegiatan uji petik maupun kunjungan lapangan.

Selama tahun 2019 DPS telah memberikan rekomendasi/opini syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank dalam bentuk Opini DPS sebagai berikut:

No.	No. Opini	Perihal
1	001/OP/DPS/2019	Penggunaan Asuransi Nasabah
2	002/OP/DPS/2019	Asuransi Pekerja
3	003/OP/DPS/2019	Produk Anjak Piutang
4	004/OP/DPS/2019	Konversi <i>Murabahah</i> menjadi MMQ
5	005/OP/DPS/2019	Rencana Pembukaan Layanan Syariah Bank (LSB) Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS-BPIH)
6	006/OP/DPS/2019	Rencana Tindak Lanjut Aktivitas <i>Co-Branding</i> BCA Syariah-KSEI
7	007/OP/DPS/2019	Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Nasabah
8	008/OP/DPS/2019	<i>Top Up</i> IMBT dengan Menggunakan Objek yang Sama
9	009/OP/DPS/2019	<i>Short Term Facility</i> dan <i>Intraday Facility</i>
10	010/OP/DPS/2019	Rencana Realisasi Pembiayaan Nasabah
11	011/OP/DPS/2019	Pengalihan Fasilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> menjadi Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
12	012/OP/DPS/2019	Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK Agustus 2019
13	013/OP/DPS/2019	Rencana <i>Take Over</i> Calon Nasabah
14	014/OP/DPS/2019	Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Peternak Ikan
15	015/OP/DPS/2019	Rencana <i>Take Over</i> Calon Nasabah
16	016/OP/DPS/2019	Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah
17	017/OP/DPS/2019	Rencana Kerjasama Sinergi Perbankan antara BCA Syariah dengan BCA dalam Bentuk <i>Co-Location</i>

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERDASARKAN SELF-ASSESSMENT

Kriteria Penilaian

Kriteria *Self-Assessment* DPS terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2019 secara mandiri (*Self-Assessment GCG*) yang

disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self-Assessment GCG* ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian *Self-Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) tahun 2019 BCAS adalah Peringkat 1 atau Sangat Baik dengan analisis antara lain:

Kriteria	Analisis
<i>Governance Structure</i>	Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang karyawan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
<i>Governance Process</i>	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
<i>Governance Outcome</i>	Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Anggaran Dasar BCAS, anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota DPS akan berakhir jika yang bersangkutan:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan
- Mengundurkan diri
- Meninggal dunia
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ utama tata kelola. Direksi secara kolektif bertanggung jawab atas manajemen dan operasional Bank, serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi didukung oleh komite-komite yang berada di bawah naungannya yaitu ALCO, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian, unit-unit kerja bisnis, unit-unit kerja pendukung serta unit-unit yang berfungsi dalam Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCAS telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal *Manual Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi *Manual Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Pedoman kerja Direksi mengatur hal-hal antara lain:

1. Komposisi Direksi;
2. Kriteria dan/atau Persyaratan Direksi;
3. Independensi Direksi;
4. Masa jabatan Direksi;
5. Rangkap jabatan Direksi;
6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
7. Aspek Transparansi Direksi;
8. Larangan bagi Direksi;
9. Kebijakan Remunerasi;
10. Komite-Komite Penunjang Direksi

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN DIREKSI

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas manajemen perusahaan untuk kepentingan Bank dan selalu mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip GCG.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, POJK, PBI, dan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi mengemban tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCAS untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCAS.
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal BCAS, Auditor Eksternal, DPS, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi, serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang dapat diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
8. Mengangkat anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCAS kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
10. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
11. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola Bank, memperhatikan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Melakukan kewajiban terkait dengan Rencana Bisnis Bank, yang mencakup:
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan

- Bank yang berkesinambungan.
- b. Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berdasarkan kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
 - c. Pelaporan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank.
13. Mengkomunikasikan kepada karyawan arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.

Direksi wajib memastikan bahwa BCAS telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank dan memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka:

1. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
2. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan Risiko.
3. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
4. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
5. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
6. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
7. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

8. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA DIREKSI

Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Pasal 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan manual GCG BCAS, komposisi Direksi harus memenuhi ketentuan jumlah, domisili dan komposisi yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi BCAS adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Presiden Direktur;
- 1 (satu) orang Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan,
- 2 (dua) orang Direktur Lainnya.

Anggota Direksi BCAS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Pengangkatan RUPS berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terkait Direksi, Direksi di BCAS memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal diterimanya persetujuan OJK, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun di antaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
3. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.

4. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran di mana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholder*.

SUSUNAN ANGGOTA, DASAR PENGANGKATAN, MASA JABATAN SERTA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Direksi diangkat oleh RUPS sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Direksi memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dan memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen serta mendorong peningkatan kinerja Bank.

Susunan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2019

Susunan Direksi sebelum RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Jakarta	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-53/D.03/2016 tanggal 4 Oktober 2016	-	2016-2019
Houda Muljanti	Direktur	Jakarta	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-48/D.03/2016 tanggal 28 September 2016	-	2016-2019
Tanti Indrawati	Direktur Kepatuhan	Bekasi, Jawa Barat	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah nomor 60 tanggal 30 Maret 2010	Keputusan BI No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010	-	2016-2019
Rickyadi Widjaja	Direktur	Jakarta	RUPLB 2017 tanggal 29 Agustus 2017	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.03/2018 tanggal 14 Februari 2018	-	2018-2019

Susunan Direksi Sesudah RUPS Tahunan 2019

Dalam RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2019, RUPS menyetujui mengangkat kembali John Kosasih sebagai Presiden Direktur, Houda Muljanti sebagai Direktur, Rickyadi Widjaja sebagai Direktur serta Pranata sebagai Direktur yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Jakarta	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-53/D.03/2016 tanggal 4 Oktober 2016	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022
Rickyadi Widjaja	Direktur	Jakarta	RUPLB 2017 tanggal 29 Agustus 2017	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.03/2018 tanggal 14 Februari 2018	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022
Houda Muljanti	Direktur (merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Jakarta	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-174/D.03/2019 tanggal 24 September 2019	-	2019-2022
Pranata	Direktur	Bekasi	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-176/D.03/2019 tanggal 24 September 2019	-	2019-2022

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi dan keahlian. Terkait keahlian Direksi BCAS telah dijelaskan pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Seluruh Direksi BCAS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut telah dibuktikan bahwa seluruh anggota Direksi BCAS telah memperoleh persetujuan OJK dan telah lulus *fit and proper test*.



Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja
John Kosasih	Presiden Direktur	50 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Master of Business Administration</i>, Newport University, USA (1997) · <i>Bachelor of Economics</i>, Murdoch University, Australia (1992) 	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur BCAS (2010-2019) - Wakil Presiden Direktur BCAS (2010-2016) - Senior Advisor Ketua Tim Personal Banking BCA, Senior Advisor Kepala Pengembangan Penjualan Perbankan Individu BCA dan Konsultan Strategi Pemasaran (2005-2008) - Senior Vice President Consumer Mass Market, Danamon (2000-2005) - Komisaris sebagai perwakilan BPPN pada PT Bank Risjad Salim Internasional (2000) - PT Bank Risjad Salim Internasional (1997-1999)
Rickyadi Widjaja	Direktur	56 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Commerce, Deakin University, Australia (1989) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup Analisa Risiko Kredit, Kepala Sub Divisi Kredit Komersial dan Ritel serta Wakil Kepala Divisi Kredit Komersial, BCA (1989 - 2018)
Tantri Indrawati*	Direktur Kepatuhan	57 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Magister Sains bidang Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2004) · Sarjana bidang Ekonomi Manajemen, Universitas Airlangga (1986) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan BCAS (2010-2019) - Direktur Kepatuhan serta Direktur Pelayanan dan Pendanaan Bank Syariah Bukopin (2008-2010) - Berbagai posisi manajerial di Bank Bukopin (1986-2008)
Houda Muljanti**	Direktur (merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	52 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Magister Manajemen International Business, Institut Manajemen Prasetya Mulya (2005) - Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (1990) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur BCAS (2016-2019) - Kepala Subdiv Human Capital Strategy and Solution, BCA (2012-2016) - Komisaris PT Sentul Damai Resort (2012-2016) - Kepala Subdiv Manajemen SDM, BCA (2006-2012) - Kabirol Pengembangan Kebijakan SDM, BCA (2001-2006) - PT SQ Centre Indonesia (1993-2001) - Japan International Cooperation Agency (1991-1993)
Pranata***	Direktur	43 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana bidang Teknik Informatika, Universitas Persada Indonesia (2002) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan, BCAS (2010- Sept 2019) - SAVP Financial and Control Team Leader Unit Usaha Syariah, Bank Danamon (2009-2010) - SAVP DSP SEMM Business Planning Head, Bank Danamon (2006-2009) - AVP DSP CMM Portfolio Management Head, Bank Danamon (2004-2006) - Senior Manager MIS Strategic Planning Departemen Head, Bank Danamon (2002-2004)

*) Masa jabatan Tantri Indrawati sebagai Direktur Kepatuhan berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dimulai pada tanggal 24 September 2019 menggantikan Tantri Indrawati

***) Masa jabatan Pranata sebagai Direktur dimulai pada tanggal 24 September 2019

PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara khusus pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
John Kosasih	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Audit Internal Bisnis & Komunikasi Teknologi Informasi & Logistik
Rickyadi Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Analisa Risiko Pembiayaan Operasi
Houda Muljanti	Direktur (merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko Kepatuhan Hukum dan Sumber Daya Manusia
Pranata	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Keuangan & Perencanaan Perusahaan Bisnis Ritel dan Konsumer

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Berdasarkan Manual GCG BCAS, program pelatihan anggota Direksi meliputi:

- Pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, strategi, dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan serta pengelolaan risiko Bank
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit, wewenang, waktu

kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain

- Pengetahuan tentang perbankan secara umum dan perbankan syariah

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tahun 2019, Direksi BCAS telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

Direksi	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
John Kosasih	<i>Regional Trends in Digital Banking and Fintech</i>	DIGIFORBANKERS 6	24 Juni 2019
	<i>Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"</i>	PT. Bank BCA Syariah	19-20 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)"</i>	PT. Bank BCA Syariah	20 September 2019
	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	PT. Bank BCA Syariah	09-12 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	PT. Bank BCA Syariah	10 Oktober 2019
	<i>Pelatihan Pemahaman Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan</i>	PT. Bank BCA Syariah	17 Oktober 2019

Direksi	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Tantri Indrawati*	<i>Planning Session 2020</i> Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"	PT. Bank BCA Syariah	19-20 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT</i> Tema "Pengenal Program <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)	PT. Bank BCA Syariah	20 September 2019
	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	PT. Bank BCA Syariah	09-12 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	PT. Bank BCA Syariah	10 Oktober 2019
Houda Muljanti**	HR People Analytics	ADVANCED MANAGEMENT CENTER	20-21 Maret 2019
	<i>Planning Session 2020</i> Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"	PT. Bank BCA Syariah	19-20 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT</i> Tema "Pengenal Program <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)	PT. Bank BCA Syariah	20 September 2019
Rickyadi Widjaja	<i>Planning Session 2020</i> Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"	PT. Bank BCA Syariah	19-20 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT</i> Tema "Pengenal Program <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)	PT. Bank BCA Syariah	20 September 2019
	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	PT. Bank BCA Syariah	09-12 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	PT. Bank BCA Syariah	10 Oktober 2019
Pranata***	Pengembangan Strategi Bisnis & BCAS Award	PT. Bank BCA Syariah	23 Januari 2019
	Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	PT. Bank BCA Syariah	25 Januari 2019
	<i>Refreshment Perbankan Syariah for Executive</i>	LPII	25 Maret 2019
	Pembekalan Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	EFEKTIF PRO	28 Maret 2019
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	30 Maret 2019
	<i>Planning Session 2020</i> Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"	PT. Bank BCA Syariah	19 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT</i> Tema "Pengenal Program <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)	PT. Bank BCA Syariah	20 September 2019
	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	PT. Bank BCA Syariah	09-12 Oktober 2019
<i>Millenial Kill Everything</i>	PT. Bank BCA Syariah	10 Oktober 2019	

*) Masa jabatan Tantri Indrawati sebagai Direktur Kepatuhan berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dimulai pada tanggal 24 September 2019 menggantikan Tantri Indrawati

***) Masa jabatan Pranata sebagai Direktur dimulai pada tanggal 24 September 2019

INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi lainnya, dan/atau anggota Dewan Komisaris dan DPS, atau hubungan keuangan dan/ atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Per 31 Desember 2019 informasi kepemilikan saham Direksi dalam BCAS maupun di perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:		
		BCAS	Bank Lain	Perusahaan Lain
John Kosasih	Presiden Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
Rickyadi Widjaja	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
Tantri Indrawati*	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil
Houda Muljanti**	Direktur (merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Nihil	Nihil	Nihil
Pranata***	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil

*) Masa jabatan Tantri Indrawati sebagai Direktur Kepatuhan berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dimulai pada tanggal 24 September 2019 menggantikan Tantri Indrawati

***) Masa jabatan Pranata sebagai Direktur dimulai pada tanggal 24 September 2019

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Daftar rangkap jabatan Direksi BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Tidak ada
Rickyadi Widjaja	Direktur	Tidak ada
Tantri Indrawati*	Direktur Kepatuhan	Tidak ada
Houda Muljanti**	Direktur (merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Tidak ada
Pranata***	Direktur	Tidak ada

*) Masa jabatan Tantri Indrawati sebagai Direktur Kepatuhan berakhir pada tanggal 24 September 2019

**) Masa jabatan Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dimulai pada tanggal 24 September 2019 menggantikan Tantri Indrawati

***) Masa jabatan Pranata sebagai Direktur dimulai pada tanggal 24 September 2019

RAPAT DIREKSI

Jenis Rapat

Pengungkapan Rapat Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan

dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat yang dihadiri Direksi yaitu:

- Rapat Direksi
- Rapat Dewan Komisaris & Direksi
- Rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
- Rapat Direksi bersama komite-komite di bawah Direksi

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah mengikuti 122 (seratus dua puluh dua) kali rapat.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda	JK	RW	HM	TI	PN
1	01/01/2019	Tutup buku Desember 2018	√	√	√	√	Belum menjabat sebagai Dewan Komisaris
2	02/01/2019	Presentasi Satuan Kerja Bisnis Ritel & Konsumer	√	-	√	√	
3	09/01/2019	1. Presentasi Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi 2. Presentasi Tim BIC	√	√	√	√	
4	10/01/2019	Presentasi Satuan Kerja Hukum & SDM	√	√	√	√	
5	10/01/2019	Presentasi Departemen Manajemen Risiko	√	√	-	√	
6	17/01/2019	1. Presentasi Satuan Kerja Audit Internal 2. Presentas Departemen Kepatuhan	√	√	√	√	
7	21/01/2019	Presentasi Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi	√	√	√	√	
8	23/01/2019	Presentasi Departemen Kepatuhan	√	√	√	√	
9	30/01/2019	Presentasi Satuan Kerja Audit Internal	√	√	√	√	
10	01/02/2019	Tutup buku Januari 2019	√	√	-	√	
11	13/02/2019	1. Presentasi Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi 2. Presentas Departemen Kepatuhan	√	√	√	√	
12	27/02/2019	Presentasi Satuan Kerja Hukum & SDM	√	√	√	√	
13	01/03/2019	Tutup buku Februari 2019	√	√	√	√	
14	01/04/2019	Tutup buku Maret 2019	√	√	√	√	
15	10/04/2019	Presentasi Satuan Kerja Hukum & SDM	√	√	√	√	
16	01/05/2019	Tutup buku April 2010	√	√	√	√	
17	15/05/2019	1. Presentasi Departemen Sentra Operasi 2. Presentasi Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan	√	√	√	√	
18	20/05/2019	Persiapan menghadapi libur Idul Fitri 2019	√	√	√	√	
19	22/05/2019	1. Presentasi Satuan Kerja Hukum & SDM 2. Presentasi Saruan Kerja TI & Logistik	√	√	√	√	
20	29/05/2019	Presentasi Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan	√	√	√	√	
21	01/06/2019	Tutup buku Mei 2019	√	√	√	√	
22	25/06/2019	Presentasi Divisi Operasi	√	√	√	-	
23	01/07/2019	Tutup buku Juni 2019	√	√	√	√	
24	04/07/2019	Presentasi Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan	√	√	√	√	
25	17/07/2019	1. Presentas Departemen Kepatuhan 2. Presentasi Satuan Kerja Audit Internal	√	√	√	√	
26	24/07/2019	Presentasi Divisi Operasi	√	√	√	√	
27	01/08/2019	Tutup buku Juli 2019	√	√	√	-	
28	02/08/2019	1. Presentasi Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan 2. Presentasi Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi	√	√	√	-	

No.	Tanggal Rapat	Agenda	JK	RW	HM	TI	PN
29	05/08/2019	Presentasi Satuan Kerja TI & Logistik serta Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi	√	√	√	√	
30	07/08/2019	1. Presentasi Panitia Rakernas 2020 2. Presentasi Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan	√	√	√	√	
31	14/08/2019	Presentasi Satuan Kerja Hukum & SDM	√	√	√	√	
32	28/08/2019	1. Presentasi Panitia Rakernas 2020 2. Presentasi Departemen Kepatuhan	-	√	√	√	
33	01/09/2019	Tutup buku Agustus 2019	√	√	√	√	
34	11/09/2019	Presentasi Departemen Manajemen Risiko	√	√	√	√	
35	18/09/2019	Presentasi Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan	√	√	√	√	
36	24/09/2019	Presentasi Satuan Kerja TI & Logistik, Satuan Kerja Hukum & SDM serta Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi	√	√	√	√	
37	25/09/2019	1. Presentasi Departemen Prosedur & Pendukung Operasi serta Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan 2. Presentasi Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi	√	√	√	√	
38	01/10/2019	Tutup buku September 2019	√	√	√		√
39	01/10/2019	Presentasi Divisi Operasi	√	√	√		-
40	02/10/2019	Presentasi Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan	√	√	√		√
41	16/10/2019	Presentasi Departemen Manajemen Risiko	√	√	√		-
42	23/10/2019	1. Presentasi Departemen Prosedur & Pendukung Operasi 2. Presentasi Satuan Kerja Audit Internal	√	√	√		-
43	01/11/2019	Tutup buku Oktober 2019	√	√	√		√
44	08/11/2019	Presentasi Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan	√	-	√		√
45	22/11/2019	Presentasi Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan	√	√	√		√
46	27/11/2019	1. Presentasi Satuan Kerja TI & Logistik 2. Presentasi Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi 3. Presentasi Satuan Kerja Hukum & SDM	√	√	√		√
47	29/11/2019	1. Presentasi Departemen Manajemen Risiko 2. Presentasi Departemen Kepatuhan dan Departemen Prosedur & Pendukung Operasi 3. Presentasi Satuan Kerja Hukum dan SDM	√	√	√		√
48	01/12/2019	Tutup buku November 2019	√	√	-		√
49	11/12/2019	1. Presentasi Departemen Kepatuhan 2. Presentasi Satuan Kerja TI & Logistik	√	√	√		√
50	11/12/2019	Presentasi Satuan Kerja Hukum dan SDM	√	√	√		√
51	16/12/2019	Koordinasi persiapan libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020	√	-	√		√
52	18/12/2019	1. Presentasi Departemen Kepatuhan 2. Presentasi Satuan Kerja Audit Internal	√	-	√		√

Keterangan:

JK : John Kosasih
 RW : Rickyadi Widjaja
 HM : Houda Muljanti
 TI : Tantri Indrawati
 PN : Pranata Nazamuddin

Frekuensi dan Peserta Rapat

Selama tahun 2019, jumlah rapat yang telah dilakukan Direksi adalah total sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kali dengan frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Direksi adalah sebagai berikut.

No	Nama Rapat	Jumlah Kehadiran Direksi				
		JK	RW	TI ¹	HM ²	PN ³
Rapat Direksi						
1	Jumlah Rapat	52	52	37	52	15
	Jumlah Kehadiran	51	48	34	49	12
	%	98%	92%	92%	94%	80%
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi						
2	Jumlah Rapat	12	12	9	12	3
	Jumlah Kehadiran	12	10	9	11	2
	%	100%	83%	100%	92%	67%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS						
3	Jumlah Rapat	12	12	9	12	3
	Jumlah Kehadiran	12	9	9	10	2
	%	100%	75%	100%	83%	67%
Rapat Komite ALCO						
4	Jumlah Rapat	12	12	9	12	3
	Jumlah Kehadiran	12	9	7	9	3
	%	100%	75%	78%	75%	100%
Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan						
5	Jumlah Rapat	1	1	1	1	0
	Jumlah Kehadiran	1	1	1	0	0
	%	100%	100%	100%	0%	-
Rapat Komite Pembiayaan⁴						
6	Jumlah Rapat	15	15	0	0	0
	Jumlah Kehadiran	11	15	0	0	0
	%	73%	100%	-	-	-
Rapat Komite Manajemen Risiko						
7	Jumlah Rapat	4	4	4	4	1
	Jumlah Kehadiran	4	4	2	3	0
	%	100%	100%	50%	75%	0%
Rapat Komite Pengarah Informasi Teknologi						
8	Jumlah Rapat	3	3	2	3	1
	Jumlah Kehadiran	3	1	1	1	1
	%	100%	33%	50%	33%	100%
Rapat Komite SDM						
9	Jumlah Rapat	5	5	4	5	1
	Jumlah Kehadiran	5	5	4	5	1
	%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian⁵						
10	Jumlah Rapat	6	6	6	6	-
	Jumlah Kehadiran	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-

Keterangan:

JK : John Kosasih
 RW : Rickyadi Widjaja
 HM : Houda Muljanti
 TI : Tantri Indrawati
 PN : Pranata Nazamuddin

- 1) Masa jabatan Tantri Indrawati sebagai Direktur Kepatuhan berakhir pada tanggal 24 September 2019
- 2) Houda Muljanti menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sejak tanggal 24 September 2019, menggantikan Tantri Indrawati
- 3) Pranata menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 24 September 2019
- 4) Anggota Komite Pembiayaan adalah John Kosasih dan Rickyadi Widjaja
- 5) Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian adalah Kepala Divisi dan menghasilkan rekomendasi untuk diberikan persetujuan kepada Direksi

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain mengenai:

1. Strategi bank
2. Produk dan layanan
3. Pembiayaan

serta agenda-agenda kerja lainnya.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Berdasarkan RUPS

Kriteria Penilaian

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham yang diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Pemegang Saham.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Dalam RUPS Tahunan 2019, Pemegang Saham telah menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang

telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan BCAS yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Melalui *Self-Assessment*

Kriteria Penilaian

Kriteria *Self-Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Direksi melakukan penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2019 secara mandiri (*Self-Assessment* GCG) yang disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian *Self-Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) tahun 2019 BCAS adalah Peringkat 1 atau Sangat Baik dengan analisis antara lain:

Kriteria	Analisis
<i>Governance Structure</i>	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Komite Penunjang Direksi: <ul style="list-style-type: none"> • Komite Pembiayaan • Komite Kebijakan Pembiayaan • Komite Manajemen Risiko • Komite Sumber Daya Manusia • <i>Asset & Liability Committee</i> • Komite Pengarah Teknologi Informasi • Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
<i>Governance Process</i>	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Kriteria	Analisis				
Governance Outcome	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:				
	dalam miliar Rupiah				
Keterangan	Des 2018 Audited	Des 2019 Un-Audited	YoY Growth	Des 2019 (RBB)	Achv RBB Des
Total Aset	7.064	8.629	22,15%	8.026	107,51%
Pembiayaan	4.900	5.645	15,22%	5.304	106,44%
DPK	5.506	6.205	12,69%	5.546	111,87%
Laba sebelum pajak	72,39	83,23	14,96%	75,08	110,85%
Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi <i>concern</i> utama BCAS hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum di atas > 100%.					

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Bank secara sehat, Direksi didukung oleh para Komite yaitu:

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Kebijakan Pembiayaan
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Pembiayaan
6. Komite Sumber Daya Manusia

7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Sepanjang tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha Bank, perekonomian, maupun regulasi. Berikut adalah data jumlah rapat komite yang diselenggarakan sepanjang tahun 2019.

Rapat	Jumlah Rapat
Komite Aset dan Liabilitas	12
Komite Kebijakan Pembiayaan	1
Komite Manajemen Risiko	4
Komite Pengarah Teknologi Informasi	3
Komite Pembiayaan	15
Komite Sumber Daya Manusia	5
Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	0
Total Rapat	40

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN

Berdasarkan Anggaran Dasar BCAS, Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Direksi akan berakhir jika yang bersangkutan:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan
- Mengundurkan diri
- Meninggal dunia
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi BCAS tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan

Direksi BCAS senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Nama dan Jabatan	Memiliki Hubungan Keuangan Dengan								Memiliki Hubungan Keluarga Dengan							
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		DPS		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yana Rosiana¹ Presiden Komisaris	√		√		√		√		√		√		√		√	
Tanti Indrawati² Presiden Komisaris	√		√		√		√		√		√		√		√	
Joni Handrijanto Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√		√	
Suyanto Sutjiadi Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√		√	
John Kosasih Presiden Direktur	√		√		√		√		√		√		√		√	
Houda Muljanti³ Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	√		√		√		√		√		√		√		√	
Rickyadi Widjaja Direktur	√		√		√		√		√		√		√		√	
Pranata⁴ Direktur	√		√		√		√		√		√		√		√	
Fathurrahman Djamil Ketua DPS	√		√		√		√		√		√		√		√	
Sutedjo Prihatono Anggota DPS	√		√		√		√		√		√		√		√	

Keterangan:

- 1) Masa jabatan Yana Rosiana sebagai Presiden Komisaris berakhir pada tanggal 24 September 2019
- 2) Tantri Indrawati menjabat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Yana Rosiana terhitung mulai tanggal 24 September 2019
- 3) Houda Muljanti menjabat sebagai Direktur Kepatuhan menggantikan Tantri Indrawati terhitung mulai tanggal 24 September 2019
- 4) Pranata menjabat sebagai Direktur terhitung mulai tanggal 24 September 2019

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI

Pada tahun 2019, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris serta perubahan dan penambahan susunan Direksi. Perubahan susunan Dewan Komisaris serta perubahan dan penambahan susunan Direksi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2019 dan hasilnya telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 18 Maret 2019 No. 57. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan.

Susunan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2019

Nama	Jabatan
Yana Rosiana	Presiden Komisaris
Joni Handrijanto	Komisaris Independen
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2019

Nama	Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris
Joni Handrijanto	Komisaris Independen
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen

Susunan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2019

Nama	Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur
Houda Muljanti	Direktur
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan
Rickyadi Widjaja	Direktur

Susunan Direksi Setelah RUPS Tahunan 2019

Nama	Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur
Houda Muljanti	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)
Rickyadi Widjaja	Direktur
Pranata	Direktur



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DPS

DASAR HUKUM PENGUNGKAPAN

Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 17 ayat 3, pasal 33 ayat 3, dan pasal 51 ayat 3 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank telah memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pekerja. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank terkait penerapan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam pemberian remunerasi. Kebijakan remunerasi di antaranya memuat tentang struktur remunerasi, metode, dan mekanisme penetapan remunerasi. Penyusunan kebijakan remunerasi telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Bank yang telah diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2019 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCAS No. 57 tanggal 6 Maret 2019, RUPS Tahunan 2019 telah memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:

- Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019.
- Menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2019.



INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi di antaranya sebagai berikut:

- Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, serta kinerja keuangan Bank.
- Kewajaran dengan Bank dalam satu peer, kesetaraan jabatan pada internal Bank dan pada beberapa Bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan DPS selama tahun 2019, Bank memberikan total remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dengan total mencapai Rp23,7 miliar.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut informasi rasio gaji karyawan BCAS:

STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura.

No	Keterangan	Rasio
1	Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	23,45x
2	Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,61x

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT, KOMITE MANAJEMEN RISIKO SERTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite di bawah Komisaris dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris BCAS membentuk Komite Dewan Komisaris yang fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, adapun keputusan akhir tetap

di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite Dewan Komisaris di BCAS terdiri dari:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Tanggung jawab utama Komite Audit termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Bank disampaikan dengan akurat dan tepat waktu.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/ DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup:
 - a. Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian setiap Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SAI).
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik Terdaftar, DPS dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
2. Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar dan memastikan memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam penunjukannya.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal.

4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCAS terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS.
5. Melakukan *review* Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
6. Melakukan pembahasan dengan SAI atas hasil-hasil audit yang dipandang cukup signifikan, minimal 3 bulan sekali.
7. Menghadiri *exit meeting* hasil audit internal.

Persyaratan Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
3. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - d. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet
4. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur dan Komposisi Komite Audit

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Audit:

1. Anggota Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli dibidang perbankan syariah.
3. Anggota Komite Audit, bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah maupun Bank lain.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
5. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	6 Maret 2019 s/d 5 Maret 2022
Tantri Indrawati	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 November 2019 s/d 5 Maret 2022
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2020
J. Sindu Adisuwono	Perbankan Umum, Akuntansi dan Audit	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2020

Profil Komite Audit



Joni Handrijanto
Ketua Komite Audit

Joni Handrijanto juga merupakan anggota Dewan Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.



Tantri Indrawati
Anggota Komite Audit

Tantri Indrawati juga merupakan Presiden Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian profil Dewan Komisaris.



Riyo S. Wisaksono
Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Salatiga, 1 April 1955

Usia
64 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak tahun 2017. Diangkat sebagai anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/KOM/2018 untuk periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Pendidikan Terakhir

Doktorandus bidang Ekonomi Perusahaan
Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Perjalanan Karir

Pernah berkarier di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997) dan Bank CIC International (1998-2005). Beliau berpengalaman sebagai *Senior Consultant* di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010). Terakhir beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCAS (2010-2017).

Kepemilikan Saham BCAS

Nihil.



J. Sindu Adisuwono
Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan
Indonesia.

Domisili
Jakarta.

Tempat dan Tanggal Lahir
Salatiga, 13 Oktober 1962

Usia
57 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 003/SKP/KOM/2018 untuk periode jabatan 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Pendidikan dan Pelatihan:

Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.

Perjalanan Karir:

Berkarier di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial di antaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Berpengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk, Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk, anggota The Institute of Internal Auditor, Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (2014-2017), dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank periode (2017-2020).

Kepemilikan Saham BCAS

Nihil.

Program Pelatihan dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Audit Tahun 2019

Selama tahun 2019, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Audit	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Joni Handrijanto	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
J. Sindu Adisuwono	<i>Certification in Audit Committee Practices</i>	IKAI	6 Agustus 2019

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Joni Handrijanto	Tantri Indrawati	Riyo S. Wisaksono	J. Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan dengan total 8 (delapan) sepanjang tahun 2019 dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran dan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2019:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Joni Handrijanto	Ketua	8	8	100%
Tantri Indrawati*	Anggota	-	-	-
Riyo S. Wisaksono	Anggota	8	8	100%
Sindu Adisuwono	Anggota	8	8	100%

*) Tantri Indrawati mulai bergabung di Komite Audit pada tanggal 1 November 2019

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2019

Aktivitas yang dilakukan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap Laporan Hasil Audit, antara lain terhadap Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, prosedur kerja, dan penerapan prinsip syariah.
- Evaluasi *monitoring* tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.
- Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan Periode 31 Desember 2019
- oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan.
- Rekomendasi penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan.
- Evaluasi Rencana dan Realisasi Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Evaluasi terhadap Pengawasan Internal Cabang (PIC)
- Menghadiri *exit meeting* Audit Internal

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan

fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar penilaian kinerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan KAP, rencana kerja SKAI, dan temuan laporan hasil audit.
Program Kerja	Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit Tahun 2019.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan komite bentukan Komisaris guna membantu tugas Dewan Komisaris dalam memantau dan mengelola profil risiko di BCA Syariah dengan melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko, melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Hasil kerja Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sebuah rekomendasi.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite Pemantau Risiko telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mencakup hal-hal berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya sebagai sub organ dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan:
 - a. Evaluasi tentang kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan melalui mekanisme pembahasan mengenai metodologi pengendalian risiko terkini dan kepastian pemberian pembiayaan dari Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan serta perkembangan isu-isu risiko operasional perbankan terkini dari Departemen Manajemen Risiko.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko pembiayaan; risiko pasar; laporan profil risiko; perkembangan isu-isu operasional perbankan terkini; penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan hasil *stress test* untuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas.
3. Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.

4. Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

Persyaratan Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Pemantau Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCAS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
5. Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi, serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- c. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami profil risiko BCAS.
- d. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur dan Komposisi Komite Pemantau Risiko

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko.
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko, bukan merupakan anggota Direksi BCAS maupun Bank lain.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
5. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	6 Maret 2019 - 5 Maret 2022
Tantri Indrawati	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 November 2019 s/d 5 Maret 2022
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 September 2018 - 31 Agustus 2020
Iwan Wiwoho B	Perbankan Umum, Perbankan Syariah	Anggota	1 September 2018 - 31 Agustus 2020

Profil Komite Pemantau Risiko



Suyanto Sutjiadi
Ketua Komite Pemantau Risiko

Suyanto Sutjiadi juga merupakan anggota Dewan Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.



Tantri Indrawati
Anggota Komite Pemantau Risiko

Tantri Indrawati juga merupakan Presiden Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.



Riyo S. Wisaksono
Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Salatiga, 1 April 1955

Usia
64 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak tahun 2017. Diangkat sebagai anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/KOM/2018 untuk periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Pendidikan Terakhir
Doktorandus bidang Ekonomi Perusahaan
Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Perjalanan Karir
Pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997) dan Bank CIC International (1998-2005). Beliau berpengalaman sebagai *Senior Consultant* di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010). Terakhir beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCAS (2010-2017).

Kepemilikan Saham BCAS
Nihil.



Iwan Wiwoho B.
Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 26 April 1956

Usia
63 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2017. Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 002/SKP/KOM/2018 untuk periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Pendidikan Terakhir
Sarjana bidang Ekonomi
Universitas Complutense Madrid, Spanyol

Master of Business Administration
Instituto de Empresa, Madrid, Spanyol

Perjalanan Karir
Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCAS (2015-2017). Berkarier di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda, dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Pernah berkarier di Industri Pesawat Terbang Nusantara- IPTN (1983-1987) dan *Construcciones Aeronauticas SA (CASA)*.

Kepemilikan Saham BCAS
Nihil.

Program Pelatihan dan Pengembangan yang Diikuti Komite Pemantau Risiko di Tahun 2019

Selama tahun 2019, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Audit	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Suyanto Sutjiadi	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Tantri Indrawati	<i>Refrhment APU PPT dengan tema "Pengenaln Program Mutual Evaluation Review (MER) terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)</i>	BCA Syariah	20 September 2019
	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Riyo S. Wisaksono	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Iwan Wiwoho B	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019

Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau

hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Tantri Indrawati	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Suyanto Sutjiadi	Ketua	4	4	100%
Tantri Indrawati*	Anggota	-	-	-
Riyo S. Wisaksono	Anggota	4	4	100%
Iwan Wiwoho B	Anggota	4	4	100%

*) Tantri Indrawati mulai bergabung di Komite Pemantau Risiko pada tanggal 1 November 2019

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas laporan keuangan Perseroan.
2. Evaluasi terhadap profil risiko.
3. Evaluasi terhadap portofolio pembiayaan dan DPK.
4. Pemantauan kualitas pembiayaan dengan kualitas rendah dan *Non Performing Financing* (NPF) dan *progress action plan*.
5. Evaluasi terhadap realisasi penyaluran pembiayaan termasuk realisasi dan eksposur pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, segmentasi, tujuan pembiayaan.
6. Penerapan Program APU dan PPT di BCAS
7. Evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dengan memperhatikan *self-assessment* yang dilakukan Bank.
8. Evaluasi terhadap penerapan ketentuan kualitas Aset khususnya pembiayaan, penempatan bank lain, restrukturisasi pembiayaan, hapus buku dan hapus tagih.
9. Evaluasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan indikator profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan Bank.

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau

Risiko memastikan bahwa sistem manajemen risiko memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCAS.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Bank.
Program Kerja	Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2019.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/ DIR/2014 perihal *Manual Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi *Manual Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi BCAS dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketaatan dalam pelaksanaannya.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCAS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
6. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Persyaratan Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- c. Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCAS.
- d. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur dan Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua komite dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) anggota yang terdiri dari Presiden Komisaris, Komisaris Independen, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Berikut adalah rincian komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2019:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Tantri Indrawati	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Ketua	1 November 2019 - 5 Maret 2022
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	1 November 2019 - 5 Maret 2022
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	1 September 2019 - 31 Agustus 2022
Endang Ruslina	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota/Kepala SKHSDM	Sejak 5 April 2010

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi



Tantri Indrawati

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Tantri Indrawati juga merupakan Presiden Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.



Joni Handrijanto

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Joni Handrijanto juga merupakan anggota Dewan Komisaris BCAS. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.



Suyanto Sutjiadi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Suyanto Sutjiadi juga merupakan anggota Dewan Komisaris BCAS. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.


Yana Rosiana*

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan
Indonesia.

Domisili
Bekasi

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 25 September 1953

Usia
66 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan:

Diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris BCAS sekaligus anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-49/D.03/2016 tanggal 28 September 2016 melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2016 untuk periode jabatan sampai dengan tahun 2019.

Pendidikan dan Pelatihan:

Diploma di bidang Manajemen Keuangan dari STIE Perbanas Surabaya.

Perjalanan Karir:

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris BCAS, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2010 sampai dengan Oktober 2016. Beliau dipercaya sebagai Tim Kuasa Direksi BCA dalam proses akuisisi dan konversi PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah (2008-2010). Mengawali karir di BCA sejak tahun 1975 dan telah memangku berbagai jabatan manajerial di BCA seperti Kepala Kantor Wilayah IX (2000- 2008), Pemimpin Kantor Cabang Korporasi Sudirman (1996- 2000), dan sebagai Kepala Biro Sistem dan Prosedur (1990- 1996).

Kepemilikan Saham BCAS

Nihil


Endang Ruslina

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan
Indonesia.

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Solo, 20 Agustus 1965

Usia
54 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal *Manual Good Corporate Governance* yaitu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang pejabat eksekutif yang membawahi unit kerja SDM.

Endang Ruslina menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 182/SKPK/SKHSKM/IV/2010

Pendidikan dan Pelatihan:

Sarjana di bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCAS sejak tahun 2010 sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di PT Bank BCA Tbk (1989-2010) dan memegang berbagai jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Senior Officer di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas.

Kepemilikan Saham BCAS

Nihil

*) Masa jabatan Yana Rosiana sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 24 September 2019

Program Pelatihan dan Pengembangan yang Diikuti Komite Remunerasi dan Nominasi di Tahun 2019

Selama tahun 2019, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Tantri Indrawati	<i>Refreshment</i> APU PPT dengan tema "Pengenalan Program <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i> terhadap Indonesia oleh <i>Financial Action Task Force (FATF)</i>	BCA Syariah	20 September 2019
	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Joni Handrijanto	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Suyanto Sutjiadi	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Yana Rosiana*	-	-	-
Endang Ruslina	Pembekalan Perundingan PKB	BCA Syariah	08 Januari 2019
	Pengembangan Strategi Bisnis & BCAS Award	BCA Syariah	23 Januari 2019
	Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCA Syariah	25 Januari 2019
	Pembekalan Perundingan PKB	MMS Law Office	18 Februari 2019
	Seminar HR Director	INTIPESAN	19 Februari 2019
	HR People Analytics	Advanced Management Center	20-21 Maret 2019
	Pelatihan <i>Beautiful Life</i> BCA Tahap 1	BCA Learning Service	26-30 Agustus 2019
	<i>Planning Session 2020</i> dengan Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"	BCA Syariah	19-20 September 2019
	<i>Refreshment</i> APU PPT dengan Tema "Pengenalan Program <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i> Terhadap Indonesia Oleh <i>Financial Action Task Force (FATF)</i>	BCA Syariah	20 September 2019
	<i>Experiential Learning Games</i>	Dr. Hendricus yani	28 September 2019
	<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
	Pelatihan <i>Beautiful Life</i> Tahap 2 BCA	BCA Learning Service	15-18 Oktober 2019

*) Masa jabatan Yana Rosiana sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 24 September 2019

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang

dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	Yana Rosiana*	Endang Ruslina
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√	√

*) Masa jabatan Yana Rosiana sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 24 September 2019

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Tantri Indrawati*	Ketua	1	1	100%
Joni Handrijanto**	Ketua/Anggota	4	3	75%
Yana Rosiana***	Anggota	3	3	100%
Suyanto Sutjiadi	Anggota	4	4	100%
Endang Ruslina	Anggota/Kepala SKHSDM	4	4	100%

*) Tantri Indrawati menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 1 November 2019

**) Joni Handrijanto sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dan mulai menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mulai tanggal 1 November 2019

***) Masa jabatan Yana Rosiana sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 24 September 2019

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pembahasan nominasi pengurus BCAS periode 2019-2022
2. Presentasi evaluasi kebijakan remunerasi pekerja
3. Pembahasan nominasi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan periode 2019-2022
4. Usulan perubahan komposisi keanggotaan komite di bawah Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior, dan karyawan secara keseluruhan.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait nominasi pengurus BCAS, kebijakan remunerasi pekerja dan berbagai rekomendasi terkait remunerasi dan nominasi lainnya.
Program Kerja	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi untuk Tahun 2019.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh komite dan organ di bawah Direksi, yaitu:

Komite-komite di bawah Direksi:

- Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Sumberdaya Manusia
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Organ-Organ di bawah Direksi:

- Sekretaris Perusahaan
- Satuan Kerja Audit Internal
- Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi.

Secara umum, fungsi komite adalah:

1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya
2. Membantu Direksi dalam merumuskan pemecahan masalah

3. Memberikan pertimbangan atau masukan mengenai suatu masalah sesuai dengan bidangnya
4. Memantau dan mengevaluasi masalah sesuai bidangnya

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi. ALCO memiliki misi untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).

Susunan ALCO

Susunan ALCO terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*asset and liabilities management*).
- Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.
- Narasumber, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang nara sumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Ketua	Presiden Direktur
Sekretaris	Kepala Unit Kerja Treasury
Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis • Direktur Kepatuhan • Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Keuangan • Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi • Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan • Kepala Departemen Manajemen Risiko • Kepala Unit Kerja <i>Treasury</i>
Kelompok Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja Perencanaan & Keuangan • Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi • Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan • Kepala Departemen Manajemen Risiko • Kepala Unit Kerja <i>Treasury</i>

Uraian Fungsi Pokok dan Wewenang ALCO

Fungsi pokok:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimum.

Wewenang:

Komite mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi seperti:

- Menetapkan nisbah bagi hasil atau bonus untuk produk deposito, tabungan dan giro
- Menetapkan nisbah bagi hasil atau tingkat margin pembiayaan
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko bagi hasil/margin bank syariah lainnya, sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan

Ketua	Presiden Direktur
Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan
Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Direktur Bisnis • Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi • Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan • Kepala Satuan Kerja Audit Internal • Kepala Departemen Manajemen Risiko • Kepala Departemen Kepatuhan • Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi

Pelaksanaan Kegiatan ALCO

Selama tahun 2019, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rekapitulasi agenda rapat antara lain membahas tentang aset dan liabilitas Bank dan distribusi bagi hasil.

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi. Komite Kebijakan Pembiayaan juga berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi yang mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat, dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Uraian Fungsi Pokok dan Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan

Fungsi pokok:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- Memantau perkembangan dan kondisi portfolio pembiayaan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

Wewenang:

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Kebijakan Pembiayaan

Selama tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda rapat membahas tentang usulan perubahan ketentuan pembiayaan.

KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar bank dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Susunan Komite Pembiayaan

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bisnis serta pejabat eksekutif di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang terkait dengan bidang pembiayaan.

Ketua	a. Presiden Direktur (tingkat kedua dan ketiga) b. Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (tingkat pertama)
Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan
Anggota Komite	Tingkat Pertama: <ul style="list-style-type: none"> · Kepala Cabang · Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer · <i>Senior Officer</i> Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer · Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi · <i>Senior Officer</i> Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan Tingkat Kedua: <ul style="list-style-type: none"> · Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer · Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi · Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan Tingkat Ketiga: <ul style="list-style-type: none"> · Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi · Direktur yang membidangi Tingkat Keempat: <ul style="list-style-type: none"> · Presiden Direktur · Direktur yang membidangi

Uraian Fungsi Pokok dan Wewenang Komite Pembiayaan

Fungsi Pokok:

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Assets Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

Wewenang:

- Dari segi besarnya kewenangan:
 - Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
- Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
 - Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/ pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pembiayaan

Selama tahun 2019, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan agenda rapat membahas tentang berbagai hal tentang pembiayaan nasabah.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi dengan fungsi pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Susunan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Kepala Departemen Manajemen Risiko
Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Direktur Bisnis • Kepala Departemen Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan • Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM
Anggota Tidak Tetap Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi • Kepala Divisi Operasi • Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Uraian Fungsi Pokok dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

Fungsi Pokok:

- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)

Wewenang:

KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat antara lain membahas tentang profil risiko BCAS.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk memastikan BCAS memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

- Personalia Komite, sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur yang membawahi Unit Kerja Teknologi Informasi, Direktur yang membawahi Unit Kerja Manajemen Risiko, Pejabat Tertinggi yang membawahi Unit Kerja Penyelenggara teknologi informasi dan Pejabat Tertinggi yang membawahi Unit Kerja Pengguna Utama Teknologi Informasi.
- Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite khususnya dalam memantau efektivitas dan efisiensi perencanaan dan implementasi investasi teknologi informasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Ketua (merangkap anggota)	Presiden Direktur
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Departemen Teknologi Informasi
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Direktur Kepatuhan • Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik • Kepala Divisi Operasi • Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi • Kepala Satuan Kerja Audit Internal • Kepala Departemen Manajemen Risiko • Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi • Kepala Departemen Teknologi Informasi
Koordinator Kelompok Kerja	Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik
Anggota Tetap Pokja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi • Kepala Divisi Operasi • Kepala Departemen Teknologi Informasi • Kepala Departemen Manajemen Risiko • Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi
Anggota Tidak Tetap Pokja	Unit Kerja yang terkait dengan proyek

Uraian Fungsi Pokok dan Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Fungsi Pokok:

Fungsi pokok komite yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.

Wewenang:

- Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
- Memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi selaras dengan tujuan perusahaan.
- Merekomendasikan dan memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
- Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
- Memastikan bahwa Bank dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat antara lain membahas tentang laporan update dan evaluasi aktivitas serta rencana proyek Teknologi Informasi.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi yang memiliki misi untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan strategi perusahaan.

SUSUNAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan Komite Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja.
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal.

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Ketua (merangkap anggota)	Presiden Direktur
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Direktur Bisnis

Uraian Fungsi Pokok dan Wewenang Komite Sumber Daya Manusia

Fungsi Pokok:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten
- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM

- Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Wewenang:

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan SDM.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2019, Komite Sumber Daya Manusia telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda rapat antara lain membahas tentang remunerasi pekerja, penilaian kinerja, kenaikan gaji berkala dan bonus serta rencana pembukaan cabang.

KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi yang memiliki misi memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

- Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.
- Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian terdiri atas:

Struktur dan Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Ketua (merangkap anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Kepala Departemen Audit Internal
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> · Kepala Satuan Kerja Audit Internal · Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik
Anggota Tidak Tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/ Kepala Cabang yang membawahi karyawan yang melakukan pelanggaran dan/ atau kejahatan

Uraian Fungsi Pokok dan Wewenang Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Fungsi Pokok:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan
- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan

Wewenang:

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Selama tahun 2019, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan membahas kasus-kasus kepegawaian yang terjadi di BCAS.

ORGAN DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola, serta menjembatani kepentingan antara Bank dengan pemegang saham, regulator, nasabah, dan *stakeholder* lainnya melalui komunikasi yang baik dan terpelihara. Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi kesekretariatan, hubungan masyarakat, pengarsipan, dan penanganan dokumen Bank secara keseluruhan serta menjamin kerahasiaannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

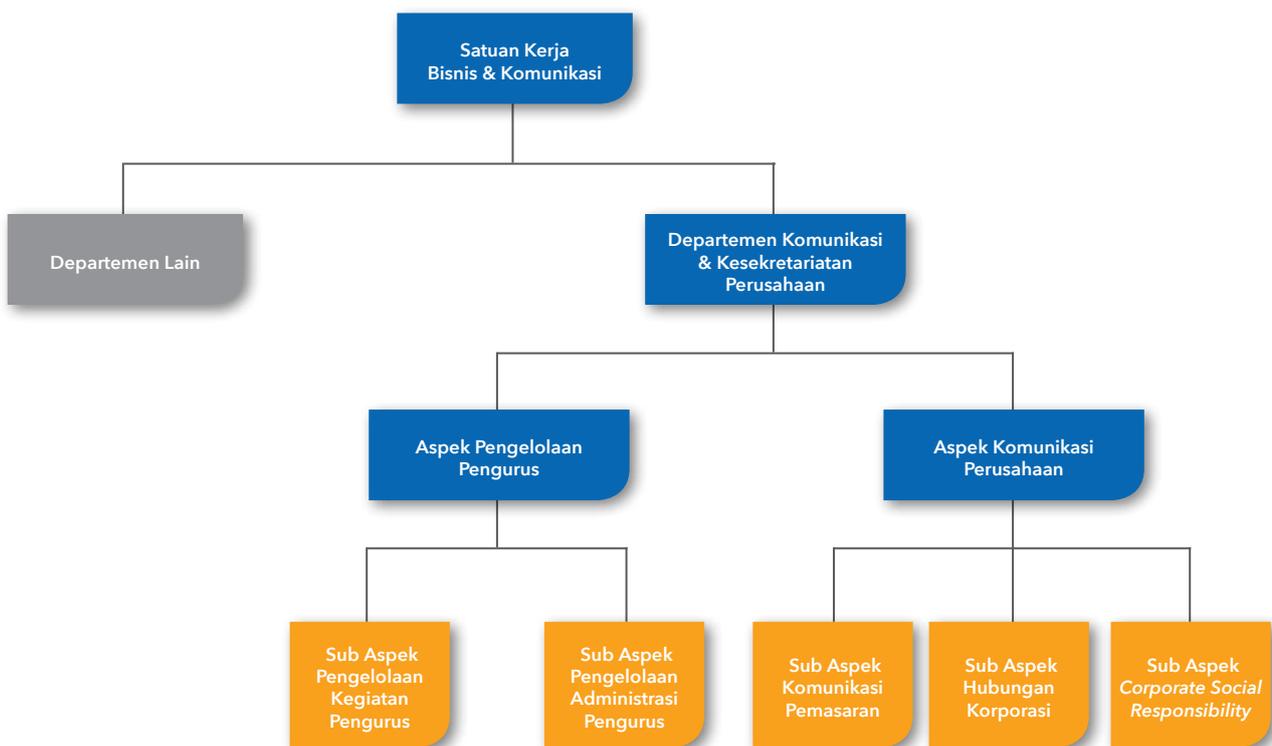
1. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Memberi saran pada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait industri dalam mengambil langkah untuk usaha Bank.
3. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam tata kelola perusahaan yang meliputi:

- a. Menyediakan informasi melalui situs web Bank dalam rangka mendukung keterbukaan informasi pada publik.
 - b. Menyampaikan laporan pada Regulator dengan tepat waktu.
 - c. Mempersiapkan penyelenggaraan dan dokumentasi rapat yang melibatkan pengurus Bank.
4. Perantara antara Bank dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan Regulator.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2018 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Aspek Pengelolaan Pengurus, Aspek Komunikasi Pemasaran, Aspek Hubungan Korporasi, dan Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:



Profil Sekretaris Perusahaan



Nadia Amalia Sekarsari
Sekretaris Perusahaan

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi

Tempat dan Tanggal Lahir
Purwokerto, 23 Juni 1982

Usia
37 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan:
Ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

Pendidikan dan Pelatihan:
Sarjana di bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Perjalanan Karier:
Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarier di PT BCA Tbk sebagai Associate Officer Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

Periode dan Masa Jabatan
Sejak tahun 2016

Kepemilikan Saham BCAS
Nihil

Program Pelatihan dan Pengembangan yang Diikuti Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Periode Pelaksanaan
Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCA Syariah	25 Januari 2019
<i>Annual Report Workshop</i> Berbasis Kriteria <i>Annual Report Award</i> 2018	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)	2-3 Mei 2019
<i>Workshop Corporate Secretary (Basic - Intermediate Level)</i>	PT. Solution Centre Indonesia / Spectra Centre	15-17 Mei 2019
<i>Planning Session</i> 2020 dengan Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCA Syariah	19-20 September 2019
<i>Refreshment</i> APU PPT dengan Tema "Pengenalan Program <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)	BCA Syariah	20 September 2019
<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 & 12 Oktober 2019
<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Pelatihan Pemahaman Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	BCA Syariah	17 Oktober 2019

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2019 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek Pengelolaan Pengurus
 - Mengelola rapat pengurus yang meliputi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.
 - Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.
 - Melakukan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank dan nasabah.
 - Mengkoordinasikan penyampaian informasi dari dan ke eksternal maupun internal.
 - Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.
 - Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.
- b. Aspek Komunikasi Pemasaran
 - Melakukan kegiatan komunikasi eksternal terkait produk dan layanan Bank kepada nasabah melalui berbagai media maupun kegiatan komunikasi internal kepada karyawan.
 - Menyusun dan merumuskan identitas Bank dan memantau penerapannya.
 - Menangani program pemasaran produk-produk terbaik Bank.
 - Melaksanakan kegiatan pemasaran secara mandiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain seperti OJK atau Grup BCA.
 - Mengkoordinasikan materi pemasaran (*marketing collateral*) di kantor pusat maupun cabang.
- c. Aspek Hubungan Korporasi
 - Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pengelolaan citra perusahaan.
 - Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.
 - Mengelola situs Bank.
 - Mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan media.
 - Menjalin hubungan strategis dengan media

melalui berbagai kegiatan seperti media *gathering* dan media *visit*

- Melaksanakan pelatihan bagi para pelaku media untuk meningkatkan pemahaman media mengenai perbankan syariah seperti pelatihan dasar perbankan syariah.
- d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 - Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan memantau pelaksanaannya.
 - Mengkomunikasikan kegiatan CSR untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media.
 - Menjalin kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan CSR seperti Lembaga Amil Zakat atau yayasan untuk kaum dhuafa.
 - Melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah atau masyarakat.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan aspek syariah.

Misi SKAI adalah memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam membangun budaya kedisiplinan, kepatuhan dan meningkatkan supervisi dengan tetap berorientasi kepada kebutuhan nasabah di seluruh unit kerja, melalui pemeriksaan yang independen, obyektif, sesuai kerangka tata kelola perusahaan dan terintegrasi dengan induk.

Piagam Audit Intern

Piagam Audit Intern BCAS telah disetujui dan disahkan oleh Direksi pada tanggal 28 Mei 2019 melalui Surat Keputusan Direksi No. 043/SK/DIR/2019.

Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

- a. Pelaksanaan audit
- b. Inisiasi komunikasi dengan auditee
- c. Pemeriksaan aktivitas Bank; dan

- d. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen

Isi dari Piagam Audit Intern BCAS ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

- Definisi Piagam Audit Intern
- Pengkinian Piagam Audit Intern

BAB 2 Satuan Kerja Audit Internal

- Misi SKAI
- Struktur dan Kedudukan SKAI
- Tugas Pokok dan Tanggung Jawab SKAI
- Cakupan Aktivitas SKAI
- Wewenang SKAI
- Kode Etik Audit Intern
- Persyaratan Auditor Intern
- Pertanggungjawaban SKAI
- Independensi SKAI
- Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala SKAI
- Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan
- Penggunaan Tenaga Ahli
- Standar Profesional dan Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ekstern
- Masa Tunggu (*Cooling - Off Period*) Anggota SAI dan Pihak Eksternal

Tugas Pokok, Tanggung Jawab & Wewenang Satuan Kerja Audit Internal

Tugas Pokok

Berikut ini adalah tugas pokok Kepala dan segenap staf SKAI:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
5. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko, tidak menyebabkan pengalihan

tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

Tanggung Jawab SKAI

Berikut ini adalah tanggung jawab Kepala dan segenap staf SKAI:

1. Mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern
2. Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Intern
3. Menggunakan kemahirannya dengan seksama dalam melaksanakan tugasnya
4. Memelihara integritas dan obyektivitas atau sikap mental yang independen
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/keputusan pengadilan

Wewenang SKAI

Berikut ini adalah wewenang SKAI:

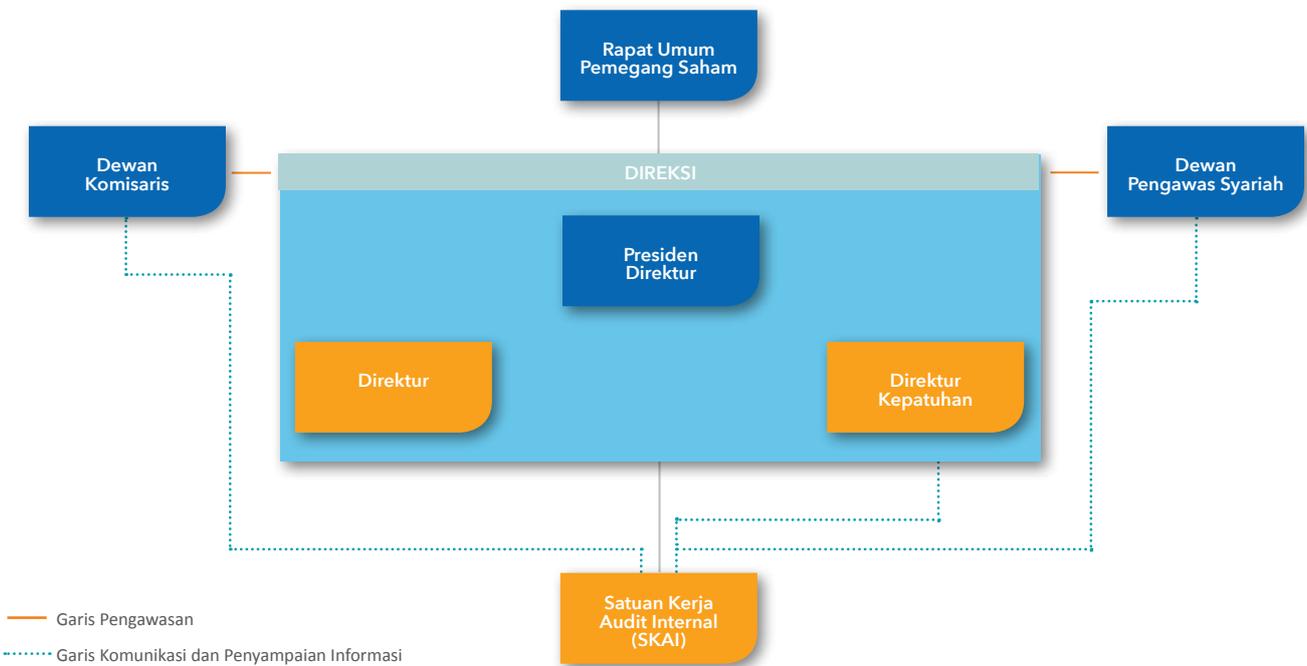
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis
6. Melakukan koordinasi dengan Audit Internal Induk Perusahaan dalam rangka penerapan fungsi audit intern terintegrasi

Struktur Kedudukan dan Organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Struktur Kedudukan

SKAI merupakan bagian dari struktur organisasi BCAS dan dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.

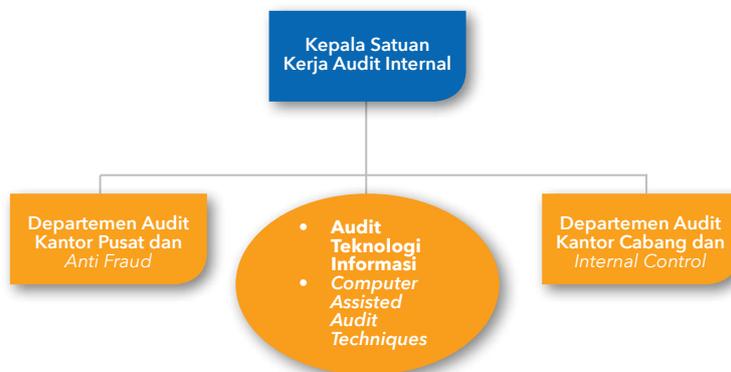
Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS:



Struktur Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal control*) yang

melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Karyawan SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:



Jumlah Anggota Satuan Audit Internal

Per 31 Desember 2019, jumlah personil SKAI BCAS adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian komposisi sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
Kepala Satuan	1
Kepala Departemen	0
Auditor	17
Internal Control	10
Admin	1
Jumlah	29

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal

Pengembangan kompetensi auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit. Rincian jumlah karyawan yang telah memperoleh sertifikasi sampai Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah
1	Sertifikasi Risk Management	14
2	Sertifikasi QIA	1
3	Sertifikasi Auditor (IAIB)	2
4	Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	29

Profil Kepala Satuan Audit Internal



Ammy Hosea Susanto
Kepala Satuan Audit Internal

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Cirebon, 11 Desember 1965

Usia
54 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan:
Surat Tugas PT Bank BCA Syariah No.073/ST/HSD/2011 tanggal 09 September 2011 dan No.095/ST/HSD/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat No.173/DIR/2011 tanggal 20 September 2011.

Pendidikan dan Pelatihan:
S2 Magister Manajemen Keuangan, LPPM (2004)
S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Tarumanagara (1989)

Perjalanan Karier:
Berkarir di PT BCA Tbk sejak tahun 1989 sampai tahun 2011 sebagai staf audit hingga advisor audit. Di tahun 2011 sampai dengan sekarang berkarier sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal BCAS.

Periode dan Masa Jabatan
Sejak tahun 2011

Kepemilikan Saham BCAS
Nihil.

Program Pelatihan dan Pengembangan yang diikuti Kepala Satuan Audit Internal Tahun 2019

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Periode Pelaksanaan
Pengembangan Strategi Bisnis & BCAS Award	BCA Syariah	23 Januari 2019
Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCA Syariah	25 Januari 2019
<i>Presentation & Communication Skill</i>	BCA Syariah	14-15 Februari 2019
Microsoft Excell-Intermediate	BCA Syariah	04-05 April 2019
National Anti Fraud Conference (NAFC)	ACFE	09-11 Juli 2019
<i>Beautiful Life</i> BCA Tahap 1	BCA Learning Service	26-30 Agustus 2019
Planning Session 2020 dengan Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"	BCA Syariah	19-20 September 2019
Refreshment APU PPT dengan Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)	BCA Syariah	20 September 2019
<i>Facing Challenges In Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 & 12 Oktober 2019
<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Pelatihan <i>Beautiful Life</i> Tahap 2 BCA	BCA Learning Service	15-18 Oktober 2019

Program Pelatihan dan Pengembangan yang Diikuti SAI di Tahun 2019

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2019 baik eksternal maupun internal, antara lain:

Pelatihan Internal

Pelatihan Internal	Penyelenggara	Tanggal
Pengembangan Strategi Bisnis dan BCAS Award	BCA Syariah	23 Januari 2019
Kepemimpinan Piawai dan Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCA Syariah	25 Januari 2019
Manajemen Risiko Operasional (MRO)	BCA Syariah	29 Januari 2019, 29 Maret 2019, 08 Mei 2019, 14 Agustus 2019
Penerapan APU dan PPT	BCA Syariah	29 Januari 2019, 27 Maret 2019, 29 Maret 2019, 08 Mei 2019, 17 Juni 2019, 14 Agustus 2019, 03 September 2019
Risiko Kepatuhan	BCA Syariah	29 Januari 2019, 27 Maret 2019, 29 Maret 2019, 08 Mei 2019, 17 Juni 2019, 14 Agustus 2019, 03 September 2019
E-Learning APU dan PPT	BCA Syariah	11 Februari-13 Februari 2019, 01-04 Maret 2019, 06 Mei 2019, 17 Juni 2019, 12 Agustus 2019, 02 September 2019
E-Learning Fitur dan Ketentuan Produk Dana dan Jasa BCA Syariah	BCA Syariah	11 Februari 2019, 12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 04 Maret 2019, 18 Juni 2019, 13 Agustus 2019, 02 September 2019

Pelatihan Internal	Penyelenggara	Tanggal
<i>E-Learning</i> Pembiayaan Emas BCA Syariah iB	BCA Syariah	11 Februari 2019, 12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 04 Maret 2019, 18 Juni 2019, 13 Agustus 2019, 02 September 2019, 03 Desember 2019
<i>E-Learning</i> Pembiayaan Umrah iB	BCA Syariah	11 Februari 2019, 13 Februari 2019, 01 Maret 2019, 04 Maret 2019, 06 Mei 2019, 18 Juni 2019, 13 Agustus 2019, 03 September 2019
<i>E-Learning</i> Pemeriksaan dan Deteksi Keaslian Uang	BCA Syariah	11 Februari 2019, 12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 01 Maret 2019, 04 Maret 2019, 13 Agustus 2019, 03 September 2019
<i>E-Learning</i> Rahasia Bank	BCA Syariah	11 Februari 2019, 12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 01 Maret 2019, 04 Maret 2019, 06 Mei 2019, 18 Juni 2019, 13 Agustus 2019, 03 September 2019
<i>E-Learning</i> Standar Layanan BCAS	BCA Syariah	11 Februari 2019, 12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 01 Maret 2019, 04 Maret 2019, 18 Juni 2019, 13 Agustus 2019, 03 September 2019, 03 Desember 2019
<i>E-Learning</i> Tahapan Mabru iB	BCA Syariah	11 Februari 2019, 13 Februari 2019, 01 Maret 2019, 04 Maret 2019, 18 Juni 2019, 13 Agustus 2019, 03 September 2019
<i>E-Learning</i> Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah	BCA Syariah	11 Februari 2019, 12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 01 Maret 2019, 04 Maret 2019, 06 Mei 2019, 18 Juni 2019, 12 Agustus 2019, 02 September 2019, 03 Desember 2019
<i>E-Learning</i> Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	BCA Syariah	12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 04 Maret 2019, 18 Juni 2019, 12 Agustus 2019, 02 September 2019
<i>E-Learning</i> Pengenalan Bukti Kepemilikan dan Slip	BCA Syariah	12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 01 Maret 2019, 04 Maret 2019, 13 Agustus 2019, 02 September 2019
<i>E-Learning</i> Pengetahuan Produk Pembiayaan BCA Syariah	BCA Syariah	12 Februari 2019, 13 Februari 2019, 04 Maret 2019, 18 Juni 2019, 13 Agustus 2019, 03 September 2019
<i>Presentation and Communication Skill</i>	BCA Syariah	14-15 Februari 2019
Microsoft Excell- <i>Intermediate</i>	BCA Syariah	04-05 April 2019, 08-09 April 2019
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	BCA Syariah	22 April 2019, 07 Mei 2019, 12 Agustus 2019, 14 Oktober 2019, 04-06 Desember 2019
Aspek Hukum Operasional Perbankan Syariah	BCA Syariah	23-24 April 2019
<i>Sharing Session</i> Teknik Audit Dalam Pemeriksaan Kantor Cabang	BCA Syariah	25-26 April 2019
Forum Operasional Cabang dan KOC BCA Syariah	BCA Syariah	03 Mei 2019
<i>Workshop</i> Peningkatan Performa ULS BCA Syariah	BCA Syariah	04 Mei 2019
Sosialisasi PKB BCA Syariah Tahun 2019-2021	BCA Syariah	06 Mei 2019
Pengenalan <i>Corporate Culture</i> dan Struktur Organisasi BCA Syariah	BCA Syariah	06-Mei-19

Pelatihan Internal	Penyelenggara	Tanggal
Penerapan Strategi <i>Anti Fraud, Audit Rating</i> dan Kelemahan Pengendalian Internal	BCA Syariah	08 Mei 2019, 14 Agustus 2019
Sosialisasi PDCA	BCA Syariah	11 Juli 2019
Perencanaan Keuangan Pribadi	BCA Syariah	05 Agustus 2019, 15 Agustus 2019, 10 September 2019, 16 September 2019
<i>Health Talk</i> BCA Life "Stroke & Pencegahannya"	BCA Syariah	09 September 2019
<i>Planning Session</i> 2020 dengan Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCA Syariah	19-20 September 2019
<i>Refreshment</i> APU PPT dengan Tema "Pengenalan Program <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i> Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)	BCA Syariah	20 September 2019
<i>Facing Challenges In Millenials Era</i>	BCA Syariah	09-12 Oktober 2019
<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Pelatihan Pemahaman Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	BCA Syariah	17 Oktober 2019
Smart dan Kaizen	BCA Syariah	07 Nopember 2019
<i>Effective and Attractive Presentation</i>	BCA Syariah	08 Nopember 2019
<i>Refreshment</i> APU PPT	BCA Syariah	14 November 2019, 28 November 2019, 03 Desember 2019
Pelatihan Strategi Pengelolaan Project NBC Secara Efektif dan Atraktif	BCA Syariah	18-19 November 2019
Forum Kepala Operasi Cabang (KOC) & <i>Account Officer</i>	BCA Syariah	19-22 November 2019
Tata Nilai BCA Syariah (Modul 1 : Saya dan BCAS)	BCA Syariah	09 Desember 2019
Pengenalan Produk Dana dan Jasa BCAS (Fitur dan <i>Benefit</i>)	BCA Syariah	19-20 Desember 2019
Aspek Hukum Operasional Perbankan Syariah	BCA Syariah	23-26 Desember 2019
<i>Digital Awareness</i>	BCA Syariah	30 Desember 2019
Tata Nilai (<i>Sharing</i> Tokoh 1: <i>Teamwork & Responsibility</i>)	BCA Syariah	31 Desember 2019

Pelatihan Eksternal

Pelatihan Eksternal	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Hukum Perbankan "Terampil Menangani <i>Fraud</i> dan Tindak Pidana Perbankan"	Perbanas Institute	28 Maret 2019
Seminar Sehari Keuangan Berkelanjutan "Menyongsong Era Keuangan Masa Depan (<i>Sustainable Finance</i>)"	LPMI	02 April 2019
Workshop Eksekutif Pembiayaan <i>Take Over</i> dan <i>Refinancing</i> Syariah	Iqtishad Consulting	23 Mei 2019
<i>National Anti Fraud Conference</i> (NAFC)	ACFE	09-11 Juli 2019
Program Pemeliharaan SMR Level 2 Topik: <i>Integrated Risk Management, Banking-Economic Update, Future Branch and Operational Risk Update</i>	BCA Learning Service	26 Juli 2019
Pelatihan <i>Beautiful Life</i> BCA	BCA Learning Service	26-30 Agustus 2019, 15-18 Oktober 2019
Pelatihan P2M Muda 1 KK	BCA Learning Service	25 Oktober 2019-08 November 2019
Audit Teknologi Informasi	Value Consult	10-11 Desember 2019

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut hasil audit, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*).

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Audit Internal

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada OJK.

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Audit Internal Tahun 2019

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.

Berikut laporan-laporan yang telah disampaikan:

1. Laporan Hasil Audit
 - a. Laporan Hasil Audit harus disampaikan oleh Kepala SKAI kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, *Auditee*, Kepala Kantor Cabang, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Satuan Kerja/Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat.
 - b. Dalam hal suatu informasi hasil audit bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit, maka informasi tersebut dilaporkan secara khusus kepada Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris, sesuai dengan tingkat informasi khusus tersebut.

2. Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI harus memantau dan menganalisis perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh auditee melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (LTLHA). Dengan tujuan untuk:

- Meningkatkan kualitas pengendalian internal melalui proses tindak lanjut secara berkesinambungan
- Mendukung adanya budaya *awareness* terhadap perbaikan atas kelemahan mekanisme kerja, yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Bank
- Meningkatkan kepatuhan *auditee* terhadap semua komitmen tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati bersama

- Rangkuman dari Laporan Tindak Lanjut disampaikan kepada Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris secara berkala

3. Laporan Audit Intern Terintegrasi

SKAI harus mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi kepada Induk Perusahaan secara triwulanan, dalam rangka pemantauan pelaksanaan audit internal SKAI BCAS yang menggambarkan perbandingan antara realisasi kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sepanjang tahun 2019, SKAI telah melaksanakan audit dengan rincian rencana dan realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Pencapaian
1	Kantor Cabang	11	11	
2	Kantor Pusat	10	10	
3	<i>Regulatory</i>	9	9	104%
4	<i>Application Review</i>	19	21	
	Jumlah	49	51	

4. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Kepala SKAI harus mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu:

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia
- Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* berkenaan dengan kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank. Di tahun 2019, SKAI melanjutkan sosialisasi *anti fraud*, pelatihan eksternal maupun internal, sebagai wujud komitmen untuk menerapkan *risk awareness* pada seluruh organisasi Bank.
- Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Selama tahun 2019 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, karyawan tetap, dan/atau karyawan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

- Laporan Hasil Kaji Ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan BCAS untuk tahun buku 2019 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Akuntan publik berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian dan ketepatan penyajian laporan keuangan perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penggunaan jasa Akuntan Publik dari pihak eksternal independen diperlukan untuk memastikan keakuratan laporan dengan standar akuntansi yang berlaku serta mendukung objektivitas dan transparansi laporan keuangan.

BCAS menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa laporan keuangan Bank melalui RUPST berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- KAP tersebut terdaftar di OJK
- KAP memiliki reputasi baik
- KAP memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan audit terhadap perusahaan terbuka

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Bank. Bank memperhatikan ketentuan terkait auditor eksternal yang dikeluarkan oleh OJK,

khususnya perihal independensi serta pembatasan penugasan audit bagi Akuntan Publik dan KAP untuk dapat memberikan jasa profesional dalam bentuk jasa audit umum.

Penunjukan Akuntan Publik Tahun 2019

Berdasarkan POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan bank pasal 6, Laporan Keuangan posisi akhir Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut daftar Kantor Akuntan Publik BCAS

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Jasa	Opini
2019	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Drs. Ruchjat Kosasih, MM., CPA	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Drs. Ruchjat Kosasih, MM., CPA	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Husni, Muharram dan Rasidi	Drs. Husni Arvan CA., CPA	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Abu Bakar Usman & Rekan	Drs. Aman Hermawan, CPA	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Abu Bakar Usman & Rekan	Drs. Aman Hermawan, CPA	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian

Jasa Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik selain pemeriksaan laporan keuangan BCAS.



MANAJEMEN RISIKO

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dasar penerapan Manajemen Risiko BCAS antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dengan pertumbuhan bisnis yang searah dengan kegiatan usaha yang semakin kompleks dan aktivitas operasional yang meningkat, BCAS terus berupaya menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif sesuai dengan unsur-unsur usaha Bank berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di BCAS dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif berfokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;

- Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko;
- Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
- Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Penerapan manajemen risiko BCAS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko mencakup:

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Reputasi
- g. Risiko Strategik
- h. Risiko Kepatuhan
- i. Risiko Imbal Hasil
- j. Risiko Investasi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Tugas pokok Departemen Manajemen Risiko dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek yaitu:

1. Aspek penerapan manajemen risiko
2. Aspek pemantauan dan pengukuran risiko
3. Aspek pengkajian pengembangan aktivitas dan produk
4. Aspek pengkajian ulang manajemen risiko
5. Aspek pelaporan manajemen risiko

1. Aspek Penerapan Manajemen Risiko

Tugas pokok aspek Penerapan Manajemen Risiko yaitu mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko BCAS yang meliputi:

- Mengimplementasikan dan mengelola program *risk control self assessment* (RCSA) sebagai sarana pengukuran profil risiko operasional secara keseluruhan
- Mengelola *loss event database*, termasuk kasus kejahatan perbankan yang pernah terjadi
- Menjalin jaringan kerja sama dengan komunitas manajemen risiko, seperti *working group* regulator dan pihak eksternal terkait
- Mendukung upaya peningkatan kompetensi karyawan dalam program sertifikasi manajemen risiko sejalan dengan kebijakan regulator

2. Aspek Pemantauan dan Pengukuran Risiko
Tugas pokok pada Aspek Pemantauan dan Pengukuran Risiko yaitu memantau dan mengukur risiko pada pihak terkait yang meliputi:
 - Melakukan *stress testing* terhadap potensi kerugian Bank
 - Memantau penggunaan limit risiko yang sudah ditetapkan
 - Memantau eksposur risiko pembiayaan aktual dengan limit yang ditetapkan, termasuk pelaksanaan strategi dan rencana portofolio pembiayaan
 - Mereview usulan unit pengendali risiko mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara oleh unit kerja operasional (*risk taking unit*)

3. Aspek Pengkajian Pengembangan Aktivitas dan Produk
Tugas pokok pada Aspek Pengkajian Pengembangan Aktivitas dan Produk yaitu mengkaji pengembangan aktivitas dan produk dari unit kerja operasional yang meliputi:
 - Mengkaji risiko dan kelayakan aktivitas dan produk baru yang diajukan dan/atau yang dikembangkan oleh unit kerja operasional
 - Mengkoordinasikan penyusunan laporan profil risiko aktivitas dan produk baru yang wajib disampaikan kepada regulator

4. Aspek Pengkajian Ulang Manajemen Risiko
Tugas pokok pada Aspek Pengkajian Ulang Manajemen Risiko yaitu mengkaji ulang kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko yang meliputi:
 - Mengkaji ulang usulan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
 - Melakukan validasi data secara berkala atas model yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan, pasar dan operasional
 - Bersama unit kerja terkait, mereview parameter tingkat risiko untuk menilai profil risiko Bank secara keseluruhan
 - Mengkaji dampak peraturan pemerintah, Bank Indonesia, fatwa-fatwa DSN dan regulator lainnya pada kebijakan dan strategik bank di bidang manajemen risiko

5. Aspek Pelaporan Manajemen Risiko
Tugas pokok pada Aspek Pelaporan Manajemen Risiko yaitu melaporkan aktivitas manajemen risiko kepada pihak terkait, yang meliputi:
 - Mengumpulkan dan mengolah berbagai data dan informasi, baik eksternal maupun internal, menjadi laporan portofolio secara menyeluruh
 - Mengkonsolidasikan hasil identifikasi *risk control self assessment and loss event database* dan pengukuran risiko secara keseluruhan (*composite risk*)
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penyusunan laporan profil keseluruhan risiko Bank kepada pihak terkait internal dan eksternal termasuk kepada perusahaan induk



PROFIL KEPALA DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO



Gandhi Ahmad Solihin
Kepala Departemen Manajemen Risiko

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bogor

Tempat dan Tanggal Lahir
Bandung, 9 Oktober 1970

Usia
49 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan:
Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Rotasi No. 067/SKR/HSD/2016.

Pendidikan dan Pelatihan:
S1 Sistem Informatika dari STMIK-LPKIA (2003).

Perjalanan Karier:
Berkarir di Bank Danamon sejak tahun 1995 sampai tahun 2010. Di tahun 2010 sampai dengan sekarang berkarier di BCAS di mana jabatan terakhir adalah sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko.

Periode dan Masa Jabatan
Sejak tahun 2016

Kepemilikan Saham BCAS
Nihil

Program Pelatihan dan Pengembangan yang Diikuti Kepala Departemen Manajemen Risiko Tahun 2019

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Periode Pelaksanaan
Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCA Syariah	25 Januari 19
Sosialisasi PDCA	BCA Syariah	11 Juli 19
<i>Planning Session 2020</i> dengan Tema "Tantangan BCA Syariah di Era Milenial"	BCA Syariah	19-20 September 2019
<i>Refreshment</i> APU PPT dengan Tema "Pengenalan Program <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Terhadap Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF)"	BCA Syariah	20 September 19
<i>Facing Challenges in Millenials Era</i>	BCA Syariah	09-12 Oktober 2019
<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 19
Pelatihan pemahaman keuangan berkelanjutan dan rencana aksi keuangan berkelanjutan	BCA Syariah	17 Oktober 19

PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan.

Pengelolaan Risiko Kredit

BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:

1. Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur.
2. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan *stress testing* untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*).

Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*Risk Tolerance/Risk Appetite*).

Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Pengelolaan Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:

1. Analisis eksposur *Benchmark Rate in Banking Book* (BRBB) berdasarkan *Gap Report* dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis.
2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori *Available for Sale* (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas

tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Analisis arus kas
2. Pemantauan *maturity gap* antara posisi aktiva dan pasiva
3. Analisis deposito inti
4. *Stress testing*

Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penerapan metode *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat.
2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun *Loss Event Database* (LED).

Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (*refreshment*), dan *Risk and Compliance Awareness* kepada karyawan.

Risiko Hukum

Risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Pengelolaan Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi

dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank.

2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Risiko Strategik

Risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.

Pengelolaan Risiko Strategik

Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif.
2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan *Key Performance Indicator* (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait.
3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.

Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku.
2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional.

Risiko Reputasi

Risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa.
2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui Call Center Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.

Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengawasan indikator *core deposit*.
2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang.
3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK.

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode *net revenue sharing* dan *profit and loss sharing* merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.

Pengelolaan Risiko Investasi

Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil.
2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil.
3. Mengantisipasi faktor eksternal.

Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Penilaian Profil Risiko BCAS telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil penilaian terhadap sepuluh jenis risiko BCAS menunjukkan komposit risiko BCAS pada kategori "*Low*" *composite*

risk. Secara inheren, posisi risiko BCAS dikategorikan *Low*.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia serta perkembangan perbankan domestik pada umumnya dan perkembangan perbankan syariah pada khususnya, BCAS melakukan pemantauan terkait kemungkinan dampaknya terhadap empat jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko imbalance. Sedangkan untuk risiko operasional, BCAS secara berkala melakukan identifikasi, penilaian, pelaporan dan pemantauan risiko operasional yang melibatkan unit kerja pemilik risiko (*risk taking unit*) baik dengan metode *Risk Control Self-Assessment (RCSA)* maupun *Loss Event Database (LED)*.

Penilaian Profil Risiko 2019

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan

mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penilaian profil risiko sesuai dengan konsep *Risk Based Bank Rating (RBBR)* terdiri dari 5 kategori peringkat yaitu:

1. Peringkat 1: *Low*
2. Peringkat 2: *Low to Moderate*
3. Peringkat 3: *Moderate*
4. Peringkat 4: *Moderate to High*
5. Peringkat 5: *High*

Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2019:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tren Risiko	Peringkat Tingkat Risiko (<i>Net Risk</i>)
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	Stabil	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	Stabil	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	Stabil	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	Stabil	<i>Low</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	Stabil	<i>Low</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	Stabil	<i>Low</i>
Risiko Strategik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	Stabil	<i>Low</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	Stabil	<i>Low</i>
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	Stabil	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	Stabil	<i>Low to Moderate</i>
Peringkat Faktor	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	Stabil	1

Peringkat Profil Risiko Bank pada Peringkat 1 yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan operasional BCAS yang antara lain tercermin dalam kinerja keuangan dan beberapa rasio terkait, *benchmark* dengan rata-rata industri Bank Umum Syariah (BUS) serta kemungkinan kerugian yang dihadapi, maka risiko inheren BCAS secara komposit tergolong sangat rendah.
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara komposit tergolong memadai, meskipun harus terus-menerus diperbaiki.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko 2019

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, BCAS melakukan upaya perbaikan terhadap profil risiko antara lain:

- Melakukan penyempurnaan beberapa kebijakan dan prosedur yang ada dan menyusun kebijakan atau ketentuan baru
- Melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap limit penyaluran pembiayaan dalam rangka manajemen risiko kredit
- Melakukan upaya diversifikasi terhadap komposisi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) serta pembiayaan dan senantiasa mempertahankan hubungan baik (*relationship*) dengan nasabah

- Melakukan pemantauan intensif terhadap posisi Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan serta rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- Melakukan pemantauan terhadap isu-isu dan perubahan yang terjadi untuk selanjutnya memberikan informasi sekitar moneter dan *risk dashboard* pihak terkait

MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCAS sebagai Perusahaan Anak dari BCA (Entitas Utama) menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan BCAS yang disampaikan kepada BCA.

FUNGSI KEPATUHAN

BCAS berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas untuk menghindarkan Bank dari berbagai potensi risiko sehingga Satuan Kerja Kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional lain.

DASAR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penerapan fungsi Kepatuhan BCAS berlandaskan pada:

1. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
2. SK Direksi No. 002/SK/DIR/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Revisi Pedoman Umum Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BCAS telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BCAS kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Penerapan Fungsi Kepatuhan BCAS terdiri dari:

1. Fungsi Kepatuhan Bank
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait Fungsi Kepatuhan
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terkait Fungsi Kepatuhan terhadap pemenuhan aspek syariah
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait Fungsi Kepatuhan
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan
6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Departemen Kepatuhan terkait perannya dalam mengelola Risiko Kepatuhan

7. Komitmen seluruh jajaran Bank untuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam setiap kegiatan operasi Bank
8. Penjabaran operasional penerapan Fungsi Kepatuhan di bidang ketaatan terhadap regulasi, bidang bisnis/pembiayaan, operasi serta APU dan PPT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN KEPATUHAN

Tugas pokok Departemen Kepatuhan diuraikan dalam 2 (dua) aspek yang meliputi:

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek Penerapan APU PPT

Aspek Kepatuhan

Tugas pokok pada Aspek Kepatuhan yaitu memastikan secara proaktif kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan perbankan dan prinsip syariah yang berlaku, yang meliputi:

- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku
- Mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengkaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah
- Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah
- Memberikan konsultasi kepada unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang mengenai interpretasi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa-fatwa DSN yang berkaitan dengan kepatuhan
- Menyusun dan menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta laporan pelaksanaan manajemen kepatuhan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
- Memberikan pendapat mengenai tindakan Bank yang berkaitan dengan segi kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan peraturan perundangan lainnya

- Bekerja sama dengan unit terkait dalam melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur kepatuhan yang berlaku agar terwujud budaya kepatuhan di Perusahaan

Aspek Penerapan APU PPT

Tugas pokok pada Aspek Penerapan APU PPT meliputi:

- Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha, volume transaksi dan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
- Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasikan data yang diperlukan dalam penerapan APU dan PPT
- Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah
- Mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai
- Memastikan pengkinian data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah
- Memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian

- uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku
- Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*
- Mengawasi penerapan APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait
- Menerima, menganalisis dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja
- Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan APU dan PPT bagi pejabat dan/atau karyawan

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KEPATUHAN

BCAS telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pada struktur perusahaan di BCAS, Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Departemen Kepatuhan yang sekaligus merupakan pelaksana fungsi penerapan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Struktur organisasi Departemen Kepatuhan adalah sebagai berikut:



PROFIL KEPALA DEPARTEMEN KEPATUHAN



Maman Hermansyah
Kepala Departemen Kepatuhan

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bogor

Tempat dan Tanggal Lahir
Kuningan, 13 September 1982

Usia
37 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan:
Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

Pendidikan dan Pelatihan:
S1 Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007).

Perjalanan Karir:
Berkarir di Bank Bukopin sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. Di tahun 2013 sampai dengan sekarang berkarir di BCAS dimana jabatan terakhir adalah sebagai Kepala Departemen Kepatuhan.

Periode dan Masa Jabatan
Sejak tahun 2015

Kepemilikan Saham BCAS
Nihil

Program Pelatihan Dan Pengembangan yang Diikuti Kepala Departemen Kepatuhan Tahun 2019

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Periode Pelaksanaan
Pengembangan Strategi Bisnis & BCAS <i>Award</i>	BCA Syariah	23 Januari 19
Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCA Syariah	25 Januari 19
Program Pemeliharaan SMR Level 3	ASBISINDO	5 September 2019
<i>Planning Session</i> 2020 dengan Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCA Syariah	19-20 September 19
<i>Refreshment</i> APU PPT dengan Tema "Pengenalan Program <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)	BCA Syariah	20 September 2019
<i>Facing Challenges In Millenials Era</i>	BCA Syariah	9 & 12 Oktober 19
<i>Millenial Kill Everything</i>	BCA Syariah	10 Oktober 2019
Pelatihan Pemahaman Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	BCA Syariah	17 Oktober 19

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2019

Pengelolaan risiko Kepatuhan yang telah dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

1. Menyampaikan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank
2. Menyampaikan laporan Kepatuhan secara semesteran kepada OJK
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan
4. Memastikan bahwa kebijakan strategis yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah
5. Melakukan kajian Kepatuhan terhadap:
 - Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCAS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
 - Penyaluran dana di atas jumlah tertentu
6. Memastikan pelaksanaan kebijakan penerapan program APU dan PPT telah sesuai ketentuan berupa kewajiban laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, pengelolaan data dan informasi nasabah
7. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan
8. Memonitor pemenuhan pelaporan antara lain pelaporan kepada BI, OJK dan PPATK serta komitmen BCAS kepada Pengawas
9. Melakukan penilaian risiko kepatuhan secara berkala (bulanan, triwulanan dan semesteran)

Indikator Kepatuhan 2019

Rasio	Bulan			
	Maret	Juni	September	Desember*
Rasio Kinerja				
CAR	25,68%	25,67%	43,78%	38,28%
NPF Gross	0,48%	0,68%	0,59%	0,58%
NPF Nett	0,42%	0,62%	0,53%	0,26%
Pembiayaan UMKM	21,59%	21,79%	21,29%	21,17%
FDR	86,76%	87,31%	88,68%	90,98%
Kepatuhan (Compliance)				
a. Persentase Pelanggaran BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMDP				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
GWM				
a. GWM Rupiah	5,15%	5,04%	4,60%	4,74%
b. GWM/Valuta Asing	-	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan				
	-	-	-	-

*) *audited*

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
Besarnya rasio KPMM BCAS di akhir 2019 sebesar 38,28%, masih berada di atas minimum kebutuhan modal untuk bank dengan peringkat risiko 1 yaitu minimum 8%.
2. Rasio *Non Performing Financing* (NPF)
NPF *Gross* BCAS di akhir 2019 sebesar 0,58% sedangkan kondisi NPF *Net* di akhir 2019 sebesar 0,26%.
3. Pembiayaan Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM)
Pembiayaan UMKM BCAS per 31 Desember 2019 sebesar 21,17% dan telah memenuhi rasio pembiayaan UMKM sebesar minimum 20%.
4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
Sesuai ketentuan yang berlaku rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah minimal sebesar 80%, rasio FDR pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 90,98%.
5. BMPK/BMPD Kepada Pihak Terkait BCAS
Sampai akhir 2019, tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Per tanggal 31 Desember 2019 penyediaan dana kepada Pihak Terkait yaitu sebesar 0,11% sehingga batas maksimal ketentuan BMPD kepada Pihak Terkait masih jauh dari ketentuan, yaitu di bawah 10% dari modal bank.
6. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah
BCAS dapat menjaga pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan BI yaitu sebesar 4,74%.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dan memastikan bank telah memiliki kebijakan dan Pedoman APU PPT yang telah dikinikani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)
Sesuai Peraturan Kepala PPATK No.2/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Pengguna Jasa secara Terpadu (SIPESAT), BCAS berkewajiban untuk menyampaikan informasi pengguna jasa dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline*.
3. Kebijakan dan Prosedur
BCAS telah memiliki Prosedur dan Kebijakan APU dan PPT sebagaimana tertuang dalam Surat

- Keputusan Direksi nomor 070/SK/DIR/2019 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BCAS Tahun 2019 yang mengganti Surat Keputusan Direksi nomor 035/SK/DIR/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT.
4. Sistem Informasi Manajemen
Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* pada tahun 2019 difokuskan pada pengisian kolom jabatan untuk nasabah yang pekerjaannya Ibu Rumah Tangga dan untuk nasabah korporasi yang sumber danannya hasil usaha tetapi tujuan penggunaan dana untuk pengeluaran rutin pribadi.
 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT
Dalam rangka meminimalisir dan mengelola risiko bank agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai dalam bidang APU dan PPT dan/atau pengalaman dalam mengelola APU dan PPT. Untuk itu BCAS secara berkesinambungan telah melakukan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan baru melalui program *e-Learning* maupun tatap muka (*In-class*). Karyawan baru CSO dan *Teller* diwajibkan untuk mengikuti *on the job training* APU dan PPT sebelum menjalankan tugasnya di unit kerja masing-masing. Di samping pelatihan tersebut, khusus kepada karyawan *frontliner* dan karyawan lain yang bertanggung jawab dalam penerapan Program APU-PPT juga wajib mengikuti program *refreshment* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 6. Rencana Pengkinian Data tahun 2020
BCAS pada tahun 2020 akan melakukan pengkinian dan pemantauan Data dan dokumen Nasabah. BCAS secara berkala melakukan pengkinian data informasi maupun dokumen Nasabah yang dilakukan berdasarkan pendekatan risiko (*risk based approach*).

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NONKEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA

Untuk memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan OJK, BCAS menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik. Laporan keuangan dan nonkeuangan BCAS telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada

pihak-pihak lain terkait sebagaimana ketentuan BI dan/atau OJK.

Selama tahun 2019, Bank telah melakukan kewajiban penyampaian laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), antara lain:

- a. Laporan Publikasi Bulanan;
- b. Laporan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Publikasi Tahunan; dan
- d. Laporan Publikasi Lain, meliputi:
 - Laporan *Good Corporate Governance*
 - Laporan publikasi lainnya, apabila diperlukan oleh OJK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan.

Sedangkan transparansi kondisi non-keuangan yang telah diwujudkan oleh BCAS antara lain:

1. Pelaksanaan transparansi informasi produk BCAS dilakukan melalui media cetak seperti *leaflet*/brosur/spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di media elektronik dan internet, serta didukung dengan kemudahan akses website BCAS di <http://www.bcasyariah.co.id>.
2. Pengaduan nasabah BCAS dapat dilakukan dengan menghubungi *call center* Halo 1500888, atau melalui kantor cabang/kantor pusat BCAS.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah tanggung jawab bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCAS untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kepatuhan Bank. BCAS memiliki 3 (tiga) bagian yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan aktivitas operasional BCAS telah sesuai dengan seluruh kebijakan dan prosedur yang ada yaitu:

1. Departemen Kepatuhan, bertugas untuk memastikan seluruh aktivitas BCAS telah sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal, termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah
2. Departemen Manajemen Risiko, bertugas untuk melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko serta melakukan koordinasi atau fasilitas dari pengelolaan risiko secara menyeluruh
3. Satuan Kerja Audit Internal, bertugas secara independen untuk memastikan kelancaran dan meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara berkala melalui pemeriksaan terhadap beberapa aspek pengendalian tertentu.

KESESUAIAN SISTEM DENGAN KERANGKA INTERNAL CONTROL INTERNATIONAL (COSO)

Sistem Pengendalian Internal BCAS berlandaskan konsep pengendalian internal berbasis COSO (The

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang berlaku secara umum, yaitu:

- Lingkungan pengendalian/*Internal Environment*
- Penetapan tujuan/*Objective Setting*
- Identifikasi kejadian/peristiwa/*Event Identification*
- Penilaian risiko/*Risk Assessment*
- Respons atas risiko/*Risk Response*
- Aktivitas pengendalian/*Control Activities*
- Informasi dan komunikasi/*Information and Communication*
- Pemantauan/*Monitoring*

TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 2019

Berdasarkan hasil audit/*review* terhadap kegiatan operasional BCAS dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BCAS secara umum sudah memadai, efektif, dan efisien. BCAS telah melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang telah dijabarkan dalam LHA selama tahun 2019.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system adalah perangkat dalam penerapan salah satu pilar dari strategi anti *fraud* BCAS yang diperuntukkan bagi karyawan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran/penyimpangan terkait indikasi *fraud*.

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab atau pengelola *Whistleblowing System* ditunjuk secara rahasia oleh Direksi.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

BCAS membentuk dan menugaskan Tim Pengelola *Whistleblowing System* dan SAI untuk menindaklanjuti dan menangani pengaduan yang memenuhi kriteria.

PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pelapor dapat menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran baik secara pribadi melalui *e-mail* bcas.bersih@bcasyariah.co.id.

TINDAK LANJUT/PENANGANAN ATAS ADANYA PENGADUAN

Berikut ini adalah Unit Kerja dan tindak lanjut/penanganan yang dilakukan sehubungan dengan pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*:

Pengelola *Whistleblowing System*

1. Memastikan pengaduan yang diterima telah memenuhi kriteria.
2. Menghubungi pelapor untuk melengkapi data pelaporan yang tidak memenuhi kriteria. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja pelapor tidak memberikan data yang diminta maka laporan dianggap tidak valid dan tidak dapat ditindaklanjuti.
3. Meneruskan pengaduan yang telah memenuhi kriteria kepada SAI.
4. Memperbaharui status pelaporan sesuai keputusan SAI.

Satuan Kerja Audit Internal

1. Melakukan verifikasi dan analisis atas pengaduan yang terima dari pengelola *Whistleblowing System*
2. Meminta pengelola *Whistleblowing System* menghubungi pelapor untuk melengkapi data yang diminta apabila laporan yang diterima memerlukan data tambahan.
3. Untuk laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan adanya indikasi *fraud* maka pengaduan tidak dapat diteruskan ke tahap investigasi.

4. Apabila laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis menunjukkan adanya indikasi *fraud* maka pengaduan dapat diteruskan ke tahap investigasi.
5. Menyerahkan hasil investigasi kepada Kepala SAI untuk diambil keputusan mengenai status laporan hasil investigasi.
6. Memberikan informasi status perkembangan pelaksanaan tindak lanjut kepada pengelola *Whistleblowing System* untuk disampaikan kepada pelapor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaporan.
7. Menginformasikan status pelaporan yang telah ditindaklanjuti kepada pengelola *Whistleblowing System* dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Status *Open* Pelaporan masih dalam proses verifikasi/analisis/investigasi
 - b. Status *Closed Not Proven* Pelaporan sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan indikasi *fraud*
 - c. Status *Closed Proven* Pelaporan sudah diinvestigasi menunjukkan adanya indikasi *fraud* dan hasil investigasi telah diserahkan kepada kepala SAI
8. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* kepada Direksi secara periodik.

Pejabat Pemutus Kasus

Pejabat yang berwenang memutuskan status pelaporan *Open* atau *Closed* adalah Kepala SAI.

Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCAS akan memberikan perlindungan terhadap pelapor dalam bentuk:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
2. Jaminan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
3. Jaminan perlindungan terhadap kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut (Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank) dimungkinkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

BCAS telah memiliki ketentuan internal nomor 080/SK/DIR/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Ketentuan

Mengenai Benturan Kepentingan yang mengatur seputar benturan kepentingan dan penanganannya. Sesuai ketentuan internal yang berlaku, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan pejabat lain (golongan 5 sampai dengan golongan 7) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (annual disclosure) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Berdasarkan hal di atas maka dapat diinformasikan bahwa selama tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PERKARA PENTING

PERKARA HUKUM

Di bawah ini adalah rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BCAS selama tahun 2019:

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses	-	-
Total	-	-

PERKARA YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2019 tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCAS yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRASI

Selama tahun 2019 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

PENGARUH PERKARA/SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Sanksi administrasi tersebut tidak bersifat material, tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

SAHAM OPSI

Bank tidak mempunyai program saham opsi. Oleh karenanya informasi mengenai saham opsi tidak tersedia.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

AKSES INFORMASI

BCAS membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai identitas dan rekam jejak, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, serta berita-berita terbaru terkait bidang usaha BCAS melalui berbagai media sebagai berikut:

1. Langsung, melalui *media update*, *media visit*, *event* sosialisasi literasi dan inklusi Perbankan Syariah dan lainnya.
2. Tidak langsung, melalui Laporan Tahunan, Publikasi Laporan Keuangan, *Press Release*, situs www.bcasyariah.co.id dan lainnya.

Informasi dan data perusahaan juga dapat diakses melalui:

Sekretaris Perusahaan BCA Syariah
 Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310
 Email: bcas_humas@bcasyariah.co.id

SIARAN PERS

Selama tahun 2019, BCAS telah menerbitkan 20 siaran pers dengan detail sebagai berikut:

No	Tanggal kegiatan	Siaran Pers
1	28 Februari 2019	Media Update: Pemaparan Kinerja BCA Syariah 2018
2	25 Maret 2019	BCA Syariah dan Pegiumrah.com jalin kerja sama
3	9 April 2019	Donor Darah HUT BCA Syariah ke 9
4	12 April 2019	Perpanjangan Kerjasama Dukcapil
5	15 April 2019	BCA Syariah Jalin Kerjasama dengan Garasi.id
6	23 April 2019	BCA Syariah Salurkan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur untuk PLN
7	1 Mei 2019	Sinergi Dompot Dhuafa dan BCA Syariah Dongkrak Perekonomian Masyarakat Sumberwaru Melalui Kerapu
8	2 Mei 2019	BCA Syariah Resmikan Cabang di Lampung
9	18 Juni 2019	BCA Syariah Resmikan Cabang di Kediri
10	11 Juni 2019	BCA Syariah Buka Kantor Cabang di Aceh
11	26 Juli 2019	Media Update: Pemaparan Kinerja BCA Syariah Semester 1-2019
12	29 Juli 2019	BCA Syariah Tandatangani Kerjasama dengan Blibli.com
13	16 September 2019	Bca Syariah Jalin Kerjasama dengan Waqara
14	17 September 2019	BCA Syariah Dorong Milenial Beriwusaha
15	23 September 2019	Kerjasama Pembiayaan Umrah Kanomas
16	30 September 2019	Kerjasama BCA Syariah dan Carmudi
17	17 Oktober 2019	Sinergi Lembaga Keuangan di Finexpo 2019 untuk Dukung Peningkatan Literasi Menabung Saham Syariah
18	11 November 2019	Sinergi OJK dan Perbankan Syariah Berikan Edukasi Perbankan Syariah Kepada Media
19	26 November 2019	Pelepasan Jamaah Umrah
20	27 November 2019	BCA Syariah Salurkan Zakat melalui BAZNAS

KODE ETIK PERUSAHAAN

POKOK-POKOK KODE ETIK

BCAS menyusun Kode Etik sebagai sebuah pedoman perilaku dan etika sekaligus sebagai sarana penerapan budaya pengendalian. Penerapan kode etik perusahaan dipantau terus menerus oleh Bank melalui masing-masing kepala unit kerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang berbudaya dan beretika.

Kode etik BCAS adalah:

1. Menjaga nama baik dan harta kekayaan Bank
2. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank
3. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah
4. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan
6. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya
7. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan
8. Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
9. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif
10. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya

PEMBERLAKUAN KODE ETIK

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCAS No. 062/SK/DIR/2010 yang telah ditandatangani oleh Presiden Direktur BCAS, kode etik wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan, dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi.

SOSIALISASI KODE ETIK

Sosialisasi Kode Etik Bank antara lain dilakukan melalui buku "Perjanjian Kerja Bersama" yang memuat kode etik dan sosialisasi Tata Nilai BCAS yang didalamnya juga memuat tentang poin-poin Kode Etik Perusahaan.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

BCAS telah menetapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut tertuang di dalam pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 26 Oktober 2016 dan meliputi:

1. Sanksi Pokok yang pembebanannya telah ditentukan pada pedoman sanksi:
 - a. Peringatan Lisan;
 - b. Surat Teguran;
 - c. Surat Peringatan;
 - d. Demosi; dan
 - e. Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
2. Sanksi Tambahan:
 - a. Pemindahan Jabatan (Rotasi);
 - b. Penundaan Promosi;
 - c. Penundaan Kenaikan Pangkat;
 - d. Penundaan Kenaikan Upah/Gaji;
 - e. Pencabutan Fasilitas-fasilitas yang Melekat pada Jabatan yang Bersangkutan;
 - f. Pelepasan Jabatan; dan
 - g. Sanksi Lainnya.

KASUS PELANGGARAN KODE ETIK PADA TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di BCAS. Hal ini menunjukkan bahwa pokok-pokok kode etik dan Tata Nilai Perusahaan sudah tertanam dengan baik di diri para insan BCAS.

TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCAS selaku perusahaan anak dari BCA turut menjadi bagian dalam sinergi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan Tata kelola Terintegrasi, BCAS turut aktif sebagai anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan menyampaikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada BCA secara periodik.

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

BCAS memahami bahwa kinerja perusahaan erat kaitannya dengan dukungan dari stakeholders diantaranya komunitas dan masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank. Dengan pemahaman tersebut maka BCAS berupaya untuk terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Bank melalui program kegiatan yang diberi nama BCAS Peduli. BCAS Peduli dilakukan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan demi mendukung pencapaian tujuan korporasi dan membangun reputasi.

Program BCAS Peduli dilaksanakan secara berkesinambungan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. **Peduli Sosial**, yang fokus pada kegiatan layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat;
2. **Peduli Prestasi**, yang fokus pada kegiatan pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan; dan
3. **Peduli Sejahtera**, yang fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM.

Total dana yang telah disalurkan Bank melalui berbagai kegiatan sosial BCAS Peduli selama tahun 2019 sebesar Rp 632.323.830 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

PENDAPATAN NONHALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan nonhalal BCAS berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA. Saldo pendapatan nonhalal sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp60.982.991,21,- (enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma dua satu rupiah).

Selama tahun 2019, BCAS telah menggunakan dana nonhalal sebesar Rp68.000.00,- (enam puluh delapan juta) untuk melakukan kegiatan edukasi perbankan syariah melalui *event* edukatif bersama OJK dan pelaku perbankan syariah lainnya serta kegiatan pelatihan/*workshop* perbankan syariah untuk media.

DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BUS

Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Ruang Lingkup Kerja
a. Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Audit laporan Keuangan
b. Emerald Delta Consulting	Menghitung kewajiban imbalan paska kerja

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BUS

Buy back shares atau *buy back obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2019 BCAS tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi*.



06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



BCA Syariah memahami bahwa kinerja finansial (*profit*) yang berkualitas bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan suatu Bank. Kinerja Bank juga erat kaitannya dengan produktivitas karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan komunitas di sekitar wilayah operasional Bank (*people*) serta keberlanjutan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu, BCAS berupaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara ketiganya untuk mencapai keberlangsungan usaha

dalam jangka panjang. Komitmen BCAS salah satunya diwujudkan dalam bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua *stakeholder* untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi dalam membangun reputasi korporasi.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOMITMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen BCAS untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh *stakeholder* dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi. Komitmen BCAS tersebut sejalan dengan arahan untuk melaksanakan dan mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10 / SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Atas dasar ini, Bank berupaya melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial yang mendukung prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance* (SF) dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

METODE DAN LINGKUP *DUE DILIGENT* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

BCAS memahami bahwa kegiatan usaha Bank secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa dampak sosial, ekonomi dan lingkungan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank. BCAS melaksanakan *due diligent* atas dampak sosial, ekonomi atau lingkungan di antaranya dengan

metode pengamatan langsung, diskusi dengan pihak internal dan eksternal serta survei kepada nasabah dan calon nasabah.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Implementasi CSR di BCAS senantiasa melibatkan beberapa pemangku kepentingan karena aspirasi mereka turut mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak signifikan pada kelangsungan usaha Bank. Oleh karena itu, BCAS mengidentifikasi keterlibatan dan kebutuhan pemangku kepentingan sekaligus menjadi evaluasi atas penerapan program CSR yang dilakukan. Pemangku kepentingan Perusahaan diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan hubungan yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, demikian juga sebaliknya.

Pemangku kepentingan utama Bank terdiri atas:

- **Pemegang saham:** sebagai pemangku kepentingan utama yang memiliki kendali atas Bank;
- **Nasabah:** sebagai pemangku kepentingan yang memanfaatkan langsung produk dan layanan Bank;
- **Karyawan:** sebagai pemangku kepentingan utama dan penggerak bisnis Bank;
- **Regulator:** sebagai pemangku kepentingan yang mengawasi terlaksananya kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.
- **Rekanan/mitra kerja:** sebagai pemangku kepentingan yang menggerakkan rantai pasokan Bank;
- **Masyarakat:** sebagai pemangku kepentingan yang menjadi mitra Bank dalam menyalurkan inisiatif-inisiatif pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan;

ISU ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan pihak internal dan eksternal mengenai isu-isu penting sosial ekonomi atau lingkungan terkait dampak kegiatan usaha, maka Bank mengidentifikasi isu-isu di antaranya sebagai berikut:

- Kenyamanan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemenuhan hak-hak karyawan serta perlakuan yang adil;

- Pencapaian kinerja finansial sesuai harapan pemegang saham;
- Pemberian produk dan layanan yang berkualitas, bertanggung jawab dan informasi yang transparan serta pemenuhan perlindungan konsumen;
- Proses asesmen dan kontrak kerja yang adil bagi mitra kerja;
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank;
- Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN SERTA PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN DAN RELEVANSINYA DENGAN BISNIS PERUSAHAAN

Dalam mengimplementasikan CSR, ruang lingkup kegiatan BCAS berpedoman pada peraturan yang berlaku seperti:

Lingkup Kegiatan	Peraturan Terkait
Ketenagakerjaan	Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Lingkungan hidup, sosial dan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah • Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah
Perlindungan konsumen	POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Selain itu, Bank juga melaksanakan program-program lainnya yang termasuk dalam lingkup kegiatan CSR sebagai wujud tanggung jawab yang melebihi ketentuan yang diatur oleh peraturan sebagaimana disebutkan di atas, di antaranya seperti secara aktif mendukung pelaksanaan program inklusi dan literasi keuangan yang merupakan program pemerintah. Kegiatan ini sangat relevan dengan bisnis BCAS sebagai pelaku industri perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Sementara kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bertujuan meningkatkan tingkat penggunaan (*usage*) masyarakat terhadap produk dan perbankan syariah. Dengan konsisten melaksanakan program inklusi dan literasi keuangan diharapkan produk dan layanan perbankan syariah dapat semakin mudah diterima dan diakses oleh masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan *market share* perbankan syariah secara nasional.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA *STAKEHOLDER ENGAGEMENT* DAN MENINGKATKAN NILAI UNTUK *STAKEHOLDER* DAN PEMEGANG SAHAM

Dalam membangun relasi dengan pemangku kepentingan, hubungan dibangun melalui berbagai

saluran komunikasi untuk berinteraksi dan berdiskusi. Sementara dalam pelaksanaan kegiatan CSR, BCAS juga melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, karyawan, mitra maupun pemerintah setempat. BCAS juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh BCA selaku Pemegang Saham sebagai salah satu upaya untuk membangun dan mempertahankan reputasi positif BCA sebagai Grup Usaha. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan CSR diharapkan dapat meningkatkan *stakeholder engagement* terhadap Bank.

STRUKTUR TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Kegiatan CSR Bank perlu dikelola dengan baik agar memberikan hasil yang optimal dan mendukung pencapaian bisnis perusahaan. Untuk itu BCAS memastikan terdapat unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial BCAS yaitu fungsi CSR yang melekat pada *Corporate Secretary*.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan mengalokasikan anggaran untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar Rp632.323.830.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

BCAS memahami bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu area tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, BCAS berkomitmen dalam penegakan HAM khususnya terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Salah satu wujud komitmen BCAS dalam penegakan HAM adalah dengan dituangkannya hak dan kewajiban karyawan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019-2021. PKB dirumuskan secara bersama-sama oleh tim perunding manajemen dan Serikat Pekerja dan diperbarui setiap tiga tahun agar senantiasa relevan dengan kebutuhan karyawan dan kompetitif dengan pelaku industri perbankan syariah lainnya dalam satu *peer*.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Karyawan merupakan *stakeholder* utama sekaligus penggerak bisnis Bank. Oleh karena itu penegakan hak asasi karyawan sebagai salah satu komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat erat relevansinya dengan bisnis perusahaan. Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan HAM berkaitan dengan isu-isu ketenagakerjaan di antaranya meliputi kesetaraan kerja tanpa memandang latar belakang gender, usia, suku, agama, ras, maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif; hak terkait waktu kerja dan cuti karyawan; serta pemberian izin untuk menjalankan kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar karyawan seperti izin beribadah, izin melahirkan/keguguran atau izin untuk laktasi pada jam kerja.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Inisiatif tanggung jawab sosial terkait HAM dirumuskan dan ditetapkan dalam PKB yang bertujuan membangun hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dengan karyawan. PKB ditetapkan secara berkala untuk periode 3 tahun dan kemudian diperbaharui kembali. PKB menuangkan secara jelas mengenai ketentuan hubungan kerja seperti penerimaan dan penempatan karyawan, mutasi, promosi; waktu kerja;

cuti, sakit dan izin; sistem penggajian, kepangkatan dan penilaian prestasi; jaminan kesehatan; tata tertib kerja dan hal-hal terkait ketenagakerjaan lainnya.

Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait HAM di antaranya:

- kesetaraan kerja tanpa memandang latar belakang gender, usia, suku, agama, ras baik dalam hal penerimaan karyawan, penilaian kerja, promosi, dan pemberian upah;
- penetapan ketentuan waktu kerja di BCAS dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
- pemberian hak cuti, sakit dan izin bagi karyawan.

Selain itu, Bank tidak hanya fokus pada besaran remunerasi maupun *benefit*, tetapi juga melakukan intervensi kesehatan agar karyawan memiliki pola gaya hidup sehat, yaitu sehat dalam pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Hal ini di antaranya diwujudkan dengan pemberian jaminan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan serta penyediaan fasilitas dan sarana olahraga yang memadai.

PENCAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat keluhan atau pengaduan dari karyawan terkait penerapan HAM.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Praktik operasi yang adil menyangkut cara suatu organisasi melaksanakan hubungannya dengan organisasi lain untuk mengedepankan hasil positif. Hal ini termasuk hubungan antara organisasi dan lembaga pemerintah, serta antara organisasi dan mitra mereka, pemasok, kontraktor, pelanggan, pesaing, dan asosiasi di mana mereka berada. Subjek praktik operasi yang adil di antaranya mencakup anti korupsi; persaingan yang sehat; mempromosikan tanggung jawab sosial dalam rantai pasokan; serta menghormati hak milik.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Pelaksanaan operasi yang adil merupakan salah satu komitmen BCAS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Komitmen tersebut dituangkan dalam:

- Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/DIR/2010 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan
- Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCAS No. 062/SK/DIR/2010.

Kebijakan terkait komitmen Bank terhadap praktik operasi yang adil, wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan, dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi sehingga membudaya di dalam tubuh organisasi.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Lingkup tanggung jawab sosial yang terkait operasi yang adil berkaitan dengan isu-isu antara lain benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), pengadaan barang dan jasa serta pengendalian gratifikasi.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perencanaan dan pelaksanaan inisiatif tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan operasi yang adil dalam lingkup perusahaan antara lain diimplementasikan dalam bentuk sebagai berikut:

Larangan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Dalam praktik operasional Bank, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat pribadi cukup besar sehingga membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi. Untuk mencegah hal tersebut, serta sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam rangka meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, Bank menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Bank sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, mitra, maupun dengan sesama rekan kerja.

Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan atas fasilitas pembiayaan, transaksi, nisbah bagi hasil khusus atau kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarga, perusahaan di mana ia dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan;
- Seluruh jajaran Bank harus menghindarkan diri atau tidak terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari;
- Seluruh jajaran Bank tidak dapat bekerja pada lembaga keuangan lain sebagai anggota komisaris, direksi, konsultan, karyawan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali apabila lembaga keuangan tersebut adalah anak perusahaan atau afiliasi Bank atau apabila dalam rangka penugasan Bank atau telah mendapatkan izin tertulis dari atasannya;
- Seluruh jajaran Bank dilarang menggunakan/ menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk keuntungan pribadi, anggota keluarganya atau keuntungan pihak-pihak lainnya.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan operasional Bank. Untuk itu, Bank harus menciptakan dan menjaga hubungan yang kondusif dengan seluruh mitra. Kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di antaranya sebagai berikut:

- Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran Bank tersebut mempunyai kepentingan.
- Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, seluruh jajaran Bank harus berusaha mendapatkan harga yang terbaik. Dalam hal diperoleh potongan harga (diskon) maka potongan harga yang diperoleh harus dibukukan untuk keuntungan Bank.

Untuk memastikan prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebijakan Bank maka Bank menyusun suatu pedoman pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Surat Edaran No. 057/SE/STL/2019 perihal Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik Oleh Pihak Ketiga (Vendor).

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka Bank menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank; dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang

maupun jasa dari Bank;

- Dalam hal terdapat pihak yang memberikan bingkisan, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, dan nilai bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan;
- Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENCAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pengaduan dan/atau pelanggaran terkait praktik operasional yang adil yang terjadi di BCAS.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

BCAS menyadari bahwa menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak kepada lingkungan. Untuk itu, BCAS senantiasa berupaya agar operasional perbankan yang dijalankan memperhatikan pelestarian lingkungan.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Lingkup tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup diantaranya meliputi penyaluran pembiayaan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup serta kegiatan operasional yang ramah lingkungan.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Bentuk implementasi tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup di antaranya adalah:

Penyaluran Pembiayaan Berwawasan Lingkungan

BCAS secara bertahap telah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses penyaluran pembiayaan di antaranya dengan memastikan nasabah/calon nasabah yang bisnisnya berdampak pada lingkungan hidup telah memiliki izin atau sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik Operasional yang Ramah Lingkungan

BCAS menginisiasi beberapa kegiatan yang berorientasi ramah lingkungan di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, antara lain:

- Sarana *e-learning* untuk pembelajaran karyawan secara *online*. Cara ini selain meningkatkan efisiensi biaya perjalanan dinas/*training* juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan kertas yang ditimbulkan dari kegiatan *training* secara konvensional;
- Meningkatkan efisiensi penggunaan kertas diantaranya melalui:
 - Pengiriman/akses dokumen secara digital melalui *email* dan portal *intranet* My BCA Syariah;
 - Penggunaan *e-statement* pada produk-produk simpanan;
 - Pengembangan perbankan digital yaitu BCA Syariah Mobile dan Klik BCA Syariah;
 - *Printer Pooling Management* (PPM), yang menggantikan peralatan *printer*, mesin fotokopi, alat pindai (*scanner*) dan faksimili menjadi *single device* (*multi function printer*);
- Melakukan kampanye efisiensi penggunaan listrik, kertas dan air kepada karyawan melalui media-media internal;
- Berupaya memfasilitasi efisiensi yang lebih besar dalam rantai pasokan kertas dengan membeli kertas dari sumber yang memiliki sertifikat berkelanjutan.

PENCAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pengaduan dan/atau pelanggaran terkait praktik perbankan yang berwawasan lingkungan hidup.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bagi BCAS, setiap SDM merupakan modal penting bagi perusahaan serta penggerak utama bisnis perusahaan dalam pencapaian kinerja Bank. Untuk itu, BCAS memberikan perhatian dalam pengelolaan SDM secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi dan karakter, karier, serta kesejahteraan karyawan. BCAS juga berupaya untuk melaksanakan praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara optimal demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan implementasi praktik K3 yang konsisten diharapkan akan tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan tenaga kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas Bank. Kebijakan dan implementasi praktik ketenagakerjaan dan K3 di BCAS berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan beroperasi dengan menempatkan kesejahteraan, keselamatan dan kualitas sebagai salah satu prioritas. Lingkup tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan dan K3 di antaranya meliputi kesetaraan kerja, hubungan kerja positif, jaminan kesehatan dan perlindungan keselamatan kerja.

Jumlah Karyawan BCAS berdasarkan Gender

Gender	2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-laki	280	50,5%	273	52,0%
Perempuan	274	49,5%	252	48,0%
Jumlah	554	100,0%	525	100,0%

- Pengembangan karyawan**
 BCAS memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk mengembangkan diri melalui *training* maupun pengembangan karier yang terarah dan terencana. Untuk mendorong produktivitas kerja, Bank juga

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kesetaraan Kerja

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan peluang kerja dan pengembangan karier yang setara tanpa memandang latar belakang gender, usia, suku, agama, ras, maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif lainnya. Komitmen ini secara konsisten dituangkan dalam kebijakan atau aturan perusahaan yang mengatur proses perekrutan dan pengembangan karier. Rekrutmen dan pengembangan karier ditentukan sepenuhnya oleh kompetensi dan prestasi karyawan.

Praktik kesetaraan kerja yang telah diimplementasikan, antara lain:

- Kesempatan kerja yang sama**
 BCAS memberikan kesempatan kerja yang sama bagi setiap individu untuk bergabung bersama BCAS tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin. Kebijakan perusahaan dalam perekrutan dan penempatan karyawan ditekankan pada kualitas dan kompetensi serta kebutuhan organisasi.

senantiasa membangun budaya dan kesadaran kompetisi kinerja yang sehat melalui penilaian kinerja yang transparan dan adil untuk individu secara periodik. Di sepanjang tahun 2019, BCAS telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh sebanyak 3.820 peserta.

Hubungan Kerja yang Kondusif

Perusahaan menyadari bahwa manajemen SDM yang baik berawal dari hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaan. Oleh karena itu, Bank senantiasa berupaya menciptakan hubungan yang positif untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, diantaranya dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Transparansi kebijakan perusahaan**
 Transparansi kebijakan perusahaan yang bersifat strategis terutama di bidang kepegawaian dan keterbukaan informasi bagi karyawan diwujudkan dengan kemudahan akses informasi melalui sarana komunikasi internal, seperti korespondensi resmi berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran, *email broadcast*, portal internal My BCA Syariah.
- Perjanjian Kerja Bersama**
 Sebagai bentuk perwujudan komitmen Bank untuk mengembangkan hubungan industrial yang kondusif dan produktif, BCAS menerbitkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB dirumuskan secara bersama-sama oleh tim perunding manajemen dan Serikat Pekerja dan diperbarui setiap tiga tahun.
- Kesempatan mengaktualisasikan keahlian, kompetensi, bakat dan minat karyawan**
 BCAS memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keahlian dan kompetensi dalam rangka mencapai target kerja maupun mengembangkan minat dan bakat karyawan di luar aspek pekerjaan. Hal ini difasilitasi oleh Bank dengan menyediakan fasilitas yang memadai serta mendorong berkembangnya komunitas-komunitas bakat dan seni yang tergabung dalam Bakorseni (Badan Koordinasi Olahraga dan Seni) diantaranya fotografi, olahraga badminton, tenis meja, basket, seni tari, dan paduan suara. Terbentuknya komunitas-komunitas hobi di BCAS juga merupakan salah satu bentuk perwujudan pemberian kebebasan kepada karyawan dalam berserikat dan berkumpul.
- Jam Kerja**
 Penetapan ketentuan jam/waktu kerja di BCAS dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Jam kerja berlangsung selama 8 (delapan) jam dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam baik untuk karyawan yang bekerja dengan waktu regular maupun sistem *shift* pada fungsi-fungsi

khusus seperti petugas *Data Center* atau petugas Satuan Pengamanan. Kelebihan waktu kerja dan bekerja di hari libur diperhitungkan jam kerja lembur dan karyawan berhak mendapatkan upah/insentif lembur serta bantuan berupa makanan.

- Remunerasi**
 Sebagai salah satu perwujudan komitmen Bank untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, BCAS memberikan kenaikan gaji secara berkala, serta bonus atas kinerja karyawan dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.



BCAS mendorong *work-life balance* di antaranya dengan mendukung kegiatan olahraga karyawan



Tim tari saman dibentuk untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni tari

Jaminan Kesehatan

Tempat kerja yang aman dan nyaman akan mendukung kesehatan fisik maupun psikis karyawan, yang berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas. Bentuk-bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan jaminan kesehatan pada karyawan di antaranya:

- Untuk memastikan kesehatan karyawan, BCAS menerapkan kebijakan fasilitas kesehatan bagi karyawan seperti rawat inap, rawat jalan, persalinan dan kacamata. Kebijakan-kebijakan terkait kesehatan dan kesejahteraan karyawan secara periodik dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan karyawan dan perkembangan industri perbankan pada *peer* yang sama.
- BCAS juga berpartisipasi dalam program layanan kesehatan pemerintah. BCAS memberikan fasilitas asuransi kesehatan dan mengikutsertakan karyawan beserta keluarganya dalam BPJS Kesehatan.

Menjaga Keselamatan Kerja

Perusahaan percaya keamanan di tempat kerja akan mendukung praktik bisnis yang baik. Praktik keselamatan kerja yang telah diimplementasikan, antara lain:

- **Pengembangan dan penataan ruang kerja**
BCAS memberikan perhatian terhadap upaya untuk menciptakan keselamatan kerja di

lingkungan kantor BCAS, melalui pengembangan dan penataan ruang kerja yang mengacu pada beberapa hal:

- kelengkapan dan kelayakan sarana dan lingkungan kerja;
- kebersihan lingkungan kerja;
- keserasian tata ruang kerja;
- ketepatan peletakan sarana kerja; serta
- kelengkapan dan kelayakan sarana pengamanan.

- **Mitigasi bencana**

Sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana seperti bencana alam dan kebakaran serta menjaga keselamatan karyawan dalam menghadapi kejadian bencana, BCAS secara berkala mengadakan latihan evakuasi (*evacuation drill*) yang diikuti seluruh karyawan. Bank juga memastikan tersedianya perlengkapan untuk menghadapi kejadian bencana dan dimonitor ketersediaannya.

PENCAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA

Selama tahun 2019 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan BCAS.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Dalam operasional bisnis perusahaan, BCAS beroperasi sebagai bagian dari lingkungan dan komunitas di sekitar wilayah operasionalnya. Untuk itu BCAS berkomitmen memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan sosial yang terencana dan terarah dalam program BCA Syariah Peduli.

Visi BCA Syariah Peduli

Program BCA Syariah Peduli mengemban visi Mewujudkan Masyarakat yang Andal dan Sejahtera.

Misi BCA Syariah Peduli

Dalam rangka mewujudkan visi program BCA Syariah Peduli, Bank menetapkan misi program sebagai berikut:

- Melaksanakan komitmen perusahaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan mendukung pertumbuhan perusahaan.
- Melaksanakan tanggung jawab perusahaan dan kepedulian sosial untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Lini bisnis utama perusahaan di bidang perbankan tak terhindar dari potensi risiko-risiko terkait kondisi sosial masyarakat yang mungkin bersinggungan dengan kegiatan operasional perbankan. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun

kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, lingkup kegiatan BCA Syariah Peduli berfokus pada 3 (tiga) pilar, yaitu:

Peduli Prestasi

Fokus pada pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan

Peduli Sosial

Fokus pada layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat

Peduli Sejahtera

Fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM

Melalui pilar-pilar BCA Syariah Peduli, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencerminkan kepedulian dan upaya BCAS untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan serta pembangunan ekonomi, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan kegiatan BCA Syariah Peduli pada tahun 2019 di antaranya:

Peduli Prestasi



BCA Syariah Mengajar

BCAS Mengajar merupakan salah satu program BCAS untuk secara aktif mengajak dan mendidik pelajar dan mahasiswa untuk mengenal perencanaan keuangan dan produk-produk perbankan Syariah. BCAS Mengajar dilakukan di beberapa wilayah kantor BCAS yaitu di wilayah DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Malang dan Banda Aceh.



Pelatihan Wartawan

Profesi wartawan sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait perbankan Syariah. Untuk itu, BCAS mengagendakan pelatihan wartawan secara rutin setiap tahunnya. Pada tahun 2019, BCAS menyelenggarakan pelatihan kepada wartawan dengan tema Memahami Akad Syariah dan Implementasinya pada Bank Syariah.



Program Magang

BCAS membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan pemagangan di BCAS dengan tujuan memperkenalkan dunia usaha kepada mahasiswa dan meningkatkan *awareness* mahasiswa kepada institusi syariah.



Edukasi Keuangan Melalui Event

Sebagai bagian dari pelaku industri perbankan syariah, maka menjadi kewajiban bagi BCAS untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan tingkat literasi dan inklusi perbankan Syariah. Sepanjang tahun 2019, BCAS secara aktif berpartisipasi dalam event edukatif seperti iB Vaganza, Safari Ramadhan, ISEF, dan FinExpo.



Bantuan Pendidikan

Kepedulian BCAS terhadap kualitas pendidikan di antaranya diwujudkan melalui pemberian bantuan pendidikan ke lingkungan terdekat yaitu keluarga karyawan BCAS yang membutuhkan khususnya karyawan alih daya.

Peduli Sosial



Donor Darah

Donor darah merupakan kegiatan rutin BCAS yang diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Kegiatan ini merupakan wujud kontribusi BCAS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah melalui PMI juga sebagai upaya mendorong tumbuhnya kepedulian sosial dan gaya hidup sehat kepada karyawan BCAS.



Bersih-Bersih Masjid

Bentuk kepedulian BCAS kepada lingkungan di antaranya diwujudkan dalam bentuk kegiatan Bersih-Bersih Masjid di mana karyawan BCAS terjun langsung membantu masyarakat di sekitar kantor BCAS untuk melakukan pembersihan sarana ibadah dalam menyambut bulan Ramadhan.



Donasi Perlengkapan Ibadah

BCAS mendonasikan perlengkapan ibadah kepada lingkungan di sekitar wilayah operasional cabang BCAS.



Sumbangan Dalam Rangka Hari Raya Idul Adha

Dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1440 H, BCAS memberikan sumbangan hewan kurban bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional BCAS yaitu di wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Bandar Lampung, dan Kediri.

Peduli Sejahtera



Ruang Ibu Cerdas

Perempuan memegang peranan penting dalam kesejahteraan keluarga. Untuk itu BCAS melakukan edukasi pengelolaan keuangan usaha dan keluarga kepada ibu-ibu pelaku usaha mikro melalui kegiatan Ruang Ibu Cerdas untuk meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan secara cermat dan bijak, serta memberikan motivasi untuk selalu berkembang demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.



Edukasi Pelaku UMKM

Sebagai salah satu upaya BCAS untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan, BCAS melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada pelaku UMKM sebagai program rutin setiap tahunnya.

PENCAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Pada tahun 2019, BCAS mendapat predikat Platinum Kategori Bank Syariah pada Indonesia CSR Award yang diselenggarakan oleh Economic Review.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Bisnis utama BCAS di bidang perbankan erat kaitannya dengan kepercayaan *stakeholder*. BCAS menyadari sepenuhnya bahwa kinerja yang dicapai BCAS adalah berkat kepercayaan nasabah/konsumen sebagai *stakeholder* yang memanfaatkan secara langsung produk dan layanan Bank. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, BCAS melakukan berbagai upaya seperti konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian, mengedepankan keamanan dan kenyamanan transaksi bagi nasabah, secara konsisten meningkatkan kualitas layanan dalam memberikan solusi bagi nasabah hingga pemenuhan peraturan mengenai perlindungan konsumen. Tanggung jawab sosial kepada konsumen diimplementasikan BCAS dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia di antaranya Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Lingkup tanggung jawab sosial kepada konsumen diantaranya meliputi penanganan pengaduan konsumen, edukasi dan penyampaian informasi yang bertanggungjawab, serta praktik keamanan data.

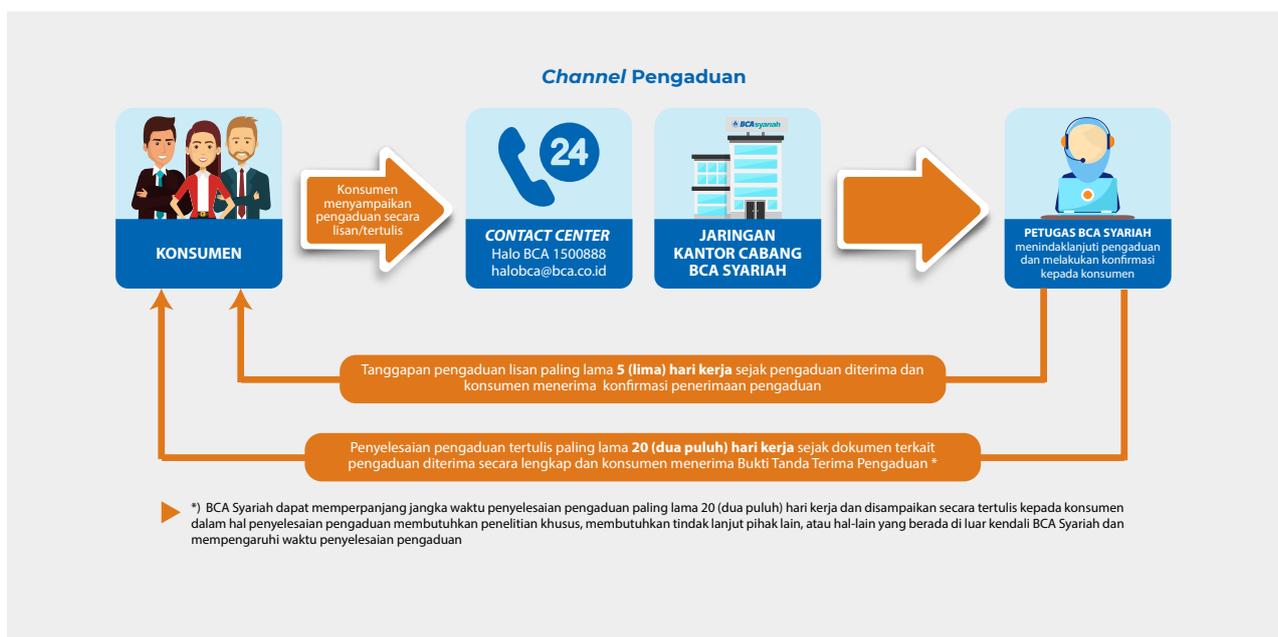
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Bentuk implementasi tanggung jawab kepada konsumen yang dilakukan di antaranya sebagai berikut:

Penanganan Pengaduan Konsumen

BCAS telah memiliki kebijakan dalam penanganan pengaduan konsumen untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan cara penanganan pengaduan secara tepat dan cepat serta *service level* sesuai ketentuan dari Regulator. Untuk penyampaian saran, keluhan maupun pengaduan konsumen, BCAS bersinergi dengan BCA memberikan layanan *contact center* 24 jam Halo BCA 1500888. Untuk memastikan penyelesaiannya, BCAS melakukan *monitoring* atas saran maupun pengaduan yang diterima baik melalui Halo BCA maupun media lain seperti rubrik Surat Pembaca di media cetak dan *online*.

Berikut alur layanan pengaduan konsumen BCA Syariah:



Berikut adalah jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2019 dan informasi penyelesaiannya:

Jenis Produk dan/atau Layanan dan Permasalahan yang Diadukan

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
Kartu ATM/Debit/ Mesin ATM	329	96,8%	11	3,2%	-	-	340

Pada akhir tahun 2019, sejumlah 329 permasalahan yang diadukan atau 96,8% telah diselesaikan sementara 11 pengaduan atau 3,2% masih dalam proses.

Edukasi dan Penyampaian Informasi yang Bertanggung Jawab

Sejalan dengan peraturan Regulator terkait perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha jasa keuangan tanpa terkecuali BCAS harus memenuhi kaidah pokok penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan. BCAS secara aktif melakukan sosialisasi terkait produk dan layanan Bank sehingga nasabah dapat lebih memahami mengenai manfaat, biaya, risiko, hak dan kewajiban dalam bertransaksi dengan Bank. Sarana informasi/ sosialisasi produk dan layanan BCAS dapat diperoleh dengan mudah oleh nasabah melalui *contact center* Halo BCA 1500888, situs www.bcasyariah.co.id, materi promosi dan *marketing collaterals* BCAS.



Direktur BCAS, Houda Muljanti, berparade bersama Wapresdir BCA, Armand Hartono, dan Direksi Grup Usaha BCA dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional

PENCAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Pada tahun 2019, BCAS mendapat predikat *Exceptional Service Performance* Kategori Sharia Banking pada *Contact Center Service Excellence Award 2019* yang diselenggarakan oleh Carre Service Quality Monitoring, Peringkat II *Best Overall Performance Banking Service Excellence Award* yang diselenggarakan oleh Infobank, serta predikat *Diamond Award Category Sharia Banking* pada *Service Quality Award* yang diselenggarakan oleh Carre Service Quality Monitoring.



Petugas *frontline* BCAS membantu pelajar untuk melakukan transaksi perbankan di Kantor Cabang BCAS

LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN SEOJK NO. 10/SEOJK.03/2017

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
1 a.	Pedoman Umum		
1.	Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan secara individu dan konsolidasi dengan Entitas Anak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku.	√	
2.	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat diadakan.	85	
3.	Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.	99-116	
4.	Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.	125	
5.	Laporan Publikasi Tahunan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Publikasi Tahunan disusun dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi Tahunan harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dengan informasi dalam Bahasa Indonesia pada Laporan Publikasi Tahunan, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.	√	
6.	Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (<i>partner in charge</i>), dan opini yang diberikan.	259-260	
7.	Laporan Publikasi Tahunan diumumkan pada Situs <i>Web</i> Bank Umum Syariah dan disampaikan oleh Bank Umum Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√	
1 b.	Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan Laporan Publikasi Tahunan meliputi:		
1.	Informasi Umum		
	Informasi Umum dalam Laporan Publikasi Tahunan paling sedikit meliputi:		
a)	susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya;	66-79	
b)	susunan dan komposisi Pemegang Saham yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham;	83-84	
c)	perkembangan usaha Bank Umum Syariah dan kelompok usaha Bank Umum Syariah, yang memuat data mengenai:		
(1)	ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan penyaluran dana bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (<i>cost of fund</i>), modal sendiri, jumlah lembar dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor; dan	8-11	
(2)	informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.2).	99-116	
d)	strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Umum Syariah;	117-118	
e)	laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank Umum Syariah, paling sedikit mencakup:		
(1)	struktur organisasi;	62	
(2)	aktivitas utama;	45	
(3)	teknologi informasi;	126	
(4)	jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	46	
(5)	realisasi tingkat bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil;	115	
(6)	perkembangan perekonomian dan target pasar;	96-98	
(7)	jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	44, 56	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
1 b.	Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan Laporan Publikasi Tahunan meliputi:		
	(8) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;	56	
	(9) kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah;	83	
	(10) sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	80-82	
	(11) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank Umum Syariah dan kelompok usaha Bank Umum Syariah dalam tahun yang bersangkutan; dan	124	
	(12) hal-hal penting	-	
2 a.	Laporan Keuangan Tahunan		
	a) Laporan keuangan, paling sedikit mencakup:	312	
	(1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);		
	(2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;		
	(3) Laporan Perubahan Ekuitas;		
	(4) Laporan Arus Kas; dan		
	(5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.		
2 b.	Penambahan Pengungkapan Informasi bagi Bank Umum Syariah yang Merupakan Bagian dari Suatu Kelompok Usaha.		
	(1) Bank menambahkan informasi pada Laporan Publikasi Tahunan mengenai:		
	(a) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau	√	
	(b) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan nonkeuangan, dalam hal tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).	√	
	(2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud dalam angka (1), paling sedikit terdiri atas:		
	(a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);	100-104	
	(b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;	104-106	
	(c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan	106-107	
	(d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi	111	
2 c.	Opini dari Akuntan Publik yang memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan.	99	
3 a.	Informasi kinerja keuangan, meliputi:		
	a) Perhitungan KPMM;	109-114	
	b) Jumlah dan kualitas aset produktif serta CKPN, yang paling sedikit memberikan informasi berdasarkan pengelompokan:	109-114	
	(1) Instrumen keuangan;		
	(2) Penyediaan dana kepada Pihak Terkait;		
	(3) Pembiayaan kepada nasabah UMKM;		
	(4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus (antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembiayaan properti); dan		
	(5) PPA yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.		
	c) Rasio keuangan, paling sedikit mencakup:		
	(1) Rasio KPMM;	112-113	
	(2) ROA;	110	
	(3) ROE;	110	
	(4) Rasio BOPO;	110	
	(5) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan BMPD; dan	110	
	(6) Rasio PDN.	110	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
3 a.	Informasi kinerja keuangan, meliputi:		
	d) Transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> ;	114	
	e) Laporan Distribusi Bagi Hasil;	115	
	f) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;	116	
	g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan	116	
	h) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada.	116	
4.	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko	129-167	
a.	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank Umum Syariah paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank Umum Syariah, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai permodalan dan manajemen risiko.	129-167	
b.	Tujuan pengungkapan permodalan, pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kecukupan permodalan Bank Umum Syariah dan profil risiko Bank Umum Syariah.	129-167	
c.	Bank Umum Syariah memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh Direksi, antara lain mengenai cakupan pengungkapan dan pengendalian intern dalam proses pengungkapan.	276	
d.	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko, paling sedikit mencakup:		
(1)	Pengungkapan permodalan, terdiri atas:	119	
(a)	Pengungkapan kualitatif mengenai:		
i.	Struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah antara lain: karakteristik, jangka waktu instrumen, fitur opsi beli, fitur <i>step-up</i> , tingkat imbal hasil, dan peringkat, apabila tersedia; dan		
ii.	Kecukupan permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan Bank Umum Syariah dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang.		
(b)	Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan Bank Umum Syariah.	119	
(2)	Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko, paling sedikit mencakup:	261-267	
(a)	Pengungkapan mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah secara umum, yang terdiri atas informasi mengenai:		
i.	Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;		
ii.	Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko;		
iii.	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan		
iv.	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		
(b)	Pengungkapan mengenai eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah secara khusus, yang terdiri atas:	261-267	
i.	Risiko Kredit;		
ii.	Risiko Pasar;		
iii.	Risiko Likuiditas;		
iv.	Risiko Operasional;		
v.	Risiko Hukum;		
vi.	Risiko Reputasi;		
vii.	Risiko Strategik;		
viii.	Risiko Kepatuhan;		
ix.	Risiko Imbal Hasil; dan		
x.	Risiko Investasi.		

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
4.	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko		
	(c) Pengungkapan Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir (b) i, meliputi:		
	i. Pengungkapan umum, terdiri atas:		
	i) Pengungkapan kualitatif:		
	(i) Informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit, termasuk organisasi manajemen Risiko Kredit, strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit;	261-267	
	(ii) Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impairment</i>); dan	261-267	
	(iii) Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.	261-267	
	ii) Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.4) a) (1).	261-267	
	ii. Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, terdiri atas:		
	i) Pengungkapan kualitatif:		
	(i) Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit;	261-267	
	(ii) Kategori portofolio yang menggunakan peringkat;	261-267	
	(iii) Lembaga pemeringkat yang digunakan; dan	261-267	
	(iv) Pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>), termasuk:		
	• Jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima atau diserahkan oleh Bank Umum Syariah;	261-267	
	• Metodologi perhitungan kecukupan modal secara intern terkait <i>counterparty credit risk</i> secara internal Bank Umum Syariah; dan	261-267	
	• Metodologi penentuan <i>credit limit</i> terkait <i>counterparty credit risk</i> sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Undang-Undang Usaha Syariah.	261-267	
	ii) Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.4) a) (2).	261-267	
	iii. Pengungkapan mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, terdiri atas:		
	i) Pengungkapan kualitatif:		
	(i) informasi mengenai kebijakan Bank Umum Syariah untuk jenis agunan utama yang diterima;	261-267	
	(ii) kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;	261-267	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
4.	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko		
	(iii) pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit (<i>creditworthiness</i>) dari pihak-pihak tersebut; dan	261-267	
	(iv) informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit.	261-267	
	ii) Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.4) a) (3).	261-267	
	iv. Pengungkapan sekuritisasi aset, terdiri atas:		
	i) Pengungkapan kualitatif:		
	(i) Pengungkapan umum manajemen risiko, meliputi hal-hal seperti tujuan Bank Umum Syariah melakukan aktivitas sekuritisasi aset, efektivitas aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan untuk memindahkan Risiko Kredit dari Bank Umum Syariah kepada pihak lain atas transaksi yang menjadi <i>underlying</i> aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank Umum Syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan Bank Umum Syariah dalam setiap fungsi;	261-267	
	(ii) Ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan tersebut; dan	261-267	
	(iii) Nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud.	261-267	
	ii) Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.4) a) (4).	261-267	
	v. Pengungkapan kuantitatif perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b. 4) a) (5).	261-267	
	(d) Pengungkapan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ii dengan menggunakan Metode Standar, meliputi:		
	i. Pengungkapan kualitatif:		
	i) Informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk:		
	(i) Organisasi manajemen Risiko Pasar;	261-267	
	(ii) Pengelolaan portofolio <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> , serta metodologi valuasi yang digunakan; dan	261-267	
	(iii) Mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> ;	261-267	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
4.	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko		
	ii) Portofolio <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang diperhitungkan dalam KPMM; dan	261-267	
	iii) Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi Risiko Pasar atas transaksi valuta asing karena perubahan kurs termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai syariah.	261-267	
	ii. Pengungkapan kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.4) b).	261-267	
(e)	Pengungkapan Risiko Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam butir (b) iii, meliputi:		
	i. Pengungkapan kualitatif mengenai informasi penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas, termasuk:		
	i) Organisasi manajemen Risiko Likuiditas;	261-267	
	ii) Strategi pendanaan;	261-267	
	iii) Teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas dan rencana pendanaan darurat; dan	261-267	
	iv) Mekanisme pengukuran dan <i>stress testing</i> serta pengendalian Risiko Likuiditas;	261-267	
	ii. Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.4) c).	261-267	
(f)	Pengungkapan Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam butir (b) iv, meliputi:		
	i. Pengungkapan kualitatif mengenai informasi penerapan manajemen risiko untuk Risiko Operasional, termasuk:		
	i) Organisasi manajemen Risiko Operasional;	261-267	
	ii) Mekanisme yang digunakan Bank Umum Syariah untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko Operasional; dan	261-267	
	iii) Mekanisme untuk memitigasi Risiko Operasional.	261-267	
	ii. Pengungkapan kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.b.4) d).	261-267	
(g)	Pengungkapan Risiko Hukum sebagaimana dimaksud dalam butir (b) v, memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Hukum, termasuk:		
	i. Organisasi manajemen Risiko Hukum; dan	261-267	
	ii. Mekanisme pengendalian Risiko Hukum.	261-267	
(h)	Pengungkapan Risiko Reputasi sebagaimana dimaksud dalam butir (b) vi memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi, termasuk:		
	i. Organisasi manajemen Risiko Reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit-unit terkait (<i>Corporate Secretary</i> , Humas, dan unit bisnis terkait);	261-267	
	ii. Kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) lainnya untuk mengendalikan Risiko Reputasi; dan	261-267	
	iii. Pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis.	261-267	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
4.	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko		
	(i) Pengungkapan Risiko Strategik sebagaimana dimaksud dalam butir (b) vii memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Strategik, termasuk:		
	i. Organisasi manajemen Risiko Strategik;	261-267	
	ii. Kebijakan yang memungkinkan Bank Umum Syariah untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik ekstern maupun intern; dan	261-267	
	iii. Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.	261-267	
	(j) Pengungkapan Risiko Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) viii memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, termasuk:		
	i. Organisasi manajemen Risiko Kepatuhan;	261-267	
	ii. Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan; dan	261-267	
	iii. Mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan.	261-267	
	(k) Pengungkapan Risiko Imbal Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ix memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Imbal Hasil, termasuk:		
	i. Organisasi manajemen Risiko Imbal Hasil;	261-267	
	ii. Strategi dalam menghasilkan laba atau pendapatan; dan	261-267	
	iii. Mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko Imbal Hasil.	261-267	
	l) Pengungkapan Risiko Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir (b) x yang memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Investasi, termasuk:		
	i. Organisasi manajemen Risiko Investasi;	261-267	
	ii. Strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil; dan	261-267	
	iii. Mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko Investasi.	261-267	
e	Dalam hal terdapat perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (<i>prone to rapid change</i>) antara lain terkait perubahan kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan kebijakan intern Bank Umum Syariah kelompok usaha, Bank Umum Syariah harus mengungkapkan eksposur risiko dan hal terkait lainnya yang diterapkan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1.b.4)d)(2) dalam Situs Web Bank Umum Syariah secara triwulanan.	261-267	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
5.	Pengungkapan khusus bagi Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:		
a.	Struktur kelompok usaha Bank Umum Syariah yang meliputi:	84	
1.	Struktur kelompok usaha Bank Umum Syariah, yang antara lain terdiri dari Bank Umum Syariah, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> ;		
2.	Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah; dan	62-63	
3.	Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (<i>shareholders acting in concert</i>). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank Umum Syariah, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.	-	
b.	Transaksi antara Bank Umum Syariah dengan Pihak-Pihak Berelasi dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:		
1.	Informasi transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, baik yang dilakukan Bank Umum Syariah maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah yang bergerak di bidang keuangan;	122-123	
2.	Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	122-123	
3.	Jenis transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, antara lain:		
(a)	Kepemilikan silang (<i>cross shareholdings</i>);	123	
(b)	Transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;	123	
(c)	Pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	-	
(d)	Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	275	
(e)	Eksposur kepada Pemegang Saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan	-	
(f)	Pembelian, penjualan dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repo.	-	
c.	Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah yang bergerak di bidang keuangan;	123	
d.	Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank Umum Syariah kepada nasabah dan/ atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank Umum Syariah;	275	
e.	Pengungkapan secara konsolidasi mengenai permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank Umum Syariah, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank Umum Syariah, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1.b.4); dan	261-267	
f.	Adanya larangan, batasan dan/atau hambatan signifikan lainnya untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh Otoritas (<i>regulatory capital</i>) antara Bank Umum Syariah dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.	-	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
6.	<p>Pengungkapan lain sesuai standar akuntansi keuangan, apabila belum tercakup dalam angka 1) sampai dengan angka 5).</p> <p>Bank Umum Syariah dalam menyusun Laporan Publikasi Tahunan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Tahunan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - Laporan Publikasi Tahunan Bank Umum Syariah yang merupakan lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan ini.</p> <p>Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Tahunan Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank Umum Syariah yang memiliki Entitas Anak menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Tertentu mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan tahunan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau b) Laporan tahunan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan nonkeuangan, dalam hal tidak terdapat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a). <p>Dalam hal Entitas Induk tidak memiliki laporan tahunan tersebut, Bank Umum Syariah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan nonkeuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank Umum Syariah. <p>Dalam hal Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung tidak memiliki laporan tahunan tersebut, Bank Umum Syariah wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan tahunan Entitas Anak. <p>Dalam hal Entitas Anak tidak memiliki laporan tahunan tersebut, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
	<p>Unit Usaha Syariah</p> <p>Unit Usaha Syariah menyajikan informasi kegiatan Unit Usaha Syariah pada Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan Unit Usaha Syariah; b. Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Unit Usaha Syariah; c. Perkembangan usaha Unit Usaha Syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, ROA, <i>Non Performing Financing (NPF)</i>, <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>, sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset, dan informasi lainnya yang relevan; d. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan; e. Tanggung jawab sosial perusahaan; dan f. Realisasi tingkat bagi hasil/imbalan dan metode penghitungan distribusi bagi hasil. 	N/A	

No.	Keterangan	Halaman	Sumber Dokumen
	LAPORAN PUBLIKASI LAIN - LAPORAN INFORMASI DAN/ATAU FAKTA MATERIAL		
1.	Laporan Informasi dan/atau Fakta Material adalah laporan yang memuat informasi dan/atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dan/atau fakta tersebut.	120	
2.	Pengumuman Laporan Informasi dan/atau Fakta Material pada Situs <i>Web</i> Bank Umum Syariah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Isi Laporan pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah- Laporan Informasi dan/atau Fakta Material.	92	
3.	Bank Umum Syariah dalam menyusun Laporan Informasi dan/atau Fakta Material yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - Laporan Informasi dan/atau Fakta Material yang merupakan lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	√	

07

LAPORAN KEUANGAN





PT BANK BCA SYARIAH

*LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018*

**PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1-3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	4-5
Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
Laporan Arus Kas.....	7-8
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.....	9
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.....	10
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	11
Catatan atas Laporan Keuangan.....	12-60

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
No. 027/DIR/2020
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
PT BANK BCA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : John Kosasih
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 - Jakarta Timur 13310
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : Pranata
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 - Jakarta Timur 13310
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Bank BCA Syariah;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Januari 2020

PT Bank BCA Syariah



The image shows two signatures and two stamps. On the left, there is a signature of John Kosasih over a blue rectangular stamp that reads 'PT Bank BCA Syariah'. Below the signature is a 5000 Rupiah banknote. On the right, there is a signature of Pranata over a blue rectangular stamp that reads 'PT Bank BCA Syariah'. Below the signature is another 5000 Rupiah banknote. The names and titles are printed below the signatures: John Kosasih, Presiden Direktur and Pranata, Direktur.

John Kosasih
Presiden Direktur

Pranata
Direktur



Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia

Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298

www.crowe.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00014/2.1051/AU.1/07/0271-2/1/II/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK BCA SYARIAH

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank BCA Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN



Drs. Ruchjat Kosasih, MM., CPA
Izin Akuntan Publik No.AP.0271

27 Januari 2020

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
KAS	4	8.417.956.901	3.941.767.500
GIRO PADA BANK INDONESIA DAN			
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2.d, 5	1.537.786.867.692	1.081.918.219.903
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2.b, 2.c, 2.e, 6		
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.113.917.993 dan Rp 113.297.017 pada 31 Desember 2019 dan 2018)</i>		110.277.881.313	11.216.404.697
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA			
Penyisihan kerugian	2.c, 2.f, 7	966.930.356.662 <u>(8.821.571.607)</u>	842.395.856.639 <u>(7.584.710.726)</u>
		958.108.785.055	834.811.145.913
PIUTANG			
Murabahah	2.c, 2.g, 8		
<i>(setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar Rp 595.747.953.563 dan Rp 635.532.625.873 pada 31 Desember 2019 dan 2018)</i>		1.619.734.900.402	1.706.939.666.581
<i>Penyisihan Kerugian</i>		<u>(35.511.850.991)</u>	<u>(27.529.475.999)</u>
<i>Jumlah Piutang Murabahah Bersih</i>		1.584.223.049.411	1.679.410.190.582
Piutang Sewa	2.c, 2.g	86.163.776	409.118.435
<i>Penyisihan Kerugian</i>		<u>(17.016.522)</u>	<u>(364.957.576)</u>
<i>Jumlah Piutang Sewa Bersih</i>		69.147.254	44.160.859
PEMBIAYAAN			
Mudharabah	2.c, 2.h, 9	490.691.173.798	242.565.632.492
<i>Penyisihan Kerugian</i>		<u>(4.906.911.738)</u>	<u>(6.509.733.909)</u>
<i>Jumlah Pembiayaan Mudharabah Bersih</i>		485.784.262.060	236.055.898.583
Musarakah	2.c, 2.h, 10	3.009.764.555.343	2.432.320.931.013
<i>Penyisihan Kerugian</i>		<u>(105.557.067.984)</u>	<u>(41.321.907.048)</u>
<i>Jumlah Pembiayaan Musarakah Bersih</i>		2.904.207.487.359	2.390.999.023.965
Qardh	2.c, 2.i,	13.915.843.512	553.337.854
<i>Penyisihan Kerugian</i>		<u>(139.158.435)</u>	<u>(5.533.379)</u>
<i>Jumlah Pembiayaan Qardh Bersih</i>		13.776.685.077	547.804.475
ASET IJARAH			
Nilai perolehan	2.j, 11	724.119.942.819	693.289.462.385
<i>Akumulasi penyusutan</i>		<u>(212.893.823.944)</u>	<u>(176.333.409.704)</u>
<i>Nilai Aset Ijarah Bersih</i>		511.226.118.875	516.956.052.681

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET TETAP	2.k, 12		
Nilai perolehan		184.981.456.241	155.609.106.541
Akumulasi penyusutan		(37.161.370.202)	(29.328.379.368)
Nilai Buku Aset Tetap		147.820.086.039	126.280.727.173
ASET LAIN			
Aset Pajak Tangguhan	2.t, 16	18.368.583.296	13.316.233.157
Aset Lain-lain	2.i, 13	354.306.779.747	168.510.515.592
Total Aset Lain		372.675.363.043	181.826.748.749
JUMLAH ASET		8.634.373.690.079	7.064.008.145.080
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	14	16.565.173.649	22.074.127.855
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN		15.101.185.905	15.028.023.848
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2.b, 15		
Pihak Berelasi			
Giro <i>Wadiah</i>		100.791.078	139.950.034
Pihak Ketiga			
Giro <i>Wadiah</i>		2.455.065.476	1.814.918.426
SIMPANAN DARI NASABAH	2.b, 2.m, 15		
Pihak Berelasi			
Giro <i>Wadiah</i>		290.688.439.468	46.469.257.996
Tabungan <i>Wadiah</i>		-	-
Pihak Ketiga			
Giro <i>Wadiah</i>		803.571.969.174	445.749.942.179
Tabungan <i>Wadiah</i>		231.953.963.292	175.564.544.211
UTANG PAJAK		10.038.085.858	11.451.502.058
LIABILITAS LAIN-LAIN	2.s, 17, 30	53.577.383.010	55.293.647.846
JUMLAH LIABILITAS		1.424.052.056.910	773.585.914.453

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
DANA SYIRKAH TEMPORER	2.b, 2.m, 18		
Dana Syirkah Temporer dari Bukan Bank:			
Tabungan Mudharabah		425.343.159.666	307.611.919.900
Deposito Mudharabah		4.453.374.092.087	4.530.710.715.204
Dana Syirkah Temporer dari Bank:			
Deposito Mudharabah		3.312.136.194	765.103.613
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank		–	190.000.000.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		4.882.029.387.947	5.029.087.738.717
EKUITAS			
Ekuitas Pemilik Entitas Induk			
Modal Disetor	2.b, 19	1.996.300.000.000	996.300.000.000
Surplus revaluasi aset tetap	2.k, 12	47.953.016.836	47.953.016.836
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual - bersih		8.162.210.052	6.858.151.088
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih		(2.406.034.874)	(866.199.958)
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya		8.000.000.000	6.500.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya		270.283.053.208	204.589.523.944
JUMLAH EKUITAS		2.328.292.245.222	1.261.334.491.910
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		8.634.373.690.079	7.064.008.145.080

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA			
SEBAGAI MUDHARIB			
	2.n, 21		
Pendapatan dari Jual Beli			
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		184.390.455.778	187.363.716.447
Pendapatan dari Sewa			
Pendapatan Bersih <i>Ijarah</i>		38.161.004.129	17.789.897.733
Pendapatan dari Bagi Hasil			
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		36.582.704.273	24.956.389.194
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		250.027.472.171	220.429.218.507
Jumlah Pendapatan		509.161.636.351	450.539.221.881
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	2.o,	112.321.897.696	72.043.827.056
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		621.483.534.047	522.583.048.937
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL			
DANA SYIRKAH TEMPORER			
	2.p, 22	(302.282.506.853)	(274.694.816.404)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK			
		319.201.027.194	247.888.232.533
PENDAPATAN USAHA LAINNYA			
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	2.q, 23	53.169.096.794	19.616.232.130
BEBAN USAHA			
Beban Kepegawaian	24	100.182.148.789	92.148.860.031
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	25	66.604.162.451	20.546.925.315
Beban Umum dan Administrasi	26, 33	77.342.589.835	48.212.119.701
Beban Usaha Lainnya:	27		
Beban Bonus Simpanan <i>Wadiah</i>		31.817.150.753	15.536.239.114
Beban Penjaminan Pemerintah		10.986.768.454	9.886.923.531
		286.932.820.282	186.331.067.692
LABA USAHA			
		85.437.303.706	81.173.396.971
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA			
	28		
Pendapatan Non Usaha		1.252.343.644	567.576.126
Beban Non Usaha		(3.393.971.740)	(9.347.519.750)
Jumlah Beban Non Usaha		(2.141.628.096)	(8.779.943.624)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGASILAN			
		83.295.675.610	72.393.453.347
ZAKAT			
		-	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
		83.295.675.610	72.393.453.347
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
	2.t, 16		
Kini		(21.075.904.500)	(20.507.973.750)
Tanggungan		4.973.758.154	6.481.589.542
LABA BERSIH			
		67.193.529.264	58.367.069.139

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		(2.053.113.222)	25.336.749.787
Pajak penghasilan		513.278.306	(6.711.516.315)
Surplus revaluasi aset tetap		–	47.953.016.836
		<u>(1.539.834.916)</u>	<u>66.578.250.308</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual		1.738.745.284	370.658.691
Pajak penghasilan		(434.686.320)	(92.664.673)
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual - setelah pajak penghasilan		<u>1.304.058.964</u>	<u>277.994.018</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		<u>(235.775.952)</u>	<u>66.856.244.326</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		<u>66.957.753.312</u>	<u>125.223.313.465</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	Surplus Revaluasi Aset Tetap
SALDO PER 31 DESEMBER 2017	996.300.000.000	6.580.157.070	--
Penyisihan Saldo Laba untuk Cadangan Umum	--	--	--
Laba Bersih Selama Tahun Berjalan	--	--	--
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum direalisasi atas:			
Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	--	277.994.018	--
Aktuarial	--	--	--
Revaluasi Aset Tetap	--	--	47.953.016.836
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	996.300.000.000	6.858.151.088	47.953.016.836
Tambahan Setoran Modal	1.000.000.000.000	--	--
Penyisihan Saldo Laba untuk Cadangan Umum	--	--	--
Laba Bersih Selama Tahun Berjalan	--	--	--
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum direalisasi atas:			
Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	--	1.304.058.964	--
Aktuarial	--	--	--
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	1.996.300.000.000	8.162.210.052	47.953.016.836

Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	Saldo laba dari Kegiatan Syariah		Jumlah Ekuitas
	Belum Ditetapkan Penggunaannya	Sudah Ditetapkan Penggunaannya	
(19.491.433.430)	147.722.454.805	5.000.000.000	1.136.111.178.445
--	(1.500.000.000)	1.500.000.000	--
--	58.367.069.139	--	58.367.069.139
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	277.994.018
18.625.233.472	--	--	18.625.233.472
--	--	--	47.953.016.836
(866.199.958)	204.589.523.944	6.500.000.000	1.261.334.491.910
--	--	--	1.000.000.000.000
--	(1.500.000.000)	1.500.000.000	--
--	67.193.529.264	--	67.193.529.264
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	1.304.058.964
(1.539.834.916)	--	--	(1.539.834.916)
(2.406.034.874)	270.283.053.208	8.000.000.000	2.328.292.245.222

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha utama lainnya		649.670.978.023	573.890.829.182
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer		(292.957.449.883)	(270.211.088.981)
Pembayaran pendapatan usaha lainnya		(21.092.868.549)	(6.734.159.317)
Pembayaran beban karyawan		(100.026.555.280)	(92.089.540.299)
Pembayaran Pajak		(22.760.314.604)	(18.760.917.396)
Pembayaran beban usaha selain beban karyawan		(78.747.150.149)	(48.015.462.475)
Penerimaan zakat		6.712.586	11.932.985
Penyaluran dana kebajikan		(303.122.355)	(228.108.099)
Penerimaan pendapatan (Pembayaran beban) non-usaha		30.276.882.232	(25.923.947)
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia		(450.032.000.000)	(389.700.000.000)
Piutang		87.527.720.838	(113.636.502.944)
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		(248.125.541.306)	(16.988.161.592)
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(577.443.624.330)	(597.905.546.087)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		(30.830.480.434)	(11.368.398.586)
Pinjaman <i>qardh</i>		(13.362.505.658)	68.990.777
Aset lain-lain		(189.504.695.440)	(106.952.418.983)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		(5.422.560.335)	7.244.299.429
Simpanan		659.031.615.642	9.542.650.315
Liabilitas lain-lain		(9.004.181.934)	2.141.129.857
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer Investasi tidak terikat		(147.058.350.770)	950.373.296.666
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(760.157.491.706)	(129.343.099.495)
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN INVESTASI			
Pembelian Surat Berharga yang diukur pada biaya perolehan dan tersedia untuk dijual		(263.000.000.000)	(293.551.655.188)
Pencairan <i>Reverse Repo</i>		-	275.906.874.848
Pencairan Surat Berharga yang diukur pada biaya perolehan dan tersedia untuk dijual		140.000.000.000	45.000.000.000
Penambahan Aset Tetap		(6.458.549.321)	(13.449.088.706)
Pembelian Aset Tidak Berwujud		(235.288.534)	(807.457.940)
Hasil penjualan aset tetap		22.019.082	2.600.000
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(129.671.818.773)	13.101.273.014

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
ARUS KAS DIPEROLEH DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Setoran Modal	19	1.000.000.000.000	--
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan		1.000.000.000.000	--
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS			
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN		280.889.689.117	397.131.515.598
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN		391.060.378.638	280.889.689.117
Kas dan Setara Kas Terdiri dari:			
Kas	4	8.417.956.901	3.941.767.500
Giro pada Bank Indonesia	5	271.250.622.431	265.618.219.903
Penempatan Pada Bank Lain	6	111.391.799.306	11.329.701.714
Jumlah		391.060.378.638	280.889.689.117
Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas			
Cadangan Umum		1.500.000.000	1.500.000.000

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PENDAPATAN USAHA	621.483.534.047	522.583.048.937
PENGURANG :		
Pendapatan periode berjalan yang kasnya belum diterima periode berjalan:		
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	(11.725.691.311)	(9.431.784.657)
Pendapatan Sewa	(12.705.301.407)	(10.244.865.235)
Akrual Bagi Hasil	(24.457.995.625)	(19.120.015.751)
Pendapatan Surat Berharga dan FASBIS	<u>(11.556.717.472)</u>	<u>(7.239.192.461)</u>
Jumlah Pengurang	(60.445.705.815)	(46.035.858.104)
PENAMBAH :		
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima periode berjalan:		
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	9.431.784.657	8.764.348.599
Pendapatan Sewa	10.244.865.235	11.025.981.701
Akrual Bagi Hasil	19.120.015.751	15.772.415.949
Pendapatan Surat Berharga dan FASBIS	7.239.192.461	2.167.175.000
Jumlah Pengurang	46.035.858.104	37.729.921.249
Pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil	607.073.686.336	514.277.112.082
Bagi hasil yang Menjadi Hak Bank	304.791.179.483	239.582.295.678
Bagi hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana	302.282.506.853	274.694.816.404
Dirinci Atas:		
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah di distribusikan	287.670.321.006	259.666.792.556
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum di distribusikan	14.612.185.847	15.028.023.848

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER
DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
Sumber Dana Zakat			
Zakat dari Pihak Luar Bank Syariah	2.r	74.538.259	67.825.673
Jumlah sumber dana zakat		74.538.259	67.825.673
Penggunaan dana zakat			
Disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat		(67.825.673)	(55.892.688)
Jumlah Penggunaan Dana		(67.825.673)	(55.892.688)
Kenaikan Dana Zakat		6.712.586	11.932.985
Saldo Awal Dana Zakat		67.825.673	55.892.688
Saldo Akhir Dana Zakat		74.538.259	67.825.673

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER
DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
Sumber Dana Kebajikan		
Infak Zakat dari dalam bank syariah	64.890	3.805
Sedekah	426.968	4.901.128
Denda	282.563.705	378.189.949
Pendapatan non-halal	46.145.912	27.119.823
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	329.201.475	410.214.705
Penggunaan Dana Kebajikan		
Sumbangan	(632.323.830)	(638.322.804)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(632.323.830)	(638.322.804)
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(303.122.355)	(228.108.099)
Saldo Awal Dana Kebajikan	1.521.037.214	1.749.145.313
Saldo Akhir Dana Kebajikan	1.217.914.859	1.521.037.214

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

1 Umum

1.a. Pendirian Bank

PT Bank BCA Syariah ("Bank") didirikan dengan nama PT Utama International Bank berdasarkan Akta No. 91 tanggal 21 Mei 1991 dari Notaris Buniarti Tjandra, S.H. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.-3446.HT.01.01.TH.91 tanggal 30 Juli 1991. Melalui akta perubahan No. 96 tanggal 22 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, S.H, telah dilakukan perubahan nama PT Utama International Bank menjadi PT Bank UIB. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-1497.HT.01.04.97 juncto Berita Negara No.61 tanggal 1 Agustus 1997.

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 lembar saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%. Komposisi kepemilikan Bank setelah akuisisi telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Akta Jual Beli saham No. 74 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan terakhir komposisi kepemilikan bank ini dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No. 223/DIR/UIB/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah Indonesia didasarkan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT Bank UIB, sesuai dengan Akta Notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H No. 49 tanggal 16 Desember 2009.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 93 tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Buena Brahmama, SH.,M.Kn.,mengenai peningkatan Modal dasar Bank menjadi Rp 5.000.000.000.000,- yang terbagi atas 5.000.000 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-.AH.01.03-0322607 Tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Raya Jatinegara Timur No.72, Jakarta Timur. Pada tahun 2019, Bank beroperasi melalui 13 Kantor Cabang Utama (KCU), 13 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 40 Unit Layanan Syariah (ULS) dan 3 Kantor Fungsional (KFO).

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

1.b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Dewan Komisaris:		
Presiden Komisaris	: Tantri Indrawati	Yana Rosiana
Komisaris Independen	: Joni Handrijanto	Joni Handrijanto
Komisaris Independen	: Suyanto Sutjiadi	Suyanto Sutjiadi
Direksi		
Presiden Direktur	: John Kosasih	John Kosasih
Direktur	: Pranata	Houda Muljanti
Direktur	: Rickyadi Widjaja	Rickyadi Widjaja
Direktur Kepatuhan	: Houda Muljanti	Tantri Indrawati
Dewan Pengawas Syariah		
Ketua DPS	: Prof. Dr. Fathurrahman Djamil	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil
Anggota DPS	: Sutedjo Prihatono	Sutedjo Prihatono

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Komite Audit		
Ketua	: Joni Handrijanto	Joni Handrijanto
Anggota	: Tantri Indrawati	J. Sindu Adisuwono
Anggota	: Riyo Sigid Wisaksono	Riyo Sigid Wisaksono
Anggota	: J. Sindu Adisuwono	
Komite Pemantau Risiko		
Ketua	: Suyanto Sutjiadi	Suyanto Sutjiadi
Anggota	: Tantri Indrawati	Riyo Sigid Wisaksono
Anggota	: Riyo Sigid Wisaksono	Iwan Wiwoho
Anggota	: Iwan Wiwoho	
Komite Remunerasi		
Ketua	: Tantri Indrawati	Joni Handrijanto
Anggota	: Joni Handrijanto	Yana Rosiana
Anggota	: Suyanto Sutjiadi	Suyanto Sutjiadi
Anggota	: Endang Ruslina	Endang Ruslina

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Gaji dan Kompensasi

	2019	2018
Direksi	19.732.229.239	14.401.475.363
Dewan Komisaris	2.833.663.860	2.375.626.200
Dewan Pengawas Syariah	1.158.018.820	1.052.246.874
	23.723.911.919	17.829.348.437

Jumlah Karyawan

Bank mempunyai 554 dan 525 karyawan tetap dan kontrak pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2.a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013).

Berdasarkan PSAK No.101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- i. Laporan Posisi Keuangan;
- ii. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain ;
- iii. Laporan Perubahan Ekuitas;
- iv. Laporan Arus Kas;
- v. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- vi. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- vii. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- viii. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal perolehan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penggunaan zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infak*, *shadaqah* dan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

2.b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No.7 (revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

2.c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *Murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *Ijarah*.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

Aset produktif atas piutang *Murabahah* sesuai dengan PSAK No. 50, 55 dan 102 (Revisi 2013) "Akuntansi *Murabahah*", dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPSI 2013.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (i) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (ii) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- (iii) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (iv) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (v) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- (vi) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- (vii) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- (viii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *Murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- (i) Piutang *Murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
- (ii) Terdapat tunggakan yang melebihi 90 hari
- (iii) Piutang *Murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) piutang *Murabahah* dengan plafond lebih besar dari Rp 2 miliar dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) piutang *Murabahah* yang diberikan dengan *plafond* lebih besar dari Rp2 miliar yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan piutang *Murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- (i) Piutang *Murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
- (ii) Piutang *Murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- (iii) Piutang *Murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default (PD)* dan *Loss of Given Default (LGD)*.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- (i) Piutang dan pembiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
- (ii) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain margin.

Aset produktif atas pinjaman *qardh*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *Ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

- (i) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produkti yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- (ii) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - (a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - (b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - (c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - (d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Atas aset non produktif, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

2.d. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

2.e. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana pada bank syariah lain dalam bentuk giro *wadiah*, deposito berjangka *Mudharabah* berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Giro dan deposito pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut dicatat sebagai liabilitas lain-lain Bank (titipan dana non halal).

2.f. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Syariah

Investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

1. Diukur pada biaya perolehan jika (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya, (b) biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, (c) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk, (d) rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi komprehensif.
2. Diukur pada nilai wajar dengan mengacu kepada: (a) kuotasi harga di pasar aktif, atau (b) harga yang terjadi pada transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau (c) nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi. Selisih antara nilai wajar dengan nilai transaksi diakui dalam laba rugi komprehensif lainnya.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah*, SIMA disajikan sebesar saldonya dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga disajikan sebagai pengurang dari akun surat berharga

2.g. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* atau akad *Ijarah*.

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan dibayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai margin yang disepakati.

Piutang *Murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggung yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang *Murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Akad *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- (i) Hibah;
- (ii) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- (iii) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Piutang pendapatan *Ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

2.h. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *Mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *Mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *Mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Musyarakah permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana Bank akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah, sehingga bagian dana Bank akan menurun dan pada akhir masa akad, nasabah akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan *musyarakah*.

2.i. Pinjaman Qardh

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2.j. Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah

Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*Ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan obyek sewa dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

2.k. Aset Tetap

Mulai 1 Januari 2018, Bank mengubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengukuran awal untuk golongan tanah dari model biaya ke model revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan secara prospektif.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari penghasilan komprehensif, penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi. Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penyusutan berdasarkan harga perolehan awal aset ditransfer dari “surplus revaluasi aset” ke dalam “saldo laba”.

Aset tetap selain tanah dicatat berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset tetap selain tanah disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

Jenis	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	20
Inventaris I	4
Inventaris II	8
Kendaraan Bermotor	4

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset diestimasikan ketika kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

2.l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka (disajikan dalam akun “Aset Lain-lainnya”) diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.m. Dana Syirkah Temporer

Dana *Syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Hubungan antara Bank dan pemilik dana *Syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *Mudharabah muthlaqah*.

Dana *Syirkah* temporer terdiri dari tabungan *Mudharabah*, deposito berjangka *Mudharabah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank.

Dana *Syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *Syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dan tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi

Dana *Syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dana, termasuk untuk mencampur dana tersebut dengan dana lainnya.

Pemilik dana *Syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *Syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

2.n. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *Mudharib* (pengelola dana) terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Ijarah* (sewa), dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *Mudharabah*, *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *Murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode efektif (*anuitas*).

Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha

Setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pengembalian harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan. Kelebihan pembayaran di atas harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya. Khusus untuk transaksi *Ijarah*, setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pelunasan piutang sewa.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

2.o. Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada Bank Syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual.

2.p. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer merupakan bagian bagi laba milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah muthlaqah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dihitung dari pendapatan bank yang diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *Mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

2.q. Pendapatan Administrasi Pembiayaan

Pendapatan administrasi pembiayaan bagi hasil, IMBT dan *Ijarah* yang jumlahnya signifikan dan berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya.

Saldo pendapatan yang belum diamortisasi untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, diakui sebagai pendapatan pada saat pelunasan.

Pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan atau tidak untuk suatu jangka waktu tertentu, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

2.r. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Kebajikan

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

2.s. Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Manfaat imbalan pasti

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Bank ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak mengklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya - [penghargaan kerja], kepada para karyawan kuncinya. Biaya untuk menyediakan imbalan ini ditetapkan dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit*. Metode ini merefleksikan jasa yang diserahkan oleh karyawan hingga tanggal penilaian dan memperhitungkan asumsi terkait proyeksi gaji karyawan. Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk biaya jasa kini, biaya bunga, biaya jasa lalu dan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

2.t. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Bank mengajukan keberatan, Bank mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Bank.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Bank bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

2.u. Standar akuntansi baru

PSAK 73 “Sewa”:

PSAK 73 memperkenalkan model komprehensif untuk mengidentifikasi pengaturan sewa dan perlakuan akuntansi baik untuk pesewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*). Pada saat berlaku efektif, PSAK 73 akan menggantikan pedoman sewa saat ini yaitu PSAK 30: Sewa dan interpretasi terkait.

PSAK 73 membedakan kontrak sewa dan jasa berdasarkan apakah aset identifikasi dikendalikan oleh pelanggan. Perbedaan sewa operasi (*off balance sheet*) dan sewa pembiayaan (*on balance sheet*) dihapus untuk akuntansi penyewa, dan digantikan oleh model di mana aset hak-guna dan liabilitas terkait harus diakui untuk semua sewa oleh *lessee* (yaitu semua pada *on balance sheet*) kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dan tetap mensyaratkan pesewa untuk mengklasifikasikan sewa baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

3 Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

3.a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penyisihan kerugian aset produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas nilai piutang nasabah guna mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi nilai penyisihan kerugian aset produktif.

3.b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 12.

Revaluasi Aset Tetap

Bank mencatat aset tetap pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, pengukuran tanah pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera dalam laporan laba rugi dan pada saat terjadi. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 30.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

4 Kas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas	<u><u>8.417.956.901</u></u>	<u><u>3.941.767.500</u></u>

5 Penempatan pada Bank Indonesia

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Giro		
Giro Wadiah	271.250.622.431	265.618.219.903
Penempatan Pada Bank Indonesia		
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia		
Syariah	662.200.000.000	646.300.000.000
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	310.000.000.000	170.000.000.000
Sukuk BI	294.336.245.261	--
	<u><u>1.537.786.867.692</u></u>	<u><u>1.081.918.219.903</u></u>

Persentase GWM (tidak diaudit) dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar 4,74% dan 5,24%.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

6 Penempatan pada Bank Lain

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Giro		
<u>Pihak Berelasi</u>		
Bank Non Syariah		
PT BCA Tbk	11.376.141.940	11.325.311.330
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT OCBC NISP (Unit Usaha Syariah)	15.657.366	4.390.384
Penyisihan Kerugian	<u>(113.917.993)</u>	<u>(113.297.017)</u>
Jumlah Giro - Bersih	11.277.881.313	11.216.404.697
Deposito		
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Bank Panin Dubai Tbk	100.000.000.000	--
Penyisihan Kerugian	<u>(1.000.000.000)</u>	<u>--</u>
Jumlah Deposito - Bersih	99.000.000.000	--
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain - Bersih	<u>110.277.881.313</u>	<u>11.216.404.697</u>

Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo Awal Tahun	113.297.017	1.507.957.730
Pembentukan (Pemulihan) Penyisihan		
Kerugian Selama Satu Tahun	1.000.620.976	(1.394.660.713)
Jumlah	<u>1.113.917.993</u>	<u>113.297.017</u>

7 Investasi pada Surat Berharga

7.a. Berdasarkan jenis, tujuan investasi dan kolektibilitas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Diukur pada Biaya Perolehan		
<u>Lancar</u>		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i>	100.000.000.000	140.000.000.000
Reksadana	50.000.000.000	--
Penyisihan Kerugian	<u>(1.500.000.000)</u>	<u>(1.400.000.000)</u>
Jumlah Surat Berharga diukur pada biaya perolehan	148.500.000.000	138.600.000.000
Tersedia Untuk Dijual		
<u>Lancar</u>		
<u>Non Pemerintah</u>		
Reksadana	455.000.000.000	450.000.000.000
Obligasi Korporasi	268.000.000.000	160.000.000.000
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	9.157.160.662	8.471.072.639
Jumlah Tersedia Untuk Dijual	732.157.160.662	618.471.072.639
Penyisihan Kerugian	<u>(7.321.571.607)</u>	<u>(6.184.710.726)</u>
Jumlah Tersedia Untuk Dijual	724.835.589.055	612.286.361.913

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

	2019	2018
Pemerintah		
Surat Berharga Syariah Negara	83.251.655.188	83.251.655.188
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	1.521.540.812	673.128.812
	84.773.196.000	83.924.784.000
Jumlah Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual - Lancar (Bersih)	809.608.785.055	696.211.145.913
Jumlah Investasi pada Surat Berharga - Bersih	958.108.785.055	834.811.145.913

7.b. Berdasarkan jangka waktu:

	2019	2018
Diukur Pada Biaya Perolehan		
Kurang dari 1 Bulan	150.000.000.000	140.000.000.000
Tersedia Untuk Dijual		
Kurang dari 1 Bulan	-	-
Kurang dari 1 Tahun	455.806.760.662	451.842.072.639
Lebih dari 1 Tahun	361.123.596.000	250.553.784.000
	966.930.356.662	842.395.856.639
<i>Dikurangi :</i>		
Penyisihan Kerugian	(8.821.571.607)	(7.584.710.726)
	958.108.785.055	834.811.145.913

7.c. Berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

	Peringkat		Jumlah	
	2019	2018	2019	2018
Diukur pada Biaya Perolehan				
Bank Pembangunan Jateng - Unit Usaha Syariah	idAA-	idAA-	100.000.000.000	140.000.000.000
Reksadana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro	--	--	50.000.000.000	--
Tersedia Untuk Dijual				
Reksadana Syariah	--	--	455.806.760.662	451.842.072.639
Sukuk <i>Ijarah</i> Indosat	idAAA(sy)	idAAA(sy)	86.342.450.000	73.256.000.000
MTN Syariah PTPN	idA(sy)	--	20.996.200.000	--
Sukuk <i>Ijarah</i> XL Axiata	AAAidn	AAAidn	71.580.000.000	72.945.000.000
Sukuk PT Jasa Marga	idAA-(sy)	--	51.379.000.000	--
Sukuk <i>Mudharabah</i> Eximbank	idAAA(sy)	--	25.624.750.000	--
PBS 016	--	--	45.009.000.000	44.280.000.000
PBS 014	--	--	39.764.196.000	39.644.784.000
Sukuk Angkasa Pura	idAAA(sy)	idAAA(sy)	20.428.000.000	20.428.000.000
<i>Dikurangi :</i>			966.930.356.662	842.395.856.639
Penyisihan Kerugian			(8.821.571.607)	(7.584.710.726)
			958.108.785.055	834.811.145.913

Informasi peringkat diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

7.d. Perubahan penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Saldo Awal Tahun	7.584.710.726	25.633.035.428
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	3.908.963.784	2.435.661.646
Pemulihan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	(2.672.102.903)	(483.986.348)
Penghapus bukuan selama tahun berjalan	--	(20.000.000.000)
Jumlah	8.821.571.607	7.584.710.726

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian investasi pada surat berharga yang dibentuk telah memadai, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

8 Piutang Murabahah

8.a. Berdasarkan Jenis

	2019					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<i>Pihak Ketiga</i>						
Murabahah	1.541.410.663.097	61.643.005.432	5.182.817.048	156.006.379	11.342.408.446	1.619.734.900.402
Jumlah	1.541.410.663.097	61.643.005.432	5.182.817.048	156.006.379	11.342.408.446	1.619.734.900.402
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(12.568.089.476)	(12.795.042.117)	(5.182.817.048)	(156.006.379)	(4.809.895.971)	(35.511.850.991)
Jumlah	1.528.842.573.621	48.847.963.315	--	--	6.532.512.475	1.584.223.049.411

	2018					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<i>Pihak Ketiga</i>						
Murabahah	1.613.449.717.320	92.041.567.866	540.510.355	65.994.925	841.876.115	1.706.939.666.581
Jumlah	1.613.449.717.320	92.041.567.866	540.510.355	65.994.925	841.876.115	1.706.939.666.581
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(18.395.621.966)	(7.955.215.648)	(331.975.942)	(4.786.298)	(841.876.115)	(27.529.475.999)
Jumlah	1.595.054.095.324	84.086.352.218	208.534.413	61.208.627	--	1.679.410.190.582

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

8.b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2019					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	461.412.163.253	596.541.683	--	--	--	462.007.704.936
Real Estate , Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	387.368.432.924	--	--	--	--	387.368.432.924
Perdagangan Besar Dan Eceran	194.183.078.191	3.118.579.857	--	150.006.379	10.933.084.394	208.370.748.621
Industri Pengolahan	207.350.623.475	1.235.837.703	5.017.987.139	--	--	213.004.448.377
Transportasi, Perjudian dan Komunikas	74.353.263.037	53.508.376.840	--	--	--	127.861.639.877
Konstruksi	59.737.287.951	1.478.414.802	184.829.909	--	--	61.380.532.752
Pertambangan Dan Penggalian	14.954.517.622	960.886.288	--	--	114.069.552	16.029.463.662
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.753.694.047	6.062.558	--	--	--	3.759.756.605
Perantara Keuangan	2.815.634.120	--	--	--	--	2.815.634.120
Perikanan	288.372.095	--	--	--	--	288.372.095
Jasa Pendidikan	22.959.399.021	--	--	--	--	22.959.399.021
Listrik, Gas Dan Air	258.956.628	--	--	--	--	258.956.628
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.017.540.345	--	--	--	--	8.017.540.345
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	26.969.473	--	--	--	--	26.969.473
Jasa Masyarakat Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	5.215.249.698	840.484.557	--	--	23.342.322	5.879.076.577
	98.735.481.014	98.820.996	--	--	271.922.179	99.106.224.189
	<u>1.541.410.063.094</u>	<u>61.043.005.434</u>	<u>5.182.817.048</u>	<u>150.006.379</u>	<u>11.342.408.447</u>	<u>1.619.734.900.402</u>
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(12.569.089.476)	(12.795.042.117)	(5.182.817.048)	(156.006.379)	(4.809.895.971)	(35.511.850.991)
	<u>1.528.842.573.618</u>	<u>48.847.963.317</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>6.532.512.476</u>	<u>1.584.223.049.411</u>

	2018					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	381.503.744.558	696.576.665	--	--	--	392.200.321.543
Real Estate , Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	315.875.695.030	33.314.978.513	--	--	--	349.190.673.543
Perdagangan Besar Dan Eceran	307.189.809.238	22.096.943.484	495.872.811	24.315.699	259.862.125	330.066.903.157
Industri Pengolahan	222.455.269.991	1.503.105.790	--	--	128.562.660	224.066.968.441
Transportasi, Perjudian dan Komunikas	173.439.696.990	32.824.242.333	--	--	--	206.263.939.313
Konstruksi	64.875.647.654	--	--	--	--	64.875.647.654
Pertambangan Dan Penggalian	7.913.562.205	428.830.362	--	--	157.661.987	8.500.304.574
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5.060.453.273	182.851.651	--	--	--	5.243.104.924
Perantara Keuangan	4.990.739.713	32.845.041	--	--	--	5.023.384.754
Perikanan	4.541.393.915	--	--	--	--	4.541.393.915
Jasa Pendidikan	1.660.515.628	--	--	--	--	1.660.515.628
Listrik, Gas Dan Air	531.426.304	--	--	--	--	531.426.304
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293.282.989	--	--	--	--	293.282.989
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	87.852.194	57.808.379	--	--	--	145.640.573
Jasa Masyarakat Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	123.020.427.999	903.795.308	44.637.744	41.879.226	295.528.343	124.306.059.269
	<u>1.613.449.717.320</u>	<u>92.041.587.666</u>	<u>540.510.355</u>	<u>66.994.025</u>	<u>841.876.115</u>	<u>1.708.038.668.581</u>
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(18.395.621.995)	(7.955.215.648)	(331.975.942)	(4.786.298)	(841.876.115)	(27.529.475.999)
	<u>1.595.054.095.324</u>	<u>84.086.352.218</u>	<u>208.534.413</u>	<u>61.208.627</u>	<u>--</u>	<u>1.679.410.190.582</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

8.c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2019	2018
Berdasarkan Periode Perjanjian Akad		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	3.891.037.811	2.317.494.976
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	48.110.678.384	64.850.897.538
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	757.631.920.737	861.737.997.454
Lebih dari 5 Tahun	810.101.263.470	778.033.276.613
	<u>1.619.734.900.402</u>	<u>1.706.939.666.581</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(35.511.850.991)	(27.529.475.999)
Jumlah	<u>1.584.223.049.411</u>	<u>1.679.410.190.582</u>

8.d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2019	2018
Kurang dari atau sama dengan 1 Tahun	62.063.693.732	85.146.688.888
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	164.241.390.607	187.954.490.123
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	772.208.089.658	797.262.685.524
Lebih dari 5 Tahun	621.221.726.405	636.575.802.046
Subjumlah	<u>1.619.734.900.402</u>	<u>1.706.939.666.581</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(35.511.850.991)	(27.529.475.999)
Jumlah	<u>1.584.223.049.411</u>	<u>1.679.410.190.582</u>

8.e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Murabahah* adalah sebagai berikut

	2019	2018
Saldo Awal Tahun	27.529.475.999	36.019.190.951
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	311.501.022.895	128.382.786.647
Pemulihan Kerugian Aset Produktif	(303.518.647.903)	(128.717.009.026)
Penghapus Bukuan	–	(8.155.492.573)
Saldo Akhir Kerugian Penyisihan	<u>35.511.850.991</u>	<u>27.529.475.999</u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian piutang *Murabahah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang *Murabahah* dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

9 Pembiayaan Mudharabah

9.a. Berdasarkan Jenis

	2019	2018
<i>Pihak Ketiga</i>		
<i>Mudharabah</i>	490.691.173.798	242.565.632.492
	490.691.173.798	242.565.632.492
<i>Dikurangi:</i>		
<i>Penyisihan Kerugian</i>	(4.906.911.738)	(6.509.733.909)
Jumlah	485.784.262.060	236.055.898.583

9.b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2019					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Perantara Keuangan	490.691.173.798	--	--	--	--	490.691.173.798
	490.691.173.798	--	--	--	--	490.691.173.798
<i>Dikurangi:</i>						
<i>Penyisihan Kerugian</i>	(4.906.911.738)	--	--	--	--	(4.906.911.738)
	485.784.262.060	--	--	--	--	485.784.262.060

	2018					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Perantara Keuangan	242.565.632.492	--	--	--	--	242.565.632.492
	242.565.632.492	--	--	--	--	242.565.632.492
<i>Dikurangi:</i>						
<i>Penyisihan Kerugian</i>	(6.509.733.909)	--	--	--	--	(6.509.733.909)
	236.055.898.583	--	--	--	--	236.055.898.583

9.c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2019	2018
Berdasarkan Periode Perjanjian Akad		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	81.177.777.781	47.249.468.669
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	--	--
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	347.160.956.500	103.143.109.553
Lebih dari 5 Tahun	62.352.439.517	92.173.054.270
	490.691.173.798	242.565.632.492
<i>Dikurangi:</i>		
<i>Penyisihan Kerugian</i>	(4.906.911.738)	(6.509.733.909)
	485.784.262.060	236.055.898.583

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

9.d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2019	2018
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	92.694.985.231	54.005.140.241
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	17.912.378.239	40.605.289.427
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	317.911.439.075	55.782.148.554
Lebih dari 5 Tahun	62.172.371.253	92.173.054.270
	<u>490.691.173.798</u>	<u>242.565.632.492</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(4.906.911.738)	(6.509.733.909)
	<u>485.784.262.060</u>	<u>236.055.898.583</u>

9.e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Mudharabah*

	2019	2018
Saldo Awal Tahun	6.509.733.909	2.255.774.709
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	15.624.346.464	11.491.359.289
Pemulihan Kerugian Aset Produktif	(17.227.168.635)	(7.237.400.089)
Penghapusan Bukuan	-	-
Saldo Akhir Cadangan Penyisihan	<u>4.906.911.738</u>	<u>6.509.733.909</u>

10 Pembiayaan *Musyarakah*

10.a. Berdasarkan Jenis

	2019	2018
<u>Pihak Ketiga</u>		
<i>Musyarakah</i>	3.009.764.555.343	2.432.320.931.013
Jumlah	3.009.764.555.343	2.432.320.931.013
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(105.557.067.984)	(41.321.907.048)
Jumlah	<u>2.904.207.487.359</u>	<u>2.390.999.023.965</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

10.c. Berdasarkan Jangka Waktu

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Berdasarkan Periode Perjanjian Akad		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	2.346.628.311.414	1.829.614.883.144
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	33.510.673.819	18.713.962.293
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	394.011.958.780	456.648.329.752
Lebih dari 5 Tahun	235.613.611.330	127.343.755.824
	<u>3.009.764.555.343</u>	<u>2.432.320.931.013</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(105.557.067.984)	(41.321.907.048)
Jumlah	<u>2.904.207.487.359</u>	<u>2.390.999.023.965</u>

10.d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	2.366.629.831.406	1.850.529.703.787
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	77.206.516.350	50.050.165.362
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	335.573.508.198	406.610.524.935
Lebih dari 5 Tahun	230.354.699.389	125.130.536.929
	<u>3.009.764.555.343</u>	<u>2.432.320.931.013</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(105.557.067.984)	(41.321.907.048)
Jumlah	<u>2.904.207.487.359</u>	<u>2.390.999.023.965</u>

Perubahan Penyisihan Kerugian *Musyarakah* adalah sebagai berikut

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo Awal Tahun	41.321.907.048	26.475.968.421
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	617.976.037.843	240.294.305.952
(Pemulihan) Penyisihan Kerugian Aset Produktif	(553.740.876.907)	(222.926.189.905)
Penghapus Bukuan	–	(2.522.177.420)
Saldo Akhir Cadangan Penyisihan	<u>105.557.067.984</u>	<u>41.321.907.048</u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah* dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Jumlah beban penyusutan adalah sebesar Rp 8.124.273.577 dan Rp 7.172.753.240 masing-masing untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tahun 2018, Bank melakukan penilaian kembali atas aset tetap golongan tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp 26.048.492.841 dan mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah dari model biaya menjadi model revaluasi.

Penilaian kembali tanah dan bangunan pada tahun 2018 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Hari Utomo dan Rekan, penilai independen eksternal, sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI) Edisi VI 2015.

Selisih penilaian kembali tanah tahun 2018 dicatat sebagai “surplus revaluasi aset tetap”, dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 47.953.016.836. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2018 sebesar Rp 8.756.619.677 diakui dalam laba rugi tahun 2018 sebagai beban operasional lainnya.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2015, nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan pendekatan pasar (*market approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*), penilaian ini adalah penilaian normal dengan format laporan terinci (lengkap).

Pengukuran nilai wajar untuk tanah termasuk dalam hierarki nilai wajar level 2 berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang digunakan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai tercatat tanah seandainya tanah tersebut dicatat dengan model biaya adalah masing-masing sebesar Rp 48.802.345.567 dan Rp 26.048.492.841.

Manajemen berpendapat tidak terdapat perubahan nilai wajar tanah yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019.

Rincian atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Harga Jual	22.019.082	2.600.000
Nilai Buku	1.106.167.443	-
Laba (rugi) penjualan Aset Tetap	<u>(1.084.148.361)</u>	<u>2.600.000</u>

Aset tetap kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, ledakan, petir, pesawat udara dan huru hara serta bencana alam pada PT Asuransi Central Asia dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 152.149.041.085 dan Rp 120.209.524.946. Manajemen berpendapat bahwa jumlah tanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

13 Aset Lain-lain

	2019	2018
Uang Muka	245.699.573.689	105.122.374.154
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	60.452.533.610	46.035.858.117
Agunan Yang Diambil Alih	31.017.405.543	-
Aset Pajak Tangguhan	18.368.583.296	13.316.233.157
Biaya Dibayar Dimuka	6.401.100.515	5.255.329.004
Perlengkapan Kantor	1.949.668.281	2.013.514.886
Aset Tak Berwujud - Bersih	861.225.931	1.556.028.687
Lain-lain	7.925.272.178	8.527.410.744
Jumlah	372.675.363.043	181.826.748.749

Uang muka merupakan uang muka kepada pihak ketiga atas rencana strategik inorganik perusahaan dan transaksi uang muka kepada *supplier*. Jumlah beban amortisasi aset tak berwujud adalah sebesar Rp 930.241.057 dan Rp 1.330.239.046 masing-masing untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 26).

14 Liabilitas Segera

	2019	2018
Titipan Setoran	11.537.715.748	11.254.618.028
Kewajiban kepada <i>Supplier</i>	2.717.381.676	4.649.576.461
Transaksi Dalam Penyelesaian	1.693.764.252	4.899.926.889
Kliring <i>Retail</i>	421.166.138	1.114.250.797
Asuransi Kesehatan	181.169.246	141.779.091
Lain-lain	13.976.589	13.976.589
Jumlah	16.565.173.649	22.074.127.855

15 Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

15.a. Berdasarkan jenis terdiri dari:

	2019	2018
Giro Wadiah		
<u>Dari Bank Lain</u>		
Pihak Berelasi	100.791.078	139.950.034
Pihak Ketiga	2.455.065.476	1.814.918.426
Subjumlah	2.555.856.554	1.954.868.460
<u>Dari Bukan Bank</u>		
Pihak Berelasi	290.688.439.468	46.469.257.996
Pihak Ketiga	803.571.969.174	445.749.942.179
Subjumlah	1.094.260.408.642	492.219.200.175
Jumlah Giro Wadiah	1.096.816.265.196	494.174.068.635
Tabungan Wadiah		
<u>Dari Bukan Bank</u>		
Pihak Berelasi	-	13.196.350
Pihak Ketiga	231.953.963.292	175.551.347.861
Jumlah Tabungan Wadiah	231.953.963.292	175.564.544.211

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

15.b. Tingkat bonus simpanan wadiah dan nisbah rata-rata per tahun

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Giro Wadiah	0,5%	1%
Tabungan Wadiah	1%	2%

15.c. Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Bank Umum Syariah

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang RI No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang RI tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp100.000.000 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang RI tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100.000.000 diubah menjadi maksimum Rp2.000.000.000.

16 Perpajakan

16.a. Utang Pajak

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PPh Pasal 4 Ayat (2)	5.323.801.774	4.953.351.864
PPh Pasal 29	269.451.250	4.264.250.271
PPh Pasal 25	3.867.453.000	1.557.064.083
PPh Pasal 21	532.123.268	635.303.962
PPh Pasal 23	41.204.059	36.049.260
Pajak Pertambahan Nilai	4.052.507	5.482.618
Jumlah	<u>10.038.085.858</u>	<u>11.451.502.058</u>

16.b. Pajak Penghasilan Badan

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pajak Kini	(21.075.904.500)	(20.507.973.750)
Pajak Tangguhan	4.973.758.154	6.481.589.542
	<u>(16.102.146.346)</u>	<u>(14.026.384.208)</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

16.c. Koreksi Fiskal

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	83.295.675.610	72.393.453.347
Beda Waktu		
Beban (Pemulihan) Penyisihan		
Penghapusan Aset	28.344.393.687	(3.853.320.613)
Cadangan Biaya <i>Legal Action</i>	266.819.867	17.997.977
Cadangan Seragam	--	(485.000.000)
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	(37.865.550)	(352.384.450)
Cadangan OJK	(1.045.000.000)	700.000.000
Cadangan Biaya Bonus, Jasa Produksi, THR	--	(254.497.770)
Cadangan Publikasi	(177.609.000)	50.775.000
Cadangan Jasa Profesional	(251.034.333)	92.534.333
Cadangan Pembiayaan	(5.247.511.177)	28.097.133.662
Cadangan Pesangon/Realisasi Pembayaran		
Imbalan Pasca Kerja	155.593.507	59.319.732
Cadangan Surat Berharga	--	(100.949.485)
Cadangan Sewa Gedung	17.492.900	7.107.100
Penyusutan Aset Tetap	(2.130.247.287)	438.327.213
Subjumlah	19.895.032.614	24.417.042.699
Beda Tetap		
Pembayaran Pajak Kurang PPh	2.189.154.750	--
Promosi	886.959.652	876.522.149
<i>Entertainment</i>	623.735.474	511.754.759
Makan Minum	258.911.716	201.048.049
Pendapatan Reksadana	(22.845.851.624)	(16.367.925.825)
Subjumlah	(18.887.090.032)	(14.778.600.868)
Penghasilan Kena Pajak	84.303.618.000	82.031.895.000
Taksiran Pajak Penghasilan Badan		
Pajak Penghasilan Badan (25% X Penghasilan Kena Pajak)	21.075.904.500	20.507.973.750
Pajak PPh 25 yang telah dibayarkan	(20.806.453.250)	(14.856.217.000)
Pajak Penghasilan Kurang Bayar	269.451.250	5.651.756.750

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

16.d. Aset Pajak Tangguhan

	2019			
	Saldo Awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dibebankan ke ekuitas	Saldo Akhir
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	6.778.675.689	7.086.098.422	-	13.864.774.111
Cadangan Pesangon	349.480.113	38.898.377	513.278.306	901.656.796
Cadangan Biaya Bonus dan THR	-	-	-	-
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	9.466.388	(9.466.388)	-	-
Cadangan Seragam	-	-	-	-
Penyusutan Aset Tetap	247.608.838	(532.561.822)	-	(284.952.984)
Cadangan Biaya <i>Legal Action</i>	756.159.533	66.704.967	-	822.864.500
Cadangan Premium Surat Berharga	-	-	-	-
Cadangan Operasional	7.071.855.351	(1.311.877.795)	-	5.759.977.556
Cadangan OJK	261.250.000	(261.250.000)	-	-
Cadangan Sewa	1.776.775	4.373.225	-	6.150.000
Cadangan Publikasi dan Promosi	63.252.250	(44.402.250)	-	18.850.000
Cadangan Pencadangan Tenaga Ahli	62.758.583	(62.758.583)	-	-
Laba Belum Direalisasi dari Reksadana	(460.518.160)	-	258.827.995	(201.690.165)
Laba Belum Direalisasi dari Pemilikan Efek	(1.825.532.203)	-	(642.453.000)	(2.467.985.203)
Laba Belum Direalisasi dari Pemilikan Sukuk	-	-	(51.061.315)	(51.061.315)
Jumlah	13.316.233.157	4.973.758.153	78.591.986	18.368.583.296

	2018			
	Saldo Awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dibebankan ke ekuitas	Saldo Akhir
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	7.742.005.842	(963.330.153)	-	6.778.675.689
Cadangan Pesangon	6.668.837.626	392.158.802	(6.711.516.315)	349.480.113
Cadangan Biaya Bonus dan THR	63.624.443	(63.624.443)	-	-
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	97.562.500	(88.096.112)	-	9.466.388
Cadangan Seragam	121.250.000	(121.250.000)	-	-
Penyusutan Aset Tetap	138.027.035	109.581.803	-	247.608.838
Cadangan Biaya <i>Legal Action</i>	751.660.039	4.499.494	-	756.159.533
Cadangan Premium Surat Berharga	25.237.371	(25.237.371)	-	-
Cadangan Operasional	47.571.937	7.024.283.414	-	7.071.855.351
Cadangan OJK	86.250.000	175.000.000	-	261.250.000
Cadangan Sewa	-	1.776.775	-	1.776.775
Cadangan Publikasi dan Promosi	50.558.500	12.693.750	-	63.252.250
Cadangan Pencadangan Tenaga Ahli	39.625.000	23.133.583	-	62.758.583
Laba Belum Direalisasi dari Reksadana	(399.385.690)	-	(81.132.470)	(460.518.160)
Laba Belum Direalisasi dari Pemilikan Efek	(1.794.000.000)	-	(31.532.203)	(1.825.532.203)
Jumlah	13.638.824.603	6.481.589.542	(6.804.180.988)	13.316.233.157

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

16.e. Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	83.295.675.610	72.393.453.347
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	(20.823.918.903)	(18.098.363.337)
Pengaruh pajak atas beda tetap	4.721.772.508	3.694.650.217
Penyesuaian pajak tangguhan atas Imbalan Paska Kerja	–	377.328.869
Pembulatan	49	43
Beban Pajak - Bersih	<u>(16.102.146.346)</u>	<u>(14.026.384.208)</u>

16.f. Komponen dari Pajak Penghasilan

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban pajak penghasilan:		
Beban pajak penghasilan:	21.075.904.500	20.507.973.750
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	(4.973.758.154)	(6.481.589.542)
	<u>16.102.146.346</u>	<u>14.026.384.208</u>

17 Liabilitas Lain-lain

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Biaya yang Masih Harus Dibayar	26.469.233.779	32.906.075.522
Pendapatan Diterima Dimuka	21.918.379.915	19.127.838.786
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 30)	3.606.627.180	1.397.920.451
Titipan Dana Sosial - Dana Kebajikan	1.217.914.859	1.521.037.214
Setoran Jaminan <i>Safe Deposit Box</i>	195.500.000	198.500.000
Titipan Dana Sosial - Zakat	74.538.259	67.825.673
Lainnya	95.189.018	74.450.200
	<u>53.577.383.010</u>	<u>55.293.647.846</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

18 Dana Syirkah Temporer

18.a. Berdasarkan Jenisnya

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dari Bukan Bank		
Tabungan <i>Mudharabah</i>		
Pihak Berelasi	--	616.200.723
Pihak Ketiga	425.343.159.666	306.995.719.177
Sub Jumlah	425.343.159.666	307.611.919.900
Deposito <i>Mudharabah</i>		
Pihak Berelasi	103.000.000.000	423.461.658.345
Pihak Ketiga	4.350.374.092.087	4.107.249.056.859
Sub Jumlah	4.453.374.092.087	4.530.710.715.204
Dari Bank		
Deposito <i>Mudharabah</i>		
Pihak Ketiga	3.312.136.194	765.103.613
Sub Jumlah	3.312.136.194	765.103.613
Sertifikat <i>Mudharabah</i>		
Pihak Berelasi	--	90.000.000.000
Pihak Ketiga	--	100.000.000.000
Sub Jumlah	--	190.000.000.000
Jumlah Dana Syirkah Temporer	4.882.029.387.947	5.029.087.738.717

Tabungan investasi tidak terikat tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad *Mudharabah muthlaqah*.

18.b. Investasi Tidak Terikat – Deposito *Mudharabah* Berdasarkan Jangka Waktu dan Sisa Umur

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Berdasarkan jangka waktu		
Sampai dengan 1 Bulan	3.753.349.899.818	4.289.065.096.626
Jangka Waktu 3 Bulan	498.411.450.960	353.325.193.142
Jangka Waktu 6 Bulan	163.572.946.338	56.658.498.158
Jangka Waktu 12 Bulan	41.351.931.165	22.427.030.891
	4.456.686.228.281	4.721.475.818.817
Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo		
Kurang dari atau Sama Dengan 1 Bulan	3.993.150.617.363	4.238.314.983.257
Lebih dari 1 Sampai Dengan 3 Bulan	355.378.309.832	438.109.180.219
Lebih dari 3 Sampai Dengan 6 Bulan	80.517.348.193	34.414.412.335
Lebih dari 6 Sampai Dengan 12 Bulan	27.639.952.893	10.637.243.006
	4.456.686.228.281	4.721.475.818.817

Deposito berjangka *Mudharabah* dengan akad *Mudharabah muthlaqah* yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing berjumlah Rp 287.669.769.252 dan Rp 333.673.701.050 dan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

18.c. Nisbah dan Pendanaan Tingkat Bagi Hasil Per Tahun

	2019 dan 2018	
	Nasabah	Bank
Tabungan <i>Mudharabah</i>	15	85
Deposito <i>Mudharabah</i>	38	62

19 Modal Saham

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		
	Jumlah Lembar	Persentase	Jumlah Rp
PT Bank Central Asia Tbk	1.996.299	99,9999%	1.996.299.000.000
PT BCA Finance	1	0,0001%	1.000.000
	1.996.300	100%	1.996.300.000.000

	2018		
	Jumlah Lembar	Persentase	Jumlah Rp
PT Bank Central Asia Tbk	996.299	99,9999%	996.299.000.000
PT BCA Finance	1	0,0001%	1.000.000
	996.300	100%	996.300.000.000

Bank melakukan peningkatan modal pada tahun 2019 sesuai dengan Akta No 93 tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Buena Brahmana, SH.,M.Kn.,mengenai peningkatan Modal dasar Bank menjadi Rp 5.000.000.000.000,- yang terbagi atas 5.000.000 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-.AH.01.03-0322607 Tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019.

20 Cadangan Umum

Melalui Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Bank UIB No. 28 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rejeki Irawati, SH., tanggal 20 April 2009, telah diputuskan untuk membentuk penyisihan cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurangkurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 22 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmana, SH., M.Kn., tanggal 14 Maret 2018, penyisihan laba bersih tahun 2017 sebesar Rp 1.500.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp 5.000.000.000 menjadi berjumlah Rp 6.500.000.000.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmana, SH., M.Kn., tanggal 18 Maret 2019, penyisihan laba bersih tahun 2018 sebesar Rp 1.500.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp 6.500.000.000 menjadi berjumlah Rp 8.000.000.000.

21 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

	2019	2018
Pendapatan dari Jual Beli :		
Pendapatan dari Marjin <i>Murabahah</i>	184.390.455.778	187.363.716.447
Sub Jumlah	184.390.455.778	187.363.716.447
Pendapatan dari Sewa		
Pendapatan <i>Ijarah</i>	155.516.193.787	160.799.204.982
Beban Penyusutan Aset <i>Ijarah</i>	(117.355.189.658)	(143.009.307.249)
Sub Jumlah	38.161.004.129	17.789.897.733
Pendapatan Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	36.582.704.273	24.956.389.194
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	250.027.472.171	220.429.218.507
Sub Jumlah	286.610.176.444	245.385.607.701
Pendapatan Usaha Utama Lainnya		
Pendapatan Bonus Fasilitas Simpanan		
Bank Indonesia Syariah	62.409.291.869	35.206.096.563
Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga	26.878.599.833	17.856.833.806
Pendapatan Reksadana	22.845.851.624	16.367.925.825
Pendapatan Bagi Hasil dari Penempatan di Bank lain	--	2.535.156.212
Pendapatan Bagi Hasil Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank	182.388.889	77.306.467
Pendapatan <i>Ujrah</i> dari Bank Lain	5.765.481	508.183
Sub Jumlah	112.321.897.696	72.043.827.056
Jumlah	621.483.534.047	522.583.048.937

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

22 Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dari Investasi Tidak Terikat		
Bukan bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak Ketiga	7.240.371.472	5.142.235.727
Subjumlah	<u>7.240.371.472</u>	<u>5.142.235.727</u>
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	—	—
Pihak Ketiga	292.142.549.444	268.972.137.804
Subjumlah	<u>292.142.549.444</u>	<u>268.972.137.804</u>
Bank		
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	1.342.250.000	383.500.000
Pihak Ketiga	1.557.335.937	196.942.873
Subjumlah	<u>2.899.585.937</u>	<u>580.442.873</u>
Jumlah	<u><u>302.282.506.853</u></u>	<u><u>274.694.816.404</u></u>

23 Pendapatan Imbalan atas Jasa Perbankan

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan Komisi		
Pendapatan Komisi Bank Garansi	234.922.118	145.413.903
Pendapatan Komisi <i>Safe Deposit Box</i>	151.030.465	152.088.000
Pendapatan Komisi Kliring	95.978.100	85.179.000
Pendapatan Komisi Pengiriman Uang	1.414.788.050	803.933.350
Pendapatan Komisi Asuransi	548.131.934	465.167.858
Pendapatan Komisi Lainnya	85.685.671	94.148.159
	<u>2.530.536.338</u>	<u>1.745.930.270</u>
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Administrasi Bank	16.542.323.252	15.294.526.958
Pemulihan penghapus bukuan	3.399.494.682	2.242.262.508
Pendapatan <i>Ta'widh</i>	184.061.006	260.386.580
Laba Penjualan Surat-Surat Berharga Tersedia		
Untuk Dijual	—	—
Lainnya	30.512.681.516	73.125.814
	<u>50.638.560.456</u>	<u>17.870.301.860</u>
	<u><u>53.169.096.794</u></u>	<u><u>19.616.232.130</u></u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

24 Beban Kepegawaian

	2019	2018
Gaji dan Uang Lembur	62.820.046.380	56.460.255.075
Tunjangan Karyawan	31.500.867.912	26.687.312.005
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 30)	155.593.507	3.559.319.732
Pendidikan Karyawan	4.744.595.755	3.485.196.258
Lain-lain	961.045.235	1.956.776.961
	100.182.148.789	92.148.860.031

25 Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif

	2019	2018
Pembentukan (Pembalikan) Cadangan Kerugian		
Pembiayaan <i>Musarakah</i> (Catatan 10)	64.235.160.936	17.368.116.047
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Catatan 9)	(1.602.822.171)	4.253.959.200
Investasi Surat Berharga (Catatan 7)	1.236.860.881	1.951.675.299
Pinjaman <i>Qardh</i>	133.625.056	501.339.247
Piutang <i>Ijarah</i>	499.288.324	(153.272.586)
Piutang <i>Murabahah</i> (Catatan 8)	7.982.374.992	(334.222.379)
Penempatan pada Bank Lain (Catatan 6)	1.000.620.976	(1.394.660.713)
Agunan Yang Diambil Alih - AYDA	(6.880.946.543)	(1.646.008.800)
Jumlah	66.604.162.451	20.546.925.315

26 Beban Umum dan Administrasi

	2019	2018
Barang dan Jasa	47.884.859.284	21.269.579.558
Beban Penyusutan (Catatan 12)	8.124.273.577	7.172.753.240
Pemeliharaan dan Perbaikan	6.832.458.136	6.369.069.089
Biaya Sewa Gedung dan Kendaraan	6.185.789.772	5.932.280.093
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya	2.724.212.137	461.978.848
Biaya Iuran OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	2.630.078.813	3.817.034.179
Promosi	1.109.276.924	876.522.149
Beban Amortisasi (Catatan 13)	930.241.057	1.330.239.046
Biaya Premi Asuransi	629.011.882	374.228.037
Lainnya	292.388.253	608.435.462
Jumlah	77.342.589.835	48.212.119.701

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

27 Beban Usaha Lainnya

	2019	2018
Beban Bonus (<i>Ujrah</i>)		
<i>Giro Wadiah</i>	29.863.550.209	12.816.643.625
<i>Tabungan Wadiah</i>	1.953.600.544	2.719.595.489
Subjumlah	31.817.150.753	15.536.239.114
Beban Lainnya		
Premi Asuransi Penjaminan Dana Pihak Ketiga	10.986.768.454	9.886.923.531
Subjumlah	10.986.768.454	9.886.923.531
Jumlah	42.803.919.207	25.423.162.645

28 Pendapatan (Beban) Non Usaha – Bersih

	2019	2018
Pendapatan Non Usaha		
Laba Penjualan aset	--	566.705.006
Lain-lain	1.252.343.644	871.120
Subjumlah	1.252.343.644	567.576.126
Beban Non Usaha		
Rugi Penjualan AYDA	(1.942.136.465)	--
Rugi penjualan aset	(1.084.148.361)	--
Kerohanian dan Olahraga	(154.935.000)	(142.374.000)
Revaluasi Aset Tetap (Catatan 12)	--	(8.756.619.677)
Lain-lain	(212.751.914)	(448.526.073)
Subjumlah	(3.393.971.740)	(9.347.519.750)
Jumlah	(2.141.628.096)	(8.779.943.624)

29 Komitmen dan Kontinjensi

	2019	2018
Komitmen		
<u>Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan</u>		
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	392.854.968.302	426.278.065.689
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	447.278.276.955	498.515.446.850
Subjumlah	840.133.245.257	924.793.512.539
Kontinjensi		
<u>Tagihan Kontinjensi</u>		
<i>Pembiayaan</i>	11.962.767.459	10.604.006.952
<i>Surat Berharga</i>	20.346.777.778	20.346.777.778
Subjumlah	32.309.545.237	30.950.784.730
<u>Kewajiban Kontinjensi</u>		
<i>Bank Garansi yang Diberikan kepada Nasabah</i>	31.092.876.000	28.169.377.106
Subjumlah	31.092.876.000	28.169.377.106

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

30 Imbalan Pasca Kerja

Bank telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan kerja tersebut.

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung oleh Aktuaris Independen PT Emerald Consulting dan PT. Gemma Mulia Inditama berdasarkan laporan No.483/LA-PSAK/EDC-I.2019-3 dan No. 4795/PSAK-GMI/18. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja tersebut dihitung dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

30.a. Beban Imbalan Kerja Neto:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Biaya Jasa Kini	2.702.485.192	3.356.197.468
Biaya Bunga	1.989.395.842	1.664.152.272
Pendapatan Bunga atas Aset Program	(1.869.465.885)	(1.461.030.008)
	<u>2.822.415.149</u>	<u>3.559.319.732</u>

30.b. Liabilitas Imbalan Kerja

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Nilai Kini Kewajiban	22.101.129.775	23.188.677.841
Nilai Wajar Aset Program	(18.494.502.595)	(21.790.757.390)
	<u>3.606.627.180</u>	<u>1.397.920.451</u>

30.c. Mutasi Nilai Kini Liabilitas adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Nilai Kini Liabilitas Awal Periode	1.397.920.451	26.675.350.506
Biaya Jasa Kini	2.822.415.149	3.356.197.468
Biaya Bunga	1.989.395.842	1.664.152.272
Pengukuran Kembali:		
Dampak Perubahan Asumsi Keuangan	1.710.081.521	(31.622.478.570)
Dampak Penyesuaian Pengalaman	829.400.265	2.243.598.912
Dampak Perubahan Asumsi Demografi	(8.318.910.886)	-
Kerugian Aktuarial pada Aset Program	5.165.720.680	4.042.129.871
Pendapatan Bunga atas Aset Program	(1.989.395.842)	(1.461.030.008)
Iuran yang Dibayarkan ke Aset Program	-	(3.500.000.000)
	<u>3.606.627.180</u>	<u>1.397.920.451</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

30.d. Perubahan nilai wajar aset program untuk program pasca-kerja

	2019	2018
Saldo awal aset program	20.871.857.253	20.871.857.253
Iuran Perusahaan	3.500.000.000	3.500.000.000
Harapan dari hasil investasi	1.461.030.008	1.461.030.008
Saldo akhir aset program - perkiraan	25.832.887.261	25.832.887.261
Kerugian aktuarial pada aset program	4.042.129.871	4.042.129.871
Saldo akhir aset program - aktual	21.790.757.390	21.790.757.390

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pasca kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018
Tingkat Diskonto Awal Periode	8,5%	8,5%
Tingkat Diskonto Akhir Periode	7,0%	7,0%
Proyeksi Tingkat Imbal Hasil Aset Program	8,5%	8,5%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	7,5%	7,5%
Tingkat Mortalita	Tabel TMI III	Tabel TMI III
Tingkat Cacat dan Sakit	9% dari Tabel TM III	9% dari Tabel TM III
Usia Pensiun	55 Tahun	55 Tahun

Sensitivitas tingkat diskonto

	2019		2018	
	-1%	+1%	-1%	+1%
Nilai kini kewajiban	23.232.121.804	21.074.177.433	25.138.368.527	21.497.400.985
Biaya jasa kini	2.833.963.847	2.583.054.799	3.676.297.408	3.082.394.274

Sensitivitas untuk tingkat kenaikan gaji

	2019		2018	
	-1%	+1%	-1%	+1%
Nilai kini kewajiban	21.134.401.203	23.145.076.217	21.551.156.937	25.041.201.423
Biaya jasa kini	2.572.574.722	2.843.250.238	3.064.794.049	3.691.746.778

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

31 Pengelolaan Risiko

Penerapan manajemen risiko BCA Syariah secara terpadu dengan mengacu pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko ini dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan *stakeholder value* sesuai dengan *risk appetite* dan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia.

Risiko Kredit

Terkait dengan pengelolaan risiko kredit, bank telah memiliki kebijakan-kebijakan mengenai pembiayaan, antara lain yaitu:

- a. Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB)
- b. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
- c. Manual Pembiayaan Konsumtif
- d. Manual Pembiayaan Produktif
- e. Kebijakan Penilaian Kualitas Penyisihan Penghapusan Aset
- f. Kebijakan Penyelamatan dan Penghapusan Pembiayaan
- g. Wewenang Memutus Pembiayaan

Dengan telah dimilikinya kebijakan Bank tersebut diatas, maka diharapkan Bank dapat mengoptimalkan kualitas pengelolaan risiko kredit melalui proses yang memadai, kecukupan agunan yang telah ditetapkan dan penetapan *risk appetite* Bank sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. BCA Syariah saat ini belum menjadi Bank Devisa, sehingga Bank belum secara langsung terkena dampak risiko pasar, namun Bank tidak terlepas dari risiko suku bunga baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran pembiayaan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur dana, likuiditas aset dan komitmen pembiayaan kepada debitur.

Untuk meminimalkan risiko likuiditas tersebut Bank telah memiliki:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- b. Metodologi Dalam Manajemen Risiko Likuiditas
- c. Kebijakan Tresuri

Tujuan dari manajemen likuiditas adalah memelihara posisi aset likuid secara optimal dan Bank dapat memenuhi seluruh kewajiban kontraktual dan ketentuan kewajiban keuangan, termasuk saat kondisi Bank sedang kritis. Untuk memenuhi kewajiban Bank kepada para nasabah dan *counterparties* serta menyediakan kebutuhan likuiditas untuk transaksi operasionalnya, maka Bank saat ini sedang melakukan pemeliharaan dalam posisi *secondary reserves* pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Untuk meminimalkan risiko operasionalnya Bank telah memiliki beberapa kebijakan, antara lain yaitu:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- b. Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang dan Sentra Operasi
- c. Ketentuan Limit Fiat Bayar, *Override* dan Otorisasi Transaksi di Aplikasi Pembiayaan.
- d. Manual Produk Dana
- e. Manual Kerja CSO
- f. Manual Kerja *Teller*
- g. Dan manual kerja lainnya

Mekanisme control dilakukan dengan memasukkan tahapan control ke dalam setiap transaksi yang semuanya tercantum dalam manual kerja Bank. Bank juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) untuk melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap kepatuhan karyawannya atas prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank Syariah tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk kepada peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Ketidakmampuan Bank syariah untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usahanya.

Bank saat ini telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko kepatuhan, yaitu:

- a. Kebijakan Kepatuhan
- b. Pedoman Penerapan Program APU dan PPT
- c. Manual *Good Corporate Governance*

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan yang berlaku, maka Bank telah melakukan beberapa sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai:

- a. Penerapan Program APU dan PPT
- b. Pengelompokan nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA)
- c. Pengkinian data nasabah
- d. Kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal
- e. *Database* teroris yang diterima dari PBB setiap 6 (enam) bulan sekali

Risiko Lainnya

Risiko lainnya yang dimaksud disini adalah risiko strategik, risiko hukum dan risiko reputasi yang harus dikelola oleh Bank dan untuk saat ini ketiga risiko tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi Bank, namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketiga risiko tersebut, Bank telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko strategik, risiko hukum dan risiko reputasi.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

32 Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Syariah

Beban premi penjaminan Pemerintah selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 10.986.768.454 dan Rp 9.886.923.531. Berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia No.3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

33 Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dan Transaksi
PT Anarawata Puspa Utama	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Asuransi Umum BCA	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Asuransi Jiwa BCA	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Aset lainnya, Simpanan Nasabah
PT Bank Central Asia Tbk	Pemegang Saham	Pemegang Saham, Giro pada Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain dan Beban Usaha
PT BCA Finance	Pemegang Saham	Pemegang Saham
PT BCA Sekuritas	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Central Sentosa Finance	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Central Capital Ventura	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Dana Pensiun Bank Central Asia	Dana Pensiun Pemegang Saham	Simpanan Nasabah
Pejabat Eksekutif	Pejabat Pembuat Keputusan	Simpanan Nasabah
Perorangan pengendali bank dan anggota keluarga	Pemegang Saham	Simpanan Nasabah

Dalam menjalankan kegiatan normal usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Perincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aset		
Giro Pada Bank Lain	11.376.141.940	11.325.311.330
Aset lainnya	541.433.500	--
Jumlah	<u>11.917.575.440</u>	<u>11.325.311.330</u>
Liabilitas		
Giro pada Bank Lain	100.791.078	139.950.034
Giro	290.688.439.468	46.469.257.996
Tabungan <i>Wadiah</i>	--	13.196.350
Tabungan <i>Mudharabah</i>	--	616.200.723
Deposito <i>Mudharabah</i>	103.000.000.000	423.461.658.345
Sertifikat <i>Mudharabah</i>	--	90.000.000.000
Liabilitas Lainnya	--	383.500.000
Laba Rugi		
Pendapatan		
Pendapatan Fee	--	11.111.111
Beban Bagi Hasil dan Ujroh		
Giro <i>Wadiah</i>	7.701.012.319	6.219.785.720
Deposito	10.884.456.738	15.942.611.065
Beban Sertifikat <i>Mudharabah</i>	1.342.250.000	383.500.000
Jumlah	<u>19.927.719.057</u>	<u>22.545.896.785</u>
Persentase terhadap beban bagi hasil dan <i>Ujroh</i>	6%	8%
Beban Sewa	1.628.948.207	1.502.081.363
Biaya Lainnya	1.396.792.621	122.354.175

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

34 Rasio Likuiditas

Nilai Tercatat	2019 (Dalam Jutaan)					
	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	Sampai dengan 1 Bulan	Sampai dengan 3 Bulan	Sampai dengan 6 Bulan	Sampai dengan 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Aset						
Kas	8.418	--	8.418	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia	271.251	--	271.251	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia	1.266.536	--	1.266.536	--	--	--
Reverse Repo	--	--	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain	11.392	--	11.392	--	--	--
Deposito Pada Bank Lain	100.000	--	100.000	--	--	--
Efek-efek	842.396	--	140.000	--	451.842	250.554
Piutang Murabahah	1.619.735	--	517	3.126	11.222	47.198
Piutang Sewa	86	--	86	--	--	--
Piutang Qardh	13.916	--	--	13.029	10	166
Pembiayaan Mudharabah	490.691	--	--	--	2.400	78.778
Pembiayaan Musyarakah	3.009.765	--	11.000	219.623	1.313.325	802.681
Ijarah	511.226	--	--	6	2.004	17.757
Aset Lain-lain	643.916	284.945	355.146	--	157	216
Sub Jumlah	8.789.328	284.945	2.164.346	235.784	1.329.118	1.398.638
Pendapatan Ditangguhkan	--	--	--	--	--	--
Penyisihan Penghapusan	(154.954)	--	--	--	--	--
Jumlah	8.634.374					
Liabilitas						
Liabilitas Segera	16.565	16.565	--	--	--	--
Simpanan dari Nasabah						
Giro	1.094.260	--	1.094.260	--	--	--
Tabungan	231.954	--	231.954	--	--	--
Simpanan dari Bank Lain	2.556	--	2.556	--	--	--
Pinjaman Diterima	--	--	--	--	--	--
Kewajiban Lain-lain	53.577	53.577	--	--	--	--
Dana Syirkah Temporer						
Tabungan Mudharabah	425.343	--	425.343	--	--	--
Deposito Mudharabah	4.456.686	--	3.993.151	355.378	80.517	27.640
Sub Jumlah	6.280.941	70.142	5.747.264	355.378	80.517	27.640
Perbedaan Jatuh Tempo	2.508.387	214.803	(3.582.918)	(119.594)	1.248.601	1.370.998
Posisi Bersih	2.353.433					
	8.634.374					

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

	2018 (Dalam Jutaan)						
	Nilai Tercatat	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	Sampai dengan 1 Bulan	Sampai dengan 3 Bulan	Sampai dengan 6 Bulan	Sampai dengan 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Aset							
Kas	3.942	--	3.942	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia	265.618	--	265.618	--	--	--	--
Penempatan pada Bank							
Indonesia	816.300	--	816.300	--	--	--	--
Reverse Repo	--	--	--	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain	11.330	--	11.330	--	--	--	--
Deposito Pada Bank Lain	--	--	--	--	--	--	--
Efek-efek	842.396	--	140.000	--	--	451.842	250.554
Piutang Murabahah	1.706.939	--	1.082	3.655	6.264	74.145	1.621.793
Piutang Sewa	409	--	409	--	--	--	--
Piutang Qardh	553	--	2	12	43	157	338
Pembiayaan Mudharabah	242.566	--	527	5.083	48.395	--	188.561
Pembiayaan Musyarakah	2.432.321	--	251.464	384.743	924.777	289.546	581.791
Ijarah	516.956	--	--	2	1.495	1.613	513.846
Aset Lain-lain	309.551	141.040	168.511	--	--	--	--
Sub Jumlah	<u>7.148.881</u>	<u>141.040</u>	<u>1.659.185</u>	<u>393.494</u>	<u>980.975</u>	<u>817.303</u>	<u>3.156.883</u>
Pendapatan Ditangguhkan	--	--	--	--	--	--	--
Penyisihan Penghapusan	<u>(83.316)</u>	--	--	--	--	--	--
Jumlah	<u>7.065.564</u>	--	--	--	--	--	--
Liabilitas							
Liabilitas Segera	22.074	22.074	--	--	--	--	--
Simpanan dari Nasabah							
Giro	494.034	--	494.034	--	--	--	--
Tabungan	175.565	--	175.565	--	--	--	--
Simpanan dari Bank Lain	140	--	140	--	--	--	--
Pinjaman Diterima	--	--	--	--	--	--	--
Kewajiban Lain-lain	55.294	55.294	--	--	--	--	--
Dana Syirkah Temporer							
Tabungan Mudharabah	308.377	--	308.377	--	--	--	--
Deposito Mudharabah	4.721.475	--	4.238.315	438.109	34.414	10.637	--
Sub Jumlah	<u>5.776.959</u>	<u>77.368</u>	<u>5.216.431</u>	<u>438.109</u>	<u>34.414</u>	<u>10.637</u>	--
Perbedaan Jatuh Tempo	<u>1.371.922</u>	<u>63.672</u>	<u>(3.557.246)</u>	<u>(44.615)</u>	<u>946.561</u>	<u>806.666</u>	<u>3.156.883</u>
Posisi Bersih	<u>1.288.605</u>	--	--	--	--	--	--
	<u>7.065.564</u>	--	--	--	--	--	--

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

35 Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Bank yang dicatat di laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

	2019		2018	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset Keuangan				
Kas	8.417.956.901	8.417.956.901	3.941.767.500	3.941.767.500
Giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia	1.537.786.867.692	1.537.786.867.692	1.081.918.219.903	1.081.918.219.903
Penempatan pada bank lain	110.277.881.313	110.277.881.313	11.216.404.697	11.216.404.697
Investasi pada surat berharga				
Sertifikat investasi <i>mudharabah</i>	148.500.000.000	148.500.000.000	138.600.000.000	138.600.000.000
Piutang				
<i>Murabahah</i>	1.584.223.049.411	1.584.223.049.411	1.679.410.190.582	1.679.410.190.582
Sewa	69.147.254	69.147.254	44.160.859	44.160.859
Pembiayaan				
<i>Mudharabah</i>	485.784.262.060	485.784.262.060	236.055.898.583	236.055.898.583
<i>Musyarakah</i>	2.904.207.487.359	2.904.207.487.359	2.390.999.023.965	2.390.999.023.965
<i>Qardh</i>	13.776.685.077	13.776.685.077	547.804.475	547.804.475
Reksadana	451.248.693.055	451.248.693.055	447.323.651.913	447.323.651.913
Investasi pada surat utang	357.512.360.040	357.512.360.040	248.887.494.000	248.887.494.000
Jumlah aset keuangan	7.601.804.390.162	7.601.804.390.162	6.238.944.616.477	6.238.944.616.477
Liabilitas Keuangan				
Liabilitas segera	16.565.173.649	16.565.173.649	22.074.127.855	22.074.127.855
Bagi hasil yang belum dibagikan	15.101.185.905	15.101.185.905	15.028.023.848	15.028.023.848
Simpanan dari bank lain				
Pihak ketiga	100.791.078	100.791.078	139.950.034	139.950.034
pihak berelasi	2.455.065.478	2.455.065.478	1.814.918.428	1.814.918.428
Simpanan dari nasabah				
Pihak ketiga	290.688.439.468	290.688.439.468	46.469.257.996	46.469.257.996
pihak berelasi	--	-	-	-
Total liabilitas keuangan	324.910.655.576	324.910.655.576	85.526.278.159	85.526.278.159

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi yang tersedia untuk dijual adalah berdasarkan harga pasar yang dikeluarkan oleh pricing provider (PT Bareksa Portal Investasi). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasian efek yang memiliki karakteristik serupa.

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga); dan
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

	2019			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
Aset				
Aset keuangan tersedia untuk dijual				
Reksadana	--	451.248.693.055	--	451.248.693.055
Sukuk BI		294.336.245.261		294.336.245.261
Investasi pada surat utang	--	357.512.360.040	--	357.512.360.040
Jumlah aset	--	1.103.097.298.356	--	1.103.097.298.356
	2018			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
Aset				
Aset keuangan tersedia untuk dijual				
Reksadana	--	447.323.651.913	--	447.323.651.913
Investasi pada surat utang	--	248.887.494.000	--	248.887.494.000
Jumlah aset	--	696.211.145.913	--	696.211.145.913

36 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal

	2019 (Dalam Jutaan)	2018 (Dalam Jutaan)
Modal Inti	2.311.468	1.240.447
Modal Pelengkap	56.253	45.432
Jumlah Modal Inti dan Pelengkap	2.367.721	1.285.879
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR):		
ATMR Risiko Kredit	5.729.160	4.912.793
ATMR Risiko Operasional	456.907	385.907
ATMR Risiko Pasar	--	--
Total ATMR	6.186.067	5.298.700
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	38,28%	24,27%

37 Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direktur Utama Bank No.001/MO/DPS/2020 tanggal 10 Januari 2020 Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BCA Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

38 Kondisi Ekonomi

Kegiatan usaha Bank mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dimasa mendatang yang mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada beberapa faktor, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain, tindakan yang berada di luar kendali Bank.

39 Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan kepada direksi pada tanggal 27 Januari 2020.



PT. Bank BCA Syariah

Kantor Pusat

Jl. Jatinegara Timur No.72

Jakarta Timur 13310

Telp. (021) 850 5030, 850 5035, 819 0072

Fax. (021) 819 0826, 850 9959

www.bcasyariah.co.id

